PERENCANAAN SKENARIO *(SCENARIO PLANNING)* PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS POTENSI LOKAL

(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

MUHAMMAD FAQIH
NIM. 105030600111019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah S.W.T yang telah memberikan segala yang indah dalam kehidupan ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membuka hati manusia sehingga dapat menerima suatu kebenaran dan mencegah kemungkaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang yang paling berharga dalam hidupku, dua orang yang paling kucintai dan sayangi.....“Ibu dan Bapak” yang telah menanamkan rasa cintaku kepada tuhan, menaburkan warna hitam dan putihnya kehidupan, berikan segala yang terbaik untukku, mengajarkan semua hal yang tak pernah ku sadari sebelumnya dan selalu mendo’akan yang terbaik untukku dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan Rohmat dan Kasih Sayang-Nya kepada ibu dan bapak di dunia dan akhirat... Aaamiiin. Satu do’a yang selalu ku suarakan untuk ibu dan bapak “Berikanlah umur panjang bagi kedua orang tua hamba, agar hamba bisa membalas secuil pengorbanan mereka, membalas tetesan air mata mereka, membalas segala kebaikan dan ketulusan mereka terhadapku, ampuni segala dosaku dan dosa mereka, kasihi mereka dan berilah kekuatan untukku agar mampu menjadi anak yang menyejukkan hati mereka disaat senang maupun susah... Aaamiiin yaa Rabbal A’lamiin”. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku (Ahmad Faruq, SP, MSc, Hilyati, SP, dan Abdul Mugis, S.Pi) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan besar untukku serta menghadirkan jagoan (Muhammad Tamam Asfari dan Muhammad Ibnu Raziq) dan gadis-gadis kecil (Alfia Qurrata’aini, Shofiyah Izzatunnisa, dan Afifatur Rufaidah) untuk menemaniku.

Sahabat Borem SS-G3 No.207 Sandi Permana, Moh. Syamsul Arifin, Bagus Budi Krisnandi, Willy Dion Pasalbessy, Vierkury Metyopandi, Izzul Anwar, Jeffy Zulkarnain, Misbahussalam dan Wika Budi Maghfiroh yang selalu memberikan motivasi, canda, tawa dan menghiasi kehidupan sehari-hariku, kalian semua bukannya tebar salam malah tebarkan sampah untukku, meninggalkan kamar mandi yang kotor setiap akhir pekan, membuka paksa ruang kerjaku dan memaksaku tinggalkan tugas hanya untuk memperbaiki alat elektronik, menghentakkan kaki bagaikan gajah ngamuk disaat ku tertidur. Namun, kalian semua telah berikan kenangan yang terindah disaat-saat terakhir. Sandi & Bagus “mbe okon nengka? Wah sawek ke bedangdutan kance penggemukan awak’no”. Dion gayamu yow kui...kui...kui-lah kuentelll tenan jowomu”. Spesial ramadhan: mas Vier & Izzul kapan nih peternakan lele dan puyuhnya kita kembangkan?. Wik, “awakmu memang wong sugih” dengan titipkan uang Rp 20.000 itu di kantongku dan itu sangat berharga untuk nikmati lebaranku di Kota Malang ini “matur nuwun”. Jeffy-nyooo, sahur dan buka terakhir kita sangat lazziz bukan? Keliling 1 Km dini hari hanya untuk sesuap nasi he he he...lebaran kita kali ini juga sangat luar biaso’kan? Takbir-nyo di tanah orang’nyo memang menyentuh ke hulu hati-nyo hingga butiran air mata-nyo tak terbendung lagi nyooo, kita selalu ingat itu nyooo sebagai judul film “tangisan takbir dalam Masjid Manarul Huda”, namun H+2 lebaran sangat menyenangkan sekali pagi yang dingin di Nongkojajar dan Bromo. Misbah “sepurane awakku gak iso bantu opo2 untuk kasus bengi iku”. Fin-Arifin “mator sakalangkong”, kemmejannya sangat sejjuk saat kompre...he he he.

Para legenda rantau terdahulu (Abdul Mugis, S.Pi, Dr. M. Junaidi, ST, MM, Muhammad Hudri, M.Pd, Gaozul Muhyi, ST, Aunus Shabur, S.Pi, Jihad Akbar, S.Pi, Prasetiyo Adi, S.Pi, Fiqih Hartiansah, S.Si) dan penerusnya (Giazurrahman, Fadli dan Farid) yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis baik tersirat maupun tersurat. Kak Gaoz, Kak Aunus dkk, terima kasih atas bantuannya saat Maba “cairan infus malam itu memang sangat segaaar di saat Tifus dan DBD! he he he maaf merepotkan”.*

Matur Nuwun Sanget untuk sahabat Planning ’10 Irlan Muhardi Putra/Cak Togel “suwun cak, ide peeeeeh...milu dang uleq pas penelitian tiang, eee ju ndak lupaq’e_taubatlah sebelum terlambat”, Angga Putra Utama “ojo lali, sampean hampir mateni awakku d smester II & bekas’e d jero atiku n jero’ne ijazahku”, Robert Durianto “dialog yang bagus & membangun”, Hendra Atmam “Aida sanak selaki, seramnya canda-tawa dita, bekuda sampe kecolongan?”, Septian Ilahude “eh...iya yah e’e’h si merah menang banyak di 2014 ini yah!”, Maria Nelsy Reda Lio “hey kau nelsy, kenapaa kau murung terus? Aduh mama sayang’eeeee”, Fariz Zulfikar “empu gondrong, sudah dapat keris samarindanya?”, Yonatan Bushido “pie komik’e wes di woco kabbeh?”, Danang Fitrakhul Ma’na

"Nang, wes balik a teko Mekkah? Batang hidungmu gak kelihatan!", Achmad Dani Fatkhur Rozi "kapan lamaran?, tak anteni d pejeruk-Mataram", Iga Arti Katresnawati "Mimpi nikah terus, rene gowo calon sampean ben awakku dadi penghulu'ne", Ulfatun Hasanah "nyonyah Dhani, undangan pernikahannya hanyutkan ke sungai saja kebetulan aliran sungainya sama dengan lokasi magang saya", Trias Ayu Novitasari "Pie toh, kosan'e dewe d sebelah kampus! gusur ae!", Ema Muslimawati "pendino umroh, bagi2 tiket'e nang arek2 iki lho...ooo...ops", Intan Nastiti P "Muke gile daaah", Novinaz Benita "apa yaaa? Kripik tempe? Semiiirrrr3x semir sepatu mba?", Lazuardi Sukma P "Entrepreneur sejati shiiip shiiip-lah", Iman Heru Wicaksono "konoha mania, komik naruto'ne durung entek, kapan2 woco bareng ae", Ardita Josi Wiyono "perdagangan tingkat tinggi", Sangkot Prakoso Hadi "apaan sih, main jebrat-jebreeet-gak seru ah", Izza Arofatul Zahroh "Ukhit...Subhanaallah Suooolehaaawww", Fadjrin Burhan "gue tau lho marahan ama gue & teman2 sampe lho gak pernah keliatan di kampus, tapi lho harus tau sumbeeer air kita...eee sudah habis eee tahun ini", Firdha Ayu Tiffani "saya paham, marahan dengan tetangga sebelah tidak baik...siapa tau dia jadi kawan", Rifki Ashabul Yamin "yow opo jho? Awakku sidho po'ra nang blambangan?", Bryan Maulana "behel anyar reeek..., rantai motor CB150R yow iso pisan gae behel", Meilisa Nurjannah R "gaya bertahan hidup yang luar biasa", Atma Mulya T.P "iki sopo reeek? sepurane bro awakku gak gowo panganan nang kampus", Krisna Widyawan "buieeeuuuh, sabar bro, koordinator kita memang mencari orang yang memiliki bakat terpendam pada saat sempro, koyo sampean ki", Tiara Dian Pratiwi "ngilang wae!", Ardiyan Wicaksono "Assalamualaikum...aida kanca lhu bawa kuda jadi candaan gpp, tp kalau bawa2 Nabi jadi candaan, gue sikat pala lhu", Wulan Puspitasari "eeeee sudaaah! Kapan nih ke Raja ampat?", Pinkan Martha Hella "looooh ikiiiii calon ketua PKK, bgmn arisannya? lancar?", Ivan Budi Susetyo "iki ikiii ikiiiii sing setiap ujian bien ikuuu lhooo reeek, sek iling'kan reeek? LERD'e pak Dollah membantu kang matur suwun, tapi ju2r aku gak njalok traktiran proyekmu_aku kepengen belimbingmu, mek iku tok wes", Heri "Lapo? Kok mandek d tengah semester", Nurul Alimi "Chong, mana celuritnya?", dan Markoban "hey Marko, jadi atlet apa kau tahun ini? Jangan bilang kau jadi atlet angkat komodo, itu tidak baik karena komodo eee sudah jadi warisan dunia. Sahabat planning '11 (Imron, Andre, Ilyas, Bang Hyasintus dll yang tidak bisa saya sebutkan_sorry lupa nama) serta Sahabat Master (Iqrom dan Nasuhi) yang selalu memberikan renungan mendalam, semangat, tangis, canda dan tawa dalam proses penulisan skripsi ini, Terima Kasih Semuanya...

Terima kasih juga kepada keluarga besar kost 207 Hj. Sarah, Bu Romlah, Pak Rahmat, Bu Hj. Nurhalimah, H. Machin, Mbah Ngat, Mbah Sumi, Mba' Muyaz, Mba' Duwi dan Mba' Lailatul Fitriah/Pipit yang selalu berikan nasehat dan hiburan bagi penulis. Bu Romlah_dll, terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya berikanku tempat tinggal layaknya rumah sendiri. Mba' Lailatul yang sangat manja, cerewet dan aneh, jangan nangis yaaa kalau diriku sudah pulang kampung & tinggalkan mba' sendiri. Jangan seperti waktu itu ya, cuma sehari saja ditinggalkan sudah marah2 & berlinang air mata...uuuuuh! Terima kasih atas kasih sayang mba' telah jadikan diriku sebagai adikmu, kebaikan mba' takkan terlupakan.

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui (Q. S. Al_Ankabuut: 64)

Sahabat-sahabatku, telah lama kita bersama berbagi canda dan tawa kadang tangisan, bahkan ungkapkan kata-kata yang sulit dimengerti, olok'an, maupun sindiran/kritikan yang terjadi diantara kita. Semua itu jika menyenangkan hati maka kenanglah/ingatlah, namun jika menyakitkan/ perih di hati maka maafkanlah dengan keikhlasan. Karena manusia takkan lepas dari sunnatullah/sifat alaminya yaitu "khilaf dan dosa". Dan kita semua memahami bahwa "tak ada yang abadi di dunia ini" seperti itu pula kebersamaan kita selama ini, pasti ada akhir. Semoga Allah Yang Maha Pengasih mempertemukan kita kembali.....Tetap semangat dan ingatlah "awal yang baik akan menentukan akhir yang terbaik pula dan perbuatan baik yang tulus dari hati, tak butuh harta, tahta ataupun pujian untuk menjadi baik, dan terkadang tak selamanya berbalas kebaikan. Biarkan Allah S.W.T yang membalas Kebaikan kita".

Malang, 1 Syawal 1435 H

MOTTO

Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

مَنْ اَرَادَالدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالَعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَالاَخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki keduanya (kehidupan dunia dan akhirat) maka dengan ilmu".

Dan Allah S.W.T memberikan kunci kepada ummat manusia untuk mendapatkan ilmu melalui surat Yusuf ayat 87, Allah S.W.T berfirman:

وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

…dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

Hal ini berarti bahwa untuk memperoleh ilmu, pertolongan dan rahmat Allah S.W.T, seseorang selain berdo'a memohon pertolongan, juga dituntut untuk tetap berjuang, bergerak dan berusaha bukan terdiam tanpa upaya dan hanya menunggu turunnya rahmat dari langit. Adapun ilmu yang dimaksud ialah "*ilmu yang menuntun orang ke jalan yang benar, bukan untuk sekedar mengobarkan perang lisan dan ahli bertempur lidah, namun lisan yang banyak bertanya dengan hati yang selalu berfikir untuk mencari sebuah kebenaran bukan ketenaran! Berbicara berbelit-belit dan membuat-buat alasan itu memang tidak diperkenankan, namun hal itu dilakukan selama musuh berbicara tidak sekedar mencari kemenangan, dalam artian masih dalam rangka mencari kebenaran" atau dengan kata lain ilmu yang dicari dan diperoleh dengan do'a, perjuangan, pengorbanan dan usaha/ kerja keras, bukan untuk kesombongan melainkan untuk meningkatkan rasa syukur dan tawadhu'(rendah hati) atas secuil ilmu yang diberikan Tuhan*. Ilmu manusia yang diibaratkan tetesan air yang jatuh pada ujung jarum setelah dicelupkan dalam samudera luas, lantas muncul kesombongan! maka merugilah bagi para pelakunya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A dari Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الجَنةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِنْ كِبْرٍ

"Tidak masuk syurga, orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan" (Shahih Muslim: 149/91)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Bebasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Disusun oleh	:	Muhammad Faqih
NIM	:	105030600111019
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Administrasi Publik
Konsentrasi/ Minat	:	Perencanaan Pembangunan

Malang, 3 Ramadhan 1435 H/
1 Juli 2014 M

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Drs. Heru Ribawanto, MS	**Drs. H. Mochamad Rozikin, M.AP**
NIP. 19520911 197903 1 002	**NIP. 19630503 298802 1 001**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan mejelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	14 Agustus 2014
Jam	:	10.00 - 10.45 WIB
Skripsi atas nama	:	Muhammad Faqih
Judul	:	Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Bebasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Drs. H. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 298802 1 001

Anggota

Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menytakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/*plagiasi*, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Ramadhan 1435 H/ 1 Juli 2014 M

Mahasiswa

METERAI TEMPEL
76571ACF327303494
ENAM RIBU RUPIAH
6000

TTD

Nama : Muhammad Faqih
NIM : 105030600111019

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Muhammad Faqih. 2014. **Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)**. Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. H. Mochamad Rozikin, M.AP, 255+xvii.

Perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan, karena berlangsung secara terus-menerus dan dilaksanakan secara bertahap baik dalam waktu 1 tahun, 5 tahun bahkan 20 tahun. Pendekatan pembangunan di Indonesia maupun di daerah saat ini lebih berorientasi pada pembangunan daratan daripada lautan. Agar pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan dapat dimanajemen dengan baik, efektif, efisien dan memiliki tujuan yang jelas, maka dibutuhkan perencanaan skenario untuk mengoptimalkan potensi lokal Kabupaten Lombok Timur dengan kekuatan sumberdaya lokalnya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi dan memformulasikan perencanaan skenario sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur berbasis potensi lokal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya ialah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data-data dianalisis menggunakan metode TAIDA *(Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting)* dengan bantuan analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dan analisis *PEST-Plus (Politic, Economic, Social, Technology and Environment).*

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, sebagian memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya, baik dari komoditi penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, namun sebagian memiliki kondisi pengelolaan yang belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran pembangunan dan belum memadainya sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk itulah dibentuk visi, misi dan strategi sektor kelautan dan perikanan dengan waktu capaian 5 sampai 20 tahun. Visi, misi dan strategi tersebut diinterintegrasikan kedalam empat skenario untuk memudahkan penerapannya. Agar skenario tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dilakukan optimalisasi peran *stakeholder* pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur saat ini dengan konsep lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia secara umum dilengkapi oleh potensi dan sumberdaya lokal, walaupun jumlahnya tidak banyak. Hal ini menjadi bukti bahwa peluang untuk suatu daerah "tidak adanya anggaran pembangunan" dan "tidak adanya sumberdaya manusia (SDM)" seperti yang dijelaskan dalam skenario IV, peluang terjadinya sangat kecil sekali dan tidak mungkin suatu daerah untuk tidak memiliki salah satu dari dua *focal concern* yang ada, baik anggaran maupun sumberdaya manusia.

Saran alternatifnya ialah melakukan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan, memanajemen/mengelola sumberdaya aparatur, tenaga lokal maupun masyarakat (khususnya di pesisir) melalui peningkatan pendidikan (berfokus perguruan tinggi) dan pengetahuan. Melakukan promosi tingkat lokal, regional bahkan internasional terhadap potensi kelautan dan perikanan Lombok Timur dengan memanfaatkan kapasitas sumberdaya lokal. Memaksimalkan mitra dan peran Badan Pengawasan Perdagangan Luar Negeri sebagai badan yang bergerak di dunia perdagangan luar negeri sekaligus pengontrol setiap harga produk kelautan dan perikanan.

Kata Kunci: Perencanaan Skenario, Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Potensi Lokal, LERD *(Local Economic Resources Development)*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Muhammad Faqih. 2014. **Scenario Planning of the Development of Marine and Fisheries Sector Based On Local Potency (Case Study In East Lombok Regency,West Nusa Tenggara Province)**. Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. H. Mochamad Rozikin, M.AP, 255+xvii.

Planning is an integral part of development process, for it is ongoing and implemented gradually either in 1 year, 5 years, or even 20 years. Development approach in Indonesia and its regions today is more oriented towards the mainland rather than the marine. To make the marine and fisheries sector managed well, effective, efficient and has a clear goal, it needs scenario planning to optimized local potency of East Lombok Regency with its local resources.

This research wants to know, describe, and analyze the situation and formulized a scenario planning of marine and fisheries sector in East Lombok Regency based on local potency. The kind of this research is descriptive with qualitative approach. The methods of data collection are observation, interview, literature study, and documentation. The data analyzed using TAIDA (*Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting*) method, supported by SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat*) analysis and *PEST-Plus* (*Politic, Economic, Social, Technology, and Environment*) analysis.

The result of this research shows that the condition of marine and fisheries sector in East Lombok Regency is good enough and potential to be developed in the future, in terms of commodity, cultivation, processing and marketing. However, the management is not optimized well. This is due to lack of budget and inadequate human resources. That makes the government formed vision, mission, and strategy for marine and fisheries sector with 5 to 20 years of performance time. Those vision, mission, and strategy of marine and fisheries sector integrated into four scenarios to ease the implementation. To make the scenarios implemented well, it needs the optimization of the stakeholders in East Lombok Regency with local concept. Conclusion of this study states that each region in Indonesia has local potency and resources, although the amount is not large. It proves that it is rarely happen when a region "does not have enough budget for development" and "there is no human resources enough" as explained in Scenario IV, is almost impossible that a region does not have one of the two existing *focal concerns* , whether the budget or the human resources.

The alternative recommendation are performing good cooperation with the related stakeholders, managing the apparatus resources, and the community especially the coastal community through education improvement (focusing on higher education) and knowledge. Performing regional promotion and in international level on the potency of marine and fisheries sector in East Lombok through local human resources. And last but not least, maximizing the role of related stakeholders and Board of Foreign Trade Watch as the party who controlled every price of marine and fisheries product in the realm of world trade.

Keywords: Scenario Planning, Marine and Fisheries of East Lombok, Local Potency, LERD (Local Economic Resources Development)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)**".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan tetap berdo'a secara terus-menerus untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Chairul Shaleh, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan mengarahkan penelitian ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Drs. H. Mochamad Rozikin, S.AP selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan masukan, perbaikan dan bimbingan sehingga penelitian ini menjadi lebih fokus dan sistematis.
7. Bapak M. Safwan selaku Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur beserta para staf administrasinya yang telah memberikan bantuan data dan layanan perizinan penelitian kepada penulis.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur beserta seluruh jajarannya (Bapak Taufik Hidayatullah, S.Pi, Ibu Ir. Hariyanti, Ibu Ir. Nursanah, Kak Ishak S.Pi, Mba' Herawati Lustiana, S.Pi, Bapak L. Arbain Putrawirawan, S.Sos dan Mba' Hasmiati) yang selalu membantu penulis dalam mengenal, memahami dan menganalisis permasalahan kelautan dan perikanan serta selalu memberikan dukungan data tentang kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur yang dibutuhkan penulis.
9. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur dan jajarannya (Bapak Ir. Makrif, Bapak Budi Utama, Bapak Bambang.S,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mba' Suprapti, Kak Hermanto dan Kak Munawarah) yang telah memberikan berbagai informasi dan data mengenai koperasi nelayan.

10. Ketua BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) Labuhan Haji dan jajarannya (Ahmadi) serta Bapak H. Lalu Zaidun di BBI (Balai Benih Ikan) Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) yang banyak memberikan informasi menarik mengenai manajemen/ tata kelola balai benih tersebut.
11. Kak' Abdul Mugis, S.Pi selaku Staff Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, yang banyak membantu dalam koordinasi, penyediaan data dan informasi penting tentang kelautan dan perikanan.
12. Bapak/Amaq Rawisah, Ibu/Inaq Rohan Ibu/Inaq Jenap, Nasipudin, Samsuri dan Alwi serta beberapa nelayan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan semua pengetahuan/ pengalaman hidup bahkan informasi mengenai kondisi hidup dan profesinya kepada penulis serta berharap agar penulis mampu memberikan yang terbaik bagi mereka nantinya atau sebagai agen kritis yang dapat menghubungkan aspirasi mereka ke pemerintah.
13. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menuntut ilmu.
14. Sahabat penulis dan teman-teman minat Perencanaan Pembangunan yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa semua hal di dunia ini tidak ada yang abadi dan sempurna. Untuk itulah, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan (Email: boremplanners@gmail.com/ faqih_rempoeng@yahoo.co.id/ Hp: 087863480881). Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang memiliki arti besar bagi pihak yang membutuhkan serta dapat diaplikasikan untuk mencapai kemaslahatan ummat.

Malang, 4 Ramadhan 1435H/ 16 Juni 2014 M

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSEMBAHAN
MOTTO
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN ..... **viii**
SUMMARY ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Sistematika Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik 17
1. Administrasi Publik 19
2. Administrasi Pembangunan 22
B. *Scenario Planning* dari Perencanaan Pembangunan 27
1. Perencanaan Pembangunan 29
2. Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)*..... 33
C. Pembangunan Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal (LERD)... 48
1. Pengertian LERD 50
2. Tingkat Kepentingan dan Fokus LERD..... 51
3. Pinsip LERD 53
D. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 55

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 61
B. Fokus Penelitian..... 62
C. Lokasi dan Situs Penelitian..... 65
D. Jenis dan Sumber Data..... 66
E. Teknik Pengumpulan Data..... 69

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

F. Instrumen Penelitian 72
G. Tahapan Analisis Data 73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Timur 77
2. Demografi Kabupaten Lombok Timur..... 82
3. PDRB Kabupaten Lombok Timur..... 89
4. Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur..... 92
a) Usaha Penangkapan..... 92
b) Usaha Budidaya..... 93
c) Usaha Pengolahan 95
d) Bakau *(Mangrove)*..... 96
e) Terumbu Karang *(Coral Reefs)*..... 97
f) Padang Lamun *(Seagrass)*..... 98
g) Pulau Kecil/ Gili 98

B. Data Fokus Penelitian
1. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur..... 99
a) Kondisi Produksi 99
b) Nilai Produksi..... 104
c) Produksi Benih 106
d) Pengolahan Hasil 110
e) Konsumsi Ikan..... 114
f) Hutan Bakau, Terumbu Karang, Padang Lamun dan Gili.. 115
g) Penghasilan Nelayan, Pembudidaya dan Pedagang Ikan ... 119
h) Sarana dan Prasarana..... 124
2. Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur..... 134
a) *Tracking*..... 134
b) *Analizing*..... 138
c) *Imaging*..... 146
d) *Deciding* 148
e) *Acting*..... 151

C. Analisis Data
1. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur..... 154
a) Kondisi Produksi 154
b) Nilai Produksi..... 158
c) Produksi Benih 163
d) Pengolahan Hasil 168
e) Konsumsi Ikan..... 170
f) Hutan Bakau, Terumbu Karang, Padang Lamun dan Gili.. 172
g) Penghasilan Nelayan, Pembudidaya dan Pedagang Ikan ... 175
h) Sarana dan Prasarana..... 180

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan 185
a) *Tracking* 185
b) *Analizing* 193
c) *Imaging* 210
d) *Deciding* 216
e) *Acting* 221

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 248
B. Saran 251

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi NTB Agustus 2013	10
2.	Perbedaan Skenario pada Bidang Seni/ Teater, Sektor Bisnis dan Sektor Publik	34
3.	Perbedaan *Scenario*, *Scenario Building* dan *Scenario Planning*	35
4.	Perbedaan antara *Scenario Planning*, *Forecasting* dan *Visi*	37
5.	Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	78
6.	Luas Kecamatan Kabupaten Lombok Timur 2012	80
7.	Tata Guna Lahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	81
8.	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	84
9.	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	86
10.	Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	88
11.	PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012	90
12.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012	91
13.	Jumlah Tangkapan Ikan di Kabupaten Lombok Timur 2012	92
14.	Produksi Perikanan di Kabupaten Lombok Timur 5 Tahun Terakhir	100
15.	Nilai Produksi dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Lombok Timur	104
16.	Perusahaan, UD (Usaha Dagang)/Usaha Milik Pribadi yang melakukan Usaha Budidaya di Kabupaten Lombok Timur 2013	109
17.	Jenis Usaha dan Kelompok Usaha Pengolahan Tujuan Konsumsi Tahun 2012	112
18.	Jenis Usaha dan Kelompok Usaha Pengolahan Tujuan Non-Konsumsi Tahun 2012	113
19.	Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Lombok Timur	115
20.	Luas Hutan Bakau di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012/2013	116
21.	Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	118
22.	Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	118
23.	Jumlah Nelayan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	120
24.	Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	125
25.	Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	127
26.	Rincian Dana Koperasi Nelayan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	131
27.	Matriks SWOT	187
28.	Skenario I “Ikan Terbang”	202

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

29. Skenario II “Ikan Mabuk” 205
30. Skenario III “Ikan Kembung” 207
31. Skenario IV “Ikan Kering” 209
32. Visi, Misi, Waktu Capaian Sebelum dan Setelah Adanya Skenario..... 212

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

No. Judul **Halaman**

1. Cara Berfikir *Scenario Planning* 40
2. Tujuan dan Fokus *Scenario Planning* 41
3. Model Interaktif Analisis Data 74
4. Budidaya Udang Lobster/Barong di Kecamatan Jerowaru 101
5. Budidaya Rumput Laut Metode *Longline* di Kecamatan Jerowaru 102
6. Grafik Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur ... 103
7. Grafik Peningkatan Produksi Perikanan di Lombok Timur 105
8. Kolam Pembesaran Benih Ikan di BBIP Labuhan Haji 106
9. Kolam Produksi Benih di BBI Desa Lenek, Kecamatan Aikmel 107
10. Industri Pengolahan Tuna di Kabupaten Lombok Timur 110
11. Hasil Olahan Ikan Panggang di Pasar Tradisional Keruak 111
12. Kondisi Tanaman Bakau/*Mangrove* di Kabupaten Lombok Timur 117
13. Pengikat Rumput Laut di Kecamatan Jerowaru 123
14. *Landing Place* di Kecamatan Jerowaru dan Keruak 126
15. Kondisi Prasarana Perikanan di Kabupaten Lombok Timur 132
16. Kondisi Prasarana Pendukung Perikanan Lombok Timur 133
17. Awik-awik Teluk Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru 142
18. Sampah dan Limbah Rumah Tangga Penduduk Pesisir 145
19. Pedagang di Pesisir Pantai Kecamatan Labuhan Haji 145
20. Matriks Logika Skenario 201

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang di sempurnakan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh besar pada terbukanya peluang suatu Daerah (kabupaten/kota) dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah dan atas dasar aspirasi masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur seluruh kewenangan dalam bidang pemerintah kecuali kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) baik kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter maupun kewenangan fiskal. Sumberdaya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah SDA (sumberdaya alam), SDM (sumberdaya manusia), sumberdaya modal/kapital, teknologi maupun institusi yang berperan dalam menentukan keberlanjutan pembangunan daerah dan merupakan kewenangan daerah untuk mengaturnya.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dan mengoptimalkan fungsi sumberdaya tersebut agar dapat memberikan sumbangan ekonomi bagi daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah merupakan asset berharga yang harus dijaga dan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Jika

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya telah berjalan dengan baik maka akan muncul potensi lokal.

Potensi lokal menggambarkan ciri khas suatu daerah dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya walaupun ada beberapa kesamaan. Potensi-potensi lokal ini digali dan dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada daerah pesisir dan kelautan yang sebagian besar merupakan daerah penghasil sumberdaya perikanan dengan kondisi masyarakat yang cenderung miskin dan kumuh. Potensi lokal yang dimiliki suatu daerah akan optimal jika dikembangkan melalui Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal yang menurut Blakely dan Bradshaw, 1994 merupakan suatu proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, pemerintah membentuk suatu kelompok kemitraan yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya, sedangkan swasta merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sebagai sumber penyedia lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal khususnya. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Arsyad (1999), bahwa pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah, maka setiap daerah berusaha untuk menggali dan melakukan ekplorasi

terhadap potensi-potensi yang berpeluang untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal merupakan isu baru dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ditempuh melalui pengembangan usaha (kecil, mikro dan menengah) karena dalam kegiatan produksinya didominasi oleh bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga tidak mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi dunia.

Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal menurut (Blakely, 1990) memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis potensi lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam *marketplace* dan lebih menempatkan kelompok masyarakat dibanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenaga kerja. Selain itu, dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal, kondisi sumberdaya suatu daerah menjadi sangat penting ketika aktivitas pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal diterapkan. Daerah yang memiliki banyak sumberdaya ekonomi lokal akan lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, akan tetapi bagi daerah-daerah yang tertinggal (baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki daerah tersebut), tentu upaya untuk menggali dan menciptakan produk-produk ekonomi unggulan menjadi suatu pekerjaan yang sulit karena menuntut kerja keras, kreativitas, inovasi dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha/ swasta *(privat sector).* Selain itu, hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di suatu

daerah ialah bagaimana menjadikan produk ekonomi yang ada di daerah tersebut agar memiliki kualitas tinggi, nilai jual yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah lainnya serta memiliki jaringan pemasaran yang baik. Salah satu dari sumberdaya ekonomi lokal yang memiliki peran dan fungsi cukup besar dalam membangun ekonomi masyarakat, namun seringkali diabaikan keberadaannya ialah sektor kelautan dan perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta fisik, bahwa dua per-tiga dari wilayah Indonesia berupa lautan yang menyimpan banyak potensi besar. Dalam Al-Qur'an (Kitab Suci Agama Islam) juga disebutkan kelebihan sumberdaya dan potensi besar yang terkandung dalam lautan, diantaranya sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut (binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya, termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya) dan makanan (yang berasal) dari laut (ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah (karena telah mati terapung) atau terdampar dipantai, dan sebagainya) sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan *(Al-Qur'an surat Al-Maa'idah ayat 96)"*.

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu

> mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur *(Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 14)"*.

Bukti lainnya ialah pembangunan tidak lagi terfokus pada sektor yang berada di bagian hulu (daratan) dikarenakan telah mencapai titik jenuh dalam pengelolaan sumberdayanya dan sektor hilir (lautan) merupakan potensi besar sebagai tumpuan pembangunan negara yang selama ini tertidur dan terlupakan. Sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa hadirnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya (berpusat di Palembang) dan diikuti oleh Kerajaan Majapahit (berpusat di Mojokerto/Jawa Timur) membuat Indonesia (Nusantara) menjadi bangsa bahari yang terkuat dan memiliki kekuasaan terluas atas wilayah lautnya. Dengan kondisi wilayah dan sejarah yang dimiliki Indonesia, tentu menyimpan kekayaan berupa sumberdaya alam yang sangat melimpah dan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yaitu sumberdaya alam yang dapat pulih *(renewable resources)*, sumberdaya alam yang tidak dapat pulih *(non-renewable resources)* dan jasa-jasa lingkungan *(environmental services)* (Dahuri, dkk, 2001:81) maupun nilai ekonomi berupa produk dan jasa lainnya dengan daya saing tinggi, sepanjang pengelolaannya dilakukan secara optimal dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

> Sumberdaya yang dapat diperbaharui *(renewable resources)* ialah perikanan tangkap, budidaya perikanan, perikanan pasca-panen, terumbu karang, hutan mangrove dan industri bioteknologi kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui *(non-renewable resources)* berupa bahan tambang dan mineral, minyak bumi dan gas, serta harta karun. Sementara sumberdaya yang berupa jasa-jasa lingkungan *(environmental services)* ialah pariwisata, perhubungan dan pelabuhan, penampung (penetralisir) limbah dan energi kelautan seperti

pasang-surut, gelombang, angin dan *OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)* (Dahuri, dkk, 2001:82-104).

Melalui potensi yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini, diharapkan mampu mewujudkan arah pembangunan yang dicita-citakan selama ini, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata, baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat disparitas (ketimpangan) pembangunan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan maupun antara daerah pesisir laut dengan daerah pusat pelayanan publik. Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang ada saat ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari sabang/ wilayah paling barat sampai merauke/ wilayah timur Indonesia, termasuk didalamnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Timur menyimpan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup melimpah, baik hayati ataupun non-hayati dan cukup menjanjikan untuk di kelola. Potensi yang ada di Kabupaten Lombok Timur saat ini tidak hanya menjadi kekayaan lokal (aset lokal) saja, akan tetapi dapat dirasakan juga manfaatnya secara nasional jika pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan adil, tepat, proporsional/ bijaksana dan berwawasan lingkungan *(sustainable)*. Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 2.679,88 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.605,55 km² dan luas wilayah laut 1.074,33 km² atau jika di hitung dalam satuan persentase, maka luas wilayah laut yang dimiliki saat ini mencapai 40,09% wilayah laut dari luas total wilayahnya. Garis pantai terbentang dari ujung selatan sampai ke utara mencapai 220 km sebagai

potensi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar pada 6 kecamatan dan 22 desa/kelurahan pantai dengan jumlah nelayan perikanan tangkap sebanyak 16.434 jiwa. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

1) Kecamatan Jerowaru dengan 4 Desa/Kelurahan Pantai.
2) Kecamatan Keruak dengan 2 Desa/Kelurahan Pantai.
3) Kecamatan Sakra Timur dengan 2 Desa/Kelurahan Pantai.
4) Kecamatan Labuhan Haji dengan 5 Desa/Kelurahan Pantai.
5) Kecamatan Pringgabaya dengan 5 Desa/Kelurahan Pantai.
6) Kecamatan Sambelia dengan 4 Desa/Kelurahan Pantai.

Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Lombok Timur memiliki sumberdaya alam (kelautan dan perikanan) yang cukup besar sehingga untuk kedepannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur (2009) meliputi budidaya laut, budidaya air payau, budidaya air tawar, hutan bakau *(mangrove)*, terumbu karang *(coral reefs)* dan bidang penangkapan dengan potensi sumberdaya ikan lestari sebesar 18.242,0 ton/tahun yang terdiri dari potensi sumberdaya ikan pelagis 7.752,8 ton/tahun dan potensi sumberdaya ikan demersal 10.489,2 ton/tahun. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini merupakan salah satu keunggulan lokal yang menjadi aset berharga bagi daerah karena berpeluang besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah yang berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. Dalam pengelolaannya, tentu dibutuhkan

dukungan dari semua pihak *(stakeholders)* dan kesungguhan hati dari pemerintah itu sendiri untuk mengelola sumberdaya pada sektor kelautan dan perikanan agar bisa bersaing di tingkat global.

Persaingan pada tingkat global berupa globalisasi perdagangan, membutuhkan kreatifitas, inovasi dan kerja keras untuk bisa mengubah ancaman menjadi peluang. Di era globalisasi perdagangan, semua negara dituntut untuk turut serta dalam persaingan antar negara tanpa adanya batasan-batasan administratif, salah satunya ialah Indonesia. Pada tahun 2015 mendatang, Indonesia dan Negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam ASEAN *(Association of South East Asian Nations)* akan mengadakan perdagangan bebas tingkat Asia yaitu *economic border less country* yang disebut *Asean Economic Community (AEC)* atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk persaingan antar negara-negara ASEAN untuk membuka sebesar-besarnya jalur perdagangan bagi negara yang tergabung didalamnya, sehingga negara-negara yang memiliki produk dengan kualitas baik dan murah akan menjadi kuat, sementara negara-negara dengan produk kualitas rendah dan bermasalah dalam biaya produksinya, akan tersingkir. Untuk itulah, negara-negara yang ikut dalam persaingan tersebut harus mampu mengembangkan berbagai keunggulan lokal yang memiliki daya saing tinggi dan dibutuhkan masyarakat luas, berupa barang dan jasa *(goods and services)* dengan kualitas tinggi, harga relatif murah, efisiensi biaya produksi dan jumlah produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri maupun pasar ekspor yang

diperlukan setiap saat. Untuk menyediakan barang dan jasa dengan kriteria tersebut, maka pemerintah (Negara) tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh pihak swasta sebagai pelaksana tugas (kegiatan) yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau dengan kata lain, tugas pemerintah terlalu banyak sehingga tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang ada secara maksimal dan karena keterbatasan modal pula, maka pemerintah memberikan tugas tersebut kepada pihak swasta dengan pembuatan kesepakatan/*Memoratorium of Understanding* (MOU) diantara keduanya.

Pemerintah (pusat) juga tidak mengabaikan peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah (pusat) dengan pemberian hak otonomi kepada daerah agar keunggulan-keunggulan lokal berupa kekayaan sumberdaya lokal yang biasanya terdapat di daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa agar dikelola secara optimal sehingga mampu bersaing di pasar global nantinya. Persaingan pada tingkat global maupun regional akan menjadi sulit mengingat potensi besar berupa produk kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur saat ini masih belum cukup untuk bersaing dengan produk luar negeri bahkan dengan daerah basis kelautan dan perikanan lainnya di Indonesia. Walaupun pada dasarnya dua komuditas kelautan dan perikanannya (rumput laut dan mutiara) telah masuk pasar ekspor.

Potensi besar tersebut tidak menjamin meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini ditandai dengan masih bayaknya masalah kesehatan dan kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi antara golongan kaya dan miskin, kecemburuan sosial

masyarakat pesisir terhadap masyarakat di daerah perkotaan (daerah yang lebih maju), rendahnya daya saing ekonomi dan ketimpangan *(disparitas)* pembangunan antar wilayah maupun antar sektor serta masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur. Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur merupakan angka pengangguran tertinggi di antara kabupaten/ kota lainnya se-pulau Lombok. Berikut ini adalah data tahun 2013 tentang tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan kabupaten/kota:

Tabel 1. Keaadaan Ketenagakerjaan di Provinsi NTB Agustus 2013

Kab/ Kota	Penduduk Usia Kerja	Bekerja	Pengangguran*	Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten/ Kota di Pulau Lombok							
Lombok Barat	435.315	257.485	11.185	268.670	166.645	61,72	4,16
Lombok Tengah	612.778	439.703	25.387	465.090	147.688	75,90	5,46
Lombok Timur	769.618	461.157	30.578	491.735	277.883	63,89	6,22
Lombok Utara	140.723	78.330	3.277	81.607	59.116	57,99	4,02
Kota Mataram	309.614	164.324	9.522	173.846	135.768	56,15	5,48
Kabupaten/ Kota di Pulau Sumbawa							
Sumbawa Barat	84.764	51.776	3.842	55.618	29.146	65,62	6,91
Sumbawa	296.378	203.525	8.729	212.254	84.124	71,62	4,11
Dompu	146.862	82.721	4.474	87.195	59.667	59,37	5,13
Bima	297.845	178.427	9.184	187.611	110.234	62,99	4,90
Kota Bima	106.588	64.394	6.530	70.924	35.664	66,54	9,21
Total	**3.200.485**	**1.981.842**	**112.708**	**2.094.550**	**1.105.935**	**65,44**	**5,38**

Keterangan: Pengganggguran* = Pengangguran sementara/ pengangguran kotor
TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS NTB. 2013. Keadaan ketenagakerjaan agustus 2013. *Berita Resmi Statistik*, 74/11 (52): 1 6.

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat pengangguran sementara/ pengangguran kotor yang tertinggi ialah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ialah Kota Bima sebesar 9,21%, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 6,91% dan di posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat pengangguran sebesar 6,22%. Sementara itu, kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah ialah Kabupaten Lombok Utara yakni sebesar 4,02%. Dan jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan TPAK sebesar 75,90%, sedangkan TPAK terendah dimiliki oleh Kota Mataram yaitu sebesar 56,15%.

Permasalahan-permasalahan seperti tingginya angka pengangguran, masalah kesehatan dan kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kecemburuan sosial dan rendahnya daya saing ekonomi yang dialami Kabupaten Lombok Timur saat ini, dapat diatasi dengan cara menciptakan kondisi pertumbuhan perekonomian yang tinggi berdasarkan kuantitas, kualitas dan produktifitasnya (menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, ahli dibidangnya dan memiliki komitmen besar dalam bekerja), berdasarkan kegiatan ekonominya atas prinsip berkelanjutan/ *sustainable* (memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk memperoleh manfaat yang sama seperti manfaat yang dirasakan saat ini, walaupun dengan cara pencapaian yang berbeda) serta memaksimalkan fungsi dan peranan sumberdaya lokal sebagai basis ekonomi rakyat yang tidak akan tersentuh oleh krisis ekonomi. Hal ini diungkapkan pula oleh Nurzaman

(2002) dalam Harahab (2010:35-36) yang mengatakan bahwa pengembangan ekonomi yang tidak tersentuh dengan kekuatan ekonomi lokal, akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Terlepas dari potensi yang ada, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur menghadapi permasalahan inti yang menyebabkan potensi-potensi yang ada menjadi kurang optimal. Permasalahan tersebut berupa masih kurangnya infrastruktur, permodalan dan pemasaran, sumberdaya manusia, penerapan teknologi masih rendah, serta masih kurang/belum layaknya sarana-prasarana pendukung pengembangan kelautan dan perikanan seperti tempat pendaratan ikan, pasar ikan tradisional, industri pengolahan, balai benih ikan (BBI). Selain itu juga, terdapat permasalahan penting lainnya yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanannya yaitu permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan berkaitan dengan penangkapan ikan yang masih menggunakan bom dan racun. Permasalahan tersebut belum tertanggulangi karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya informasi terkini yang berhubungan dengan kondisi dan keragaman ekosistem kelautan dan perikanan di wilayah ini, khususnya yang berkaitan dengan data ekosistem terumbu karang. Wiharnandi (2014) manambahkan bahwa masalah lingkungan disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi yang terjadi pada daerah hulu sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap ekosistem pada daerah tengah maupun hilir, antara lain sedimentasi perairan, tingkat kekeruhan air, erosi, dan pencemaran. Untuk itulah, maka dibutuhkan perencanaan disertai kebijakan/strategi yang tepat sasaran dan

menunjang aspirasi masyarakat lokal (khususnya masyarakat pesisir, nelayan, kuli panggul, petani ikan maupun pedagang ikan di Kabupaten Lombok Timur) dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk perencanaan itu ialah perencanaan skenario yang akan membawa Kabupaten Lombok Timur untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki dengan berbagai pilihan alternatif yang disediakan dalam desain skenario. Perencanaan skenario ini ditempuh melalui perumusan, penyusunan dan pemilihan skenario yang sesuai/tepat dengan karakteristik sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan masyarakat serta sumberdaya lokal yang dimilikinya, sehingga rencana yang diambil nantinya bisa berfungsi dengan baik, efisien dan optimal (produktif) serta dikelola *(di-manage)* secara bersama-sama dengan prinsip lokal yang pada akhirnya akan terwujud kemakmuran berkeadilan. Untuk itulah maka, peneliti memilih judul penelitian ***"Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal"***.

B. Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah perencanaan skenario sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur berbasis potensi lokal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, seperti:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur;
2. Memformulasikan perencanaan skenario sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur berbasis potensi lokal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan bermanfaat secara akademis dan praktis.

1. Manfaat Akademis

   Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan bidang ilmu Perencanaan Pembangunan khususnya dan ilmu administrasi secara umum serta kebijakan publik dalam melakukan perencanaan skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada potensi lokal (sumberdaya ekonomi lokal). Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan perbandingan yang bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan sumbangan berupa pemikiran tentang skenario dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada potensi/ keunggulan sumberdaya ekonomi lokal kepada Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Masyarakat maupun *Stakeholder* yang terkait dengan pengembangan sektor tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini ialah landasan bagi penulis untuk mengkaji berbagai literatur yang terkait dengan administrasi pembangunan dalam administrasi publik, administrasi publik, administrasi pembangunan, perencanaan pembangunan, skenario, dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal (LERD), serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian, baik berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil analisis peneliti tentang kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dan formulasi perencanaan skenarionya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan Dalam Administrasi Publik

Administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi publik yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang atau dengan kata lain, implementasi administrasi publik di negara maju berbeda dengan yang ada di negara yang sedang berkembang dan administrasi publik tidak cukup untuk membuat negara-negara yang sedang berkembang menjadi maju, untuk itulah dibutuhkan pengembangan atas disiplin administrasi publik yang meliputi administrasi untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang kelima unsur ini dibahas dalam administrasi pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan (administrasi publik negara yang sedang berkembang) lahir dan menjadi penyempurna sekaligus sebagai kaki-tangan dari administrasi publik (administrasi publik negara maju) untuk dapat diterapkan di negara yang sedang berkembang. Selain itu, tujuan diterapkannya administrasi pembangunan ialah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan suatu negara menuju tahap modernisasi.

Menurut Tjokroamidjojo (1978:7), setidaknya ada 4 kecenderungan yang menuntun administrasi publik menuju administrasi pembangunan, yaitu:

1) Administrasi publik menaruh perhatian terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat substantif, baik itu perumusan kebijaksanaan, instrumen pelaksananya maupun pengimplementasian dari pembangunan itu sendiri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2) Administrasi publik mengembangkan pendekatan yang bertumpu pada *(behavioral approach)* yang mengkaji tentang sikap maupun peranan birokrasi dan berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut, serta bagaimana keputusan diambil dan pengetahuan dikembangkan.
3) Administrasi publik cenderung melakukan pendekatan manajemen dengan mengembangkan sistem analisisnya pada administrasi pembangunan dan penggunaan teknik-teknik analisis kuantitatif seperti *operations research, program and performance budgeting,* dan lain sebagainya.
4) Administrasi publik lebih menekankan perhatiannya terhadap hubungan antara ekologi sosial dengan budaya masyarakat, dari pada sikap administratif dan lembaga-lembaga administratif dengan ekologi sosial maupun budaya masyarakat tertentu.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa administrasi pembangunan berkembang sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan dalam hal implementasi antara administrasi pemerintahan di negara maju dengan administrasi pemerintahan di negara berkembang. Sejalan dengan itu, Riggs (1964) dalam Hayati, T., H. Nursadi, dan A. Danesjvara (2005:18) memandang bahwa dalam hal sistem, struktur, dan fungsinya, administrasi publik yang diterapkan pada negara yang sedang berkembang mempunyai pola perilaku yang berbeda dengan negara maju dan pendekatan yang digunakan cenderung berubah. Selain itu, terdapat tiga kecenderungan yang menunjukkan administrasi pembangunan dalam administrasi publik. Tiga kecenderungan tersebut diungkapkan lebih lanjut oleh (Riggs, 1964 dalam Hayati, T., H. Nursadi, dan A. Danesjvara, 2005:18), yaitu 1) bergesernya pendekatan yang bersifat normatif ke pendekatan empiris; 2) bergesernya pendekatan ideologis ke arah pendekatan nomotetis; 3) bergesernya pendekatan normatif, empiris, ideologis dan nomotetis ke dalam pendekatan ekologis.

1. Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai ilmu mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat seperti Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White, serta Alexis de Tocqueville (Tjokroamidjojo, 1978:1). Dari penulis-penulis dan praktisi-praktisi tersebut, Woodrow Wilson merupakan penulis sekaligus sebagai praktisi yang dikenal banyak orang melalui tulisannya yang berjudul *"The Study of Administration"* dan mengemukakan pendapatnya mengenai sebuah perpaduan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik. Gagasan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Pfiffner dan Presthus (1953), bahwa ilmu administrasi adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik. Namun lebih lanjut, Wilson mengatakan bahwa *".....administration questions are not political questions; although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its offices"* atau dengan kata lain, disiplin administrasi publik memang merupakan produk hasil perkembangan dari ilmu politik, akan tetapi perlu adanya pemisah diantara keduanya. Gagasan ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh pakar-pakar administrasi berikutnya melalui proses berfikir yang mendalam, sehingga muncul-lah ilmu administrasi seperti saat ini.

a) Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Waldo (1955) dalam

Tjokroamidjojo (1978:1-2) mengatakan bahwa administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Dari pendapat ini, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan sebuah konsep yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya/ publik dalam upaya meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan publik dengan melakukan manajemen maupun pengorganisasian terhadap sumberdaya manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan bernegara.

Selain itu pula, administrasi publik berkaitan dengan pengkoordinasian seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat berbeda-beda/ beragam dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu itu sendiri maupun kelompoknya, sehingga membutuhkan keterlibatan atau intervensi dari berbagai pihak bukan hanya sebatas kelompok namun lebih kepada pembentukan *"massa/ kumpulan orang-orang dengan tujuan yang sama"* yang akan menggerakkan dan mempengaruhi kebijakan negara agar memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Diperkuat pula oleh Nigro dan Nigro (1988) yang mengatakan bahwa *"public administration has an important role in the formulation of public policy and is this part of political process"*.

Dalam pelaksanaannya, administrasi publik memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu rasional (masuk akal/ tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan), efektif (tujuan tercapai sesuai dengan sasaran), efisien

(perbandingan antara input/ pengorbanan dengan output/ hasil) dan produktif (mampu bersaing ditengah kondisi yang tidak menentu untuk mencapai tujuan).

b) Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokroamidjojo (1978:3) ada tiga fungsi dasar administrasi publik, yaitu:

1) Formulasi/ Perumusan Kebijaksanaan
   Fungsi ini dijabarkan dalam empat subfungsi, yaitu a) kebijaksanaan yang baik berasal dari proses analisis yang baik terhadap keadaan-keadaan nyata yang ada, b) perumusan kebijaksanaan juga merupakan usaha untuk memproyeksikan fakta-fakta masa kini dan memperkirakan *(forecast)* kemungkinan yang terjadi pada fakta-fakta tersebut di masa yang akan datang serta menyusun alternatif langkah kegiatan *(alternative courses of action)* yang mungkin dilalui, c) supaya suatu program strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada *point* a dan b dapat disusun, dan d) pengambilan keputusan *(decision making)*.
2) Pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi
   Untuk menjalankan fungsi ini, administrasi publik harus mampu mendapatkan, menggunakan, dan mengendalikan empat elemen/ unsur-unsur dasar administrasi yaitu struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain.
3) Penggunaan dinamika administrasi
   Penggunaan dinamika administrasi tidak hanya bertujuan untuk merealisasikan tujuan/ kebijaksanaan yang telah dirumuskan saja, namun juga untuk melakukan pengendalian atau pengelolaan terhadap unsur-unsur administrasi yang ada. Unsur dinamik administrasi (*The dynamic of administration)* ini meliputi a) pimpinan, b) koordinasi, c) pengawasan, d) komunikasi.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya, administrasi publik berusaha menyusun atau memformulasikan kebijaksanaan melalui perencanaan atas struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lainnya dengan penggunaan dinamika administrasi agar tujuan/ kebijaksanaan yang telah dirumuskan dapat terealisasi

dengan baik dan untuk melakukan pengendalian atau pengelolaan terhadap unsur-unsur administrasi seperti:

a) Pimpinan (manajer) merupakan penggerak proses administrasi melalui aturan *(reward and punishment)* maupun melalui motivasi.
b) Koordinasi merupakan singkronisasi kegiatan antar bagian dalam proses administrasi, sehingga mengarah pada sasaran atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
c) Pengawasan yaitu tindakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang ada dan dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dan penyimpangan (monitoring dan evaluasi).
d) Komunikasi merupakan aspek penting dalam hal pencapaian tujuan bersama. Dengan komunikasi yang baik, maka akan tercipta rasa kebersamaan, kerjasama dan satu visi untuk mencapai tujuan.

2. Administrasi Pembangunan

Perkembangan administrasi pembangunan dimulai sejak berakhirnya perang dunia ke-II yang ditandai dengan kepedulian Negara yang menang pada peretempuran Perang Dunia untuk merehabilitasi kondisi perekonomian dunia yang telah hancur akibat perang dan dampaknya akan lebih terasa di negara-negara yang kalah. Kepedulian untuk memberikan bantuan dari negara yang menang dalam perang dunia ke-II terhadap Negara yang kalah, dikarenakan beberapa pertimbangan penting diantaranya ialah pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan pertimbangan terhadap nilai kemanusiaan. Pertimbangan tersebut

diwujudkan oleh Negara Amerika Serikat sebagai negara yang menang dalam perang dunia ke-II untuk membantu negara-negara di Eropa Barat dan Jepang.

Di Eropa Barat sendiri, paket bantuan dituangkan kedalam *"Point Four Program"* atau terkenal dengan sebutan *"Marshall Plan" (perencanaan yang dibuat oleh jenderal Marshall, yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat).* Pengimplementasian program ini membuat perubahan yang sangat besar/ signifikan dan dramatis bagi kehidupan masyarakat di kawasan Eropa Barat. Hal inilah yang memberikan motivasi besar bagi Amerika Serikat dan negara bekas penjajah yang telah maju untuk mengembangkan bantuannya ke negara-negara yang baru merdeka *(negara dunia ke-tiga)*. Seperti yang diketahui bersama, negara-negara baru tersebut memperoleh kemerdekaannya dengan memanfaatkan situasi Perang Dunia ke-II untuk bebas dari penjajah, baik melalui peperangan maupun melalui perundingan yang hampir seluruhnya terdapat di Benua Asia dan Afrika.

Bantuan yang diberikan ke negara-negara baru merdeka ditujukan untuk membangun bidang politik, ekonomi dan sosial budaya di negara tersebut. Menurut Siagian (2012:8), bantuan tersebut dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu;

> Pendekatan moralis dan paragmatis. Secara moralis, bantuan tersebut merupakan cara negara bekas penjajah untuk "menebus dosanya" terhadap negara bekas jajahannya karena kebijaksanaan yang eksploitatif di masa lalu yang menyengsarakan rakyat pribumi. Namun secara paragmatis, mengatakan bahwa kalau-pun negara-negara bekas penjajah bersedia memberikan bantuan ke negara bekas jajahannya bukan atas landasan moralis, melainkan untuk kepentingan nasional negara penjajah. Bentuk kepentingan nasional negara bekas penjajah terhadap negara bekas jajahan ialah dengan menjadikan negara bekas jajahan sebagai negara penghasil bahan baku/mentah untuk industri di negara bekas penjajah dan

menjadikan negara bekas jajahannya sebagai pasar bagi produk yang dihasilkannya.

Terlepas dari itu semua, bantuan yang di berikan kepada negara bekas jajahan berdampak pada perkembangan sistem perekonomian, politik dan sosial budaya negara penerima bantuan yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan Ilmu Administrasi Pembangunan. Dalam perkembangannya, ilmu administrasi pembangunan merupakan bidang studi yang mempelajari sistem administrasi publik di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

a) Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan berasal dari dua kata yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi merupakan kegiatan kerjasama antar manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Waldo (1992) dalam Kartasasmita (1996) mengatakan bahwa yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antar manusia lainnya adalah derajat rasionalitas tinggi yang ditunjukkan oleh pencapaian tujuan dan cara untuk mencapainya.

Sedangkan pengertian pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *"Administrasi Pembangunan"*, Siagian (2012:4-5) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan maupun perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara/ bangsa, pemerintah dan masyarakat didalamnya menuju ke arah modernitas yang bertujuan untuk pembinaan bangsa *(nation-building)*. Dengan

kata lain, pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus melalui perencanaan, berorientasi pada masa depan dan berkaitan erat dengan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan untuk semua.

Secara lengkap Siagian (2012:5) memberikan difinisi tentang administrasi pembangunan sebagai "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya". Sementara itu, Tjokroamidjojo (1978:13) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan ialah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Hakim (2011:38) juga mengemukakan definisi administrasi pembangunan menurut Paul Meadows bahwa administrasi pembangunan merupakan kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik.

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan ialah suatu proses, upaya atau cara yang ditempuh oleh suatu negara/ bangsa (pemerintah) dalam mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial, politik maupun lingkungan secara sadar dan terencana sebagai cara untuk memperbaiki tata kelola kehidupan dan penghidupan negara/ bangsa yang bersangkutan sehingga mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya.

b) Administrasi Bagi Pembangunan

Masalah administrasi bagi pembangunan lebih berkaitan dengan masalah manajemen pembangunan. Dalam manajemen pembangunan sendiri, dikenal beberapa fungsi yang berpengaruh bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan, diantaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan;

   Perencanaan dibutuhkan untuk merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien dan produktif dalam memanfaatkan sumberdaya lokal maupun mengembangkan potensi lokal yang ada. Perencanaan sebagai fungsi manajemen berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif/ pilihan-pilihan yang mungkin diambil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2) Pengerahan (mobilisasi) Sumberdaya;

   Berhasil tidaknya suatu kegiatan pembangunan tegantung pada pengerahan/ mobilisasi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki, baik dalam mobilisasi dana pembangunan (sumberdaya modal/ kapital), pengerahan sumberdaya manusia, pengerahan teknologi maupun memperkuat aspek organisasi dan kelembagaan.

3) Tingkat Partisipasi Masyarakat;

   Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjamin lancar dan berhasilnya kegiatan pembangunan. Banyak bukti empiris yang menunjukkan kegagalan pembangunan yang tidak mencapai visi, misi dan sasarannya, karena kurangnya partisipasi masyarakat.

4) Koordinasi;

Koordinasi merupakan cara yang ditempuh untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat yang menjadi penerima dampak langsung dari kegiatan pembangunan. Koordinasi memainkan peranan penting dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mengembangkan keterikatan masyarakat atas pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga kebijakan yang diambil merupakan hasil musyawarah bersama atas kepemilikan bersama pula.

5) Monitoring dan Evaluasi;

Monitoring diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan tidak menyimpang dari rencana semula. Sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang didapatkan.

B. *Scenario Planning* dari Perencanaan Pembangunan

Seperti perencanaan strategis, perencanaan skenario *(scenario planning)* pada awalnya digunakan oleh kaum militer untuk mengatur jalannya peperangan, namun dengan perkembangan zaman maka perencanaan skenario *(scenario planning)* mulai bergeser dan banyak digunakan pada sektor bisnis untuk mengatur dan mengelola perekonomian. Penggunaan perencanaan skenario *(scenario planning)* pada sektor bisnis dimulai dari adanya krisis energi yang

menyebabkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan besar sehingga banyak yang *collap's/* bangkrut. Untuk itulah, dibutuhkan suatu pendekatan baru dalam perencanaan. Pendekatan tersebut ialah perencanaan skenario *(scenario planning)* yang memiliki kemampuan dalam mengelola/ memanajemen waktu dan sumberdaya untuk diarahkan ke suatu tujuan yang kita perkirakan terjadi *(what is likely to happen)*, sesuatu yang kita inginkan terjadi *(what we would like to see)*, dan mengurangi resiko atas sesuatu yang mungkin terjadi *(what might happen)* maupun sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi *(what we would not like to see)*.

"Shell" merupakan perusahaan pertama yang menggunakan skenario secara luas sebagai alat strategi dalam pengaturan perusahaannya, kemampuan dalam melihat kemungkinan masa depan dan bertindak dengan cepat telah menjadi alasan utama dibalik kesuksesan perusahaan tersebut. Melihat kesuksesan/ keberhasilan dari perusahaan *"Shell"*, maka sektor publik mencoba untuk mengembangkan pendekatan tersebut untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya di negara yang sedang berkembang, sehingga tercipta kesejahteraan untuk semua secara adil dan merata. Selama ini pendekatan perencanaan di negara yang sedang berkembang lebih mengarah pada pencapaian pembangunan yang lebih menekankan pemanfaatan sumberdaya sepenuhnya untuk melancarkan aktivitas pembangunan atau dengan kata lain, pembangunan melalui penggunaan sumberdaya secara berlebihan tanpa memahami resiko-resiko yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut. Atas alasan itulah, maka pendekatan perencanaan skenario memberikan sumbangan pemikiran yang tepat bagi pengembangan ilmu

perencanaan di negara sedang berkembang atau lebih dikenal dengan perencanaan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan

Pada awalnya, ide atau gagasan mengenai perencanaan dianggap sebagai sebuah ideologi dimana hampir seluruh kegiatan maupun kehidupan sosial masyarakat diatur dan direncanakan oleh pemerintah/ negara. Peranan pemerintah dalam mengatur dan merencanakan kelangsungan kegiatan dan kehidupan sosial masyarakat sangat penting, mengingat semakin tajamnya persaingan sektor swasta *(privat sector)* dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat baik melalui penawaran barang dan jasa maupun penyediaan faktor produksi yang sebagian besar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan *(profit oriented)*, walaupun harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Untuk itulah, pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan mengelola permasalahan pembangunan negara, berkewajiban dalam melindungi kepentingan masyarakatnya. Peranan tersebut menurut Tjokroamidjojo (1980) berupa a) penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien, b) mendorong perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakatnya, dan c) mengarahkan perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Akan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini jauh berbeda, peran pemerintah berkurang dengan adanya semangat demokrasi, sementara itu peran masyarakat menjadi dominan. Hal ini terlihat dengan adanya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), dimana masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam menuangkan semua ekspresinya dan terlibat secara penuh dalam proses pembangunan baik dalam

tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana, maupun dalam tahap monitoring dan evaluasi rencana. Terlepas dari itu semua, pemerintah merupakan pemegang amanat penting dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggaraan negara yang baik bagi rakyatnya melalui pemerataan pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan suatu konsep yang saling terkait antara *stakeholder-stakeholder* yang ada didalamnya untuk membentuk kebijakan-kebijakan pembangunan strategis, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan.

Perencanaan itu sendiri, merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang mengandung beberapa pengertian antara lain:

a) Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang terdiri dari keputusan atau pilihan alternatif untuk menggunakan sumber daya yang ada secara terus-menerus, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.
b) Menurut Tjokroamidjojo (1980) perencanaan adalah proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
c) Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1, perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.

a) Manfaat Perencanaan

Adanya anggapan bahwa perencanaan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang, memberikan pengaruh besar pada manfaat dari perencanaan itu sendiri. Manfaat perencanaan tersebut, menurut Tjokroamidjojo (1980) ialah sebagai berikut:

a) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
b) Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan *(forecasting)* terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek pengembangan, juga mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sesedikit mungkin;
c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau memilih kombinasi cara yang terbaik;
d) Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urut-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya;
e) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perencanaan sebagai alat untuk mencapai masa depan harus memberikan kemudahan dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan, perencanaan dituntut agar mampu memperkirakan *(forecasting)* terhadap potensi-potensi, prospek pengembangan, dan resiko-resiko yang mungin dihadapi dalam waktu pelaksanaan tertentu dan berupaya untuk membatasi/ mengurangi dampak ketidakpastian dengan melakukan perkiraan (*forecasting)* tadi. Dengan adanya perkiraan *(forecasting)*, maka secara tidak langsung seorang perencana (*planner)* membutuhkan alternatif terbaik untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang muncul melalui pembentukan urut-urutan kegiatan atau pembentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan maupun mendesak/ tidaknya suatu tujuan dan sasaran pembangunan. Pembentukan urut-urutan atau skala prioritas ini pada akhirnya akan memudahkan seorang perencana *(planers)* dalam menentukan indikator keberhasilan rencana yang bertujuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana.

Selain itu, Bryan dan White (1987:23-28) mempertegas lagi bahwa perencanaan itu sangat penting dilaksanakan jika 1) sumber-sumber yang dimiliki terbatas dan disertai dengan kurangnya pengetahuan dalam penyerapan dan penerjemahan terhadap informasi dan 2) keinginan untuk mengendalikan masa depan yang diinginkan bersifat mendesak. Dari pendapat Bryan dan White tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan berfungsi untuk menjadikan sumber-sumber yang terbatas tersebut lebih efisien, efektif dan memberikan hasil yang optimal/ produktif dan secara tersirat menganjurkan untuk melakukan *scenario planning* terhadap masa depan sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai.

b) Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan dibagi menjadi tiga, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 4, 5 dan 8 diatur dengan jelas mengenai jangka waktu perencanaan pembangunan. Tiga ayat tersebut berbunyi:

a) Pasal 1 ayat 4 mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
b) Pasal 1 ayat 5 mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
c) Pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Nasional *(Rencana Pembangunan Jangka Pendek)* yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Munir (2002:41) menjelaskan lebih spesifik tentang perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dan mengatakan bahwa perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang ini merupakan cetak biru/ *blue print* pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang dan bertujuan sebagai pondasi bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah pembangunan yang membutuhkan jangka waktu lama dapat dipermudah pencapaiannya melalui bantuan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Walaupun perencanaan jangka menengah masih umum, akan tetapi sasaran-sasaran yang bersifat sektoral sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. Sebagai contohnya ialah pembentukan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA).
c) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun yang biasa disebut sebagai rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat. Hal ini dikarenakan rentang waktu pencapaiannya lebih singkat, sehingga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)*

Skenario seringkali dihubungkan dengan bidang seni atau teater, karena basis dari skenario itu sendiri memang berasal dari bidang seni maupun teater. Pada masa sekarang, skenario tidak hanya digunakan untuk pentas hiburan saja,

namun sudah melembaga dan digunakan untuk mengembangkan sektor bisnis *(privat)* dan sektor publik. Persamaan skenario pada bidang seni/ teater, sektor bisnis dan sektor publik terletak pada cara pencapaian tujuannya yang mengacu pada skenario/ *setting* yang ditetapkan sebelumnya, sementara perbedaannya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Skenario pada Bidang Seni/ Teater, Sektor Bisnis dan Sektor Publik

Substansi	Bidang Seni/ Teater	Sektor Bisnis/ *Privat*	Sektor Publik
Pembentukan skenario	Sutradara	Pengusaha/ Pemilik modal	Pemerintah
Tujuan	Hiburan	Keuntungan/ *Profit Oriented*	Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
Sumberdaya	Dengan mengeluarkan sejumlah uang	Kerjasama dengan pihak lain	Sudah ada dan hanya butuh pengelolaan
Waktu pencapaian target	Singkat	Medium/ sedang	Lama dan Panjang
Monitoring/ pengawasan	Langsung oleh pembuat skenario/ Sutradara	Jabatan/ bidang dengan fungsi pengawasan	Tim pengawas khusus

Sumber: Data diolah penulis

Dari tabel tersebut, terlihat dengan jelas perbedaan antara skenario pada bidang seni/ teater, sektor bisnis dan sektor publik bahwa a) Dalam pembentukan skenario bidang seni/teater dilakukan oleh sutradara, sedangkan sektor bisnis dilakukan oleh pengusaha/ pemilik modal dan sektor publik dilakukan pemerintah; b) Dari tujuannya, skenario bidang seni/teater bertujuan untuk hiburan, sedangkan sektor bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/ *profit oriented*. Sementara itu, sektor publik menggunakan skenario dengan tujuan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; c) Untuk mendapatkan sumberdaya, pada bidang seni/teater dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah uang, sektor bisnis/ *privat* dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain (sesama perusahaan/ dengan pemerintah), sedangkan sektor publik, sumberdaya sudah ada dan hanya butuh pengelolaan saja; d) Waktu pencapaian target, skenario bidang seni/teater pencapaiannya dalam waktu singkat, sedangkan skenario sektor bisnis pencapaiannya dalam waktu tidak terlalu singkat maupun tidak terlalu lama (medium/ sedang). Sementara itu, skenario sektor publik waktu pencapaiannya lama dan panjang; e) Dalam hal monitoring/ pengawasan, bidang seni/ teater dimonitoring/diawasi langsung oleh pembuat skenario (Sutradara), sektor bisnis oleh jabatan/ bidang dengan fungsi pengawasan, sedangkan sektor publik dimonitoring/diawasi oleh tim pengawas khusus.

Pengertian atau definisi tentang skenario itu sendiri tidak hanya memiliki satu istilah ataupun satu makna, akan tetapi memiliki banyak istilah dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif dari para ahli yang konsisten dalam bidang ini. Istilah dan makna yang berbeda ini menurut Chermack (2003) dibagi menjadi tiga, yaitu *scenario, scenario building dan scenario planning*. Perbedaan ketiga istilah ini dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 3. Perbedaan *Scenario, Scenario Building dan Scenario Planning*

Term*	Definition*
Scenario	*"A tool for ordering one's perceptions about alternative future environments in which one's decisions might be played out" (Schwartz, 1991)*
Scenario Buliding	*"The process of constructing alternate future of bisiness external environment"*

Scenario Planning	*"Scenario planning is inherently a learning process that challenges the comfortable conventional wisdoms of the organization by focusing attention on how future may be different from the present" (Thomas, 1994)*

Keterangan: Term*= Daftar istilah
Definition*= Daftar definisi

Sumber: Chermack, T.J. 2003. Thesis: *A Theory of Scenario Planning.* US: Umi Microform.

Tabel 3 di atas memberikan pemahaman bahwa *scenario* hanyalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menghimpun dan mengkomunikasikan pandangan/ persepsi seseorang terhadap pilihan-pilihan yang mungkin terjadi dimasa depan sesuai dengan keputusan yang diambil. *Scenario building* lebih mengarah pada identifikasi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dalam menjalankan sektor bisnis yang dicapai melalui proses pengkonstruksian alternatif/ pilihan-pilihan masa depan. Sedangkan *scenario planning* ialah proses pembelajaran yang bersifat menantang kebijaksanaan organisasi dengan memfokuskan perhatiannya terhadap kemungkinan masa depan yang berbeda dari keadaan/ situasi saat ini. Ketiga konsep ini membentuk sebuah ikatan yang erat satu dengan yang lainnya dan berkontribusi besar dalam analisa penelitian penulis.

Scenario sebagai alat untuk menghimpun dan mengkomunikasikan pandangan/ persepsi masyarakat, pemerintah, swasta dan *stakeholder* terkait dalam merumuskan kondisi dan alternatif kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal dimasa depan. Kemudian *Scenario building* sebagai proses pembuatan strategi alternatif untuk masa depan yang bermodalkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan identifikasi atas lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal. Sementara itu, *scenario planning*

berfungsi sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat, pemerintah, swasta dan *stakeholder* terkait untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kondisi maupun kemungkinan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal dimasa depan yang tentu berbeda dari keadaan/ situasi saat ini.

Dari tiga konsep skenario yang ada, *scenario planning* merupakan satu-satunya konsep yang populer. Hal ini dikarenakan *scenario planning* memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam mengidentifikasi ketidakpastian masa depan dan berguna dalam menerapkan alternatif-alternatif rencana strategis suatu organisasi. Selain itu, *scenario planning* tidak hanya memberikan gambaran atas apa yang diinginkan terjadi, apa yang diperkirakan terjadi dan apa yang mungkin terjadi namun juga apa yang tidak diinginkan terjadi. Menurut Ringland (1998), *scenario planning* adalah bagian dari perencanaan strategis yang berhubungan dengan alat dan teknologi untuk mengelola suatu ketidakpastian di masa depan, sehingga menjadikan *scenario planning* berbeda atau bukan merupakan *forecasting (peramalan).*

Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003:21) juga mengatakan hal yang sama, bahwa *scenario planning* bukanlah suatu ramalan/perkiraan *(a forecasting)* maupun sebuah visi, akan tetapi masa depan yang diinginkan. Perbedaan antara *Scenario planning, visi* dan *forecasting* sebagai berikut:

Tabel 4. Perbedaan antara *Scenario Planning, Forecasting* dan *Visi*

Scenario Planning	*Forecasting*	*Visi*
Kemungkinan masa depan yang berjangka	Kemungkinan masa depan	Masa depan yang diinginkan
Berbasis ketidakpastian	Berdasarkan hubungan tertentu	Berdasarkan nilai
Ilustrasi terhadap resiko	Menyembunyikan resiko	Menyembunyikan resiko

Kualitatif atau kuantitatif	Kuantitatif	Biasanya kualitatif
Diperlukan untuk mengetahui apa yang diputuskan	Diperlukan untuk berani memutuskan	Diperlukan untuk menghimpun kekuatan dalam memutuskan *(energizing)*
Jarang digunakan	Digunakan sehari-hari	Sering digunakan *(relatif)*
Kuat dalam perspektif jangka panjang dan menengah dengan ketidakpastian yang tinggi	Kuat dalam perspektif jangka pendek dengan ketidakpastian yang rendah	Sebagai pemicu dalam perubahan fungsi secara sukarela

Sumber: Lindgren, M dan H, Bandhold. 2003. *Scenario planning: The Link between future and strategy*. New York: Palgrave Macmillan. (hal 24)

Berdasarkan tabel 4 di atas, terdapat kelemahan dari *scenario planning* yaitu jarang digunakan. Mats Lindgren dan Hans Bandhold memberikan penjelasan terhadap permasalahan ini, setidaknya ada empat alasan mengapa *scenario planning* jarang dipilih untuk digunakan lebih banyak lagi. Berikut penulis paparkan beberapa inti dari empat alasan mengapa *scenario planning* jarang digunakan:

a) Ketidakpastian pada kesimpulan *(uncertainty in conclusions).* Perencanaan skenario *(scenario planning)* tidak memberikan satu-pun jawaban pasti tentang masa depan, sehingga tidak memberikan keamanan/jaminan yang baik dalam pengambilan keputusan.

b) Berlawanan dengan prinsip kesederhanaan dalam *managerial* "pengelolaan masalah yang benar-benar sederhana" *(counterintuitive to managerial simplicity).* Perencanaan skenario *(scenario planning)* tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam pengelolaan suatu masalah. Prinsip kesederhanaan (perencanaan tradisional) mengatakan

bahwa terdapat satu jawaban yang pasti (benar) untuk setiap pertanyaan/ permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian dan setiap bagian dapat diselesaikan secara terpisah. Ini berbeda dengan prinsip yang ada pada perencanaan skenario *(scenario planning)* yang lebih bersifat sistemik/ holistik (menyeluruh) dalam mengelola setiap permasalahan.

c) Metode dan jawaban yang lemah *(soft method and soft answer).* Teknik skenario biasanya bersifat kualitatif, berdasarkan pada penalaran dan pengenalan pola yang intuitif atau dengan kata lain teknik skenario melalui tahap-tahap analisis, namun dalam praktiknya metode dan jawaban atas suatu permasalahan sering menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan (mudah dipengaruhi/ cepat berubah terhadap kondisi lingkungan), sehingga terkesan lemah.

d) Memakan waktu *(time consuming).* Alasan mengapa pimpinan tertinggi jarang sekali memilih atau mengaplikasikan *scenario planning* kedalam proyek-proyeknya dikarenakan metode ini membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Hal ini dibuktikan dalam sebuah seminar atau *workshop*, peserta membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan secara keseluruhan dengan berbasiskan pada metode *scenario planning*.

Cara berfikir *scenario planning* ialah menjadikan pengalaman masa lalu (kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan) sebagai bahan evaluasi terhadap capaian di masa sekarang dan menjadi pembelajaran berharga untuk

mengembangkan masa depan. Masa sekarang merupakan tumpuan (identifikasi kekuatan dan kelemahan) untuk merumuskan kemungkinan masa depan (menangkap peluang dan mengatasi ancaman) dengan berbekal pada pengalaman masa lalu. Masa depan adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang perencana dengan memadukan antara umpan balik dan umpan maju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

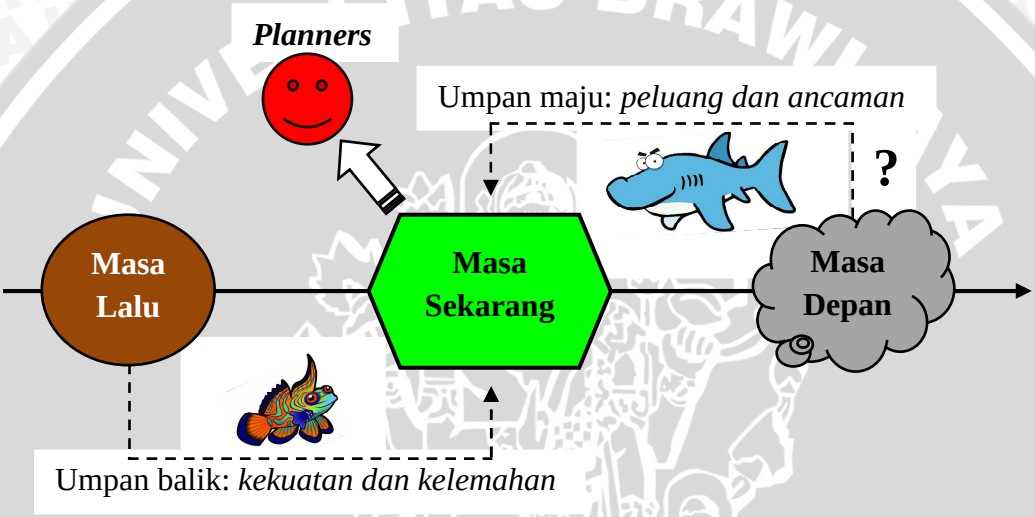

Gambar 1. Cara Berfikir *Scenario Planning*
Sumber: Adaptasi dari Lindgren, M dan H, Bandhold. 2003. *Scenario planning: The Link between future and strategy*. New York: Palgrave Macmillan. (hal 22)

Keterangan: Coklat/ tua= masa lalu memberikan umpan balik berupa kekuatan dan kelemahan bagi Hijau/ subur = masa sekarang/ tempat seorang *planners* melakukan perencanaan skenario melalui penghimpunan atas data-data penting dari masa lalu (coklat) yang ditandai dengan ikan kecil *(mandarin fish)*/ capaian yang belum maksimal dan memberikan umpan maju berupa ikan hiu/ keinginan untuk menangkap peluang yang maksimal dan mengurangi setiap ancaman yang mungkin terjadi di Abu-abu/ masa depan/ dengan ketidakpastian tinggi.

Dalam *scenario planning* disebutkan juga teknik skenario yang berguna dalam mewujudkan berbagai macam tujuan, seperti tujuan pengembangan bisnis, industri, teknologi maupun dalam pengembangan produk lokal khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Namun, tujuan-tujuan tersebut masih bersifat eksplisit atau merupakan aplikasi dari fungsi *scenario planning*. Fungsi *scenario*

planning ialah sebagai inspirasi dalam mengembangkan pemikiran/ ide/ gagasan/ kebijakan dan sebagai penyaring *(filters)* atas resiko yang mungkin terjadi. Adapun tujuan dan fokus skenario yang dimaksud, sesuai dengan gambar yang ada dibawah ini:

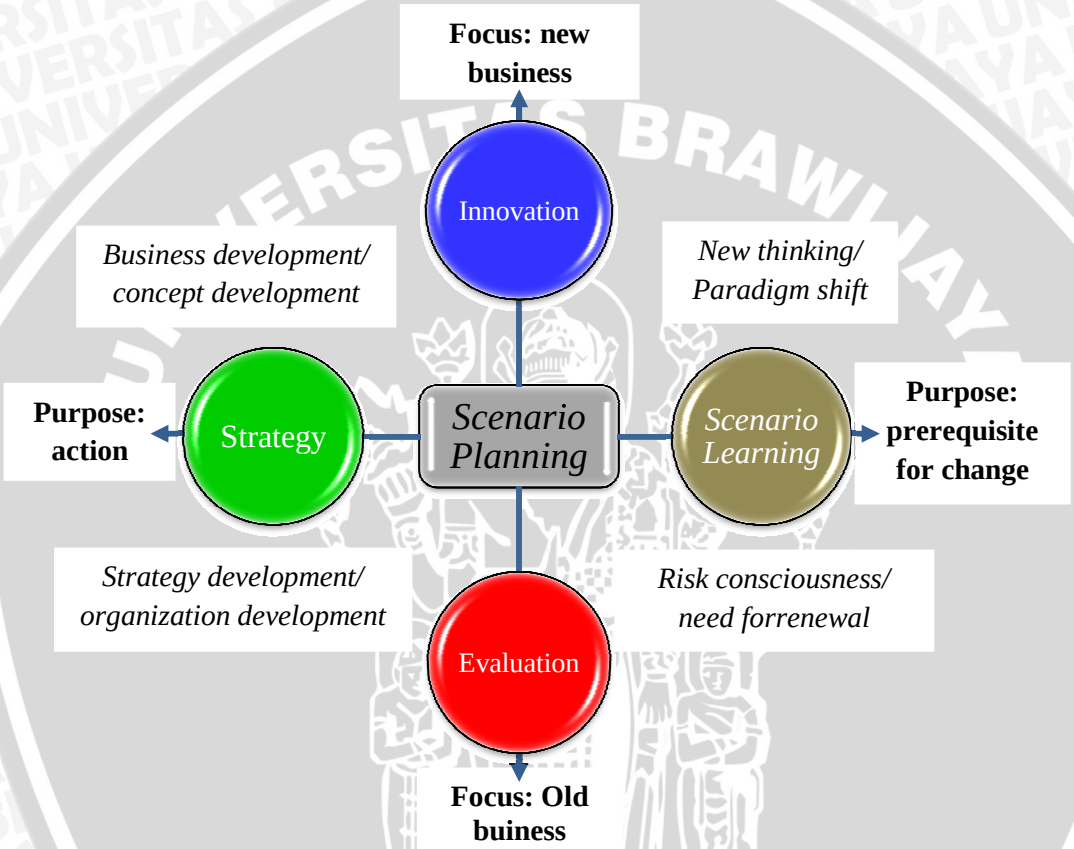

Gambar 2. Tujuan dan Fokus *Scenario Planning*
Sumber: Lindgren, M dan H, Bandhold. 2003. *Scenario planning: The Link between future and strategy*. New York: Palgrave Macmillan. (hal 25)

Untuk menghasilkan skenario yang baik, maka dibutuhkan beberapa syarat atau kriteria penting yang akan menjadi landasan dalam pembuatan skenario. Kriteria tersebut menurut Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003:31), ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan dalam pembuatan skenario yang baik, yaitu: *a) Decision-making power; b) Plausibility; c) Alternatives; d) Consistency; e) Differentiation; f) Memorability; g) Challenge*. Dari pendapat tersebut dapat

dipahami beberapa kriteria yang baik dalam membentuk skenario, berikut penjelasannya:

a) Kekuasaan dalam membuat keputusan. Setiap skenario yang telah ditetapkan sebelumnya, harus memberikan wawasan yang luas untuk mempertimbangkan jawaban atas setiap permasalahan yang timbul. Kekuasaan diperlukan untuk mempertegas, memperjelas dan membangun sebuah konsistensi dari jawaban semua permasalahan dalam bentuk keputusan-keputusan. Untuk itulah, setiap organisasi membutuhkan suatu kekuasaan yang telah dilengkapi dengan tujuan keputusan.

b) Masuk akal. Skenario yang dikembangkan harus berada dalam batas-batas kejadian yang mungkin terjadi dimasa depan dan kejadian-kejadian tersebut harus bersifat realistis (diterima akal sehat atau berlandaskan pada bukti dilapangan dan mengacu pada data-data akurat).

c) Alternatif. Secara umum, semua kemungkinan skenario memiliki kesamaan, akan tetapi karena kemungkinan skenario memiliki batas waktu tertentu maka rentan terhadap ketidakpastian. Ketidakpastian ini akan ditutupi oleh adanya *set skenario* (skenario yang telah ditetapkan sebelumnya) atau dengan kata lain dari empat kemungkinan skenario, hanya ada satu kemungkinan skenario yang paling realistis untuk dijadikan alternatif dalam memecahkan masalah.

d) Konsistensi. Setiap skenario harus memiliki konsistensi internal dalam menjalankan kemungkinan skenario yang ada. Tanpa konsistensi internal pelakunya, maka skenario tidak akan pernah dipercaya *publik*.

e) Diferensiasi. Skenario harus berbeda secara struktural atau berbeda secara kualitatif. Perbedaan ini tidak hanya pada makna dan garis besar/ istilah besarnya saja, namun harus mengembangkan perbedaan lainnya diluar variasi dasar skenario (makna, garis besar/ istilah).

f) Diingat. Skenario yang baik adalah skenario yang mudah diingat dan dibedakan. Untuk itulah, maka perlu adanya batasan terhadap jumlah skenario yang akan diambil.

g) Menantang. Skenario menantang kebijaksanaan organisasi tentang masa depan, yang akan menempatkan skenario pada posisi sebenarnya. Organisasi ditantang untuk membuat dan memberikan kebijaksanaan yang dapat diterima dimasa depan.

Skenario yang baik tidak hanya membutuhkan tujuh criteria tersebut diatas, namun juga membutuhkan langkah-langkah untuk membangun *scenario planning* itu sendiri. Menurut Schwartz (1996) terdapat delapan langkah untuk membangun *skenario planning*, yaitu:

a) *Identify focal issue (focal concern) or Decision* merupakan langkah awal yang digunakan untuk mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang dapat mempengaruhi keputusan maupun cara berfikir/ cara pandang skenario atas isu atau masalah tersebut dengan memperhatikan beberapa kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya, penentuan jangka waktu pelaksanaan dan relevansinya dilapangan.
b) *Identify key forces in the local environment* yaitu proses identifikasi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kesuksesan maupun kegagalan dari isu utama atau masalah utama (seperti krisis

sumberdaya perikanan dan kelautan, pencemaran lingkungan, konflik antar nelayan, ketersediaan sarana-prasarana dan kelembagaan serta isu/ masalah utama lainnya). Langkah ini menuntut pengambil kebijakan *(policy maker)* untuk bisa membuat pilihan-pilihan yang dianggap mampu menjadi faktor pendorong kesuksesan maupun sebagai faktor penyebab terjadinya kegagalan serta pertimbangan atas konsekuensi/ resiko dari keputusan yang dibuat nantinya.

c) *Driving Forces (Change drivers)* merupakan langkah lanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dapat mempengaruhi dan mendorong perubahan pada *key forces*. Dengan kata lain, langkah ini berfungsi sebagai penggerak yang akan membawa skenario pada tujuan akhirnya melalui penentuan faktor-faktor pengungkit yang akan memberikan hasil positif *(signifikan)* dan faktor-faktor yang mungkin memberikan hasil yang negatif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Terdapat lima *driving forces* yang seringkali teridentifikasi dan dikenal banyak orang, yaitu faktor politik *(politik)*, faktor ekonomi *(economy)*, faktor sosial *(social)*, faktor teknologi *(technology)*, dan faktor lingkungan *(environment)* atau lebih dikenal dengan *PEST Plus.*

d) *Rank by importance of uncertainty* merupakan langkah yang ditempuh untuk mengidentifikasi isu utama/ masalah utama yang mempengaruhi tingkat kesuksesan, kegagalan maupun tingkat ketidakpastian berbagai hal yang erat kaitannya dengan faktor politik *(politik)*, faktor ekonomi *(economy)*, faktor sosial *(social)*, faktor teknologi *(technology)*, dan faktor lingkungan *(environment)* melalui perangkingan atau pemberian peringkat terhadap faktor yang terpenting dan faktor yang tidak penting.

e) *Selecting the scenario logic* yaitu langkah penyusunan dan penetapan logika skenario untuk menghasilkan alternatif-alternatif/ pilihan-pilihan bersifat logis dan relevan yang biasanya dilakukan melalui penelitian kualitatif (*Focus Group Discussion*/ *FGD* maupun wawancara mendalam).

f) *Fleshing out the scenarios* merupakan tahap penguatan skenario melalui penambahan ide, gagasan/ pemikiran, data sekunder beserta perkembangannya dan data lainnya untuk memperjelas data primer yang didapat sebelumnya, sehingga akan diketahui skenario yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada.

g) *Implications* merupakan langkah penting yang berfungsi untuk melihat ketepatan implikasi/ pengaruh suatu kebijakan atau keputusan dalam bangun skenario yang telah dibuat, tidak hanya pada satu atau dua skenario saja namun pada skenario secara keseluruhan.

h) *Selecting the leading indicators or signposts* yaitu langkah terakhir yang bertujuan menetapkan dan memilih indikator yang sesuai untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi rencana yang ada dalam skenario.

Sementara itu, menurut Lindgren dan Bandhold (2003:38) mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun skenario ialah dengan TAIDA *(Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting)*, sebagai berikut:

> *a) Tracking: we trace changes and signs of threats and opportunities; b) Analysing: we analyse consequences and generate scenarios; c) Imaging: we identify possibilities and generate visions of what is desired; d) Deciding: we weigh up the information, identify choices and strategies; e) Acting: we set up short-term goals, take the first steps and follow up our actions.* Menurut Lindgren dan Bandhold, a) *Tracking* merupakan tahap penelusuran atas perubahan dan tanda-tanda keberadaan ancaman dan peluang; b) *Analysing* merupakan tahap analisis terhadap konsekuensi yang munculnya akibat adanya skenario; c) *Imaging* merupakan tahap identifikasi berbagai kemungkinan dan membangun visi atas sesuatu yang kita inginkan; d) *Deciding* merupakan tahap memutuskan/ pertimbangan atas informasi, identifikasi terhadap pilihan-pilihan dan strategi; e) *Acting* merupakan tahap pengaturan tujuan untuk jangka pendek dengan mengambil langkah pertama dan seterusnya sebagai sebuah tindakan.

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam melakukan perencanaan skenario terdapat beberapa langkah penting yang biasa disingkat dengan TAIDA *(Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting)*, sebagai berikut:

a) *Tracking* (Pelacakan). Merupakan tahapan awal dari sebuah perencanaan skenario. Dalam tahap ini dilakukan penelusuran atas suatu perubahan yang terjadi dan tanda-tanda keberadaan ancaman/ tantangan maupun peluang serta mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki atau melakukan SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*. Bryson (2007:147) mengatakan bahwa:

> SWOT merupakan suatu teknik untuk memfokuskan kepada pertanyaan seperti (1) Peluang eksternal terpenting apakah yang kita miliki? (2) Ancaman eksternal terpenting apakah yang kita hadapi? (3) Apa kekuatan internal terpenting kita? dan (4) Apa kelemahan internal terpenting kita?

Dengan demikian, tahapan awal ini menjadi tahap identifikasi dan berusaha mempelajari perubahan dari masa lalu berupa kekuatan dan kelemahan untuk menghadapi masa sekarang dan melakukan skenario terhadap masa depan dengan menangkap peluang dan mengatasi ancaman/ tantangan.

b) *Analyzing* (Menganalisis). Tahapan ini dilakukan melalui analisis terhadap konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan peluang dan ancaman/ tantangan atau dengan kata lain, tahap *analyzing* berfungsi sebagai media dalam menganalisis data berupa peluang dan ancaman/ tantangan yang diperoleh pada tahap *tracking* dengan bermodalkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi dimasa sekarang dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa depan. Pada tahap ini, dikembangkan juga logika skenario sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketidakpastian masa depan. Dalam tahap ini dilakukan pula pertimbangan atas lima faktor penting yaitu faktor politik *(politic)*, faktor ekonomi *(economy)*, faktor sosial *(social)*, faktor teknologi *(technology)*, dan faktor lingkungan *(environment)* atau lebih dikenal dengan *PEST's Plus.*

c) *Imaging* (Penggambaran). Merupakan tahap untuk membuat suatu gambaran mengenai masa depan yang diinginkan dengan menciptakan suatu visi. Visi merupakan suatu gagasan yang positif mengenai masa depan yang diinginkan. Dalam tahapan ini penggambaran yang

diciptakan melalui visi bukanlah tujuan jangka pendek, akan tetapi tujuan yang bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapainya. Penciptaan visi akan memberikan suatu deskripsi yang jelas/ gambaran yang nyata mengenai masa depan sesuai dengan skenario yang akan dilakukan. Selain itu, tahap *imaging* juga merupakan tahap identifikasi terhadap suatu kemungkinan dan dampak yang terjadi ketika skenario itu muncul serta membangun visi atas sesuatu yang diinginkan *(vision of what desired).*

d) *Deciding* (Memutuskan). Merupakan tahap dimana segala sesuatu diputuskan secara bersama-sama. Masa depan dapat dilacak, dianalisis dan dilakukan suatu tindakan untuk mencapai visi, serta mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari ancaman di masa depan. Pada tahapan ini segala tindakan yang berhubungan dengan perencanaan skenario diputuskan bersama-sama untuk melihat peluang dan menghindari ancaman. Tahap *deciding* juga berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa saja yang akan menjadi sasarannya dan dengan menggunakan strategi seperti apa? atau dengan kata lain tahap *deciding* berhubungan dengan identifikasi atas beberapa pilihan dan strategi.

e) *Acting* (bertindak). Merupakan tahap akhir, dimana strategi yang telah diputuskan *(deciding)* diintegrasikan ke dalam suatu tindakan yang akan dibuat perencanaan skenarionya. Hal ini berarti bahwa *"acting"* adalah tahap implementasi strategi yang telah mengintegrasikan

skenario sekaligus tahap pembelajaran oganisasi untuk terus berusaha beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

Dari beberapa pendapat tentang skenario dan langkah-langkah penyusunannya, dapat dipahami bahwa proses perencanaan skenario merupakan bagian *scenario learning* yang selalu dimulai dengan mengenali *(focal concern)* atau kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman/ tantangan). Kondisi-kondisi ini kemudian diidentifikasikan faktor-faktor kuncinya *(key forces)* sebagai pendorong sebuah perubahan yang selanjutnya akan digunakan untuk membangun logika skenario. Logika skenario yang terbangun memerlukan deskripsi naratif berupa pembentukan visi untuk diputuskan secara bersama-sama dan dilakukan pembentukan, pemilihan serta memutuskan strategi yang akan digunakan. Keputusan terhadap strategi, kemudian diintegrasikan ke dalam suatu tindakan untuk dibuat perencanaan skenarionya.

C. Pembangunan Bebasis Sumberdaya Ekonomi Lokal (LERD)

Secara sederhana kata LERD atau *Local Economic Resources Development* sama dengan PSEL (Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal), namun berbeda dengan LED *(Local Economic Development)* atau dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal). Letak perbedaan keduanya ialah pada tingkat kelokalannya atas potensi yang ada atau dengan kata lain bahwa LERD/PSEL merupakan konsep pengembangan dalam bidang ekonomi yang modal utamanya berasal dari potensi lokal asli yang dimiliki suatu daerah dan dikembangkan di daerah yang bersangkutan, sedangkan

LED/PEL merupakan konsep pengembangan dalam bidang ekonomi yang modal utamanya bukan berasal dari potensi lokal asli yang dimiliki daerah tersebut, namun dari hasil adopsi atas potensi daerah lain yang dikembangkan di daerah tersebut dikarenakan memiliki beberapa kesamaan dan dengan pertimbangan tertentu.

Terlepas dari perbedaan tersebut, dalam perkembangannya LERD merupakan turunan dari PEL sehingga hubungan keduanya sangat erat. Menurut (Said, 2012 dalam *Program Diklat Non Gelar Pusbindiklatren Bappenas 2012*) dijelaskan bahwa ada dua hal yang menyebabkan LERD/ PSEL muncul sebagai konsep baru setelah LED/ PEL, yaitu:

> 1) pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (LERD) secara nasional, merupakan urgensi/ kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh daerah maju maupun yang relatif tertinggal, 2) sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan otonomi daerah, sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat.

Pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa akibat keterbatasan pemerintah dalam hal sumberdaya aparatur dan kapasitasnya, maka dibentuklah sistem desentralisasi pemerintahan yang ditandai dengan adanya hak otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya-sumberdaya yang menjadi sumber pembangunan negara dapat dikelola dengan baik melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau besar maupun kecil, kaya akan keanekaragaman potensi sumberdaya alam, budaya, ekonomi, institusi lokal, dan lain-lain. Sehingga butuh konsep tersendiri, dimana setiap potensi berkembang pada tempatnya masing-masing sebagai

identitas sebuah keberagaman. Konsep tersebut ialah *Local Economic Resoures Development* (LERD), sedangkan konsep *Local Economic Development* (LED) tidak menjelaskan adanya keterbatasan berupa kapasitas dan sumberdaya yang dihadapi oleh pemerintah pusat.

Dari dua penyebab munculnya LERD tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan yang sifatnya mengikat terhadap urusan pemerintahan di tingkat daerah karena adanya desentralisasi yang ditandai dengan adanya hak otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk sumberdaya alam, budaya, ekonomi, institusi lokal, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan daerah tersebut atau dengan kata lain daerah memiliki hak paten atas sumberdaya yang dimiliki sehingga sedikit kemungkinan bagi pemerintah pusat ataupun daerah lainnya untuk berusaha mengembangkan sumberdaya tersebut, kecuali ada penandatanganan perjanjian atau kerjasama sebelumnya. Intinya, era-otonomi menuntut setiap daerah untuk saling bersaing dengan memunculkan produk lokal/ potensi lokal sebagai kekuatan untuk mendapatkan pemasukan bagi daerahnya, sehingga daerah yang tidak bisa memunculkan potensi lokalnya tidak akan mendapatkan tambahan pemasukan bagi daerahnya. Hal ini berarti bahwa peranan potensi lokal sangat vital dan kecil kemungkinan untuk dikembangkan di daerah lainnya dengan teknik/ cara-cara dan tingkat keberhasilan yang sama.

1. Pengertian LERD

Secara sederhana makna LERD atau *Local Economic Resources Development* atau lebih dikenal dengan PSEL (Pengembangan Sumberdaya

Ekonomi Lokal) menurut Blakely and Bradshaw (1994) ialah Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal merupakan suatu proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau dengan pendapat yang berbeda, Blakely, (1990) mengungkapkan bahwa:

> "konsep pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis potensi lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam *marketplace* dan lebih menempatkan kelompok masyarakat dibanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenaga kerja"

Sumberdaya dalam hal ini meliputi sumberdaya alam *(natural resources)*, sumberdaya manusia *(human resources)*. Sumberdaya alam *(natural resources)* yang merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang penggunaan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan ekologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu (FAO, 1995). Sumberdaya manusia/SDM yang dimaksud meliputi kewirausahaan, tenaga kerja dan sumberdaya institusi (IHS, 2006).

2. Tingkat Kepentingan dan Fokus LERD

Tjokrowinoto (1996) mengidentifikasi ada beberapa "rasional dasar/ logika dasar" tentang perlunya pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal, yaitu:

> a) sumber pembangunan yang berasal dari pusat, tidak akan dapat mencukupi untuk menjangkau sebagian besar masyarakat, terutama pada lapisan sosial bawah; b) program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat yang bertumpu pada manjemen birokrasi, sukar untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; c) pengelolaan sumberdaya lokal lebih tanggap pada variasi setempat yang diwarnai oleh ekologi alami, ekologi sosial dan preferensi individual yang sangat bervariasi; d) memungkinkan masyarakat memobilisasi berbagai sumber

yang kurang termanfaatkan, sampai kepada keterampilan, komunkasi dan sumber dana; dan terakhir e) pengelolaan sumberdaya lokal menempatkan tanggung jawab pembangunan pada masyarakat setempat.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal dikarenakan a) pemerintah pusat tidak akan dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan masyarakat pada lapisan menengah kebawah/ sosial rendah dengan sumberdaya yang dimiliki saat ini, b) seringkali program-program maupun proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat; c) pengelolaan sumberdaya lokal lebih sensitif dalam memahami kearifan lokal baik berupa ekologi alam, ekologi sosial dan keahlian individu yang beragam; d) memungkinkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang selama ini kurang dimanfaatkan; e) sumberdaya lokal akan menempatkan masyarakat sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, sehingga masyarakat lebih memaksimalkan partisipasinya baik dalam hal pengambilan keputusan, tindakan, dan penilaian terhadap resiko yang menyangkut proses pembangunan di daerahnya karena merasa memiliki dan bertanggung jawab sepenuhnya atas sumberdaya tersebut.

Fokus dari pembangunan sumberdaya ekonomi lokal (LERD) ialah peningkatan dan optimalisasi kandungan lokal yang melibatkan *stakeholders* dalam suatu bentuk kerjasama/ kemitraan, baik yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan pertumbuhan, ketahanan dan kemandirian dalam bidang ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan melalui pembentukan dan

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dapat mengurangi tingkat disparitas/ kesenjangan sosial antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah.

Fenomena tentang kemiskinan, berkurangnya kesempatan kerja, memburuknya kualitas lingkungan hidup, bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan maupun dalam proses pembangunan merupakan tantangan besar yang secara tidak langsung harus dijawab oleh pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal atau dengan kata lain pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal (LERD), bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. Payung hukum yang mendukung dan mendorong terbentuknya konsep pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal ialah pasal 14 ayat 2 UU 32 tahun 2004 mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota di bidang ekonomi yang bersifat pilihan baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata dan lain-lain, urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Prinsip LERD

Adanya distorsi berupa “kesalahan” di dalam menerapkan model-model pembangunan yang ada selama ini menyebabkan bergesernya paradigma pembangunan yang menurut Rustiadi, Saefulhakim, dkk (2011:126-127) pergeseran tersebut ditandai dengan kecenderungan pendekatan dari cenderung

melihat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan lokal. Dapat dipahami bahwa perubahan paradigma tersebut ingin menempatkan pendekatan-pendekatan bersifat regional dan lokal sebagai tumpuan pembangunan yang berada di *"level bawah"*, tanpa melupakan pembangunan pada *"level atas"*. Hal ini tentu akan berdampak pula pada prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang menurut Munir (2002:208-209) terdapat enam prinsip dasar, yaitu:

> a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat pada tingkat lokal oleh warga masyarakat yang diakui perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; b) Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada di dalam masyarakat setempat; c) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi, dan karenanya mengakui makna pilihan nilai individual dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis; d) Didalam mencapai tujuan yang ditentukan, menggunakan teknik *social learning* dimana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatori dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing; e) Budaya kelembagannya ditandai oleh adanya organisasi yang otonom dan mandiri yang saling berinteraksi memberikan umpan balik untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi; dan f) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pendapat ini dapat diartikan bahwa keputusan dan inisiatif untuk kepentingan masyarakat setempat dibentuk pada tingkat lokal oleh warga masyarakat yang diakui memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengelola aset-aset lokal/ sumberdaya lokal yang dimiliki melalui toleransi dan pengakuan terhadap *(nilai-nilai individual)* yang akan memberikan perbedaan dalam

pengambilan keputusan nantinya. Selain itu pula, dalam upaya pencapaian tujuan, setiap individu berinteraksi satu dengan lainnya dalam sebuah musyawarah yang mengacu pada pemikiran kritis masing-masing individu tersebut sehingga terbentuk organisasi otonom dan mandiri yang saling berinteraksi secara partisipatif (dua arah/ umpan-balik) dalam mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi hingga terjalin hubungan/ jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal, baik dalam bentuk kelompok penerima manfaat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah daerah.

D. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sub-sektor kelautan mencakup kegiatan-kegiatan pemanfaatan, penambangan, angkutan dan jasa-jasa lainnya yang berada di wilayah pesisir maupun di lautan, termasuk kegiatan industri kemaritiman (Kusumastanto, 2002). Akan tetapi, dari sudut pandang sektor perikanan dan kelautan, sub-sektor kelautan hanya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan biologis dasar termasuk terumbu karang, bakau dan biologis dasar lainnya yang mendukung aktivitas perikanan (Nadeak, 2009:107). Sehingga secara umum sektor kelautan dan perikanan mencakup kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang berhubungan dengan perikanan. Dengan asumsi tersebut, maka secara umum sektor kelautan dan perikanan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sub-sektor perikanan yang berintegrasi dengan sub-sektor kelautan dan kegiatan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan lingkungannya. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang perikanan yang diubah dalam UU No. 45/2009 menyebutkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan maupun lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi sampai dengan kegiatan pemasaran merupakan lingkup yang ada dalam bisnis perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama ini menjadi sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dengan demikian, maka sektor kelautan dan perikanan bukanlah menjadi penentu utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan hampir dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Sehingga sangat rasional jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan tumpuan dalam peningkatan perekonomian nasional dan daerah.

> "Untuk itulah dibutuhkan upaya percepatan dan ide kreatif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengkoordinasian lintas sektor maupun dukungan *stakeholders* yang menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting dalam penentuan kebijakan ekonomi, politik dan sosial" (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

Peranan sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam pembangunan nasional ialah sebagai pendorong muncul dan tumbuhnya industri maupun usaha-usaha kecil melalui penyediaan bahan baku, peningkatan ekspor hasil produk kelautan dan perikanan (berpengaruh pada meningkatnya devisa/ pendapatan negara), peningkatan kesempatan kerja, peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, petani ikan, pedagang ikan serta dapat menunjang kegiatan

pembangunan pada sektor tersebut dan sektor lainnya maupun pembangunan pada lingkup nasional. Untuk itulah, maka pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan dalam usaha sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Menurut Latief, Fitrianto dan Suroso, (2010:25), masalah internal dan ekternal dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ialah:

> "Masalah internal berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemanfaatan pulau-pulau kecil, konservasi laut, lemahnya penegakan hukum (*illegal fishing, over-fishing,* penggunan *trawl* atau pukat harimau, dll) maupun pengelolaan potensi kelautan non-konvensional. Sedangkan masalah eksternalnya ditunjukkan dengan masih rendahnya kesadaran negara/ bangsa tentang peranan sumberdaya kelautan yang sangat strategis bagi kemakmuran bangsa, yang tercermin dari belum kondusifnya kebijakan moneter, fiskal, dan investasi, tata ruang dan pengendalian pencemaran, kepastian dan penegakan hukum dalam berusaha".

Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah membentuk Undang-undang dan Peraturan-peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1) UU No. 5/1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

Menurut Undang-undang ini, hak atas suatu tanah tidak meliputi pemilikan *kekayaan alam* yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya (Harsono, 2005:19). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa pengambilan kekayaan alam yang

terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Pada dasarnya kekayaan sumberdaya alam di wilayah pesisir khususnya kelautan dan perikanan juga merupakan bagian dari kekayaan alam yang di maksud dalam undang-undang tersebut. Namun, secara tersirat Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa, membutuhkan pengaturan tersendiri dan Undang-undang inilah yang menjadi pelopor adanya pengaturan yang dimaksud.

2) UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Undang-undang ini juga di sebut sebagai undang-undang tentang ratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dalam undang-undang ini ditetapkan konsep Wawasan Nusantara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia. Menurut Dahuri, dkk (2001:143) mengatakan bahwa:

> "Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta lautan yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sesuai dengan konsep wawasan nusantara tersebut, laut wilayah Indonesia adalah laut territorial selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur dari garis pangkal *(base line)* yang menghubungkan titik-titik pangkal terluar *(base point)* dari pulau terluar di wilayah kepulauan Indonesia".

3) UU No. 31/2004 tentang Perikanan yang direvisi menjadi UU No. 45/2009 tentang Perikanan.

Undang-undang ini menjelaskan segala hal tentang perikanan, mulai dari definisi, sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, usaha penangkapan, usaha pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran, nelayan, pembudidaya, perizinan, batas perairan, sarana-prasarana perikanan dan beberapa aspek lainnya

seperti kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PK).

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum memaksimalkan integrasi dengan kegiatan pembangunan antar sektor maupun antar daerah. Ini terlihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut khususnya tentang kelautan dan perikanan yang selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan tanpa memperhatikan kelestarian/ daya dukung sumberdaya yang ada, dan belum mampu untuk mengurangi faktor-faktor penyebab rusaknya lingkungan. Untuk itulah perlu di perhatikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK yang mengatakan dengan tegas bahwa "norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya". Dan dalam Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

> "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a) keberlanjutan; b) konsistensi; c) keterpaduan; d) kepastian hukum; e) kemitraan; f) pemerataan; g) peran serta masyarakat; h) keterbukaan; i) desentralisasi; j) akuntabilitas; dan k) keadilan".

Untuk bisa melakukan setiap asas tersebut maka dibutuhkan konsistensi dan keterpaduan dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir (yang didalamnya terdapat pengelolaan kelautan dan perikanan) serta memerlukan

pengawasan dan evaluasi yang baik oleh pemerintah, masyarakat maupun *stakeholders*.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan dan bertanggung jawab terhadap perusakan/ pencemaran laut. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dalam Pasal 15 menetapkan bahwa "setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya". Pemanfaatan secara berlebihan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, akan mengakibatkan rusaknya ekosistem di wilayah laut maupun pesisir.

Selain undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan tersebut dengan beberapa peraturan, seperti: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032, dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penentuan dan penggunaan metode penelitian tertentu merupakan suatu langkah penting dalam penyusunan penelitian ilmiah, karena dapat memberikan arah terhadap pemecahan masalah yang diteliti dan memungkinkan bagi peneliti lainnya untuk menguji suatu hasil penelitian sehingga memperoleh hasil penelitian yang *valid*, terukur dan sesuai dengan rencana. Adapun rumusan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan yang terakhir ialah tahapan analisa data.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur saat ini. Untuk menggambarkan fenomena sosial tersebut secara jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena, maka dibutuhkan alat bantu berupa pendekatan kualitatif yang menurut Sugiyono (2009:8) dianggap sebagai pendekatan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah dan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), sehingga analisis datanya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bersifat induktif dan hasil penelitian lebih ditekankan pada sebuah makna dari pada generalisasi.

Jika dilihat dari manfaat penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan secara praktis. Hal ini ditunjukkan dengan upaya untuk melakukan penyusunan dan memformulasikan perencanaan skenario *(scenario planning)* sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, yang hasilnya dapat diterapkan sebagai solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan pada sektor tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pusat perhatian yang ditujukan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data di lapangan dan menghindari data yang tidak relevan atas suatu permasalahan yang diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini ialah memahami secara jelas tentang kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur yang pada akhirnya akan berguna dalam memformulasikan perencanaan skenario sektor tersebut.

1. Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur seperti potensi wilayah khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang dapat dilihat dari luas pantai/ panjang garis pantai atau luas wilayah pengembangan kelautan dan perikanan, kondisi produksi ikan, nilai produksi, produksi benih, pengolahan hasil, konsumsi ikan, kondisi hutan bakau, terumbu karang, penghasilan nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan, regulasi yang mengatur

pengembangan kelautan dan perikanan, aspek kelembagaan dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur.

2. Memformulasikan perencanaan skenario sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, meliputi:

   a) Identifikasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi guna menangkap peluang dan mengantisipasi ancaman/ tantangan. Peluang dan ancaman bisa datang dari adanya globalisasi (AEC 2015) yang menuntut semua negara bahkan lingkup pemerintahan terkecil sekalipun untuk turut serta dalam perdagangan bebas dan persaingan antar negara tanpa adanya batasan-batasan administratif. Globalisasi bisa menjadi peluang dengan terbukanya pasar bagi produk kelautan dan perikanan, dan menjadi ancaman/ tantangan ketika produk kelautan dan perikanan dengan kualitas rendah akan tersingkir "konsumen berkurang". Hasil identifikasi ini juga dapat di ambil dari data-data yang ada pada fokus penelitian yang pertama "Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur".

   b) Melakukan analisis pengaruh politik *(politic)*, ekonomi *(economy)*, sosial *(social)*, teknologi *(technology)* dan lingkungan *(environment)* atau biasa disingkat *(PEST's Plus)* terhadap perencanaan yang akan diambil nantinya atau dengan kata lain, analisis konsekuensi atau resiko yang mungkin muncul akibat

adanya suatu perencanaan yang berhubungan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dengan melihat lima faktor penting yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi dan *environment*/ lingkungan *(PEST's Plus)*. Perencanaan yang dimaksud harus mengacu pada hasil identifikasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

c) Membuat gambaran mengenai masa depan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur baik dari sisi produksi, efektivitas kelembagaan, dukungan sarana-prasarana maupun dari sisi regulasi kebijakan yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan suatu visi jangka panjang yang mengakui dan memiliki toleransi terhadap inisiatif lokal, maupun dengan identifikasi terhadap kemungkinan dan dampak yang terjadi ketika skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan itu muncul.

d) Memutuskan (termasuk dalam tahap membuat, memilih dan memutuskan) kebijakan-kebijakan/ keputusan-keputusan/ strategi-strategi untuk mencapai suatu visi yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola aset-aset lokal/ sumberdaya lokalnya yaitu sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur.

e) Melakukan penjabaran terhadap kebijakan-kebijakan/ keputusan-keputusan/ strategi-strategi pengembangan sektor kelautan dan

perikanan di Kabupaten Lombok Timur menjadi sebuah kegiatan-kegiatan/ rencana aksi dimana kegiatan/ rencana aksi tersebut akan berjalan lancar jika didukung dengan adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal, baik dalam bentuk kelompok penerima manfaat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data maupun informasi tentang masalah yang diteliti, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan batas-batas wilayah sebelah barat Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara, sebelah timur Selat Alas, sebelah utara Laut Jawa, dan sebelah selatan Samudera Hindia. Memiliki luas wilayah 2.679,88 km² yang terbagi secara administratif dalam 20 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 96 desa. Lokasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menyediakan data yang akurat bagi peneliti, sehingga hasil penelitian menjadi relevan, rasional dan bisa diterima secara logis.

Sementara itu, situs penelitian merupakan letak atau posisi dimana peniliti menghabiskan waktunya untuk meneliti atau dengan kata lain, *"situs penelitian"* adalah tempat yang lebih spesifik dari *"lokasi penelitian"* (dalam satu lokasi penelitian, terdapat satu atau dua situs penelitian bahkan lebih). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil situs penelitian pada instansi seperti Bappeda Kabupaten

Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan (DISKELKAN) Kabupaten Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, peneliti juga mengambil situs penelitian pada wilayah pesisir dengan basis kelautan dan perikanan (Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Sambelia), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak) dan Labuhan Lombok (Kecamatan Pringgabaya), Pasar Tradisional Keruak, Balai Benih Ikan (BBI) Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Desa Labuhan Haji (Kecamatan/Kelurahan Labuhan Haji).

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat dekriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga jenis data yang digunakan juga berupa data-data kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian (Miles & Huberman, 1992). Selain itu, dibutuhkan juga data-data yang bersifat *kuantitatif* atau data-data yang bersifat numerik/ angka-angka untuk pendekatan-pendekatan tertentu. Dengan kata lain, *data kuantitatif* menjadikan data kualitatif lebih menarik dan mampu menggambarkan fenomena yang terjadi secara utuh dan mendalam.

Sumber data merupakan subjek yang menyediakan dan tempat data/ informasi berada. Sumber data dalam penelitian kualitatif bisa berasal dari dalam diri manusia dan luar manusia. Sumber data dari manusia biasanya dalam bentuk

kata-kata atau ucapan lisan, sikap, moral, dan perilaku/ tindakan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data dari luar manusia berupa *draft*/ dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti catatan hasil rapat, gambar, foto, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini diperkuat oleh Sugiyono (2009:225) yang mengatakan bahwa sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber data yang memberikan data/ informasi kepada pengumpul data (peneliti) secara langsung sebagai *key informant* atau orang-orang yang diamati dan memeberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang relevan serta mengetahui dan mengerti masalah yang dicari/dibutuhkan peneliti. Adapun *key informant* data primer yang terkait dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:
   a) M. Safwan selaku Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur;
   b) Taufik Hidayatullah, S.Pi selaku Kasubbag Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, namun sudah lama bekerja pada Bidang Budidaya sebagai Koordinator Program;
   c) Ir. Nursanah selaku Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Bidang Konservasi, Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;

d) Ir. Hariyanti selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;

e) Herawati Lustiana, S.Pi selaku Staff pada Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;

f) Ishak, S.Pi selaku Staff pada Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;

g) Abdul Mugis S.Pi selaku Staff Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat;

h) Ir. Mak'rif selaku Kepala Bidang Kelembagaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur;

i) Bambang S. selaku Staff yang menangani bidang perkoperasian pesisir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur;

j) H. Lalu Zaidun selaku Pegawai pada Balai Benih Ikan (BBI) Desa Lenek (Kecamatan Aikmel);

k) Ahmadi yang merupakan salah satu penjaga (perawat benih ikan) sekaligus sebagai pekerja di BBIP Labuhan Haji;

l) Amaq Rawisah (Bapak Rawisah), nelayan di Desa Labuhan Lombok (Kecamatan Jerowaru) yang alih profesi sebagai pengumpul barang bekas;

m) Nasipudin dan Samsuri sebagai Nelayan di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak);

n) Inaq Jenap (Ibu Jenap) sebagai Pengikat Rumput Laut di Kecamatan Jerowaru;

o) Inaq Rohan (Ibu Rohan) sebagai Pedagang/Penjual Ikan di Pasar Tradisional Kecamatan Keruak;

p) Alwi sebagai Masyarakat Pesisir Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru.

2. Data Skunder merupakan sumber yang memberikan data/ informasi kepada pengumpul data (peneliti) secara tidak langsung. Dalam penelitiaan ini, data skunder tersebut seperti Data Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka tahun 2008-2013, RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Timur, Data Statistik Perikanan Tangkap Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Data Umum Kelautan dan Perikanan Lombok Timur (Data Produksi dan Nilai Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan, *Mangrove/* Bakau, Terumbu Karang, Padang Lamun, Koperasi Nelayan, data kelembagaan, luas perairan/ luas area pengembangan perikanan, jumlah nelayan, jumlah/jenis alat tangkap, dan sarana-prasarana).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung maksud dan fokus penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik seperti dibawah ini:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung pada lokasi dan situs penelitian seperti Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan (DISKELKAN) Kabupaten Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, observasi juga dilakukan pada wilayah pesisir dengan basis kelautan dan perikanan (Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Sambelia), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak) dan Labuhan Lombok (Kecamatan Pringgabaya), Pasar Tradisional Keruak, Balai Benih Ikan (BBI) Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Desa Labuhan Haji (Kecamatan/Kelurahan Labuhan Haji). Cara ini digunakan untuk mendapatkan data/ informasi mengenai pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur yang tidak didapatkan pada saat wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, sehingga *skenario planning* dapat dirumuskan berdasarkan kelengkapan informasi tersebut. Selain itu, melalui observasi akan diperoleh motif, kepercayaan, keseriusan, perilaku dan kebiasaan subyek secara mendalam serta dapat diketahui/ dipahami reaksi emosional subyek tersebut dengan mengarahkan peneliti untuk membangun pengetahuan berdasarkan informasi yang ada (Sonhadji, 1996).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur atau dengan kata lain, wawancara membuka

kesempatan yang seluas-luasnya bagi para informan kunci/ *key informant* yaitu M. Safwan, Taufik Hidayatullah, S.Pi, Ir. Nursanah, Ir. Hariyanti, Herawati Lustiana, Ishak, S.Pi, Abdul Mugis S.Pi, Ir. Makrif, Bambang S., H. Lalu Zaidun, Ahmadi, Amaq Rawisah (Bapak Rawisah), Nasipudin, Samsuri, Inaq Jenap (Ibu Jenap), Inaq Rohan (Ibu Rohan), dan Alwi untuk memaparkan/ mengungkapkan suatu gambaran umum yang berkaitan dengan fokus penelitian sekaligus sebagai bahan untuk membandingkan hasil pengamatan dan petunjuk bagi peneliti dalam menemukan *(key informant)* selanjutnya. Selain itu juga, wawancara merupakan media yang efektif dalam menghimpun dan menemukan permasalahan penelitian dan mengetahui lebih mendalam tentang informan kuncinya, maka jumlah informan kuncinya harus lebih sedikit atau dalam jumlah kecil (Sugiyono, 2009:231).

3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan memahami isi buku-buku/jurnal, surat-surat (perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan instansi luar daerah), catatan harian (kelautan dan perikanan umum Kabupaten Lombok Timur), foto (metode *long line* budidaya rumput laut di Kecamatan Jerowaru), dokumen pemerintah dan swasta (surat ijin kapal penangkap ikan, modal/aset/volume usaha/sisa hasil usaha koperasi nelayan dan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan), media cetak (koran, klipping dan majalah) maupun media elektronik seperti data *server, flashdisk, internet/ browsing* dan data yang tersimpan dalam *website/ literature review* (gambaran visi-misi Kabupaten Lombok Timur). Teknik ini membantu

peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang hal-hal/ masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

F. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya, peneliti tentu membutuhkan instrument yang mampu menunjang kelancaran kegiatan tersebut. Instrumen penelitian yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ialah orang atau peneliti itu sendiri *(human instrument)* dengan berbekal teori dan pengetahuan/ wawasan yang luas maupun dengan kepekaan panca indra dalam melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan, sehingga mampu mengembangkan pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksikan secara jelas dan akurat tentang kondisi sosial sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti membutuhkan instrument pendukung seperti pedoman wawancara *(interview guide)*, catatan lapangan *(field note)* dan instrumen lainnya seperti alat perekam dan *camera* (CROSS-CB83CT dan Sony Ericsson-K800i), buku (KENKO_PN-404 dan *Seminar Pad*) dan alat tulis (Standard AE7 Alfa Tip 0,5 dan FASTER *High Grade* F-3).

Pedoman wawancara *(interview guide)* digunakan sebagai kerangka dasar atau acuan dalam melakukan wawancara, kemudian catatan lapangan *(field note)* untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan difikirkan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data lapangan, sedangkan instrumen lainnya (alat perekam, *camera*, buku, alat tulis) digunakan untuk merekam hasil wawancara,

sebagai bukti observasi, dan mencatat data-data/ dokumen serta mempermudah dalam menangkap laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

G. Tahapan Analisis Data

Data observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah terhimpun dari situs penelitian dianalisa kemudian diolah menggunakan metode analisis *scenario planning* agar menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2009:244) mengungkapkan bahwa:

> Apabila data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan. Dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari ungkapan Sugiyono tersebut, dapat dipahami bahwa analisa data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis melalui pengorganisasian data, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan yang dapat dipelajari, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain dalam bentuk kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan dan analisis data dikerjakan secara bersamaan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data

yang diperoleh sudah jenuh dan terselesaikannya laporan penelitian. Miles & Huberman (1992:16) mengungkapkan lebih lanjut bahwa terdapat tiga tahap analisis dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(display data)* dan penarikan kesimpulan atau verifikasi *(conclusion: drawing/ verifying)*. Lebih lanjut, Miles & Huberman (1992:20) memaparkan model interaktif berikut ini:

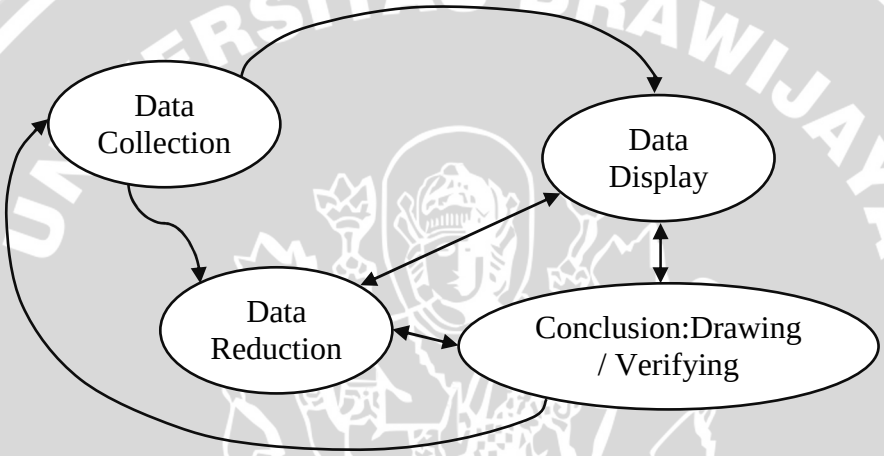

Gambar 3. Model Interaktif Analisis Data
Sumber: Miles, M.B., & A.M. Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Diterjemahkan oleh: Rohidi, T.R. ed.1. Jakarta: UI-Press. (hal 20)

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa langkah-langkah dalam analisis data kualitatif berawal dari reduksi data *(data reduction)* yang merupakan proses pemilihan atas data terpenting diantara data lainnya melalui penyederhanaan yang kemudian diabstraksi. Dalam mereduksi data, terdapat bagian yang harus dianalisis dengan membentuk fokus, mempertegas, memperjelas data dengan membuang hal yang tidak berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, dan mengelola data agar diperoleh simpulan akhir. Sejak melakukan

pemilihan kasus, kerangka kerja konseptual, penyusunan pertanyaan penelitian dan penyusunan tata cara pengumpulan data yang akan digunakan, pada saat itulah reduksi data berlangsung.

Setelah data direduksi, maka dilakukanlah penyajian data *(display data)* yaitu suatu proses merangkai data/ informasi yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya sebuah simpulan penelitian. Penyajian data berfungsi sebagai cara untuk mempermudah peneliti dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dan memungkinkan peneliti dalam memformulasikan perencanaan skenario/ *scenario planning* serta mengambil tindakan lain yan berkaitan dengan hal tersebut. Penyajian data tersebut dapat berupa grafik, tabel, *flowchart*, matriks, gambar, skema, jaringan kerja/ *networking* maupun keterkaitan antar kegiatan.

Langkah yang terakhir ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi *(conclusion: drawing/ verifying)*. Langkah ini dilakukan untuk penarikan simpulan, peneliti dituntut untuk memahami setiap kejadian baik berupa pernyataan, hubungan sebab-akibat maupun pola-pola tertentu yang ditemukan dilapangan dengan melakukan pencatatan, sehingga dapat diambil *"benang merah"* dari setiap peristiwa tersebut. Hal yang perlu perhatian oleh peneliti ialah pada saat peneliti memperoleh data melalui wawancara, observasi maupun studi kepustakaan dan dokumentasi berarti saat itu pula peneliti telah menarik kesimpulan dengan menyederhanakan dan menarik arti dari data-data yang diperoleh, akan tetapi kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi dilapangan, sehingga untuk

menyempurnakannya (hasil penelitian) membutuhkan verifikasi atau pengecekan keabsahan atas kesimpulan sementara tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari empat kabupaten dan satu kota di Pulau Lombok (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram). Sedangkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang ada, dengan ibu kota Selong. Kabupaten Lombok Timur memiliki luas total wilayah 2.679,88 km², terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09%). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88% dari luas Pulau Lombok atau setara dengan 7,97% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan secara geografis terletak pada 8º-9º garis Lintang Selatan dan 116º-117º Bujur Timur.

Posisi wilayah yang terletak pada ujung timur pulau Lombok dan terbentang dari ujung utara ke selatan, menyebabkan Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya komoditas-komoditas pertanian maupun perikanan yang keluar-masuk dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok melalui penyebrangan kapal (dermaga) yang ada di Kabupaten Lombok Timur atau dengan kata lain, Kabupaten Lombok Timur menjadi gerbang penghubung bagi produk pertanian dan perikanan baik dari Kabupaten lain yang ada di Pulau Lombok maupun dari

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pulau Sumbawa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Timur, ialah sebagai berikut a) sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, b) sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, c) sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas, dan d) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Timur selain terbagi berdasarkan batas-batas geografis wilayahnya, juga dibatasi secara administratif berdasarkan kecamatan dan desa. Jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Timur disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RT
1	Keruak	15	0	66	0	247
2	Jerowaru	15	0	90	0	235
3	Sakra	12	0	24	0	415
4	Sakra Barat	18	0	87	0	424
5	Sakra Timur	10	0	50	0	401
6	Terara	16	0	66	0	169
7	Montong Gading	8	0	47	0	304
8	Sikur	14	0	60	0	397
9	Masbagik	10	0	75	0	656
10	Pringgasela	10	0	47	0	213
11	Sukamulia	9	0	36	0	235
12	Suralaga	15	0	61	0	362
13	Selong	1	11	5	48	276
14	Labuhan Haji	8	4	42	21	477
15	Pringgabaya	15	0	79	0	131
16	Suela	8	0	41	0	234
17	Aikmel	24	0	138	0	273
18	Wanasaba	14	0	94	0	231
19	Sembalun	6	0	31	0	353
20	Sambelia	11	0	35	0	331
Jumlah/ Total		**239**	**15**	**1.174**	**69**	**6.364**

Keterangan: RT = Rumah Tangga
Lingkungan yang dimaksud ialah Lingkungan Kelurahan

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Lombok Timur dalam BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ialah 20 kecamatan dengan 239 desa yang terdiri dari 1.174 dusun. Sedangkan untuk wilayah kelurahan hanya terdapat pada dua kecamatan yaitu Selong dengan 11 kelurahan yang terbagi menjadi 48 lingkungan kelurahan dan Labuhan Haji dengan 4 kelurahan yang terbagi menjadi 21 lingkungan kelurahan dengan jumlah rumah tangga (RT) sebanyak 6.364 RT. Dan dari hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2014, di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, diketahui bahwa terdapat 20 (duapuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) desa/ kelurahan pantai di 6 (enam) kecamatan.

Enam desa/ kelurahan pantai yang ada di Kabupaten Lombok Timur ialah a) Kecamatan Jerowaru dengan 10 desa/ kelurahan pantai seperti Desa Batu Nampar Selatan, Wakan, Pemongkong, Jerowaru, Pandanwangi, Buana Ekas, Sekaroh, Serewe, Kwang Rundun dan Pene, b) Kecamatan Keruak dengan 3 desa/ kelurahan pantai seperti Desa Pijot, Tanjung Luar dan Ketapang Raya, c) Kecamatan Sakra Timur dengan 2 desa/ kelurahan pantai seperti Desa Menceh dan Desa Surabaya, d) Kecamatan Labuhan Haji dengan 7 desa/ kelurahan pantai seperti Desa/ Kelurahan Penede Gandor, Labuhan Haji, Suryawangi, Ijobalit, Korleko, Korleko Selatan dan Kertasari, e) Kecamatan Pringgabaya dengan 10 desa/ kelurahan pantai seperti Desa Kerumut, Pohgading, Batuyang, Pringgabaya, Labuhan Lombok, Pringgabaya Utara, Pohgading Timur, Anggaraksa, Gunung Malang dan Seruni Mumbul, dan f) Kecamatan Sambelia yang terdiri dari 6 desa/

kelurahan pantai seperti Desa Sugian, Labuhan Pandan, Belanting, Obel-obel, Dara Kunci dan Dadap. Pembagian wilayah administratif ini, dilengkapi juga dengan luas wilayah yang dimiliki oleh setiap kecamatan. Adapun luas kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Luas Kecamatan Kabupaten Lombok Timur 2012

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	Keruak	40,49	2,52
2	Jerowaru	142,78	8,89
3	Sakra	25,09	1,56
4	Sakra Barat	32,30	2,01
5	Sakra Timur	37,04	2,31
6	Terara	41,41	2,58
7	Montong Gading	25,66	1,60
8	Sikur	78,27	4,87
9	Masbagik	33,17	2,07
10	Pringgasela	134,26	8,36
11	Sukamulia	14,49	0,90
12	Suralaga	27,02	1,68
13	Selong	31,68	1,97
14	Labuhan Haji	49,57	3,09
15	Pringgabaya	136,20	8,48
16	Suela	115,01	7,16
17	Aikmel	122,92	7,66
18	Wanasaba	55,89	3,48
19	Sembalun	217,08	13,52
20	Sambelia	245,22	15,27
Jumlah/ *Total*		**1.605,55**	**100,00**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur dalam BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang bervariasi. Luas wilayah Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur yaitu Selong memiliki luas 31,68 (32 km²) atau setara dengan 1,97 (2%) dari luas total wilayah yang ada. Sementara itu, untuk kecamatan yang memiliki luas wilayah terbanyak

ialah Kecamatan Sambelia yang mencapai luas 245,22 (245 km²) atau setara dengan 15,27 (15%) dari luas total wilayah. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil ialah Kecamatan Sukamulia dengan luas 14,49 (14 km²) atau jika dijadikan dalam bentuk persen maka luas wilayahnya 0,90 (0,9%) dari luas total wilayah di Kabupaten Lombok Timur.

Luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan permukiman saja, namun juga untuk penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan untuk tujuan pengembangan ekonomi daerah, seperti sawah, tegalan, ladang/huma, padang rumput atau padang pengembalaan, tambak, kolam/empang, perkebunan, hutan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012, maka penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Tata Guna Lahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	46.354	44,42
2	Tegalan/ Kebun	22.202	21,28
3	Rumah, Bangunan dan Halaman	8.035	7,70
4	Ladang/ Huma	5.142	4,93
5	Padang Rumput/ Pengembalaan	556	0,53
6	Tambak	2.161	2,07
7	Kolam/ Empang	1.247	1,19
8	Hutan*	3.476	3,33
9	Perkebunan	3.160	3,03
10	Lain-lain	12.024	11,52
Jumlah		**104.357**	**100,00**

Keterangan : *) Hutan Rakyat

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur dalam BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa penggunaan lahan yang paling banyak ialah untuk areal persawahan sebesar 46.354 Ha atau sama dengan 44,42%, kemudian disusul oleh areal untuk tegalan/kebun sebanyak 22. 202 Ha atau sama dengan 21, 28% dan urutan ke-tiga ialah penggunaan lahan untuk kepentingan lainnya sebanyak 12.024 Ha atau 11,52%. Sementara itu, untuk lahan yang berkaitan dengan sektor perikanan dan kelautan seperti tambak dan kolam/ empang luas lahannya berturut ialah 2.161 Ha (2,07%) dan 1.247 Ha (1,19%). Sedangkan untuk penggunaan lahan terkecil diperuntukkan sebagai padang rumput atau padang pengembalaan bagi ternak-ternak warga yang luasnya hanya 556 Ha atau sebanding dengan 0,53%.

Jumlah penggunaan lahan tersebut bukan merupakan jumlah total dari keseluruhan lahan yang ada, namun jumlah lahan yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Adapun lahan sebanyak 3.476 Ha atau sama dengan 3,33% adalah lahan yang ditanami pohon atau sering disebut sebagai hutan rakyat. Sementara untuk hutan negara, penulis tidak mencantumkannya karena lahan yang digunakan sebagai hutan negara bukan hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Luas hutan negara mencapai 55.928 Ha dan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan seperti Kecamatan Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Pringgasela, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Wanasaba, Sembalun dan Sambelia.

2. Demografi Kabupaten Lombok Timur

Jumlah penduduk merupakan isu sentral dalam sebuah pembangunan, dimana penambahan dan pengurangan penduduk akan berpengaruh besar pada

strategi, kebijakan dan kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah. Disamping itu, dengan diketahuinya penyebaran penduduk maka pembangunan akan berjalan tepat sasaran dan tercapainya tujuan pembangunan. Dari luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.605,55 Ha, terdapat penduduk sebanyak 1.123.488 jiwa dan setiap tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012 sendiri, terjadi peningkatan sekitar 0,6% jika dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2011.

Penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 jika dirinci berdasarkan jenis kelaminnya, maka terdapat 524.126 laki-laki dan 599.362 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin penduduknya sebesar 87,45% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada 87 laki-laki. Penduduk Kabupaten Lombok Timur tersebar di 20 kecamatan dan cenderung tidak merata untuk setiap kecamatannya, dimana kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak ialah Kecamatan Masbagik dengan jumlah penduduk sebesar 95.392 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Sembalun sebanyak 19.051 jiwa. Dari jumlah penduduk yang dimilikinya, Kabupaten Lombok Timur menempati urutan pertama di tingkat provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak sekitar 25 % dari total penduduk se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ditegaskan pula oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, beliau mengatakan bahwa:

> “kalau untuk jumlah penduduk di Lotim ini, paling banyak di NTB ini. Jadi, 25 persen penduduk NTB itu ada di Lombok Timur, sehingga bahasa kita itu dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi, kalau mau menanggulangi kemiskinan di NTB itu, Lotim dulu harus dihentaskan atau

memang di prioritaskan karena jumlah penduduknya lebih banyak" (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2014, di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur)

Sementara itu, untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Kecamatan	Kepadatan (jiwa/km²)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Keruak	1.155	1.171	1.183	1.200	1.212
2	Jerowaru	353	357	372	379	384
3	Sakra	2.069	2.096	2.102	2.126	2.140
4	Sakra Barat	1.412	1.431	1.450	1.468	1.480
5	Sakra Timur	1.118	1.133	1.104	1.117	1.125
6	Terara	1.676	1.698	1.581	1.594	1.578
7	Montong Gading	1.442	1.462	1.582	1.593	1.630
8	Sikur	872	883	863	868	868
9	Masbagik	2.736	2.772	2.834	2.863	2.876
10	Pringgasela	360	365	373	377	378
11	Sukamulia	2.036	2.063	2.096	2.116	2.121
12	Suralaga	1.807	1.831	1.922	1.931	1.959
13	Selong	2.332	2.364	2.608	2.648	2.688
14	Labuhan Haji	1.027	1.041	1.070	1.081	1.086
15	Pringgabaya	674	683	665	670	671
16	Suela	326	330	326	327	329
17	Aikmel	731	741	755	763	767
18	Wanasaba	1.075	1.090	1.061	1.067	1.067
19	Sembalun	84	85	87	87	88
20	Sambelia	127	129	120	122	123

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur dalam BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat kepadatan penduduk pada sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur cenderung meningkat setiap tahunnya dan dapat digolongkan/ dikelompokkan kedalam tiga kategori kepadatan, yaitu:

a) Tinggi yaitu tingkat kepadatan dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa/km² yang meliputi Kecamatan Masbagik, Selong, Sakra dan Sukamulia;

b) Sedang yaitu tingkat kepadatan dengan jumlah penduduk berkisar antara 1.000 sampai 2.000 jiwa/km² yang meliputi Kecamatan Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Montong Gading, Suralaga, Labuhan Haji dan Wanasaba;

c) Rendah yaitu tingkat kepadatan dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 jiwa/km² yang meliputi Kecamatan Jerowaru, Sikur, Pringgasela, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Sembalun dan Sambelia.

Berbicara mengenai jumlah dan kepadatan penduduk, maka tidak terlepas dari keadaan/kondisi (kualitas dan tingkat) pendidikan dari setiap penduduk yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kualitas dan tingkat pendidikan akan menentukan tingkatan berfikir, cara menyelesaikan permasalahan, kecepatan dalam menyerap informasi, tingkat kreatifitas, tingkat ketaatan akan hukum/ peraturan, memahami strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan kata lain, kualitas dan tingkat pendidikan akan menentukan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya dan kualitas sumberdaya manusia di tingkat provinsi, sehingga tujuan pembangunan daerah yang diinginkan yaitu kesejahteraan sosial akan lebih mudah dalam pencapaiannya. Kualitas dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal dan menjadi salah satu kendala pembangunan. Hal ini disampaikan pula oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok

Timur pada saat wawancara tanggal 19 Maret 2014, mengatakan bahwa "yang menjadi fokus utama atau masalah utama pembangunan yang kita hadapi selama ini hampir sama saja, seperti kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur itu yang masih kurang…". Untuk itu, kualitas dan tingkat pendidikan harus didukung dengan tersedianya sarana-prasarana pendidikan baik berupa gedung, buku, tenaga pengajar yang professional dan sarana-prasarana lainnya. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lombok Timur dijelaskan lebih detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Tidak Pernah Sekolah	217.359	21,10
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	267.527	25,97
3	Tamat Sekolah Dasar	301.830	29,30
4	SLTP	130.827	12,70
5	SLTA	88.695	8,61
6	Perguruan Tinggi	23.899	2,32
Jumlah		**1030.137**	**100,00**

Sumber: Gafar, A.M. 2012. *Analisis Peranan Individu, Pemerintah dan Kelompok Sosial Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Lombok Timur*. Selong: Lembaga Pusat Studi Sumber Daya (PSSD). Halaman 30.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lombok Timur bervariasi, mulai dari yang tidak pernah sekolah, tidak tamat dan tamat sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SMA), dan perguruan tinggi. Persentase tingkat pendidikan penduduk terbanyak ialah tamat sekolah dasar (SD) dengan jumlah 301.830 jiwa atau sama dengan 29,30%, sedangkan untuk tingkat pendidikan

dengan jumlah paling kecil ialah tingkat pendidikan tinggi (perguruan tinggi) jumlahnya hanya 23.899 jiwa atau setara dengan 2,32%. Sementara itu, tingkat pendidikan penduduk yang tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tidak pernah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih cukup banyak sekitar 267.527 jiwa atau setara dengan 25,97% pernah merasakan pelayanan pendidikan dasar, namun tidak tamat dan 217.359 jiwa atau sama dengan 21,10% belum pernah merasakan pelayanan pendidikan dasar (tidak pernah sekolah). Hal ini tentu membutuhkan perhatian pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam menyediakan dan memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Penduduk Kabupaten Lombok Timur jika dilihat dari lapangan pekerjaannya sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan yang semuanya itu berada dalam lingkup bidang pertanian baik pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Hal ini dijelaskan pula oleh Kepala Desa Jerowaru (Kecamatan Jerowaru) yang mengatakan bahwa:

> "…sebagian besar masyarakat di Desa Jerowaru ini masih bekerja di bidang pertanian atau sekitar separuhnya itu bekerja sebagai petani. Sektor pertanian yang tinggi ini, luas lahan saja sudah mencapai 92 persen. Dan hampir di seluruh Kabupaten Lombok Timur juga masih banyak bekerja sebagai petani". (Wawancara pada tanggal 5 April 2014, di Kantor Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru).

Lapangan pekerjaan yang didominasi oleh bidang pertanian, menandakan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Timur masih merupakan masyarakat pedesaan yang cenderung bersifat paguyuban atau masyarakat agraris dengan sifat gotong royong yang masih relatif tinggi. Walaupun demikian, penduduk Kabupaten Lombok Timur tidak hanya bekerja pada satu bidang pekerjaan saja,

namun bervariasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Adapun persentase pekerja laki-laki dan perempuan yang bekerja pada beberapa bidang pertanian dan bidang lainnya, penulis paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total*
1	Pertanian/ *Agriculture*	43,16	35,21	39,60
2	Industri Pengolahan	8,77	15,17	11,63
3	Perdagangan / *Trade*	13,06	33,52	22,21
4	Jasa-jasa/ *Services*	20,26	14,76	17,80
5	Lainnya/ *Others*	14,76	1,34	8,76

Keterangan: *) Jumlah pekerja laki-laki ditambah perempuan, kemudian dibagi dua (rata-rata)

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa lapangan pekerjaan dibidang pertanian masih terbuka luas dengan persentase pekerja laki-laki sebesar 43,16% dan pekerja perempuan sebanyak 35,21% atau jika dirata-rata maka besaran persentasenya ialah 39,60%. Bidang pekerjaan lain yang mampu menyerap tenaga kerja ialah bidang perdagangan dengan persentase rata-rata antara pekerja laki-laki dan perempuan yaitu 22,21%. Sementara itu, persentase rata-rata penduduk Kabupaten Lombok Timur yang bekerja pada bidang jasa dan industri pengolahan masih berada pada tingkatan sedang. Persentase rata-rata penduduk yang bekerja pada bidang jasa sebesar 17,80% dan bidang industri pengolahan sebanyak 11,63% serta sisanya sebesar 8,76% bekerja pada bidang lainnya.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi berupa keadilan dan kemakmuran rakyat dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masayarakat akan terwujud apabila nilai tambah total yang tercipta dari aktivitas kegiatan ekonomi meningkat dan niai tambah total tersebut dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB/ GDRP *(Gross Domestic Regional Product)* merupakan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada untuk menciptakan nilai tambah atau pemasukan bagi daerah tersebut. Data-data mengenai PDRB yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000, menurut Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa:

> "…secara umum Lombok Timur itu, kita bisa lihat di Lombok Timur Dalam Angka,…kemudian eee APBD juga kita punya buku disitu, kemudian eee dalam rangka pelaksanaan pembangunan kita juga punya namanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang didalamnya ada program visi dan misi yang berbeda-beda kan…(Wawancara pada tanggal 19 Maret 2014, di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur)

Untuk mengetahui besarnya PDRB/ GDRP *(Gross Domestic Regional Product)* yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur pada beberapa tahun terakhir, maka dapat di lihat pada draft KDA (Kabupaten Dalam Angka). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2010-2012, sebagai berikut:

Tabel 11. PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

No	Lapangan Usaha/ *Industrial Origin*	2010	2011*	2012**
1	Pertanian	2.227.109,70	2.488.606,38	2.642.204,54
2	Pertambangan dan Penggalian	252.872,68	285.128,94	322.822,14
3	Industri	363.572,78	402.717,66	444.513,20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	21.257,45	23.445,01	26.107,78
5	Bangunan	545.911,83	646.897,70	749.731,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.132.664,63	1.330.945,95	1.527.839,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	399.534,05	432.354,62	470.153,52
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	317.275,56	370.801,19	426.293,63
9	Jasa-Jasa	956.352,32	1.081.513,30	1.190.892,33
PDRB/GDRP		**6.216.551,00**	**7.062.410,73**	**7.800.557,28**

Keterangan: *) Angka sementara
**) Angka sementara bisa berubah sewaktu-waktu

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai PDRB yang telah dicapai Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang bersifat dinamis sehingga menghasilkan nilai tambah yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari besarnya PDRB Kabupaten Lombok Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 yang mencapai 7,80 triliun rupiah, mengalami peningkatan sekitar 738,15 miliar rupiah dibanding tahun 2011 yang mencapai 7,06 triliun rupiah dan meningkat sebesar 1,58 triliun rupiah dibanding tahun 2010 yang mencapai 6,21 triliun rupiah. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha/ *industrial origin* yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Sumbangan terbesar bagi PDRB Kabupaten Lombok

Timur pada tahun 2012 diberikan oleh sektor pertanian termasuk didalamnya ialah usaha pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan yang mencapai 2,64 triliun rupiah, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan besar sumbangan untuk PDRB sebesar 1,52 triliun rupiah. Urutan ketiga ditempati oleh sektor jasa yang menyumbang ke PDRB sebesar 1,19 triliun rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangan terendah bagi PDRB ialah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 26,10 juta rupiah. Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Lombok Timur atas dasar harga konstan 2000, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

Tahun	PDRB/ GDRP (Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2010	2.970.479,44	5,01
2011*	3.152.254,23	6,12
2012**	3.322.493,94	5,40

Keterangan: *) Angka sementara
**) Angka sementara bisa berubah sewaktu-waktu

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur. 2013. Lombok Timur Dalam Angka 2013. *Katalog BPS*, 1102001.5203 (5203.1301): 1 594.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, PDRB Kabupaten Lombok Timur atas dasar harga konstan 2000 telah mencapai 3,32 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,40% dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai nilai 3,15 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,12% dan dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai nilai 2,97 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%.

4. Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

a) Usaha Penangkapan

Potensi sumberdaya ikan lestari (MSY/ *Maximum Suistainable Yield*) yang didapatkan oleh nelayan Kabupaten Lombok Timur tersebar di beberapa perairan laut seperti Laut Jawa, Samudera Hindia dan Selat Alas. Besarnya potensi sumberdaya ikan lestari (MSY/ *Maximum Suistainable Yield*) tersebut, menurut Ishak, S.Pi selaku Staff pada Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa:

> "…kita punya potensi sumberdaya ikan lestari sekitar delapan belas ribu ton per tahun, potensi tersebut adalah gabungan dari potensi sumberdaya ikan pelagis (ikan permukaan) yang besarnya sekitar tujuh ribuan ton per tahun dan potensi ikan damersal (ikan laut dalam/dasar) kurang lebih sepuluh ribu ton per tahun…" (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur).

Berikut potensi-potensi sumberdaya ikan lestari di perairan laut Kabupaten Lombok Timur menurut jenis ikan dan perairan sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Tangkapan Ikan di Kabupaten Lombok Timur 2012

Nama Perairan	MSY (ton/tahun)		Total Penangkapan
	Pelagis	Damersal	
Laut Jawa	4.120,50	5.797,00	9.917,50
Samudra Hindia	3.300,50	3.306,50	6.607,00
Selat Alas	331,80	1.385,70	1.717,50
Jumlah	**7.752,80**	**10.489,20**	**18.242,00**

Keterangan: MSY = *Maximum Suistainable Yield*/ Sumberdaya Ikan Lestari
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total tangkapan pada tahun 2012 ialah 18.242,00 ton/tahun yang terdiri dari sumberdaya ikan pelagis sebesar

7.752,80 ton/tahun dan damersal sebanyak 10.489,20 ton/tahun. Jumlah tangkapan ikan tersebut didapat dari beberapa perairan seperti Laut Jawa, Samudra Hindia dan Selat Alas. Perairan dengan tangkapan terbanyak pada tahun 2012 ialah perairan Laut Jawa dengan total hasil tangkapan sebanyak 9.917,50 ton/tahun yang terdiri dari ikan pelagis sebanyak 4.120,50 ton/tahun dan ikan damersal sebanyak 5.797,00 ton/tahun.

b) Usaha Budidaya

Secara umum, usaha budidaya sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan lokasi pengembangannya, yaitu usaha budidaya laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar. Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yang mengatakan bahwa:

> "potensi budidaya Lombok Timur itu, ada budidaya laut, kemudian ada potensi budidaya air payau atau tambak dan potensi budidaya air tawar. Budidaya laut yang punya potensi di kita, ada budidaya mutiara, ada budidaya rumput laut, kemudian ada lobster, kerapu, teripang dan kekerangan. Rumput laut kita punya potensi dua ribu hektar, penyebarannya ada di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Keruak dan Sambelia. Kemudian untuk kerapu sekitar lima ratusan hektar, lobster sekitar lima dua lima hektar dan itu penyebarannya sebagian besar di Kecamatan Jerowaru…nah kemudian kita bergerak ke budidaya air payau, ini lebih besar lagi sekitar tiga ribu lima ratus hektar di sepanjang garis pantai Lombok Timur, pemanfaatan tidak begitu besar dan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang ini. Sedangkan untuk air tawar kita punya potensi hampir di setiap kecamatan"

Berikut ini adalah usaha budidaya sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan lokasi pengembangannya:

1. Budidaya Laut

Potensi areal untuk kegiatan budidaya laut di Kabupaten Lombok Timur mencapai 6.842,31 Ha. Dari luas areal budidaya yang ada, Kabupaten Lombok Timur mengembangkan beberapa komoditas pada perairan lautnya, seperti: a) kerang mutiara dengan luas areal budidaya sebanyak 3.433,65 Ha, b) ikan kerapu dengan luas areal budidaya mencapai 509,40 Ha, c) udang lobster dengan areal 525,76 Ha, d) rumput laut sebanyak 2.000,00 Ha, e) teripang sebanyak 194,00 Ha, dan f) kekerangan sebanyak 179,50 Ha. Penyebaran potensi areal pengembangan budidaya laut terdapat di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Sambelia.

2. Budidaya Air Payau

Potensi areal untuk budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Lombok Timur mencapai luas 3.500,00 Ha dengan potensi produksi 24.500,00 ton/thn. Sedangkan pemanfaatannya baru mencapai 322,00 Ha (9,20 %). Sedangkan untuk penyebaran potensi areal budidaya air payau (tambak) tersebut adalah: a) Kecamatan Jerowaru 1.408,50 Ha, b) Kecamatan Keruak 50,00 Ha, c) Kecamatan Sakra Timur 150,00 Ha, d) Kecamatan Labuhan Haji 75,00 Ha, e) Kecamatan Pringgabaya 375,00 Ha, dan f) Kecamatan Sambelia 1.441,50 Ha. Selain tambak dengan komoditas perikanan, Kabupaten Lombok Timur juga memiliki potensi tambak dengan komoditas garam. Tambak garam yang ada saat ini masih dikelola secara sederhana dan kurang/belum menerapkan teknologi modern, namun hasil yang diperoleh dari tambak garam tersebut cukup memberikan pengaruh bagi kesejahteraan petani garam. Luas tambak garam di Kabupaten Lombok Timur

sekitar 419,20 Ha dengan luas areal yang dimanfaatkan sebanyak 297,45 Ha atau sekitar 70,96 % dan memiliki tingkat produksi sebanyak 7,392,58 ton.

3. Budidaya Air Tawar

Potensi pengembangan budidaya air tawar di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan bentuk usahanya dapat digolongkan kedalam tiga bentuk, yaitu kolam, minapadi dan keramba. Potensi areal budidaya ikan air tawar di kolam luasnya 1.771,35 Ha, dimana penyebarannya hampir pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Konsentrasi penyebaran potensi budidaya ikan di kolam yaitu di wilayah selatan dan tengah dengan pemanfaatan areal baru mencapai 901,60 Ha atau sekitar 52,70%. Sementara itu, potensi areal budidaya ikan di sawah (minapadi) luasnya 3.138,00 Ha, dimana penyebarannya berada pada wilayah tengah yang merupakan dataran rendah dan subur. Pemanfaatan potensi areal budidaya ikan di sawah (minapadi) luasnya 366,25 Ha (11,67%). Sedangkan potensi areal untuk kegiatan budidaya ikan di karamba luasnya mencapai 8,85 Ha. Kegiatan budidaya ini dilakukan pada sungai-sungai yang mempunyai aliran air yang cukup dan ketersediaan airnya sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi areal budidaya ikan di karamba baru mencapai 0,25 Ha (2,83%).

c) Usaha Pengolahan

Potensi pengolahan di Kabupaten Lombok Timur sangat beragam, mulai dari usaha pengeringan ikan, pemindangan ikan, pemanggangan/pengasapan, fermentasi/terasi, krupuk, pengolahan rajungan dan rumput laut. Hal ini

disampaikan pula oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, bahwa:

> "Sentaranya itu kita punya di Kecamatan Sakra yaitu sentra pemindangan dan pemanggangan, khususnya di Desa Rumbuk. Sampean asli sini ya? Desa Rumbuk tau ya?. Kemudian Kecamatan Pringgabaya di desa Apitaik yaitu pemindangan ikan, kering ikan atau ikan tembang itu e'e, terus sama di Desa Labuhan Lombok dan Desa Menanga Baris. Terus ada lagi di Kecamatan Keruak, ada di Desa Ketapang Raya, Desa Tanjung Luar, Desa Batu Rimpang tau ya sampean ya, kalau yang itu-kan jual-jual ikan bakar itu pusatnya, ada cumi kering, minyak ikan hiu, pemindang juga ada di sana, minyak ikan hiu, sama olahan hiu itu lho mas kayak sirip, tulang dijadikan tepung. Terus ada lagi di Kecamatan Jerowaru, pengolahan rajungan...itu dilakukan oleh beberapa kelompok" (Wawancara tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)

Usaha pengolahan ini didukung oleh 24 kelompok pengolahan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Pringgabaya, Sambelia, Masbagik, Sakra, Keruak dan Jerowaru. Dari salah satu kelompok tersebut, terdapat satu kelompok yang produknya memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu produk fermentasi/terasi di Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara pada tanggal 5 April 2014 dengan Kepala Desa Jerowaru (Kecamatan Jerowaru) yang mengatakan bahwa "…produk unggulan perikanan itu seperti pengolahan terasi aja dari udang yang berlokasi di Desa Jor. Itu terkenal sampai para pejabat kabupaten atau provinsi itu kalau kesini cari terasi jor, karena rasanya yang khas".

d) Bakau *(Mangrove)*

Ekosistem Bakau *(mangrove)* merupakan hutan rawa yang terdapat pada kawasan pesisir atau muara yang dipengaruhi pasang surut air laut. Luas hutan

bakau *(mangrove)* yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan mencapai 1.777,76 Ha yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Timur, seperti Kecamatan Sambelia yang terletak di bagian utara, sedangkan hutan bakau dibagian selatan terdapat di Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru. Kecamatan yang memiliki luas hutan bakau terbanyak ialah Kecamatan Jerowaru 970,10 Ha, Kecamatan Sambelia sebanyak 724,08 Ha dan Kecamatan Keruak 83,58 Ha. Data ini diperkuat dari hasil wawancara pada tanggal 1 April 2014 dengan Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Bidang Konservasi, Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa "…luas hutan bakau yang ada di Lombok Timur itu sekitar seribu tujuh ratusan-lah. Tersebar di tiga kecamatan seperti Kecamatan Sambelia, Keruak dan Jerowaru".

e) Terumbu Karang *(Coral Reefs)*

Terumbu karang *(coral reefs)* merupakan salah satu ekosistem yang subur atau dapat dikatakan sebagai salah satu ekosistem dengan produktivitas primer tinggi. Ini dikarenakan fungsi dari terumbu karang ialah sebagai tempat yang digunakan oleh ikan dan biota laut lainnya untuk mencari makanan, bereproduksi (berkembang biak/ memperbanyak diri) dan melindungi diri dari predator (musuh) serta sebagai peredam gelombang laut. Penyebaran potensi terumbu karang *(coral reefs)* di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 April 2014 dengan Kepala Seksi KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

"…potensi terumbu karang yang kita punya hampir merata di perairan laut Lombok Timur, seperti di Kecamatan Jerowaru, terus Kecamatan Keruak, Labuhan Haji, Labuhan Lombok, sama di Kecamatan Sambelia. Terumbu karang itu biasanya berada pada kedalaman sekitar 8 sampai 34 meter dari muka air laut dengan perkiraan luasnya mencapai 321,04 kilometer persegi".

f) Lamun *(Seagrass)*

Vegetasi lamun *(seagrass)* yang biasanya hidup di perairan dangkal dan tenang yaitu disekitar perairan teluk. Perairan laut di Kabupaten Lombok Timur termasuk kaya akan vegetasi lamun *(seagrass)*. Dari 12 (duabelas) jenis lamun yang ada di perairan Indonesia, 11 (sebelas) diantaranya ada di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yang mengatakan bahwa "… kita punya potensi kelautan dan perikanan lainnya seperti bakau, terumbu karang, lamun dan gili…untuk lamun, itu kita sangat kaya, sekitar separuh jenis lamun di Indonesia kita miliki". Penyebaran vegetasi lamun tersebut terdapat pada perairan Serewe, Teluk Ekas, Pijot dan Gili Petagan yang ketiganya berada di Kecamatan Jerowaru. Selain itu, vegetasi lamun juga terdapat di Gili Sulat dan Gili Lawang yang keduanya berada dalam lingkup Kecamatan Sambelia.

g) Pulau Kecil/ Gili

Gili merupakan wilayah yang berbentuk pulau, namun berukuran kecil, tidak terpisah jauh dari pulau utamanya, sebagian memiliki penghuni dan ada pula yang tidak berpenghuni. Dari hasil wawancara pada tanggal 1 April 2014 dengan Kepala Seksi KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa "...pulau kecil atau gili di Lotim (Lombok Timur) sangat

banyak, ada yang berpenghuni, ada juga yang tidak dan tersebar di bagian utara sampai selatan". Jumlah pulau kecil/ gili yang ada di Kabupaten Lombok Timur ialah 35 (tiga puluh lima) gili di bagian selatan dan utara. Terdapat 5 (lima) gili yang telah berpenghuni/ telah dimanfaatkan sementara sisanya sebanyak 30 gili masih belum berpenghuni/ belum dimanfaatkan.

B. Data Fokus Penelitian

1. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

a. Kondisi Produksi

Produksi ikan di Kabupaten Lombok Timur sangat beragam mulai dari jenis ikan laut, payau dan tawar. Jenis ikan yang ditangkap nelayan maupun yang dibudidayakan, yaitu Ikan Alu-alu, Bawal, Nila, Gurame, Belanak, Biji Nangka, Cakalang, Cendro, Cumi-cumi, Cucut, Ekor Kuning, Gerot-gerot, Gulamah, Ikan Layaran, Ikan Terbang, Japuh, Julung-julung, Kakap, Kembung, Kerapu, Beronang, Kurisi, Kwee, Layang, Layur, Lemadang, Lemuru, Lencam, Pari, Peperek, Rajungan, Selar, Siro, Sotong, Bentong, Setuhuk Hitam, Sunglir, Talang-Talang, Tembang, Tenggiri, Teri, Tetengkek, Tongkol, Tuna, Hiu, Ikan Lainnya, Udang Windu, Udang Barong/Lobster, Udang Putih, Kenyar, Kerang Darah, Kerang Hijau, Kerang Mutiara, Kerong-kerong, Binatang Lunak dan Rumput Laut (bukan dari jenis ikan). Ikan-ikan, kerang dan rumput laut tersebut merupakan hasil dari beberapa areal perikanan seperti areal budidaya laut, perairan umum, tambak, sawah dan kolam. Jenis ikan yang banyak ditangkap

nelayan ialah ikan cakalang, tongkol, belanak dan cumi. Hal ini diungkapkan oleh Nasipudin, salah satu nelayan di Desa Tanjung Luar yang mengatakan bahwa:

> *"Ndek tentu mauk ta empak ni, laguq si paling luek ta mauq jak empak maraq tongkol, turingan, kadang-kadang cumi endah luek mauq ta mun pas musim'ne. Mun batur-batur si bejaring ni jak, belanak luek mauk na…"* Ikan yang kita dapat itu tidak tentu, tetapi yang paling banyak kita dapatkan seperti ikan tongkol, *turingan* (sebutan bagi ikan cakalang), kadang-kadang cumi-cumi juga banyak kita dapatkan kalau sedang musimnya. Kalau teman-teman yang menjaring ini, ikan belanak yang banyak mereka dapatkan…(Wawancara tanggal 18 April 2014 di pesisir pantai Desa Tanjung Luar)

Perkembangan produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur bersifat dinamis atau dengan kata lain, ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan produksi, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Produksi Perikanan di Kabupaten Lombok Timur 5 Tahun Terakhir

No.	Komoditi	Produksi (Ton/Tahun)					Rata-rata
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	**Budiaya Laut**	**60.559,52**	**93.194,80**	**119.133,80**	**112.590,30**	**104.133,60**	**97.922,40**
	a. Mutiara	0,22	0,20	0,20	0,40	0,50	0,30
	b. Kerapu	5,40	9,00	12,60	17,20	22,20	13,28
	c. Udang Lobster	82,90	116,60	146,00	153,50	173,50	134,50
	d. Rumput Laut	60.471,00	93.069,00	118.975,00	112.419,20	103.937,40	97.774,32
2	**Budidaya Tambak**	**1.435,10**	**1.783,50**	**2.581,20**	**2.788,90**	**3.620,00**	**2.441,74**
3	**Budidaya Air Tawar**	**856,00**	**1.271,10**	**1.752,30**	**3.370,10**	**4.187,14**	**2.287,33**
	a. Kolam	851,00	1.264,70	1.702,80	3.022,70	3.927,24	2.153,69
	b. Minapadi	3,60	4,30	5,70	210,80	130,30	70,94
	c. Keramba	1,40	2,10	43,80	136,60	129,60	62,70
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**12.941,70**	**15.683,00**	**13.095,30**	**12.520,30**	**12.738,50**	**13.395,76**
	Jumlah	**75.792,32**	**111.932,40**	**136.562,60**	**131.269,60**	**124.679,24**	**116.047,23**

Sumber: Data Diolah 2014

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa terdapat 4 (empat) komoditi yang menjadi sumber produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu budidaya laut, budidaya tambak/air payau,

budidaya air tawar dan penangkapan ikan laut. Budidaya laut memiliki produksi tertinggi dari sumber produksi lainnya, walaupun terjadi penurunan produksi pada 2 (dua) tahun terakhir dan jika di rata-rata, maka tingkat produksinya sebesar 97.922,40 ton/tahun yang didapat dari beberapa usaha didalamnya seperti budidaya mutiara, kerapu, udang lobster dan rumput laut.

Gambar 4. Budidaya Udang Lobster/ Barong di Kecamatan Jerowaru
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Untuk komoditi rumput laut, sebagian besar dilakukan oleh masyarakat lokal dengan membentuk usaha skala kecil dan usaha yang tergabung dalam bentuk kelompok dan Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan khusus rumput laut. Kawasan tersebut terletak di Teluk Ekas dan Serewe yang merupakan bagian dari Kecamatan Jerowaru. Masyarakat biasanya menggunakan metode *long line* dalam pembudidayaan rumput laut di kedua kawasan ini. Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, juga mengatakan bahwa “Budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat kita, itu dilakukan pertama kali dengan metode *long line* pada tahun 2002 sampai sekarang, namun saat ini kita coba

dengan metode sistem kantong". Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 Maret 2014 dengan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan hal yang sama, bahwa sebagian besar masyarakat membudidayakan rumput lautnya dengan metode *long line*.

Gambar 5. Budidaya Rumput Laut Metode *Longline* di Kecamatan Jerowaru
Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur 2013

Kemudian untuk budidaya tambak/air payau dan budidaya air tawar dalam 5 (lima) tahun terakhir produksinya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata produksi untuk budidaya tambak ialah 2.441,74 ton/tahun dan budidaya air tawar yang diperoleh dari budidaya kolam, minapadi dan keramba rata-rata 2.287,33 ton/tahun. Sedangkan untuk penangkapan laut perkembangan produksinya bersifat fluktuatif/berubah-ubah dengan rata-rata produksi sebesar 13.395,76 ton/tahun, sehingga rata-rata produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan ialah 116.047,23 ton/tahun. Perkembangan produksi perikanan tersebut juga digambarkan lebih spesifik dalam grafik berikut ini:

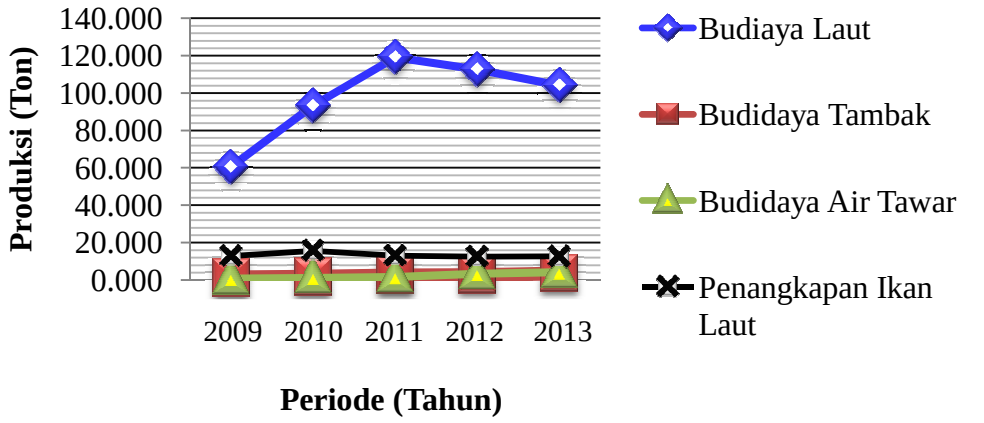

Gambar 6. Grafik Perkembangan Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: Data Diolah, 2014

Grafik tersebut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi perubahan terhadap produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Perubahan tersebut terlihat jelas pada tingkat produksi budidaya laut tahun 2009 sampai tahun 2011. Dalam jangka waktu dari tahun 2009 sampai tahun 201 tersebut, telah terjadi peningkatan yang signifikan, akan tetapi dalam 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, terjadi penurunan produksi ikan.

Untuk perkembangan produksi budidaya tambak dan budidaya air tawar dari tahun 2009 terus mengalami peningkatan produksi secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Sedangkan untuk penangkapan ikan laut, perkembangan produksinya pada tahun 2009 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2010 sampai tahun 2011 terjadi penurunan dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 sampai dengan 2013 perkembangannya tidak terlalu signifikan/ cenderung *stagnan* (berjalan ditempat).

b. Nilai Produksi

Untuk mengukur keberhasilan produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur, tidak hanya pada tingkat produksinya saja namun juga nilai dari produksinya. Hasil dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, mengungkapkan bahwa:

> "Dari data yang kita punya, nilai produksi sektor kelautan dan perikanan kita di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2011 dan 2012 sebagiannya mengalami peningkatan, namun sebagiannya lagi mengalami penurunan. Ini juga dipengaruhi oleh tingkat produksi perikanan kita"

Untuk lebih jelasnya mengenai nilai produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Nilai Produksi dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Lombok Timur

No.	Komoditi	Nilai Produksi		Kenaikan (%/Tahun)
		2011	2012	
1	**Budiaya Laut**	**201.745.850**	**239.960.312**	**18,94**
	a. Mutiara	27.500.000	55.000.000	100,00
	b. Kerapu	3.710.000	6.450.000	73,85
	c. Udang Lobster	38.837.500	53.725.000	38,33
	d. Rumput Laut	131.698.350	124.785.312	-5,25
2	**Budidaya Tambak**	**90.020.300**	**97.611.500**	**8,43**
3	**Budidaya Air Tawar**	**37.992.400**	**72.428.800**	**90,64**
	a. Kolam	37.422.100	66.499.400	77,70
	b. Minapadi	117.900	4.426.800	3.654,71
	c. Keramba	452.400	1.502.600	232,14
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**235.245.000**	**225.365.400**	**-4,20**

Sumber: Data Diolah 2014

Menurut data-data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama dua tahun melakukan produksi perikanan yaitu tahun 2011 dan 2012, Kabupaten

Lombok Timur mengalami penurunan nilai produksi perikanannya pada komoditi rumput laut sebesar 5,25% per tahun dan pada penangkapan ikan lautnya menurun sebanyak 4,20% per tahun. Sedangkan komoditi yang menunjukkan peningkatan/kenaikan nilai produksi signifikan di 2012 ialah komoditi budidaya air tawar, khususnya yang berasal dari usaha minapadi, yaitu sebanyak 3.654,71% per tahun. Peningkatan nilai produksi komoditi budidaya air tawar juga terlihat jelas pada grafik di bawah ini:

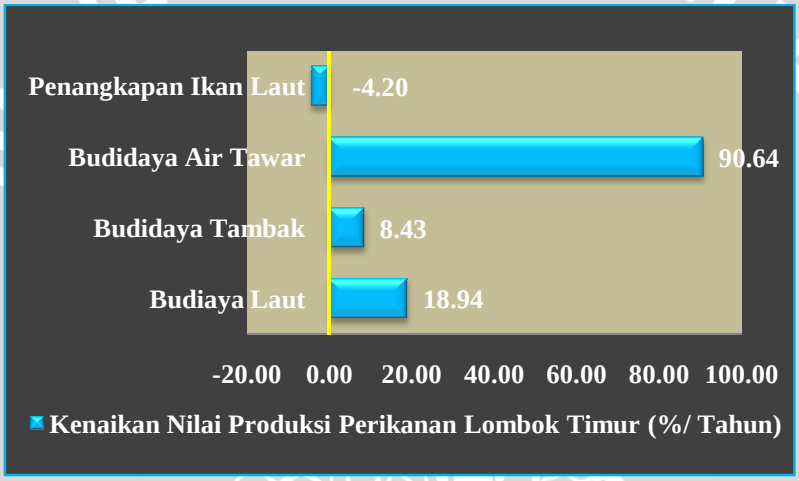

Gambar 7. Grafik Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: Data Diolah 2014

Grafik tersebut menunjukkan nilai produksi komoditi utama yang dimiliki oleh sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Dari ke-empat komoditi yang ada, terdapat satu komoditi yang nilai produksinya menurun yaitu penangkapan ikan laut yang penurunannya sebesar 4,20% per tahun. Sedangkan untuk budidaya air tawar, meningkat secara signifikan di tahun 2012 yaitu sebesar 90,64%, disusul oleh meningkatnya komoditi budidaya laut sebesar 18,94% per tahun, kemudian budidaya tambak/ air payau sebanyak 8,43% per tahun.

c. Produksi Benih

Produksi benih/bibit untuk menunjang pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagian berasal dari BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) yang berada di Kecamatan Labuhan Haji, BBIP Labuhan Haji ini dikhususkan untuk pembesaran ikan laut dan payau seperti kerapu, lobster dan nila. Untuk jumlah benih di BBIP tahun 2014, kurang lebih sekitar 350 ekor benih ikan nila saja dan hanya satu kolam dengan lebar 2 meter dan panjang 4 meter, sedangkan kolam pembesaran lainnya masih kosong.

Gambar 8. Kolam Pembesaran Benih Ikan di BBIP Labuhan Haji
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Kondisi benih yang ada di BBIP Labuhan Haji diperkuat dengan hasil wawancara pada tanggal 10 April 2014 dengan salah satu penjaga (perawat benih ikan) sekaligus sebagai pekerja di BBIP Labuhan Haji, mengatakan bahwa:

> *"…anu kosong, cuma ini doang so nile ini. Kance rubin bawal ta cobak, laguk mate dile doang terus te'teh wah...kosong doang lapuk'na. Laek ja se-ndek man begenti bupati no, kolam-kolam ni berisi doang lapuk'na, terus jerak no agak macet, sampe nane wah…terus pimpinan tini wah almarhum endah pire-pire bulan ini wah. Mun bibit leman dinas, tini taok pembesaran doang. Ite coba anu sebenar'ne, anu apa aran'ne pakan alami plankton no, laguq kan ndaraq gin ta kadu. Wah pira kali ta coba laguq teteh doang"*…anu kosong, Cuma ada Ikan Nila ini saja. Kemarin kita coba pembesaran bawal, tetapi karena sering mati lampu (listrik)

akhirnya mati semua…(kolamnya) kosong semua. Dulu sebelum pergantian bupati sebelumnya (bupati era 2003-2008), kolam-kolam pembesaran di BBIP semuanya berisi, akan tetapi setelah itu (setelah pergantian bupati) sepertinya sedikit terhambat dan sampai sekarang…terus pimpinan (BBIP) yang ada disini juga sudah meninggal dunia beberapa bulan ini. Kalau benih/bibit diadakan oleh dinas, disini untuk pembesaran. Kami coba anu sebenarnya, anu apa namanya pakan alami "plankton" itu, tapi tidak ada yang kami gunakan (modal). Sudah beberapa kali kami coba tetapi semuanya mati saja.

Produksi benih/bibit juga dilakukan oleh BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) yang khusus mengelola pembenihan dan pembesaran ikan air tawar seperti ikan nila, mujahir, gurame, lele, patin, bawal, tawes dan ikan mas. Jumlah produksi bibit/ benih yang ada di BBI Lenek jika dihitung maka total benih yang dihasilkan kurang lebih sekitar 14.400 ekor. Jumlah ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 22 April 2014 dengan H. Lalu Zaidun yang mengatakan bahwa "Balai Benih Ikan (BBI) Lenek ini memiliki luas satu hektar dua puluh (1,20 Ha) menurut sertifikat yang ada, tapi setengahnya untuk kolam setengahnya lagi untuk bangunan. Ini terdiri dari 36 kolam dan untuk satu kolam minimal berisi 400 ekor ikan…". Jumlah ini belum termasuk kolam ukuran kecil yang baru dibentuk dengan isi benih ikan berumur sekitar 3-4 minggu.

Gambar 9. Kolam Produksi Benih di BBI Desa Lenek, Kecamatan Aikmel
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Produksi benih/bibit di Kabupaten Lombok Timur bukan hanya berasal dari BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) di Kecamatan Labuhan Haji dan BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) saja, namun sebagian besar benih/bibit ikan biasanya didatangkan dari luar kabupaten bahkan dari luar pulau, terutama untuk komoditi rumput laut. Sesuai dengan hasil wawancara tanggal 19 Maret 2014 dengan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

> "…ada juga komoditi yang kita upayakan juga ialah rumput laut, kita punya potensi lahan dua ribu hektar tapi pemanfaatannya masih kecil yaitu kurang dari dua puluh persen. Disini sebenarnya kendalanya sering di bibit. Bibit itu kita masih kurang dan petani rumput laut kita mendatangkannya dari luar. Itu yang sedang kita upayakan untuk ketersediaan bibitnya".

Produksi bibit untuk kepentingan budidaya khususnya mutiara dan udang, lebih banyak dilakukan oleh perusahaan swasta dan ada juga yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk UD (usaha dagang) yang dimiliki oleh individu maupun dalam bentuk kelompok. Hal ini dipertegas juga dari hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang sudah lama bekerja pada Bidang Budidaya sebagai Koordinator Program, mengatakan bahwa:

> "kalau data mengenai pembibitan ikan, kita masih belum ada data konkritnya, hanya saja untuk kepentingan atau kebutuhan budidaya khususnya budidaya mutiara dan udang, biasanya dilakukan oleh beberapa pihak seperti perusahaan dan ada juga dari UD (usaha dagang) yang ada di Lombok Timur".

Berikut adalah nama, bidang usaha dan lokasi usaha dari perusahaan dan UD (usaha dagang)/usaha milik pribadi yang melakukan produksi benih/bibit di Kabupaten Lombok Timur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Perusahaan, UD (Usaha Dagang)/Usaha Milik Pribadi yang Melakukan Usaha Budidaya di Kabupaten Lombok Timur 2013

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi Usaha
1	PT. *Autore Pearl Culture*	Mutiara	Kec. Sambelia dan Kec. Jerowaru
2	PT. BGHM (Buana Gemilang Hamparan Mutiara)	Mutiara	Kec. Sambelia
3	PT. Hide Mulia	Mutiara	Kec. Pringgabaya
4	PT.Pundi-pundi Lumbung Pertiwi	Mutiara	Kec. Pringgabaya
5	UD. Makmur Sejahtera	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
6	UD. Unik Samudra	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
7	UD. Melempo Jaya	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
8	UD. Sukses Makmur	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
9	Adi Sucipto	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
10	Windu Menanga Reak'	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
11	Wahyu Tanoyo	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
12	Kelompok Tani Mitra Sukses	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
13	Kelompok Tani Pantai Makmur	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
14	Windu Marina Abadi	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
15	Tanjung Kenanga	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
16	Nefo	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia
17	PT. Bumi Padak Goar	Budidaya Tambak Udang	Kec. Sambelia

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur 2014

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 (dua) komoditi yang memiliki usaha budidaya sekaligus melakukan pembibitan yaitu komoditi mutiara dan udang. Kedua komoditi ini dikembangkan oleh 17 perusahaan yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sambelia, Pringgabaya dan Jerowaru. Adapun untuk perusahaan yang memiliki dua lokasi pengembangan, yaitu PT. *Autore Pearl Culture* dengan bidang usaha mutiara yang berlokasi di Kecamatan Sambelia dan Jerowaru. Sedangkan untuk budidaya dan pembibitan udang, sebagian besar berada di Kecamatan Sambelia.

d. Pengolahan Hasil

Usaha pengolahan hasil dari sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh industri pengolahan skala rumah tangga yang pemasarannya untuk memenuhi permintaan pasar lokal/ antar daerah dan menurut hasil wawancara tanggal 28 Maret 2014 dengan Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, diketahui bahwa hanya ada 2 (dua) industri pengolahan ber-skala besar, yaitu PT. Versajah Tunaloi dan UD. Baura Tuna, keduanya mengolah ikan tuna dengan kualitas ekspor.

Gambar 10. Industri Pengolahan Tuna di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur 2013

Untuk industri pengolahan skala rumah tangga biasanya berbentuk PT (Perusahaan Terbatas), UD (Usaha Dagang) dan individu/ kepemilikan pribadi maupun keluarga. Industri pengolahan skala rumah tangga juga terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan tujuan usaha pengolahannya, yaitu pengolahan konsumsi dan non-konsumsi. Pengolahan konsumsi ialah bentuk pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk konsumsi (dimakan), seperti pengeringan ikan,

pemindangan, pemanggangan/pengasapan, pembuatan terasi dan beberapa makanan ringan yang berbahan dasar ikan serta olahan dari rumput laut lainnya.

Gambar 11. Hasil Olahan Ikan Panggang di Pasar Tradisional Keruak
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Pengolahan non-konsumsi merupakan bentuk pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang sebagian besar (relatif) tidak untuk dikonsumsi (tidak dimakan). Selain itu, bahan bakunya berasal dari sisa pengolahan yang bersifat konsumsi baik berupa sirip, tulang maupun kulit ikan yang kemudian dijadikan bahan obat-obatan. Pengolahan non-konsumsi lainnya bertujuan untuk koleksi pribadi atau sebagai perhiasan, seperti mutiara. Usaha-usaha pengolahan hasil untuk konsumsi dan non-konsumsi di Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh beberapa kelompok usaha. Lebih lanjut, Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan mengatakan bahwa:

> “Sentaranya itu kita punya di Kecamatan Sakra yaitu sentra pemindangan dan pemanggangan, khususnya di Desa Rumbuk. Sampean asli sini ya? Desa Rumbuk tau ya?. Kemudian Kecamatan Pringgabaya di desa Apitaik yaitu pemindangan ikan, kering ikan atau ikan tembang itu e’e, terus sama di Desa Labuhan Lombok dan Desa Menanga Baris. Terus ada lagi di Kecamatan Keruak, ada di Desa Ketapang Raya, Desa Tanjung Luar, Desa Batu Rimpang tau ya sampean ya, kalau yang itu-kan jual-jual ikan bakar itu pusatnya, ada cumi kering, minyak ikan hiu, pemindang juga ada di sana, minyak ikan hiu, sama olahan hiu itu lho mas kayak sirip, tulang dijadikan tepung. Terus ada lagi di Kecamatan Jerowaru, pengolahan rajungan...itu dilakukan oleh beberapa kelompok” (Wawancara tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur)

Beberapa kelompok pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan pengolahan untuk tujuan konsumsi dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 17. Jenis Usaha dan Kelompok Usaha Pengolahan Tujuan Konsumsi Tahun 2012

No.	Jenis Usaha Pengolahan	Nama Kelompok	Lokasi Usaha
1	Pengeringan Ikan	Setia Kawan	Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya
2	Pemindangan Ikan	Melati I	Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia
		Melati II	Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia
		Timba Segeleng	Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya
		Nilatika	Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik
		Kembang Sari	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Sopoq Ate	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Bandang Reak	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Tumpang Sari	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Sirage Nunggal	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Tunas Makmur	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Belimbing Manis	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Briuk Tinjal	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Mekar Sari	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Tumbuh Baru	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Sumber Rejeki	Desa Batu Rimpang, Kecamatan Keruak
3	Tepung Ikan	UD. Adi Tresna	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		UD. Mina Raya	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Haji Ati	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
		Jayadi	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
4	Pengolahan Fermentasi/Terasi	Pesisir Samudra	Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru
5	Krupuk Ikan	Kelompok Usaha Kerupuk Ikan Hiu (KUKIH)	Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra
6	Rajungan/ Kepiting Laut	UD. Laut Biru	Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru
7	Rumput Laut	PT. Mitra Nusra	Teluk Sunut, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat satu kelompok yang melakukan usaha pengolahan ikan kering, yaitu kelompok pengolahan Setia

Kawan yang terletak di Desa Apitaik (Kecamatan Pringgabaya). Untuk jenis usaha pengolahan berupa pemindangan ikan memiliki kelompok usaha paling banyak yaitu sekitar 15 kelompok yang sebagian besar berlokasi di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra tidak hanya mendominasi pada usaha pemindangan saja, namun juga menjadi lokasi utama dalam usaha pengolahan ikan menjadi tepung ikan dan kerupuk ikan. Sementara itu, Kecamatan Jerowaru memiliki usaha pengolahan yang beragam, mulai dari pengolahan terasi udang di Dusun Jor, pengolahan rajungan/kepiting laut di Dusun Ujung, sampai dengan pengolahan yang bukan berbahan baku hewani (ikan, udang, kepiting, kerang, dan lain-lain), namun berbahan nabati (tumbuh-tumbuhan) seperti pengolahan rumput laut di Dusun Teluk Sunut. Sedangkan untuk kelompok pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang bertujuan non-konsumsi dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18. Jenis Usaha dan Kelompok Usaha Pengolahan Tujuan Non-Konsumsi Tahun 2012

No.	Komoditi	Potensi	Produksi	Nama Kelompok	Lokasi Kegiatan
1	Mutiara	3.433 Ha	0,4 ton/tahun	PT. *Autore Pearl Culture*, PT. BGHM (Buana Gemilang Hamparan Mutiara), PT. Hide Mulia dan PT.Pundi-pundi Lumbung Pertiwi	Kec. Jerowaru, Kec. Sambelia dan Kec. Pringgabaya
2	Tulang	-	1500 kg/bulan	UD. Adi Tresna	Rumbuk Kec. Sakra
			1000 kg/bulan	UD. Mina Raya	Rumbuk Kec. Sakra
			500 kg/bulan	H. Ati	Rumbuk Kec. Sakra
			500 kg/bulan	Jayadi	Rumbuk Kec. Sakra
3	Kulit Pari	-	1000 kg/bulan	UD. Mina Raya	Rumbuk Kec. Sakra
			100 kg/bulan	Kelompok Pada Girang	Rumbuk Kec. Sakra
4	Minyak Hiu	800 liter	600 liter/bulan	UD. Adi Tresna/ H. Arpi	Rumbuk Kec. Sakra
			600 liter/bulan	UD. Barokah/ Suyitno	Tanjung Luar Kec. Keruak
			500 liter/bulan	H. Ati	Rumbuk Kec. Sakra

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) komoditi yang menjadi fokus usaha pengolahan non-konsumsi, yaitu mutiara, pengolahan tulang, kulit pari dan minyak hiu. Pengolahan komoditi ini dilakukan oleh 13 kelompok usaha yang hasil olahannya dijadikan bahan baku obat-obatan dan perhiasan. Terdapat dua komoditi yang memiliki potensi pengembangan seperti mutiara (3.433 Ha) dan pengolahan minyak hiu (800 liter). Seperti pengolahan untuk tujuan konsumsi, pengolahan ini juga didominasi oleh kelompok usahan pengolahan yang berasal dari Desa Rumbuk (Kecamatan Sakra).

e. Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur merupakan indikator yang menunjukkan bahwa produk perikanan yang ada saat ini memiliki kualitas, kuantitas dan produktifitas yang bisa diterima oleh masyarakat selaku konsumen maupun diterima oleh perusahaan sebagai bahan baku utama dalam pengembangan produk industri. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal tanggal 28 Maret 2014 dengan Herawati Lustiana, S.Pi selaku Staff pada Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa “perkembangan tingkat konsumsi ikan kita di Lotim (Lombok Timur) cukup baik dan ini terus dilakukan upaya peningkatannya…rumus untuk menghitungnya-pun ada sendiri, itu tergantung dari tingkat produksi ikan dan harganya”. Pada tanggal 28 Maret 2014, Ishak, S.Pi selaku Staff pada bidang yang sama mengatakan bahwa “upaya peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur itu didukung oleh program provinsi yaitu GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dan diperkuat lagi dengan lembaga

FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)". Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Lombok Timur

No.	Tingkat/ Level	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)		Kenaikan (%/Tahun)
		2013	2014	
1	Nasional	35,14	38,00	8,14
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	25,4	29,04	14,33
3	Kabupaten Lombok Timur	27,94	31,94	14,32

Sumber: Data Diolah 2014

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat konsumsi ikan tingkat nasional sekitar 8,14% per tahun yang berpengaruh pada meningkatnya konsumsi ikan di tingkat provinsi khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 14, 33% per tahun. Sedangkan untuk konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013 sekitar 27,94 kg/kapita dan tahun 2014 sekitar 31,94 kg/kapita atau jika di lihat dari kenaikan/peningkatannya, maka tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur meningkat sebanyak 14,32% per tahun.

f. Hutan Bakau, Terumbu Karang, Padang Lamun dan Gili

Hutan bakau, terumbu karang dan padang lamun merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Hutan bakau sebagai pelindung pantai dari abrasi, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan hewan laut lainnya, sedangkan padang lamun sebagai salah satu sumber pakan bagi ikan dan dapat juga dijadikan sebagai bahan makanan dan beberapa campuran obat-obatan bagi manusia. Kondisi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan pulau kecil/gili di Kabupaten Lombok Timur diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Bidang Konservasi, Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, bahwa:

> "Bidang yang kita kelola itu berkaitan dengan *mangrove*, terumbu karang, padang lamun dan pulau-pulau kecil atau Gili. Namun yang sering kita program itu *mangrove* sama terumbu karang. Dari data yang ada 'kan terdapat kondisi baik, sedang dan rusak…lokasi *mangrove* ini kita punya lokasi di Kecamatan Sambelia, Jerowaru dan Keruak di lokasi ini kita lakukan program penanaman kembali. Kemudian terumbu karang kita lakukan program terumbu karang buatan, tapi masalah untuk terumbu karang ini sangat-sangat sulit diatasi, masalah pengeboman, e'e'e' ini terjadi di sepanjang perairan kita baik di utara maupun selatan. Pengeboman ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, jadi sangat sulit untuk di atasi".

Kondisi hutan bakau, terumbu karang dan padang lamun di Kabupaten Lombok Timur lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Luas Hutan Bakau di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012/ 2013

No.	Kecamatan	Desa	Kondisi (Ha)			Luas (Ha)
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Jerowaru	Jerowaru	59,51	27,05	21,64	108,2
		Pemongkong	232,18	105,53	84,43	422,14
		Sekaroh	38,65	17,56	14,05	70,264
		Batu Nampar Selatan	19,52	8,87	7,1	35,49
		Serewe	37,55	17,06	13,65	68,26
		Ekas Buana	47,99	21,81	17,45	87,25
		Wakan	41,8	19,2	15,2	76,2
		Pandan Wangi	41,42	18,82	15,06	75,3
		Paremas	14,85	6,75	5,4	27
Jumlah			**533,47**	**242,65**	**193,98**	**970,10**
2	Keruak	Pijot	20,86	9,48	7,59	37,93
		Ketapang Raya	25,11	11,41	9,13	45,65
Jumlah			**45,97**	**20,89**	**16,72**	**83,58**
3	Sambelia	Sugian	367,61	167,2	133,68	668,49
		Padak Goar	30,57	13,9	11,12	55,59
Jumlah			**398,18**	**181,1**	**144,8**	**724,08**
Total Luas (Ha)			**977,62**	**444,64**	**355,50**	**1.777,76**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki hutan bakau, yaitu Kecamatan Jerowaru, Keruak dan Sambelia. Kondisi hutan bakau di tiga kecamatan tersebut sebagian besar dalam kondisi baik, namun ada juga hutan bakau yang mengalami kerusakan dan kerusakannya hampir merata di tiga kecamatan tersebut.

Gambar 12. Kondisi Tanaman Bakau/ *Mangrove* di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Luas areal hutan bakau di Kecamatan Jerowaru sekitar 970,10 Ha, Kecamatan Keruak sebanyak 83,58 Ha dan Kecamatan Sambelia sebanyak 724,08 Ha. Sehingga luas total area yang menjadi hutan bakau di Kabupaten Lombok Timur ialah 1.777,76 Ha yang terdiri dari 977,62 Ha hutan bakau dalam kondisi baik, 444,64 Ha dalam kondisi sedang, dan sisanya sebanyak 355,50 Ha dalam kondisi memperihatinkan/rusak. Selain hutan bakau, terdapat juga terumbu karang sebagai tempat tempat berkembangbiaknya ikan dan biota laut lainnya atau dengan kata lain terumbu karang merupakan salah satu indikator yang menentukan baik atau tidaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

No.	Kecamatan	Kondisi (Ha)			Luas Total (Ha)
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Jerowaru	233,28	251,20	371,52	856,00
2	Keruak	112,30	124,00	178,88	415,18
3	Labuhan Haji	103,68	115,20	165,12	384,00
4	Pringgabaya	120,96	134,40	192,64	448,00
5	Sambelia	293,76	326,40	467,84	1.088,00
Jumlah		**863,98**	**951,20**	**1.376,00**	**3.191,18**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa hanya ada satu kecamatan dari 6 (enam) kecamatan pesisir yang belum terdata kondisi terumbu karangnya, yaitu Kecamatan Sakra Timur. Sedangkan untuk kondisi terumbu karang di 5 (lima) kecamatan pesisir Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar dalam kondisi rusak dengan luas kerusakan sebesar 1.376,00 Ha dari luas total terumbu karang yang ada, yaitu 3.191,18 Ha. Sementara untuk sisanya sebesar 951,20 Ha dalam kondisi sedang dan 863 Ha dalam kondisi baik. Kemudian untuk kondisi padang lamun di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013, sebagian besar dalam kondisi baik, namun kondisi padang lamun yang rusak lebih banyak dari kondisi sedang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

No.	Kecamatan	Kondisi (Ha)			Luas Total (Ha)
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Jerowaru	29,59	6,82	9,1	45,51
2	Keruak	24,49	5,65	7,53	37,67
3	Sambelia	47,96	11,06	14,75	73,77
Jumlah		**102,04**	**23,53**	**31,38**	**156,95**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah padang lamun di Kabupaten Lombok Timur ialah 156,95 Ha yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Jerowaru sebanyak 45,51 Ha, Kecamatan Keruak sebanyak 37,67 Ha dan Kecamatan Sambelia sebanyak 73,77 Ha. Padang lamun dengan kondisi baik sekitar 102,04 Ha, kondisi sedang sekitar 23,53 Ha dan padang lamun yang mengalami kerusakan lebih banyak daripada padang lamun dengan kondisi sedang yaitu sekitar 31,38 Ha. Vegetasi lamun selain terdapat di tiga kecamatan tersebut, tetapi juga banyak ditemukan pada pulau-pulau kecil/gili-gili.

Gili-gili/pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Lombok Timur biasanya dijadikan tempat penelitian dan sebagian digunakan sebagai tempat hunian alternatif bagi masyarakat pantai di Lombok Timur serta sebagai tempat wisata. Kabupaten Lombok Timur memiliki kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gili yang sebagian besar dari gili-gili tersebut tersebar di bagian selatan dan utara dengan 5 (lima) gili telah berpenghuni sementara sisanya sebanyak 30 gili masih belum berpenghuni. Nama dari 5 (lima) gili dalam kondisi berpenghuni diantaranya ialah Gili Belek, Gili Bidara, Gili Sunut, Gili Ree dan Gili Maringkik.

g. Penghasilan Nelayan, Pembudidaya dan Pedagang Ikan

Kabupaten Lombok Timur memiliki nelayan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Pringgabaya, dan Sambelia. Dari enam kecamatan tersebut, jumlah nelayannya sangat beragam mulai dari yang paling rendah sampai yang paling banyak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Jumlah Nelayan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)
1	Jerowaru	11	3.319
2	Keruak	3	6.037
3	Sakra Timur	2	611
4	Labuhan Haji	7	1.680
5	Pringgabaya	10	3.686
6	Sambelia	8	2.224
Total		**41**	**17.557**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut jumlah nelayan terbanyak terdapat di Kecamatan Keruak dengan jumlah 6.037 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) desa. Untuk kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit, terletak di Kecamatan Sakra Timur yang berjumlah 611 jiwa dan tersebar hanya di 2 (dua) desa saja. Sedangkan total nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ialah 17.557 jiwa yang tersebar pada 41 desa dari enam kecamatan pantai/pesisir. Dari jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar nelayan memiliki tingkat penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 500.000 kapita/bulan, sementara untuk tingkat penghasilan tertinggi sekitar Rp. 1.700.000 kapita/bulan dan penghasilan nelayan terendah ialah sekitar Rp. 250.000 kapita/bulan.

Tingkat penghasilan yang dimiliki nelayan Kabupaten Lombok Timur saat ini didapat dari kerja keras dan pengorbanan yang besar bahkan sampai mengalami kerugian. Kerugian-kerugian yang dialami menyebabkan beberapa nelayan beralih profesi sebagai pedagang, bekerja sebagai buruh perusahaan perikanan, berwirausaha (tambak, kolam, usaha walet), dan ada pula yang alih

profesi sebagai pengumpul barang bekas, salah satunya Amaq Rawisah (Bapak Rawisah) yang mengatakan bahwa:

> "*Ado ngene angkun na, amun laek kan jaq masi empak utuh, kan jak adoh begak sakitan ta mancing, mun ta mauq bejual araq-araq aji enam pulu pituq pulu jak aget ita wah ino bauq ta mbeli beras, meta minyak. Laguq ndeq'ne rapet engan ta, toooh… tooooooh…. nooo…ujung gunung no. Ndeq tiang wah sampe flores jaq, engkah pulo. Engkah no, sedia sangu sebulan/ dua bulan, mun seminggu jak kado' so ita, sedia minyak no dua telu jerigen. Becatan ta meta skene, ta mauq satus seminggu, sekilo dua stengah, mun sekarung isian seket beras ino jak paling entah lima kilo*" Aduh begini saja, kalau dulu kan ikan masih utuh/ banyak (sekarang ikan sudah menipis), sehingga sangat sulit/ sakit untuk memperoleh ikan, jika kita (arti "kita" merujuk ke "saya" dalam bahasa sasak halus) dapat menjual kira-kira harga enam puluh atau tujuh puluh saja sudah berutung dan dapat membeli beras dan (mencari) minyak. Akan tetapi, jarak dengan tempat penangkapan tidak dekat, disanaaa… disanaaaaaaa…itu…di ujung gunung itu. Saya belum pernah (menangkap ikan) sampai flores, hanya sampai pulau kecil saja. Setelah itu, harus sediakan bekal satu bulan atau dua bulan, kalau (melaut) hanya seminggu saja, kita (saya) bisa rugi, butuh minyak dua atau tiga jerigen (tempat yang terbuat dari plastik yang biasanya digunakan untuk mengisi bensin, solar, minyak tanah, dll). Lebih cepat kita (saya) mencari botol bekas, dapat seratus ribu satu minggu, satu kilo harganya dua ribu setengah, kalau satu karung ukuran beras lima puluh kilo, itu hanya mendapatkan lima kilo (botol bekas). (Wawancara pada tanggal 14 April 2014, di pesisir pantai Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya).

Dapat dipahami bahwa menjadi nelayan merupakan profesi yang penuh resiko. Sebagian besar dari nelayan di Kabupaten Lombok Timur tidak mampu mengembalikan modal usaha, untuk melaut saja butuh bahan bakar yang banyak sedangkan tujuan/ tempat penangkapan sangat jauh, karena di laut terdekat stok ikan sudah menipis yang pada akhirnya mereka (nelayan) memilih untuk beralih profesi. Menjadi pengumpul botol bekas saja, bisa menghasilkan uang sebanyak Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000 per minggu, sedangkan menjadi nelayan (khususnya nelayan kecil) hasil sebanyak itu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya, terkadang tidak sesuai dengan hasil kerja keras di laut dan justru

sebaliknya, nelayan berkorban besar (rugi) untuk bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu.

Untuk pendapatan pembudidaya ikan, perhitungannya setiap kali panen dan berbeda-beda pada setiap komoditi budidaya. Tingkat pendapatan pembudidaya khusus budidaya laut seperti budidaya kerapu dan lobster berkisar antara Rp. 4.000.000 sampai Rp. 50.000.000 per sekali panen. Sedangkan untuk pembudidaya air tawar (nila, karper, gurame, lele) pendapatan yang diperoleh dari usahanya ialah Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 17.000.000 per sekali panen. Sedangkan untuk tingkat pendapatan petani/pembudidaya rumput laut sekitar 1.000.000 sampai Rp.13.700.000 per sekali panen. Tingkat pendapatan pembudidaya ikan di Kabupaten Lombok Timur diperkuat dari hasil wawancara pada tanggal 4 April 2014 dengan Abdul Mugis S.Pi selaku Staff Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, yang mengatakan bahwa:

> *"Pendapatan tau si budidaya empak atau komoditas si len o oken Kabupaten Lombok Timur o pada ke sebagian reak' pendapatan pembudidaya si lok oken Kabupaten len se-NTB (Nusa Tenggara Barat). Tau si budidaya kerapu atau lobster oken Semawa o maung no sekitar sekat juta per sekali panen o. Lamin empak aik' tawar o sekitar saik' dapet enam olas sekian lah tiap panen. Si maung untung reak' o, pembudidaya rebu let, hok o sekitar telu olas atau bahkan sampe lima olasan, ke rebu let tu panen biasa'no umir 45 ngano"* Pendapatan orang/petani yang membudidayakan ikan atau komoditi yang lainnya di Kabupaten Lombok Timur itu sama dengan sebagian besar pendapatan pembudidaya yang ada di Kabupaten lainnya se-NTB (Nusa Tenggara Barat). Orang yang membudidayakan kerapu atau lobster di Sumbawa, memperoleh pendapatan sekitar lima puluh juta per sekali panen. Kalau ikan air tawar, itu sekitar satu sampai enam belas sekian (juta) tiap panen. Yang mendapatkan pendapatan/untung banyak ialah pembudidaya rumput laut, itu sekitar tiga belas atau bahkan sampai lima belasan (juta) dan rumput laut kita panen biasanya umur 45 hari.

Dalam usaha budidaya rumput laut, biasanya pembudidaya memilih tenaga kerja lokal untuk mengikat bibit rumput laut yang diberikan upah sebesar Rp. 5.000 setiap 50 meter ikatan bibit. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pada tanggal 5 April 2014 dengan Inaq Jenap (Ibu Jenap) yang merupakan salah satu pengikat rumput laut di Kecamatan Jerowaru, beliau mengatakan bahwa:

> *"…pire laloq' mauq' ta anak. Seket meter mauq ta betali' bayar ne ita si bos n'tieh, entah lima-iyu, ba' laguq' ketimbang ndarak ta poroq' anneh. Ni arik'me endah ta tejak betali' mauk sejelo sepulu atau due pulu, jari bauk ne kadu belanje, bayar buku sekolah…"* …dapat kita tidak seberapa anakku (anakku adalah panggilan akrab ibu-ibu di suku sasak terhadap anak muda). Lima puluh meter hasil mengikat (bibit rumput laut) kita di bayar oleh bos, itu cuma lima ribu rupiah, tetapi daripada tidak ada pekerjaan. Ini adik mu (anak Ibu Jenap) juga saya mengajaknya mengikat (bibit rumput laut) dia mendapatkan (uang/upah) sehari Rp. 10.000,- atau Rp 20.000,- sehingga dapat digunakan untuk keperluan belanja dan bayar buku sekolah.

Gambar 13. Pengikat Rumput Laut di Kecamatan Jerowaru
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Peluang kerja bukan hanya bagi pengikat rumput laut, namun juga pedagang/penjual ikan juga dapat diuntungkan dari kegiatan budidaya tersebut bahkan dari kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Pedagang/ penjual ikan khususnya ikan hasil tangkapan nelayan maupun pembudidaya di Kabupaten Lombok Timur memiliki tingkat pendapatan sekitar Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000 per hari. Pedagang/ penjual ikan yang ada di pasar tradisional

sebagian besar merupakan pedagang dengan modal kecil salah satunya Inaq Rohan (Ibu Rohan) pedagang/penjual ikan di pasar tradisional Kecamatan Keruak, yang mengatakan bahwa:

> *"Tanjong taok ta bait empak, nendak e'ntan anakku modal ta satus, kurabelah, satak pire jak si araq. Cumi empat ngatus selae, mun muraq jak luek mauk ta mun nengka jak mahal. Pire lalo mauk ta bedagang anakku sepulu, lima olas, dua pulu kadang-kadang mun arak, mun nde arak ba ndarak mauk ta"* Tanjung (Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak) tempat saya mengambil ikan, caranya dengan memborong anakku (anakku adalah panggilan akrab ibu-ibu di suku sasak terhadap anak muda) dengan modal Rp. 100.000, Rp. 150.000, Rp. 200.000 berapa saja yang ada (modal). Cumi-cumi modalnya Rp. 425.000, kalau murah kita bisa mendapatkan banyak, kalau sekarang mahal. Dapat berdagang tidak seberapa anakku Rp. 10.000, Rp. 15.000, Rp. 20.000 itupun kalau ada, kalau tidak ya tidak dapat apa-apa. (Wawancara pada tanggal 18 April 2014, di Pasar Tradisional Keruak, Kecamatan Keruak).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pedagang/ penjual ikan yang bermodal rendah sebagian besar berpenghasilan terendah ialah Rp. 10.000 dan pendapatan pedagang/penjual dalam tingkatan sedang yaitu Rp. 20.000, sedangkan pendapatan pedagang/penjual ikan tertinggi ialah Rp. 50.000.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan pada sektor tersebut. Tersedianya sarana dan prasarana akan mempermudah nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, konsumen maupun memberikan kemudahan dalam pengawasan, pendistribusian bibit dan hasil, pemasaran, tumbuhnya usaha baru, pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta mempermudah pihak-pihak yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dalam mengelola sumberdaya yang ada. Untuk sarana pendukung dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada

di Kabupaten Lombok Timur yaitu armada penangkapan ikan, alat tangkap serta koperasi nelayan. Ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yang mengatakan bahwa:

> "dilihat dari sarana-prasarananya Kabupaten Lombok Timur butuh banyak perbaikan. Sarana-prasarana yang kita punya armada penangkapan ikan itu sekitar tiga ribuan, kemudian alat tangkap yang sering digunakan teman-teman nelayan biasanya pancing (pancing biasa) atau jaring, kita juga punya koperasi nelayan. Kemudian kita punya BBI, BBIP, TPI, KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) dan masih banyak lagi. Kita juga bentuk KPPL (Komite Pengelola Perikanan Laut) desa pada tahun 2000 eee 2001-an kalau gak salah…"

Armada penangkapan ikan berupa Perahu Tanpa Motor (PTM), Perahu Motor Tempel (PMT) dan Kapal Motor (KM). Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan *landing places/* tempat pendaratannya dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 24. Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Kecamatan	*Landing Places* (Desa/ Kelurahan)	Armada Penangkapan Ikan (Unit)			Total
			PTM	PMT	KM	
1	Jerowaru	Batu Nampar	103	1.540	12	1.655
2	Keruak	Tanjung Luar	10	965	179	1.154
3	Sakra Timur	Sakra Timur	15	72	3	90
4	Labuhan Haji	Labuhan Haji	62	237	2	301
5	Pringgabaya	Labuhan Lombok	77	121	110	308
6	Sambelia	Sugian	212	203	39	454
Jumlah			**479**	**3.138**	**345**	**3.962**

Keterangan: PTM = Perahu Tanpa Motor
PMT = Perahu Motor Tempel
KM = Kapal Motor

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

Dari tabel tersebut diketahui bahwa armada penangkapan ikan yang ada di kabupaten Lombok Timur ialah perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan

kapal motor. Armada penangkapan ikan tersebut tersebar di 6 (enam kecamatan) seperti Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Sambelia. Adapun armada penangkapan ikan yang paling banyak digunakan oleh nelayan di Kabupaten Lombok Timur berturut-turut ialah perahu motor tempel (PMT) yang jumlahnya mencapai 3.138 unit, perahu tanpa motor (PTM) berjumlah 479 unit dan terakhir ialah kapal motor dengan jumlah 345 unit.

Terdapat 2 (dua) *landing place* (tempat pendaratan) yang memiliki armada terbanyak yaitu *landing place* di Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru dan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. *Landing place* di Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru dengan total aramada penangkap ikannya sebanyak 1.655 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 103 unit, perahu motor tempel sebanyak 1.540 unit dan kapal motor sebanyak 12 unit. Kemudian *landing place* armada penangkapan ikan terbanyak kedua ialah *landing place* di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak yang memiliki armada penangkapan ikan dengan total 1.154 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 10 unit, perahu motor tempel sebanyak 965 unit dan kapal motor sebanyak 179 unit.

Gambar 14. *Landing Place* di Kecamatan Jerowaru dan Keruak
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Sarana pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang kedua ialah alat tangkap. Alat tangkap baik dari segi jumlah maupun jenisnya merupakan sarana utama dalam upaya peningkatan produksi tangkapan ikan. Jumlah dan jenis alat tangkap menurut *landing places* di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Alat Tangkap	Batu Nampar	Tanjung Luar	Sakra Timur	Labuhan Haji	Labuhan Lombok	Sugian	*Total*
1	Payang	19	366	-	-	13	-	398
2	Purse Seine	-	37	-	-	15	-	52
3	Jaring Insang Hanyut	-	52	24	56	68	90	290
4	Jaring Insang Tetap	152	226	54	75	88	27	622
5	Jaring Lingkar Apung	-	12	-	-	-	8	20
6	Jaring Klitik	425	280	34	84	128	52	1.003
7	Bagan Tancap	40	33	-	-	-	-	73
8	Bagan Sampan	-	-	-	-	25	7	32
9	Pancing Rawai	149	588	20	90	178	30	1.055
10	Pancing Biasa	205	409	175	215	92	334	1.430
11	Pancing Tonda	122	397	43	111	199	130	1.002
12	Pancing Ulur	85	245	31	103	172	52	688
13	Pukat Pantai	-	6	-	-	6	-	12
14	Bubu	22	79	15	12	-	17	145
Jumlah		1.219	2.730	396	746	984	747	**6.822**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

Tabel tersebut menjelaskan bahwa total alat penangkap ikan di Kabupaten Lombok Timur ialah 6.822 unit yang berasal dari 6 (enam) lokasi yaitu Desa Batu Nampar dengan jumlah alat tangkap ikan sebanyak 1.219 unit, Desa Tanjung Luar dengan jumlah alat tangkap terbanyak yaitu 2.730 unit, Desa Sakra Timur yang merupakan *landing place* dengan jumlah alat tangkap paling sedikit diantara yang lain yaitu sebanyak 396 unit, Desa/ Kelurahan Labuhan Haji sebanyak 746 unit, Desa Labuhan Lombok dengan jumlah alat tangkap ikan sebanyak 984 dan Desa

Sugian dengan jumlah alat tangkap 747 unit. Sedangkan untuk jenis alat penangkap ikan yang ada di Kabupaten Lombok Timur semuanya berjumlah 14 jenis, namun jenis alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan ialah pancing biasa sebanyak 1.430 unit, pancing rawai sebanyak 1.055 unit, jaring klitik sebanyak 1.003 unit dan pancing tonda sebanyak 1.002 unit. Sementara itu, pukat pantai merupakan jenis alat tangkap yang paling sedikit jumlahnya dan hanya terdapat pada 2 (dua) *landing place* se-Kabupaten Lombok Timur, yaitu di Desa Tanjung Luar dan Desa Labuhan Lombok dengan jumlah alat tangkapnya masing-masing 6 unit.

Sarana pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ketiga ialah koperasi nelayan. Koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan usaha-usaha sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Bentuk dari koperasi nelayan Kabupaten Lombok Timur sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam, dimana setiap anggota memiliki kesempatan untuk memperoleh dana pinjaman dari kegiatan pengelolaan koperasi tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara pada tanggal oleh Bambang S. selaku Staff di Dinas Koperasi dan UMKM yang menangani bidang perkoperasian pesisir, mengatakan bahwa:

> "koperasi nelayan di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar berbentuk simpan pinjam, itu sekitar 75%, kalau koperasi produsen jarang bahkan ndak ada kayaknya di Lombok Timur. Kalau simpan pinjam itu ada tiga kalau gak salah itu Koperasi Nelayan Sumber Jala, Koperasi Nelayan Tambak Ujung Mas dan Koperasi Nelayan Sinar Petagan…dan ada satu mungkin yang masih beroperasi"

Beberapa koperasi nelayan yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

1) Koperasi Nelayan Sumber Jala

Koperasi Nelayan Sumber Jala berada di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak) dan memiliki badan hukum bernomor 191.a/BH/PAD/XXVIII.6/ KUKM.11.2/X/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2008 oleh Dinas Koperasi dan UKM. Jumlah anggota koperasi ini ialah 381 orang yang terdiri dari 288 anggota laki-laki dan 93 anggota perempuan. Sedangkan untuk pengelola koperasi ini terbagi menjadi 4 (empat) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, yaitu manajer, pengurus, pengawas dan karyawan. Secara keseluruhan, jumlah pengelola Koperasi Nalayan Sumber Jala ialah 21 orang yang terdiri dari seorang manajer dengan jumlah pengurus dan pengawas koperasi ini masing-masing berjumlah tiga 3 (tiga) orang yang semuanya ialah laki-laki serta memiliki karyawan laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 3 orang sehingga jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) orang.

2) Koperasi Nelayan Tambak Ujung Mas

Koperasi ini berlokasi di Desa Pemongkong (Kecamatan Jerowaru) yang asas berdirinya sesuai dengan badan hukum bernomor 147/BH/DKP.08.5/III/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2001 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Jumlah anggota koperasi ini adalah 37 orang anggota yang terdiri dari 28 anggota laki-laki dan 9 anggota perempuan. Sedangkan untuk jumlah pengelolanya sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 orang pengurus dan 3 orang pengawas adalah laki-laki semuanya. Koperasi ini tidak memiliki manajer dan karyawan.

3) Koperasi Nelayan Sinar Petagan

Berdirinya Koperasi Nelayan Sinar Petagan yang berlokasi di Desa Sambelia (Kecamatan Sambelia) diperkuat oleh badan hukum bernomor 159/BH/DKP.08.5/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Juli 2001 atau empat bulan setelah keluarnya badan hukum Koperasi Nelayan Tambak Ujung Mas (Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru). Jumlah anggota koperasi ini adalah 37 orang anggota yang terdiri dari 28 anggota laki-laki dan 9 anggota perempuan. Sedangkan untuk jumlah pengelolanya sebanyak 9 orang, terdiri dari 3 orang pengurus dan 3 orang pengawas adalah laki-laki semuanya. Koperasi ini sama dengan koperasi sebelumnya yaitu Koperasi Nelayan Tambak Ujung Mas yang tidak memiliki manajer dan karyawan.

Kondisi ketiga koperasi nelayan ini menurut hasil wawancara pada tanggal 12 April 2014 dengan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa "…pengelola koperasi banyak yang mengecewakan kita adalah pengurusnya itu, dia sempat menyewa mobil Panser 25 Juta dia rapat ke Mataram lamaaa, gaya sekali kan! akhirnya apa, mobil banyak hutang, biaya numpuk eee gulung tikar itu koperasi". Pengelolaan koperasi dalam hal ini koperasi nelayan, tidak akan lepas dari sumber modal, aset yang dimiliki dan tingkat/ volume usaha dan sisa hasil usahanya (SHU). Adapun modal, aset, tingkat/ volume usaha dan sisa hasil usaha dari koperasi nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Rincian Dana Koperasi Nelayan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Nama Koperasi Nelayan	Modal		*Asset*	Volume Usaha	Sisa Hasil Usaha
		Sendiri	Luar			
1	Sumber Jala	39.089.000	36.861.000	75.950.000	25.708.000	5.524.000
2	Tambak Ujung Mas	24.070.000	-	24.070.000	-	-
3	Sinar Petagan	14.975.000	3.500.000	18.475.000	-	-
Jumlah		**78.134.000**	**40.361.000**	**118.495.000**	**25.708.000**	**5.524.000**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa modal dalam pengelolaan koperasi nelayan di Kabupaten Lombok Timur di dapat dari internal koperasi itu sendiri dan modal dari luar. Dari ketiga koperasi nelayan yang ada, hanya Koperasi Nelayan Tambak Ujung Mas yang sumber modalnya dari internal koperasi itu sendiri, sedangkan koperasi lainnya menggunakan modal dari internal koperasi itu sendiri ditambah dengan modal dari luar. Koperasi dengan *asset* terendah ialah Koperasi Nelayan Sinar Petagan dengan asset hanya Rp.18.475.000. Sedangkan koperasi nelayan yang memiliki *asset* terbanyak ialah Koperasi Nelayan Sumber Jala dengan *asset* sebanyak Rp.75.950.000 yang didukung dengan volume usaha sebesar Rp.25.708.000 dan memiliki sisa hasil usaha sebesar Rp.5.524.000.

Untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan, tidak hanya memerlukan sarana pengembangannya saja namun juga diperlukan prasarana pendukung. Prasarana pendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu: 1) BBI (Balai Benih Ikan) khusus air tawar, BBIP (Balai Benih Ikan Pantai), PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), Pelabuhan Perikanan, *Reapeter* dan KKLD (Kawasan Konservasi Laut

Daerah) masing-masing berjumlah hanya 1 unit, 2) TPI (Tempat Pelelangan Ikan), *Cool Storage*, Pabrik Es dan Kapal Pengawas, masing-masing berjumlah 6 unit, 3) SPDN (*Solar Packed Dealer* untuk Nelayan) sebanyak 3 unit, 4) Pos KPPL (Komite Pengelola Perikanan Laut) berjumlah 7 unit yang merupakan prasarana sektor kelautan dan perikanan yang memiliki jumlah terbanyak diantara yang lainnya. Dari sekian banyak prasarana sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur saat ini, beberapa ada yang kurang terawat (BBIP/ Balai Benih Ikan Pantai dan TPI/ Tempat Pelelangan Ikan) dan dibeberapa lokasi ada yang tidak berfungsi seperti, *Cool Storage* dan SPDN/ *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan.

Gambar 15. Kondisi Prasarana Perikanan di Kabupaten Lombok Timur
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Kondisi prasarana pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur ini di perkuat dari hasil wawancara tanggal 18 April 2014 dengan Samsuri seorang nelayan di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak) yang mengatakan bahwa:

> *"…ado ngeni wah kondisi TPI tie, lekan laeeeek wah ndek man ne rubah. Ite anti dana lekan pemerintah doang ni, laguk ndarak jawaban masi-an. Amun ta gawek' si ite nelayan ni, kan ndek bauk sik ta, ndarak ta*

kadu…terima jari wah. Hidup ta doang serba sulit, apalagi gin ta bagusang macem langan, jembatan ato TPI ni…eee sulit angka" …beginilah kondisi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ini, dari dulu belum di perbaiki. Kita tunggu dana dari pemerintah saja untuk ini, tetapi masih tidak ada jawaban. Kalau kita para nelayan disini yang kerjakan, kita tidak mampu, tidak ada yang kita gunakan (tidak ada modal)…sehingga terima jadi saja. Hidup kita saja seperti ini, apalagi mau perbaiki semacam jalan, jembatan atau TPI ini…eee sulit memang".

Prasarana yang digunakan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur tidak terbatas pada prasarana yang berkaitan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan saja, namun juga prasarana yang mampu mendukung kelancaran aktivitas pengembangan sektor tersebut. Adapun prasarana pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan dan pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan tempat pelelangan ikan.

Gambar 16. Kondisi Prasarana Pendukung Perikanan Lombok Timur
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Gambar diatas merupakan kondisi prasarana pendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang masih belum optimal dan sebagian besar mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terlihat pada fasilitas jembatan di Kecamatan Labuhan Haji yang hampir putus di tengah-tengahnya namun masih digunakan warga, pembatas pinggiran pantai Labuhan Haji yang rusak, jalan menuju KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) yang hampir separuh dari

jalan tersebut berlubang, pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak) dengan kerusakan hampir di seluruh lantai, bahkan sampai terlihat rangka besi beton yang telah keropos. Selain itu, fasilitas pelengkap pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berupa jaringan listrik yang terlihat hanya sisa tiangnya yang sudah keropos/berkarat dan pipa air yang digunakan untuk cadangan air tawar bagi kapal-kapal penangkap ikan, kondisinya yang sudah rusak berat (pipa hancur dan keran air hilang).

2. Perencanan Skenario Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur

Untuk melakukan perencanaan skenario terhadap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur yang berbasis pada potensi lokal, maka dibutuhkan beberapa langkah yang ada dalam metode TAIDA seperti *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting.* Untuk lebih jelasnya tentang langkah-langkah dalam metode ini, maka dipaparkan data-data hasil penelitian sebagai berikut:

***a. Tracking* (Pelacakan)**

Tahap *tracking* atau pelacakan memberikan pembelajaran tentang masalah internal dan ekternal dari sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Penentuan faktor internal dan ekternal dalam tahapan ini didukung pula dengan data-data kondisi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Timur. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

1) *Strength* (Kekuatan)

Kabupaten Lombok Timur memiliki luas perairan laut yang hampir sama dengan luas daratan dan terbentang dari utara hingga selatan yang luasnya mencapai 1.074,33 km² atau sama dengan 40,09%. Kabupaten Lombok Timur memiliki 6 kecamatan pantai dengan 41 desa nelayan, memiliki komoditi yang beragam seperti budidaya laut, budidaya tambak, budidaya air tawar, perikanan tangkap serta memiliki kawasan minapolitan khusus rumput laut yang letaknya di Kecamatan Jerowaru. Untuk usaha pengolahan hasil, Kabupaten Lombok Timur memiliki 2 (dua) industri besar yang mengolah ikan tuna kualitas ekspor sesuai dengan ungkapan dari Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada saat wawancara tanggal 28 Maret 2014.

Dilihat dari konsumsi ikannya, Kabupaten Lombok Timur juga didukung oleh pemerintah provinsi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui tradisi dan budaya yang menurut hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Ishak, S.Pi selaku Staff pada Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa:

> "…upaya peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur itu didukung oleh program provinsi seperti GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), pernah dengar kan? dan program ini diperkuat lagi dengan adanya lembaga FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)".

Potensi lain yang dimiliki kabupaten ini ialah kawasan konservasi dan beberapa pulau kecil/gili yang memiliki fungsi sebagai salah satu alternatif pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sekaligus sebagai obyek

wisata potensial. Kabupaten Lombok Timur juga memiliki letak strategis yang menjadikannya sebagai gerbang penghubung bagi produk pertanian dan perikanan.

2) *Weakness* (Kelemahan)

Kabupaten Lombok Timur dilihat dari sarana-prasarana pendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai. Sarana yang dimaksud ialah kelembagaan perikanan seperti lembaga perkreditan, perbankan, koperasi perikanan yang mandiri serta organisasi nelayan secara aktif, tepat dan benar. Sedangkan prasarana belum memadai seperti BBIP, TPI, SPDN, *Cool Storage*, fasilitas jalan, jembatan dan kelengkapan pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan TPI seperti jaringan listrik dan air tawar. Selain itu, Kabupaten Lombok Timur masih kekurangan tenaga ahli profesional, kualitas sumberdaya aparatur masih kurang, penyebaran informasi pasar dan penguasaan penerapan teknologi petani ikan/ nelayan yang masih rendah yang menyebabkan kurangnya inovasi dan rendahnya kemampuan teknologi tepat guna.

Kurangnya tenaga profesional diungkapkan pula oleh Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengungkapkan bahwa “kalau kita sih, secara struktural memang kita kekurangan personil untuk mengelola potensi-potensi kelautan dan perikanan ini…” (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur). Dilihat dari aspek pemasaran juga masih lemah dan hal ini ditandai dengan minimnya promosi tentang potensi perikanan dan kelautan, kurangnya kesempatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk

menginvestasikan modalnya dan kurangnya mitra yang baik antara pemerintah, swasta, lembaga masyarakat maupun masyarakat perikanan pada umumnya.

3) *Opportunity* (Peluang)

Peluang yang dapat di tangkap oleh Kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanannya yaitu a) sumberdaya kelautan dan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tersedia saat ini masih menunjang, b) kebutuhan produk kelautan dan perikanan yang terus mengalami peningkatan dan dikembangkannya pasar lelang mutiara bertaraf internasional di tingkat provinsi. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pada tanggal 4 April 2014 dengan Abdul Mugis S.Pi selaku Staff Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, mengatakan bahwa:

> *"lamin produk man kelautan-perikanan dita oken Lombok ke Semawa o, lega si meta o mara rebu let atau si len o terutama mutiara…oken provinsi o lok' pasar lelang mutiara, jari bauk' i semudak' dalam pemasaran no lalo luar negeri o"* kalau produk dari kelautan-perikanan kita di Lombok dan Sumbawa, banyak yang mencarinya seperti rumput laut atau yang lainnya terutama mutiara…di provinsi itu ada pasar lelang mutiara, jadi dapat mempermudah dalam pemasarannya ke luar negeri.

Peluang berikutnya ialah c) adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis *blue economy* yang berkaitan dengan masalah pengelolaan perikanan tanpa limbah/ *zero waste*, dan d) adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Otonomi Pengelolaan Wilayah Perairan (Sumberdaya Perikanan), peraturan daerah tentang penataan ruang kawasan, aturan pengambilan terumbu karang dan hukum adat/awik-awik.

4) *Threat* (Ancaman)

Ancaman yang harus diwaspadai oleh Kabupaten Lombok Timur dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanannya yaitu a) sentralistik kekuasaan yang relatif masih ada pada pemerintah pusat seperti masalah perizinan (usaha perikanan dan kelautan) yang cenderung berbelit-belit, iklim kompetisi antar daerah yang semakin tinggi, b) eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan yang berlebihan, c) berkembangnya daerah penambangan di dekat pantai (tambang batu apung) menyebabkan tercemarnya kualitas air, d) terjadinya wabah penyakit ikan saat paceklik dan harga pakan, obat-obatan serta suku cadang perahu cukup tinggi, e) efek globalisasi AEC *(Asean Economic Community)* tahun 2015, dan f) adanya pola hidup konsumtif (gengsi) di kalangan nelayan lokal yang masih tinggi dan hal ini juga diungkapkan langsung oleh Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

> "…makanya ndak heran ketika panen, teman-teman budiaya khususnya, maupun nelayan kita dengan hasil budidaya dan tangkapan yang banyak, motooooor dia ndak mau beli kelas-kelas bebek, yang dibeli kelas-kelas motor ngebut itu apa namanya? *Vixion*…itu, rata-rata temen-temen pesisir tu…" (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur).

***b. Analizing* (Menganalisis)**

Berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur yang dipaparkan dalam tahap sebelumnya *(Tracking)*, terdapat 2 (dua) masalah utama *(focal concern)* yang merupakan sumber masalah dan menjadi penyebab kekuatan kurang memberikan pengaruh positif untuk

menghadapi ancaman dan kelemahan yang dimiliki sangat sulit untuk menangkap peluang. Dua masalah tersebut ialah kurangnya anggaran/ modal pembangunan dan sumberdaya manusia yang masih belum memadai. Kurangnya anggaran pembangunan di Kabupaten Lombok Timur diakui oleh Kasubbag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dengan mengatakan bahwa:

> "sebagian besar kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ialah masalah permodalan, sedangkan anggaran yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur masih belum cukup untuk memenuhi tuntutan pembangunan" (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur).

Alasan kekurangan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, dibenarkan pula oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur yang intinya ialah kendala dalam pembangunan di Kabupaten Lombok Timur khususnya sektor kelautan dan perikanan salah satunya disebabkan oleh penggunaan anggaran yang lebih banyak ditujukan untuk gaji pegawai yaitu 70%, sedangkan anggaran untuk pembangunan hanya 30% yang dibagi ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sehingga anggaran pembangunan yang diterima oleh SKPD tersebut kurang, termasuk didalamnya ialah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, beberapa nelayan, pedagang/penjual ikan, pembudidaya dan pekerja/penjaga BBIP mengakui kekurangan modal (anggaran) menjadi kendala dalam melakukan proses pengembangan kelautan dan perikanan.

Dilihat dari sumberdaya manusianya, Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Bidang Konservasi, Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Lombok Timur pada saat wawancara pada tanggal 1 April 2014, mengakui bahwa "sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Timur khususnya yang bersentuhan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan masih membutuhkan pengembangan". Lebih lanjut, inti dari ungkapan beliau dibuktikan dalam berbagai usaha yang telah ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur agar masyarakat menghentikan kegiatan perusakan (terumbu karang), namun karena sumberdaya manusianya yang masih kurang, hal tersebut masih tetap dilakukan walaupun diberikan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang melakukan aktivitas pengolahan hasil kelautan dan perikanan juga terkendala masalah permodalan yang disertai dengan kurangnya sumberdaya manusia yang terampil, kreatif dan inovatif.

Kurangnya modal dan sumberdaya manusia untuk melakukan aktivitas pengolahan hasil, menurut hasil wawancara tanggal 28 Maret 2014 dengan Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa "…sarana-prasarana kita butuh penambahan sedangkan kendala dalam bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan, itu seperti modal, SDM-nya (sumberdaya manusia) dan teknologi". Masalah ini akan terlihat jelas dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan yang ada di Lombok Timur.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur secara umum diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan peraturan lain yang mengikutinya. Dan jika dilihat dari sisi politik baik berupa aturan ataupun kebijakannya, Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan juga mengatur kegiatan pengembangan sektor kelautan dan perikanannya pada pasal 27 ayat 1 sampai 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 yang didalamnya terdapat aturan yang jelas mengenai pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan baik berupa kegiatan penangkapan, budidaya maupun pengolahan hasil. Selain itu juga, terdapat beberapa peraturan yang mengikat kegiatan sektor kelautan dan perikanan secara politik agar berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Aturan tersebut berupa larangan untuk melakukan praktek atau kegiatan-kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan yang merusak lingkungan/ tempat hidup ikan.

Pendekatan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki saat ini. Dari masyarakat sendiri, terdapat hukum/aturan yang bersifat politis tradisional yaitu awik-awik yang merupakan norma, nilai dan tata hukum yang mengatur tentang sektor kelautan dan perikanan berdasarkan pada adat yang berlaku. Awik-awik memberikan aturan yang jelas mengenai perilaku maupun tindakan yang dapat

membahayakan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu awik-awik yang ada di Kabupaten Lombok Timur ialah awik-awik yang berada di Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru atau lebih dikenal dengan Awik-awik Teluk Jor. Aturan yang mengikat pada awik-awik ini ialah sanksi berupa denda yang biasanya berupa uang dan sanksi sosial lainnya. Besarnya sanksi berupa uang di jelaskan oleh Alwi yang merupakan salah satu masyarakat di pesisir Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru pada saat wawancara tanggal 5 April 2014 yang mengatakan bahwa:

> *"…awik-awik lek te, aturanne bauk side gitak lek toooh sedi bangunan belek no, arak plang nto'. Amun nde salak' ite larang ngebom, motas ato ngeracun, nyedak bakau kance karang, buang anu endah ape aran'ne cangkang-cangkang kerang. Mun ta langgar, ite denda paling belek' no selae jute…arak lengkap pokok'ne nto', coba wah lampak nto"* …awik-awik yang ada disini, aturannya dapat anda lihat di sanaaa sebelah bangunan besar itu, ada spanduk disana. Kalau tidak salah, larangan mengebom, pemotasan atau meracun, merusak bakau dan karang, membuang "anu" juga apa namanya cangkang-cangkang kerang. Kalau kita langgar, kita didenda paling besar Rp. 25.000.000,-…ada lengkap pokoknya disana, coba anda jalan saja ke sana.

Gambar 17. Awik-awik Teluk Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Dilihat dari aspek ekonomi, pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur memberikan kontribusi besar bagi sektor lainnya maupun dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu,

pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dapat menciptakan lapangan usaha dan terserapnya tenaga kerja lokal, khususnya pada komoditi budidaya baik budidaya laut, budidaya air payau/ tambak maupun budidaya air tawar serta komoditi yang berkaitan dengan pengolahan hasil. Selain menciptakan lapangan usaha pada bidang budidaya, pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur juga memberikan kesempatan bagi para pedagang maupun pembudidaya untuk mengelola sumberdaya ikan menjadi olahan kuliner yang disukai oleh masyarakat dan hal ini juga dapat meningkatkan nilai jual ikan sehingga tingkat perekonomian masyarakat juga bisa meningkat.

Dari tingkat partisipasinya, masyarakat di Kabupaten Lombok Timur khususnya yang berada di wilayah pesisir/ mayoritas sebagai nelayan merupakan tipe masyarakat yang cenderung sulit untuk diatur sehingga tingkat partisipasinya-pun terbilang rendah. Untuk menghadiri MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diadakan oleh pemerintah daerah setiap setahun sekali saja, mereka lebih memilih untuk melaut. Hal ini di ungkapkan pula oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

> "eee…kendala yang kita hadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Lombok Timur salah satunya di sebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat juga, eee…terutama nelayan, terkadang nelayan memilih melaut daripada hadir di acara Musrenbang dan itu juga mungkin dari tingkat pendidikannya juga sih yang anu, berpengaruh begitu" (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2014 di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur)

Indeks pembangunan manusia khususnya di daerah pesisir, bisa dilihat dari bidang pendidikan dan kesehatan yang masih belum maksimal. Jarak antara rumah dengan dua bidang layanan tersebut relatif jauh sehingga butuh waktu lama untuk sampai di tempat layanan tersebut dan tingkat keamanannya-pun masih rendah. Tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh pendidikan dasar, membuat masyarakat pesisir (nelayan) Kabupaten Lombok Timur masih rendah dalam penerapan teknologinya baik dari bidang penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil. Teknologi yang ada di Kabupaten Lombok Timur saat ini masih belum cukup untuk memaksimalkan potensi yang ada, seperti kapal penangkap ikan yang ada saat ini hanya berkisar antara 2-6 gt *(gross tonase)* sehingga daya jangkau ke *fishing groud/* tempat penangkapan ikannya juga rendah, teknologi untuk pengolahan rumput laut, penyulingan minyak ikan, pengemasan produk dan teknologi pengolah bahan mentah ke barang jadi masih terbilang sederhana. Selain itu pula, teknologi untuk pembuatan pakan dan obat-obatan untuk kepentingan budidaya masih kurang dan butuh penyempurnaan (teknologi modern).

Kurangnya pemahaman tentang lingkungan menyebabkan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir maupun masyarakat yang berada di bagian hulu menjadi kurang memperhatikan dampak lingkungan yang muncul akibat kegiatan-kegiatan pengambilan maupun pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan. Penduduk pesisir Kabupaten Lombok Timur juga masih belum menyadari akibat perilaku buruknya dengan membuang sampah dan limbah rumah tangga ke laut

dapat menimbulkan bencana dan merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Gambar 18. Sampah dan Limbah Rumah Tangga Penduduk Pesisir
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Kegiatan-kegiatan lain yang masih berjalan dan berdampak buruk bagi lingkungan perairan di Kabupaten Lombok Timur ialah praktek-praktek pengambilan sumberdaya ikan di laut yang merusak ekosistem pesisir seperti melakukan pengeboman ikan, pembuangan limbah ke laut, tumpahan minyak maupun oli kapal, pengerusakan tanaman bakau untuk areal tambak maupun perumahan dan lain sebagainya membuat potensi ikan juga berkurang. Pencemaran lingkungan juga berasal dari beberapa aktivitas perdagangan di piggiran pantai, seperti di Kecamatan Labuhan Haji.

Gambar 19. Pedagang di Pesisir Pantai Kecamatan Labuhan Haji
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Gambar tersebut memperlihatkan pedangang yang memasarkan barangnya di pinggiran pantai yang jarak antara tempat berdagang dengan pinggiran laut sekitar 5-7 meter. Biasanya pembeli membuang sisa bungkus makanan maupun minuman yang dibeli di sekitar pantai tanpa peduli kebersihan pantai dan dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah yang dibuang tersebut. Pedangang juga tidak peduli jika konsumennya membuang sampah (sampah dari barang yang dibeli pada pedagang tersebut) dan pedagang di area ini dari tahun ke-tahun terus bertambah jumlahnya.

c. *Imaging* (Gambaran masa depan/ Visi)

Visi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2008-2013 yang berkaitan erat dengan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025. Selain itu, RPJPD Kabupaten Lombok Timur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008. RPJPD Provinsi NTB juga tidak akan terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007.

Visi Kabupaten Lombok Timur 2008-2013 berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tersebut juga tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan berbagai program untuk mencapai 8 (delapan) program dari "*Millenium Development*

Goals (MDG's)" sampai tahun 2015, seperti 1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, 2) menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk seluruh penduduk, 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7) memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan 8) membangun kemitraan global dalam pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut, maka pengembangan visi Kabupaten Lombok Timur diarahkan untuk menjawab semua tuntutan yang ada dalam 8 (delapan) program yang tercantum dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2014 dengan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

> "…kendala yang umum kita hadapi itu berkaitan kualitas pendidikan yang masih belum maksimal selain itu kita juga masih rendah di pelayanan kesehatan. Itu yang menyebabkan kita pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melaksanakan atau menerapkan MDG's itu dalam visi kita begitu…dan visi kita dulu (visi pembangunan tahun 2008-2013) dapat dilihat pada draf RPJMD yang kita punya. Visi ataupun misi di RPJMD kita yang lama hanya berlaku sampai tahun 2013 dan sekarang telah terpilih bupati yang baru, sehingga visi-misinya tentu ada yang berubah, namun visi-misi tersebut sementara ini masih dipakai sampai sekarang (tahun 2014)".

Pertimbangan atas berbagai hal tersebut di atas dan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi serta aspirasi para pemangku kepentingan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 2008-2013 adalah **"Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan Dalam Lindungan Allah SWT"**. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki makna

sebagai berikut: 1) Masyarakat Lombok Timur yang adil dalam kesejahteraan, yakni untuk menciptakan kondisi yang menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat ditegakkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab serta diwujudkan penegakan hukum tanpa kecuali dalam kehidupan masyarakat, 2) Masyarakat Lombok Timur yang Sejahtera dalam Keadilan, yakni masyarakat Lombok Timur yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baik ekonomi maupun sosial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur tanpa kecuali, 3) Dalam Lindungan Allah SWT, yakni terciptanya keadilan dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan tetap dalam naungan dan lindungan Allah SWT.

***d. Deciding* (Misi/ Keputusan/Kebijakan)**

Sesuai dengan draf RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Timur tahun 2008-2013, untuk dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Timur tahun 2008-2013, maka Pemerintah Daerah Lombok Timur menetapkan misi pembangunan daerah, seperti: 1) Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan di semua sektor prioritas yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, 2) Mewujudkan pembangunan nyata ekonomi kerakyatan berbasis agroindustri dan bahari yang berwawasan lingkungan, 3) Mendorong reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh untuk mencairkan kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro-publik, 4) Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak, 5) Mewujudkan kerukunan hidup beragama dan

kehidupan antar kelompok yang rukun, taqwa dan penuh kesejukan dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, 6) Menumbuh kembangkan iklim investasi dalam dan luar negeri untuk membuka lapangan kerja yang secara langsung mampu mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 7) Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. Selain itu, menurut Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa:

> "…kemudian eee dalam rangka pelaksanaan pembangunan kita juga punya namanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang didalamnya ada program visi dan misi yang berbeda-beda kan…untuk tahun ini kita masih memakai RPJMD sebelumnya. Tahun (2014) ini RPJMD kita yang baru, itu baru selesai di bahas di dewan dan masih konsultasi, kalau dokumen jadinya belum emh…emhua ha ha ha haaaa. Tapi intinya ke depan itu untuk masa sekarang ini..pertumbuhan ekonomi yang tangguh, kemudian sumberdaya manusia, kemudian ada untuk pengembangan sinergitas antar wilayah, pertanian arti luas (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), peningkatan kualitas hidup, itu jadi misi. Kemudian peningkatan kualitas iman dan taqwa, pengembangan kearifan lokal" (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2014, di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur).

Tujuh misi dalam draf RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Timur tahun 2008-2013 memiliki penjelasan yaitu: 1) Misi pertama dilaksanakan dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah, 2) Misi ke-dua merupakan cara yang ditempuh untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja dengan tetap mempertahankan kelestarian daya dukung sumberdaya alam

mengingat sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian dalam sektor pertanian, perikanan dan kelautan, 3) Misi ke-tiga dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah yang amanah, profesonal serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Juga mampu mengawal dan menjamin tersusunnya rencana dan terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan dan tepat sasaran secara efisien dan efektif serta mampu mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi daerah dan masyarakat. Pelaksanaan misi ini mendukung dan menjamin terlaksananya misi-misi lainnya, 4) Misi ke-empat dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan yang sering terlupakan dalam pembangunan dan mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang selanjutnya berkontribusi menunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat, 5) Pelaksanaan misi ke-lima untuk mewujudkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan misi-misi lainnya. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan memerlukan suasana yang kondusif, aman, damai serta berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunya kasus kriminalitas, menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga serta diskriminasi terhadap perempuan. Adanya suasana rukun, aman dan damai merupakan prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat membangkitkan minat masyarakat dalam berkarya membangun Lombok Timur.

Dua misi terakhir memiliki peran tersendiri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lombok Timur yaitu, 6) Pelaksanaan misi ke-enam

guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan proses administrasi dan prosedur perijinan serta penciptaan kondisi aman dan rasa aman akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di Lombok Timur. Dengan meningkatnya investasi baik dalam maupun luar negeri diharapkan berdampak pada meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan, dan 7) Pelaksanaan misi ke-tujuh guna menjamin terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan berdampak pada terwujudnya iklim yang kondusif dan meningkatnya dukungan masyarakat bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan meningkatnya kualitas demokrasi diharapkan akan mampu menghasilkan para pemimpin daerah baik di eksekutif maupun legislatif yang berkualitas, bersih, responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

***e. Acting* (Tindakan)**

Tahapan ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan misi/kebijakan/ keputusan-keputusan kedalam sebuah kegiatan-kegiatan/rencana aksi yang akan membentuk skenario sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur sebagian besar memliki program untuk pengembangan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta konservasi dan pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk konservasi, pemerintah derah melakukan berbagai upaya salah satunya ialah melaksanakan program yang bertujuan untuk melindungi *mangrove* dan terumbu karang. Untuk melindungi

mangrove (hutan bakau/*mangrove*) sendiri, dilakukan melalui penanaman dan pembibitan *mangrove*. Penanaman bakau/*mangrove* merupakan program yang sering dilaksanakan. Sedangkan untuk pembibitan, pemerintah daerah masih belum berhasil dalam mengelolanya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Bidang Konservasi, Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan bahwa:

> "…tapi kalau pembibitan itu baru pertama kali dan tidak berhasil dan yang sering kita laksanakan adalah penanaman pohon bakau atau *mangrove*, dimana penanaman ini sesuai dengan lokasi yang ada, maksudnya jenis tanahnya, jenis (bakau/mangrove) apa yang kira-kira pas atau cocok untuk ditanam dilokasi tersebut. Kayak kemarin kita ada program eee untuk tahun 2013, penenaman *mangrove*-nya ada dari provinsi dan dari Uni-Eropa ada kegiatan yang lokasinya dibagian selatan seperti Jerowaru dan Keruak" (Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur).

Untuk terumbu karang, pemerintah daerah melakukan perbaikan kualitas terumbu karang melaui program terumbu karang buatan. Kendala besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal konservasi khususnya yang berkaitan dengan terumbu karang ini ialah masih banyaknya praktek penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan anjuran yang ada seperti pengeboman, penggunaan racun dan penggunaan alat/bahan berbahaya lainnya. Pemerintah daerah juga melakukan pembinaan untuk mengatasi perilaku masyarakat tersebut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur agar masyarakat menghentikan kegiatan perusakan (terumbu karang). Namun karena sumberdaya manusianya yang masih kurang, hal tersebut masih tetap dilakukan walaupun

diberikan lapangan pekerjaan baru. Dan hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, bahwa:

> "untuk terumbu karang, kita punya program terumbu karang buatan. Nah tapi selama ini untuk terumbu ini sangat-sangat sulit di berantas masalah pengeboman yang terjadi hampir di seluruh perairan kita baik dibagian selatan maupun utara. Karena pengeboman ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, walaupun nanti dikasih apa namanya semacam mata pencaharian alternatif sampai saat ini belum dapat teratasi" (Wawancara pada tanggal 1 April 2014 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur).

Untuk pengolahan hasil dan pemasaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai pelatihan-pelatihan , memfasilitasi usaha-usaha yang bersifat kreatif dari masyarakat lokal seperti pengolahan kulit pari menjadi tas/dompet yang saat ini masih dikembangkan. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengirim masyarakat lokal yang memiliki ide kreatif tersebut ke *workshop-workshop* yang disediakan pemerintah provinsi, pusat maupun swasta. Sedangkan untuk kegiatan penangkapan, masyarakat diberikan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh pemerintah daerah berupa kapal motor, namun karena berbagai hal dan karena kurang cermatnya perhitungan tentang lokasi penggunaan kapal tersebut, maka masyarakat hanya memanfaatkan mesinnya/motornya saja karena untuk kapal yang diberikan itu terlalu ringan (terbuat dari bahan *fiber glass*) sehingga tidak cocok untuk arus keras seperti di Lombok Timur. Untuk budidaya, masyarakat yang ingin mengembangkan usaha budidayanya dan memiliki lahan yang cukup, pemerintah daerah memberikan fasilitas benih dengan syarat telah mengajukan proposal usahanya kepada pemerintah daerah dan telah dinilai layak.

Dilihat dari sisi perencanaannya masyarakat Kabupaten Lombok Timur khususnya masyarakat pesisir diberikan hak atau kesempatan yang baik oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi pembangunannya melalui MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Namun, hak atau kesempatan tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2014 dengan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa:

> "eee…kendala yang kita hadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Lombok Timur salah satunya di sebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat juga, eee…terutama nelayan, terkadang nelayan memilih melaut daripada hadir di acara Musrenbang dan itu juga mungkin dari tingkat pendidikannya juga sih yang anu, berpengaruh begitu".

C. Analisis Data

1. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

a. Kondisi Produksi

Kondisi produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur menggambarkan bahwa komoditi budidaya, baik budidaya air tawar, budidaya tambak/air payau maupun budidaya laut merupakan komoditi yang banyak dikembangkan. Komoditi-komoditi ini dapat meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan jika terkelola dengan baik dan menempatkan kekuatan lokal di dalamnya. Karena pengembangan ekonomi yang tidak tersentuh dengan kekuatan ekonomi lokal, akan menyebaban terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan (Nurzaman, 2000 dalam Harahab, 2010: 35-36). Dari ketiga komoditi budidaya di Lombok Timur,

komoditi budidaya laut merupakan komoditi yang memiliki produksi tertinggi di antara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari komoditi ini memiliki harga yang cenderung mahal dari komoditi budidaya lainnya dan pemasarannya-pun lebih mudah sehingga banyak pembudidaya memilih komoditi ini yang pada akhirnya mereka akan meningkatkan produksinya.

Untuk komoditas budidaya laut khususnya mutiara, kerapu dan udang lobster, dalam rentan waktu 5 tahun selalu mengalami peningkatan produksi yang dikarenakan oleh permintaan akan komoditi ini tinggi, namun jika dilihat dari kuantitas produksi setiap tahunnya masih rendah di bandingkan dengan rumput laut. Rendahnya kuantitas produksi ketiga komoditi ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan usaha, kelembagaannya maupun minimnya penggunaan teknologi modern yang dapat membantu kegiatan usaha. Sedangkan untuk budidaya rumput laut dilihat dari kuantitas/jumlah produksi per tahunnya di Kabupaten Lombok Timur cukup tinggi, akan tetapi *trend* peningkatannya pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan oleh kurangnya bibit, keadaan cuaca yang tidak menentu dan kurangnya sarana-prasarana yang memadai untuk pengembangan kegiatan budidaya rumput laut. Masalah-masalah tersebut bermuara pada minimnya permodalan, baik dari masyarakat sendiri maupun dari pemerintah.

Komoditi budidaya lainnya yaitu, budidaya tambak/ air payau yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh meningkatnya konsumen/pasar yang terbuka bagi setiap komoditi ini dan harga yang relatif mahal. Daerah yang masih menjadi konsumen utama

komoditi ini ialah Bali dan Surabaya. Komoditas yang menjadi unggulan seperti udang (vennamei dan lobster) dan kerapu. Pembudidaya tertarik untuk membudidayakan kedua komoditas ini dikarenakan kemudahan dalam pemeliharaan dan nilai jual yang sangat tinggi. Untuk kerapu saja, nilai jualnya ditingkat pembudidaya sekitar Rp. 350.000/kg dan hampir sama dengan nilai jual udang lobster per kilogramnya.

Komoditi yang menunjukkan peningkatan produksi setiap tahunnya, juga di alami oleh komoditi budidaya air tawar. Faktor penyebab meningkatnya produksi budidaya air tawar ialah semakin meningkatnya jumlah konsumen lokal dalam mengkonsumsi ikan khususnya ikan air tawar (ikan nila, karper, gurame, mas, lele, bawal, dan lain-lain), lahan budidaya mudah dalam penataannya, jenis ikan air tawar juga tidak rumit untuk dibudidayakan dan hampir setiap rumah di setiap kecamatan yang debit airnya mencukupi, terdapat kolam. Hal ini sangat berkaitan erat dengan konsep LERD atau *Local Resources Economic Development* (Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal) yang diungkapkan Blakely and Bradshaw (1994) yaitu "suatu proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan".

Lapangan pekerjaan yang tercipta dari aktifitas produksi di Kabupaten Lombok Timur ialah berkembangnya usaha perdagangan yang berbasis kuliner yang memberikan kesempatan bagi nelayan maupun pembudidaya dalam hal pemasaran. Dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya produksi perikanan di kabupaten ini. Usaha kuliner yang di kembangkan oleh

masyarakat lokal, menyediakan menu utama ikan yang banyak dicari oleh konsumen ikan baik di tingkat lokal maupun pendatang. Agar sumberdaya lokal yang dimiliki bisa maksimal, usaha kuliner tersebut menarik peminat pelanggannya dengan membuka kolam pemancingan sekaligus dengan dapur pengolahannya. Usaha kuliner tersebut sebagian besar tersebar di Kecamatan Aikmel, Masbagik, Pringgasela dan Selong.

Untuk produksi penangkapan ikan laut masih bersifat fluktuatif/ berubah-ubah hal ini dikarenakan sumberdaya ikan dan nelayan mulai berkurang serta sarana-prasarana baik di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan maupun untuk tujuan konservasi yang belum memadai. Kurangnya sumberdaya ikan di Kabupaten Lombok Timur dikarenakan habitat ikan mulai mengalami kerusakan akibat pencemaran oleh limbah, aktifitas penambangan pasir maupun penagambilan bahan galian C lainnya, pengeboman dan pengambilan ikan secara berlebihan. Akibat berkurangnya sumberdaya ikan yang menjadi sumber penghasilan bagi nelayan, beberapa nelayan mulai beralih profesi dan profesi sebagai nelayan dijadikan profesi sambilan. Dari data-data yang ada, diketahui bahwa beberapa nelayan memilih profesi barunya untuk berdagang, bekerja sebagai buruh perusahaan perikanan, berwirausaha (tambak, kolam, usaha walet), dan ada pula yang alih profesi sebagai pengumpul barang bekas. Oleh karena beralihnya bidang pekerjaan nelayan, maka akan terjadi penurunan terhadap jumlah nelayan dan penurunan ini akan menyebabkan penurunan produksi perikanan. Penurunan produksi perikanan menyebabkan jumlah ikan yang disediakan untuk kebutuhan konsumsi berkurang, walaupun ada harganya tentu

akan menjadi mahal sehingga konsumen dengan daya beli yang rendah akan beralih terhadap barang konsumsi lainnya yang lebih terjangkau dengan daya beli mereka (menurunkan tingkat konsumsi ikan).

b. Nilai Produksi

Nilai produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur tahun dari 2011 sampai 2012 sebagian besar mengalami peningkatan dan terdapat dua komoditi yang mengalami penurunan nilai produksi yaitu komoditi air laut khususnya rumput laut dan penangkapan ikan laut. Penurunan nilai produksi rumput laut sebesar 5,25% per tahun merupakan akibat dari menurunnya tingkat produksi rumput laut, penurunan kualitas rumput laut dan masih terkendala dalam hal distribusi pemasaran. Namun, kendala utama menurut beberapa petani rumput laut ialah terletak pada tingkat produksinya baik berupa modal maupun masalah teknis seperti rumput laut yang dibudidayakan petani terkadang hanyut dibawa ombak laut. Selain itu, proses pemasaran produk yang masih mengandalkan industri dari luar pulau sehingga akan menurunkan nilai/harga rumput laut itu sendiri. Dengan kata lain, Kabupaten Lombok Timur merupakan cadangan bahan baku rumput laut yang murah, namun dengan kualitas ekspor. Industri yang berada diluar pulau tersebut mendapatkan keuntungan lebih banyak karena rumput laut yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur di ekspor ke luar negeri tanpa perantara lagi. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan promosi rumput laut di negara-negara yang membutuhkan bahan baku rumput laut atau bisa juga dengan melakukan pengolahan sehingga bisa mengurangi dampak kegagalan pada aspek pemasarannya.

Penurunan nilai produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur juga terjadi penangkapan ikan laut yang menurun sebanyak 4,20% per tahun. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan sedikit menurun dan jenis hasil tangkapan ikan nelayan bukan dari jenis ikan yang memiliki nilai/harga jual tinggi. Jenis ikan yang nilai jualnya rendah biasanya konsumen juga tidak terlalu banyak yang mengkonsumsinya karena rasa dan kualitasnya yang relatif rendah pula. Sedangkan untuk ikan yang nilai jualnya tinggi, konsumennya tentu lebih banyak karena rasanya dan kualitas ikan juga relatif baik. Dari segi kuantitas/jumlah, dua kilogram ikan yang lebih rendah nilai jualnya sebanding dengan satu kilogram ikan yang benilai jual tinggi, sehingga nelayan akan merugi jika mendapatkan jenis ikan bernilai jual rendah dengan kuantitas/jumlah yang sama dengan jenis ikan bernilai jual tinggi. Untuk mengatasi hal itu, biasanya nelayan menangkap sebanyak-banyaknya jenis ikan bernilai jual rendah untuk mengimbangi harga/nilai jualnya dengan ikan bernilai jual tinggi disaat jenis ikan bernilai jual tinggi tersebut mulai menipis dan hal ini sesuai dengan pedoman Tjokroamidjojo (1980) dalam pengelolaan sumber pembangunan khususnya sumberdaya yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan, melalui: a) penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien, b) mendorong perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakatnya, dan c) mengarahkan perkembangan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan sosial.

Mulai menipisnya sumberdaya ikan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur tentu menjadi permasalahan besar ketika nelayan dalam kegiatan penangkapannya dilakukan secara berlebihan dan beberapa dari mereka ada yang

melakukan penangkapan sampai merusak habitat ikan. Untuk itulah dibutuhkan perhatian pemerintah, hubungan yang baik dari pihak swasta dan *stakeholder* terkait serta yang paling penting ialah kesadaran dari masayarakat lokal dalam hal ini nelayan sebagai penerima manfaat agar tetap memberikan keseimbangan bagi lingkungan kerjanya (lautan dan isinya) dengan membatasi jumlah tangkapan atau dalam hal ini memilih jenis dan ukuran ikan yang pantas untuk ditangkap (tidak mematikan generasi ikan) dan melakukan kegiatan pengawasan maupun pelestarian habitat ikan, sehingga sumberdaya ikan tetap terjaga dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil tangkapan ikan baik dari segi jenis, kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam Pasal 15 peraturan tersebut, sangat jelas menetapkan bahwa "setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya". Sehingga pelaku tindak perusakan/ praktek perusakan tentu tidak akan ada celah dalam melakukan aksinya, karena sudah tersistem dengan baik dari masyarakat tingkat bawah sampai aparatur penegaknya dan hal ini kembali lagi pada konsistensi maupun kesadaran dari masing-masing pelaksananya.

Berbeda dengan dua komoditi sebelumnya, komoditi yang satu ini justru mengalami peningkatan nilai produksi yang sangat signifikan di tahun 2012. Komoditi yang dimaksud ialah komoditi budidaya air tawar khususnya minapadi dengan peningkatan/ kenaikan nilai produksi sekitar 37 kali lipat atau sekitar

3.654,71% per tahunnya. Peningkatan ini dikarenakan kebutuhan akan konsumsi ikan khususnya daerah pedesaan cukup tinggi, terutama untuk ikan air tawar. Pada mulanya, masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Timur menggunakan teknik minapadi sebagai bentuk dari hobi memelihara ikan saja. Namun karena kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan oleh metode minapadi maka masyarakat mulai menerapkannya secara intensif.

Minapadi di Kabupaten Lombok Timur bukan hanya sebuah metode pemeliharaan ikan di sawah dengan tananaman padi, namun sebagian besar masyarakat melakukannya di areal penanaman kangkung. Ikan yang di pelihara di sawah padi dan di sawah kangkung memberikan manfaat ganda bagi petani. Selain untuk konsumsi, ikan juga menjadi predator bagi hama tanaman padi dan kangkung sehingga kondisi tanaman juga terjaga dengan baik dan tidak membutuhkan bahan kimia pembasmi hama secara berlebihan. Masyarakat lebih memilih ikan konsumsi dari hasil minapadi dikarenakan ikan tersebut memiliki rasa yang jauh lebih enak dari ikan yang diternakkan di kolam maupun keramba. Hal ini dikarenakan oleh pola hidup ikan di kolam dan keramba yang cenderung dikondisikan supaya harus bertahan hidup baik dengan pemberian suntikan anti stress, pakan buatan, penambahan bahan kimia lainnya maupun endapan kotoran yang selalu menumpuk dan tidak terurai di dasar kolam maupun keramba.

Pemeliharaan ikan pada kolam budidaya, berbeda dengan pemeliharaan dengan metode minapadi, yang memperlakukan ikan secara alami baik dari cara bertahan hidupnya, bereproduksi, sumber makanan (serangga, siput/keong kecil, larva hama tanaman, maupun sisa makanan yang terbawa aliran air maupun sisa

makanan seperti nasi basi yang sengaja dibawa oleh petani), maupun tempat hidup yang selalu bersih dari endapan kotoran/ zat sisa (NO3/Nitrat) karena diserap langsung oleh tanaman padi dan kangkung sebagai zat penyubur. Dari kegiatan minapadi tersebut, petani di Kabupaten Lombok Timur bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanaman dan hasil berupa ikan (dijual/ dikonsumsi). Faktor penghambat dari kegiatan minapadi ialah sering terjadinya tindakan pencurian ikan dan perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menebarkan racun (potassium).

Kasus pencurian ikan bersumber dari lemahnya perekonomian warga dan menyempitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, sehingga mengabaikan hak milik orang lain (mencuri) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hukum dan minimnya kepedulian terhadap sesama serta psikologis masyarakat yang masih labil menjadi faktor lain atas tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur dari aspek pembangunan sumberdaya manusianya masih kurang dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* terkait untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperhatikan budaya dan aspek lokal lainnya yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan.

Nilai produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur secara umum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat produksi dan sumberdaya manusia yang mengelola sumber tesebut. Dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lombok Timur, akan memberikan pengaruh pula pada

meningkatnya nilai produksi perikanan. Namun hal ini berbeda dengan komoditi budidaya air tawar khususnya minapadi yang nilai produksinya meningkat, namun dilihat dari tingkat produksinya cenderung menurun. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditi ikan dari hasil minapadi yang mengalami peningkatan. Sedangkan sumberdaya manusia sebagai faktor penting/memiliki peran utama untuk memberikan dorongan terhadap peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur sehingga sektor kelautan dan perikanan semakin maju dan mampu bersaing di dunia global terlebih pada pasar Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)/ AEC (*Asean Economic Community)* nantinya.

c. Produksi Benih

Produksi benih khususnya ikan di Kabupaten Lombok Timur masih belum terdata dan terkelola dengan baik, seperti BBIP (Bali Benih Ikan Pantai) yang berada di Kecamatan Labuhan Haji. Jumlah benih/bibit yang ada di balai benih tersebut sangat minim, hal ini dikarenakan adanya pergantian jabatan bupati di tahun 2008 silam yang membuat program kerja menjadi berubah dan sebelum pergantian jabatan bupati sebelumnya (bupati era 2003-2008), kolam-kolam pembesaran di BBIP semuanya berisi, akan tetapi setelah itu (setelah pergantian bupati) sepertinya sedikit terhambat dan sampai sekarang. Selain pergantian bupati tersebut, terdapat juga kekosongan jabatan pimpinan khususnya pada Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Kecamatan Labuhan Haji.

Kekosongan jabatan pimpinan tersebut disebabkan karena dua/tiga bulan sebelumnya, pimpinan BBIP meninggal dunia dan sampai saat ini belum ada

penggantinya, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kinerja pegawai (staff) dalam kondisi yang seharusnya. Terkadang beberapa pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di lokasi tersebut pulang kerja lebih dahulu dan ada pula yang tidak hadir sehingga pengelolaan BBIP tersebut terkesan setengah-setengah. Hal ini ditunjukkan pula pada hasil kerja tahun 2014 ini, karena program kerja yang minim menyebabkan para penjaga BBIP hanya bertugas untuk menjaga dan merawat benih ikan dengan jumlah yang sangat minim dengan menggunakan satu kolam pembesaran saja, sedangkan kolam pembesaran yang lainnya dibiarkan kosong tanpa adanya benih/bibit ikan dan sebagian ada yang mengalami kerusakan (bocor).

Benih ikan yang ada di balai benih ini (untuk saat ini hanya benih ikan nila) biasanya disalurkan ke tambak-tambak air payau di daerah sekitar pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur, karena nila merupakan ikan yang mampu bertahan hidup di dua keadaan air yang berbeda yaitu di air tawar dan air payau (campuran air laut dan air tawar). Sebenarnya, benih/bibit yang ada di BBIP Labuhan Haji tidak hanya dari jenis ikan nila saja, namun sebelumnya (masa jabatan bupati era 2003-2008) dikembangkan juga jenis ikan kerapu dan lobster. Dalam hal ini dibutuhkan kerelaan hati dari bupati yang baru untuk terus menjalankan visi, misi dan program pembangunan yang tertera di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bupati sebelumnya yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah dan mencoba melakukan peninjauan kembali/evaluasi terhadap visi-misi maupun program yang kurang menguntungkan/kurang berhasil memberikan kontribusi besar bagi daerah. Hasil

evaluasi tersebut, bisa juga digunakan sebagai strategi baru dalam membentuk visi-misi maupun program bupati yang baru, sehingga tidak menimbulkan gap/ jurang pembatas dengan visi-misi maupun program bupati terdahulu, dan hal ini tentu akan menjadikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur khususnya pada sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan lancar, bertahap dan ter-arah.

Jika dilihat dari fungsinya, BBIP Labuhan Haji selama ini hanya berfungsi sebagai tempat pembesaran benih saja dan benih ikan yang ada di BBIP disediakan oleh dinas dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP/ DISKELKAN). Adapun permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BBIP ini ialah fungsi utama dari BBIP yang seharusnya sebagai tempat pembenihan dan pembesaran benih bukan hanya sebagai tempat pembesaran saja, dengan demikian maka dapat memberikan kemudahan dan manfaat secara luas bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya, masyarakat lokal maupun pengusaha dalam mengembangkan usaha perikanannya, terutama yang menyangkut masalah benih/bibit ikan. Akan tetapi kembali lagi ke sumber dari masalah yang ada, yaitu kurangnya anggaran atau modal, karena dengan modal yang minim tentu hasil pembangunan yang didapat juga rendah dan butuh waktu lama untuk mengembangkan fungsi BBIP menjadi tempat pembenihan dan pembesaran benih.

Beberapa sumber benih utama BBIP Labuhan Haji seperti Balai Benih Ikan (BBI) air tawar yang ada di Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) atau biasa disebut BBI Lenek, benih dari pembudidaya setempat (masyarakat lokal), perusahaan maupun UD (usaha dagang)/usaha milik pribadi dan sebagiannya

besar didatangkan dari luar daerah. Sumber-sumber benih tersebut merupakan sumberdaya lokal yang harus dimanfaatkan keberadaannya dan dilestarikan tingkat partisipasinya dalam hal pembenihan. Balai Benih Ikan (BBI) air tawar yang ada di Desa Lenek (Kecamatan Aikmel) dengan luas lahan, jumlah kolam dan jumlah produksi benih yang ada saat ini, masih belum cukup untuk bisa memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Dibutuhkan kerjasama tim dalam mengelola pembenihan dan pembesaran benih ikan, kerjasama tersebut dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi setiap pegawai/ staff, penjaga maupun pengurus balai benih tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam internal BBI Lenek ialah kurangnya pembagian kerja bagi para pegawainya dan cenderung terpusat pada pimpinan saja. Selain itu, arus informasi dari atasan sangatlah minim yang menyebabkan beberapa pegawai lainnya tidak betah dan sebagian mengundurkan diri maupun pindah/mutasi kerja.

Permasalahan seperti pimpinan dengan manajemen rendah, tidak bisa terbuka, tidak bisa bekerjasama dengan bawahannya dan sulit menerima saran/kritik dari bawahan yang bersifat membangun hendaknya diselesaikan secepat mungkin. Pemimpin seperti ini banyak dijumpai, terutama di Kabupaten Lombok Timur dan anehnya sebagian besar dari mereka justru jabatannya semakin kuat. Menguatnya jabatan pemimpin tersebut dikarenakan memiliki hubungan khusus dengan pejabat tingkat atas lainnya dan kepala daerah (bupati) baik sebagai *partner*, keluarga maupun sahabat dekat, sehingga sangat sulit untuk dilakukan perombakan pimpinan. Mengatasi permasalahan ini tidak hanya dengan

pendekatan kekeluargaan, namun harus dengan tindakan tegas dari pemegang jabatan tertinggi di atas pimpinan tersebut, jika tidak bisa dipahami secara baik, maka langkah terakhir ialah memaksimalkan fungsi bupati sebagai pimpinan utama suatu daerah yang berhak memberikan sanksi baik berupa mutasi, penurunan pangkat maupun diberhentikan karena tidak mampu memberikan tauladan yang baik bagi bawahan, manajemen yang buruk terhadap tujuan pembangunan daerah dan bertindak sesuka hati. Hal ini sesuai dengan prinsip administrasi publik yang dikembangkan oleh Waldo (1955) dalam Tjokroamidjojo (1978:1-2) mengatakan bahwa "administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah". Pendapat ini tentu menjadi landasan bagi para pemimpin agar tjuan "pemerintah" (negara) dapat terwujud dengan adanya manajemen yang didukung oleh sumberdaya manusia maupun peralatannya/teknologi yang tepat. Manajemen yang dimaksud bukan hanya manusia dan peralatannya, namun juga hubungan antar pemerintah, atasan dengan bawahan, pemerintah dengan rakyat, hubungan rakyat dengan rakyat.

Praktek-praktek ketidak-adilan dan kolonisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah biasa terjadi, termasuk di Kabupaten Lombok Timur sendiri. Adapun hal yang bisa dilakukan ialah meningkatkan rasa saling percaya antara atasan/pemimpin dengan bawahan, tidak menjalankan ego masing-masing, memperbaiki niat menjadi pemimpin untuk benar-benar tulus dalam membangun daerahnya yaitu Kabupaten Lombok Timur dan selebihnya mengembalikan semua tindakan tersebut kepada individu yang bersangkutan. Terlepas dari semua itu,

produksi benih di Kabupaten Lombok Timur perlu dioptimalkan kualitas, kuantitas bahkan produktifitasnya dengan memanfaatkan sumber anggaran yang ada dan dorongan dari sumberdaya manusia yang terampil, mampu bersaing, dan memiliki tingkat berfikir yang baik untuk mengembangkan sumberdaya lokalnya baik fisik (sumberdaya alam) maupun non-fisik (sumberdaya manusia). Sumberdaya alam *(natural resources)* yang merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang penggunaan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan ekologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu (FAO, 1995). Sumberdaya manusia/ SDM yang dimaksud meliputi kewirausahaan, tenaga kerja dan sumberdaya institusi (IHS, 2006).

d. Pengolahan Hasil

Pengolahan hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sangat beragam baik untuk tujuan konsumsi maupun untuk kebutuhan non-konsumsi. Selain itu, pengolahan hasil kelautan dan perikanan ini dilengkapi pula dengan beberapa kelembagaan seperti Perusahaan Terbatas (PT), UD (Usaha Dagang) dan koperasi/kelompok usaha serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai lembaga resmi dan bertanggung jawab atas pengembangan hasil olahan maupun pemasarannya. Sesuai dengan fungsi dasar administrasi publik menurut Tjokroamidjojo (1978:3) tentang fungsi pengaturan/ pengendalian unsur-unsur administrasi dikatakan bahwa “untuk menjalankan fungsi ini, administrasi publik harus mampu mendapatkan, menggunakan, dan mengendalikan empat elemen/ unsur-unsur dasar administrasi yaitu struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain”, maka usaha dari

Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur khususnya bidang pemasaran dan pengolahan hasil ialah memfasilitasi usaha-usaha yang bersifat kreatif dari masyarakat lokal seperti pengolahan kulit pari menjadi tas/dompet yang saat ini masih dikembangkan. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengirim masyarakat lokal yang memiliki ide kreatif tersebut ke *workshop-workshop* yang disediakan pemerintah provinsi, pusat maupun swasta. Hal ini tentu menjadi landasan utama bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan. Walaupun demikian, langkah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur masih perlu dikembangkan lagi guna menciptakan sumberdaya kelautan dan perikanan yang idenya mampu mengolah sumberdaya lokal menjadi suatu produk yang bisa bersaing di pasar dunia.

Berbicara mengenai persaingan dunia, Kabupaten Lombok Timur saat ini masih terkendala pada masalah pemasaran. Untuk hasil olahan yang masuk pasar ekspor secara langsung saja, hanya dua komoditi yaitu olahan tuna dan mutiara, sedangkan komoditi yang lainnya masih berada pada tingkat pemasaran lokal, antar povinsi dan antar kabupaten/kota. Pemasaran tingkat lokal didominasi oleh jenis olahan yang bertujuan untuk konsumsi seperti pengeringan ikan, pemindangan, pengolahan fermentasi/terasi, krupuk ikan dan beberapa dari olahan rumput laut. Pemasaran tingkat lokal ini bukan hanya memberikan kemudahan dalam pemasarannya saja, namun juga dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja lokal yang terserap dari kegiatan pengolahan tersebut dibuktikan dengan banyaknya

kelompok usaha pengolahan yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk pemasaran antar povinsi maupun antar kabupaten/kota masih mengalami kendala yang sama yaitu pemasaran.

Pemasaran antar provinsi maupun antar kabupaten/kota menyebabkan hasil yang diperoleh pengolah menjadi menurun dan terkadang tidak sesuai dengan harga yang berlaku, karena biasanya olahan yang dipasarkan masih berbentuk setengah baku, walaupun ada yang mengolah menjadi bahan jadi, harga dipasaran masih dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki jaringan internasional sehingga pengolah tingkat lokal tidak bisa mengetahui harga sebenarnya. Untuk itulah dibutuhkan perluasan jaringan pemasaran dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh kelompok usaha pengolahan maupun dari pemerintah daerah dan perlu adanya prasarana pendukung aktifitas pemasaran seperti pelabuhan peti kemas, tranportasi barang yang memadai dan prasarana lainnya. Selain itu, dibutuhkan upaya percepatan dan ide kreatif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengkoordinasian lintas sektor maupun dukungan *stakeholders* yang menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting dalam penentuan kebijakan ekonomi, politik dan sosial" (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010).

e. Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur meningkat secara signifikan di tahun 2014 dan peningkatan tersebut dapat mengimbangi tingkat konsumsi ikan di tingkat provinsi. Menurut Satria (2009:233-234) paling tidak ada tiga hal yang mampu mendorong peningkatan konsumsi ikan, yaitu faktor

biologis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Selain tiga faktor tersebut, ada faktor lainnya yang sangat ampuh dalam meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yaitu faktor politik. Faktor politik yang menjadi penyebab meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2014, ditunjukkan dengan semakin meluasnya program pemerintah provinsi yaitu Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang didukung dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) hingga tingkat desa. Selain itu, dari faktor ekonomi ditunjukkan dengan semakin banyaknya pembudidaya menjual ikan segar yang dilengkapi pula dengan dapur pengolahan dan warung (lesehan) yang berada di sekitar kolam budidaya sehingga menarik masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Ada juga pedagang ikan keliling yang berdagang hingga ke perumahan warga sehingga warga tidak perlu menghabiskan waktu untuk membeli ikan ke pasar.

Ditinjau dari segi kesehatan/ biologis dan sosiologisnya, ikan merupakan makanan yang rendah kolesterol, tinggi protein, tinggi kalsium (ikan teri) dan kandungan minyak (omega 3) pada ikan mampu memberikan perkembangan yang baik bagi otak khususnya pada anak-anak. Karena kelebihan-kelebihan tersebut sebagian besar masyarakat kota menjadikan “makan ikan” sebagai budaya dan menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Hal ini terbukti ketika banyak kolam budidaya yang dilengkapi restoran dengan menu utama ikan maupun restoran yang bertemakan *seafood* dengan yang harga jual menunya relatif mahal dan tentunya memiliki pelanggan atau konsumen yang berasal dari golongan

menengah ke atas (pejabat, pengusaha dan orang-orang berstatus sosial tinggi lainnya).

f. Hutan Bakau, Terumbu Karang, Padang Lamun dan Gili

Hutan bakau di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar dalam kondisi baik dikarenakan letak atau lokasinya cukup jauh dari perkampungan nelayan, sedangkan hutan bakau yang dekat perkampungan nelayan sebagian ada yang mengalami kerusakan bahkan di beberapa lokasi, hutan bakau dirusak untuk kepentingan tambak, pengembangan usaha (perdagangan, bisnis walet, dll) dan permukiman. Pengelolaan potensi ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PK) dalam Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a) keberlanjutan; b) konsistensi; c) keterpaduan; d) kepastian hukum; e) kemitraan; f) pemerataan; g) peran serta masyarakat; h) keterbukaan; i) desentralisasi; j) akuntabilitas; dan k) keadilan". Kepastian hukum dibutuhkan dalam melindungi hutan bakau, baik yang ada di wilayah lindungan maupun yang berada dekat dengan perkampungan nelayan. Langkah ini tentu dengan memaksimalkan penerapan hukum tertulis maupun hukum adat (awik-awik). Jika terjadi kerusakan, tentu akan berkaitan dengan kurang mengikatnya hukum adat (awik-awik) dalam menindak tegas pelaku perusakan. Selain itu, kesadaran dan peran masyarakat lokal dalam memelihara keseimbangan alam masih kurang.

Kurangnya kesadaran dan peran masyarakat lokal dalam memelihara maupun menjaga kelestarian hutan *mangrove*/bakau disebabkan masyarakat

belum memahami keuntungan yang bersifat langsung/keuntungan praktis dari pohon *mangrove*/bakau yang bisa menghasilkan rupiah. Untuk mengatasi hal ini, maka dari pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur perlu di mengadakan pelatihan yang kontinu pada masyarakat pesisir dalam mengolah bakau menjadi sesuatu yang bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat pesisir. Agar kegiatan ini terwujud, maka harus didukung pula oleh ketersediaan anggaran pembangunan yang cukup. Selain hutan bakau, terdapat pula terumbu karang sebagai tempat yang strategis bagi ikan dan biota laut lainnya untuk memperbanyak diri/berkembang biak.

Kondisi terumbu karang di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar mengalami kerusakan dan pada beberapa lokasi cukup memperihatinkan seperti di perairan Labuhan Lombok (Kecamatan Pringgabaya), Sambelia, Labuhan Haji dan Pemongkong (Kecamatan Jerowaru). Hal ini disebabkan oleh masih adanya praktek-praktek/kegiatan-kegiatan pengerusakan lingkungan atau eksploitasi yang tidak bertanggung jawab seperti penggalian terumbu karang secara berlebihan untuk bahan kapur dan penangkapan ikan secara destruktif dengan penggunaan bahan peledak dan potasium. Padahal aturan tentang pengambilan terumbu karang tersebut sudah diterangkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang menetapkan bahwa:

> "Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melanggar ketentuan Pasal 6 (setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dilarang melakukan pengambilan karang laut untuk keperluan atau kepentingan apapun di seluruh wilayah perairan Kabupaten Lombok

> Timur) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Terlepas dari itu semua, di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Sambelia (Gili Sulat dan Gili Lawang), Kecamatan Jerowaru (Pantai Surga, Tanjung Ringgit, Serewe, dan Teluk Sunut) kondisi terumbu karang *(coral reefs)* relatif masih baik. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut cenderung jauh dari aktivitas penangkapan ikan dan menjadi daerah yang dilindungi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur atau dijadikan sebagai daerah konservasi sesuai dengan pada pasal 23 ayat a dan b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 yang berbunyi:

> "Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri atas: a) Taman Wisata Alam Laut (TWAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: 1) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Sulat, KKLD Gili Lawang, KKLD Gili Petagan; dan 2) Kawasan suaka perairan Guoh Sandak di Teluk Jukung, suaka perairan Gili Rango Teluk Serewe, Suaka Perairan Sapah Kokok di Teluk Ekas, Suaka Perairan Taked Pedamekan di Sambelia, dan Suaka Perairan Pekat Belanting. b) Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditingkatkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Untuk kondisi padang lamun di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar dalam kondisi baik yaitu sekitar 65 %, kondisi sedang sekitar 15 % dan sisanya sebanyak 20 % dalam kondisi rusak. Kondisi padang lamun yang sebagian besar dalam kondisi baik dikarenakan tingkat eksploitasinya rendah dan hanya digunakan untuk konsumsi/pelengkap pangan bagi masyarakat pesisir. Disamping itu, cara untuk mendapatkan lamun itu sendiri sangat sederhana dan tanpa membahayakan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara mengambilnya tanpa alat

apapun (hanya dengan tangan saja) di pantai yang gelombang lautnya telah surut dan biasanya berupa lamun yang terseret arus. Hal inilah yang membuat vegetasi lamun di Kabupaten Lombok Timur mayoritas dalam kondisi baik. Sedangkan untuk padang lamun yang mengalami kerusakan, sebagian besar disebabkan oleh pencemaran air laut baik dari sampah, limbah rumah tangga, tumpahan oli kapal dan penggunaan *jaring oros* (jaring yang ditarik dari pinggir pantai). Selain hutan bakau, terumbu karang dan padang lamun, Kabupaten Lombok Timur juga memiliki potensi lain yang harus dijaga dan dikelola keberadaannya yaitu pulau-pulau kecil atau gili.

Gili yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur cukup bayak dan hal ini tentu akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah jika dikelola dengan maksimal dan mampu memahami potensi yang pantas di kembangkan di gili-gili tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur ialah menjadikannya sebagai tempat penelitian seperti Gili Sulat dan Gili Lawang yang berada di Kecamatan Sambelia.

g. Penghasilan Nelayan, Pembudidaya dan Pedagang Ikan

Penghasilan nelayan merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan tingkat kesejahteraan nelayan dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS Pusat) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) dalam Gafar, A.M. (2012:39) mengatakan bahwa:

> “Badan Pusat Statistik (BPS Pusat), batas kemiskinan adalah orang dengan penghasilan US $ 1,5 atau Rp. 12.000 sehari per orang (atau Rp. 360.000 per bulan). Sedangkan menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia,

batas kemiskinan adalah penduduk dengan penghasilan Rp. 7.000,- per hari atau Rp. 210.000,- per bulan".

Tingkat penghasilan rata-rata nelayan di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 400.000 sampai 500.000 per bulan, sesuai dengan kajian tersebut di atas, maka nelayan tersebut termasuk sebagai nelayan yang berada di atas garis kemiskinan atau bisa disebut sejahtera/ bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum cukup untuk aktif dalam upaya pembangunan, belum aktif terlibat dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Akibatnya sebagian dari nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur memilih pekerjaan yang memiliki korelasi positif antara usaha yang di keluarkan dengan keuntungan yang diperoleh, salah satunya dengan mengumpulkan barang bekas yang memberikan hasil/keuntungan yang lebih besar dari hasil melaut.

Keuntungan lain yang didapatkan dari pengumpul barang bekas (botol plastik) bukan hanya pada peningkatan pendapatan, namun juga memberikan kontribusi pada lingkungan pantai dan para pembudidaya rumput laut. Manfaat yang diperoleh lingkungan khususnya pantai ialah terbebas dari tumpukan sampah (botol plastik), walaupun untuk sampah plastik lainnya masih berserakan di tepi pantai, namun hal tersebut sangat membatu lingkungan perairan Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan manfaat yang diperoleh para pembudidaya rumput laut ialah tersedianya perlengkapan budidaya alternatif dengan harga murah yaitu botol plastik (pengganti alat pengapung pabrikan) untuk mengapungkan rumput laut di perairan budidaya yang biasanya terlihat pada metode *long line.* Pendapatan dari usaha penangkapan/ menjadi nelayan dan menjadi pengumpul

barang bekas berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan menjadi pembudidaya.

Tingkat pendapatan pembudidaya di Kabupaten Lombok Timur sangat beragam, tergantung pada komoditi yang di usahakan. Untuk pembudidaya air laut seperti kerapu dan lobster pendapatan terendahnya sekitar Rp. 4.000.000 per sekali panen dan pendapatan tertingginya sekitar Rp. 50.000.000 per sekali panen. Biasanya panen dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan tergantung pada besar benih yang ditebar. Pendapatan sebanyak ini tidak semuanya dinikmati oleh pembudidaya karena harus dikurangi dengan biaya produksi budidaya baik berupa bibit, pakan, obat-obatan, keramba (jaring), transportasi, upah tenaga kerja dan lain sebagainya. Untuk kisaran harga kerapu dan lobster hampir memiliki harga yang sama, yaitu Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 per kilogramnya, namun harga ini terkadang di permainkan oleh para pengepul/tengkulak. Pengepul/tengkulak mempermainkan harga dengan memberikan informasi harga dibawah harga normal, sehingga untung yang diperoleh jauh lebih besar dari pembudidaya. Untuk itu, dibutuhkan penyebaran informasi yang baik diantar para pembudidaya kerapu dan lobster untuk mengetahui harga pasar, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para pengepul/tengkulak. Selain budidaya air laut, Kabupaten Lombok Timur juga memiliki potensi budidaya air tawar yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha budidaya.

Tingkat pendapatan pembudidaya ikan air tawar sebagian besar memiliki tingkat pendapatan sebanyak Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 17.000.000 per sekali panen dan biasanya dalam setahun, pembudidaya/petani ikan ini melakukan

panen sebanyak dua kali yang akan menyebabkan tingkat pendapatannya dalam setahun menjadi dua kali lipat. Usaha budidaya ini sebagian besar dilakukan oleh individu (beserta keluarganya) dan ada pula yang melakukannya secara berkelompok sehingga dapat membentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyerap tenaga-tenaga kerja lokal. Untuk daerah pemasarannya masih ditujukan untuk kebutuhan pasar lokal dengan menjualnya ke para pedagang di pasar-pasar tradisional, bahkan ada yang langsung membeli ke tempat pembudidayaan (kolam). Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang baik, bukan hanya dari segi kuantitas dan produktifitas saja, namun juga kualitas dari komoditi budidaya yang akan dipasarkan.

Kabupaten Lombok Timur tidak hanya mengembangkan budidaya perikanan, namun juga budidaya rumput laut. Tingkat pendapatan melalui budidaya rumput laut sekitar Rp. 1.000.000 sampai Rp.13.700.000 per sekali panen dan biasanya pembudidaya rumput laut melakukan panen setiap 45 hari atau kurang lebih 8 kali dalam setahun. Hal ini tentu dapat menguntungkan petani rumput laut dengan masa panen yang relatif singkat, hasil yang didapat banyak dan harga rumput laut juga cukup menjanjikan akan tetapi pendapatan dari hasil penjualan rumput laut tersebut tidak semuanya dapat dinikmati, sebagian di gunakan untuk membeli bibit baru maupun peralatan budidaya. Sedangkan sebagiannya lagi untuk memberikan upah kepada pengikat rumput laut dan upah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga khususnya bagi masyarakat pesisir serta dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pengikat rumput laut sangat produktif dalam memanfaatkan waktu luang karena sebagian besar berasal dari

kaum ibu dan anak-anak. Dari pekerjaan ini anak-anak dapat menghasilkan uang jajan, buku mupun bayar sekolah sendiri, sehingga tidak perlu meminta ke orang tuanya. Upaya ini semakin kuat dengan adanya dukungan pemerintah yang menjadikan Lombok Timur sebagai kawasan minapolitan rumput laut.

Pembudidaya Kabupaten Lombok Timur secara umum disebut sejahtera atau mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu pula, pembudidaya ini mampu berperan aktif dalam upaya pembangunan serta aktif terlibat dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya yang ditunjukkan dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Pekerjaan tersebut berupa pengikat rumput laut, kuli panggul dan pedangang/penjual ikan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Peran pembudidaya yang aktif dalam upaya pembangunan dan aktif terlibat dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya tidak sama dengan peran nelayan terhadap pedagang/penjual ikan, karena nelayan tidak memiliki cukup uang/pendapatan untuk memberikan perannya secara aktif. Akan tetapi, peran nelayan cukup dipertimbangkan oleh pedagang ikan, khususnya untuk daerah pesisir yang membutuhkan nelayan sebagai sumber ikan yang akan dijual oleh pedagang ikan.

Pedagang ikan di Kabupaten Lombok Timur jika dilihat dari tingkat pendapatannya hampir sama dengan para nelayan yaitu berada di atas garis kemiskinan atau bisa disebut sejahtera/bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum cukup untuk aktif dalam upaya pembangunan, belum aktif terlibat dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Pendapatan yang diperoleh saat ini belum tentu semuanya di terima pedagang,

karena pedagang harus membayar tempat berjualan (pajak), transportasi dan beberapa kuli panggul. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh dengan menciptakan inovasi barang dagangan sehingga konsumen juga banyak yang tertarik, keuntungan yang didapat juga tentu meningkat. Hal ini tentu membutuhkan peran *stakeholders* dalam pengembangan inovasi dan peran pemerintah dalam memaksimalkan kawasan minapolitan di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan, peran masyarakat ialah membantu pemerintah mewujudkan visi-misi pembangunan khususnya bidang kelautan dan perikanan dengan kemampuan/ kapasitas sumberdaya ekonomi lokal yang dimiliki ataupun dengan bantuan tenaga dan fikiran sesuai dengan kemampuan baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Dan hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Siagian (2012:4-5) bahwa:

> "pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan maupun perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara/ bangsa, pemerintah dan masyarakat didalamnya menuju ke arah modernitas yang bertujuan untuk pembinaan bangsa *(nation-building)"*.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana yang digunakan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu armada penangkapan ikan, alat tangkap serta koperasi nelayan. Armada penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh perahu motor tempel (PMT).

Perahu motor tempel (PMT) banyak digunakan oleh nelayan dikarenakan pertimbangan terhadap hak milik, biaya perawatan, hasil/keuntungan dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Dengan menggunakan perahu motor tempel (PMT), nelayan bisa mencapai *fishing ground* (tempat penangkapan ikan) yang lebih jauh dan cepat dibandingkan menggunakan perahu tanpa motor (PTM) sehingga hasil (ikan) yang diperoleh juga lebih banyak. Jika dibandingkan dengan kapal motor (KM), perahu motor tempel (PMT) lebih hemat biaya baik dari sisi perawatan, bahan bakar dan resiko kerugian yang mungkin dialami nelayan atas hasil (ikan) yang diperoleh karena kapal motor (KM) biasanya dimiliki oleh pengusaha kapal, sedangkan beberapa nelayan lokal ditunjuk sebagai orang yang mengoperasikan kapal dan hasilnya dibagi dengan perbandingan sekitar 70% untuk pemilik kapal dan 30% untuk nelayan, itupun tergantung pada jumlah tangkapan. Tidak adanya hak milik dan minimnya keuntungan yang diperoleh, membuat nelayan memilih untuk menabung dan melakukan kredit terhadap mesin penggerak kapal (motor tempel).

Sarana pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang kedua ialah alat tangkap. Alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan Kabupaten Lombok Timur ialah pancing biasa karena harganya cukup murah dan mudah dibawa kemanapun. Namun, hasil yang diperoleh tentu tidak banyak dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumsi). Sedangkan alat tangkap yang jumlahnya paling sedikit ialah pukat pantai karena untuk mendapatkannya butuh biaya besar, tenaga yang dibutuhkan juga besar sehingga nelayan tidak terlalu banyak menggunakan alat tangkap ini. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Timur mulai membatasi penggunaan pukat pantai ini karena dapat merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, anak ikan dan biota laut lainnya yang bukan untuk konsumsi. Lokasi penyebaran alat tangkap ikan yang beragam terdapat di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, dan papan semuanya sangat tergantung pada hasil laut. Sementara di lokasi lainnya, keluarga nelayan masih bisa mengolah lahan pertanian dekat pantai, sehingga hasil melaut bisa dilengkapi dengan hasil dari usaha pertanian.

Sarana pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ketiga ialah koperasi nelayan. Koperasi nelayan di Kabupaten Lombok Timur yang sudah terdaftar/ memiliki izin, berjumlah 3 (tiga) koperasi nelayan. Dari tiga koperasi ini, yang masih aktif hanya 1 (satu) koperasi saja, sedangan sisanya/ 2 (dua) koperasi lainnya masih ada namun tidak menunjukkan aktifitas layaknya sebuah koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi nelayan yang tidak aktif tersebut terkendala masalah permodalan dan kantornya sering dihadapkan pada bencana alam (abrasi dan badai). Selain itu, minat nelayan terhadap usaha perkoperasian semakin berkurang karena dana yang mereka masukkan banyak di salah-gunakan oleh para pengurus koperasi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan manajemen yang baik dari para pengurus koperasi nelayan tersebut dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi terlebih masalah modal/anggaran.

Pengembangan dan pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan, tidak hanya dilihat dari ketersediaan maupun kondisi sarananya saja, akan tetapi dilihat dari ketersediaan dan kondisi prasarana pendukungnya juga. Ketersediaan

prasarana pengembangan sektor kelautan yang ada di Kabupaten Lombok Timur saat ini dinilai cukup, namun prasarana tersebut membutuhkan perawatan/ pemeliharaan dan beberapa perbaikan, sehingga dapat dimanfaatkan atau difungsikan sebagaimana mestinya. Selama ini, prasarana yang ada terus-menerus digunakan, namun untuk perawatan/pemeliharaannya masih sangat kurang bahkan dibiarkan rusak, seperti BBIP, TPI, *Cool Storage*, SPDN, jalan menuju KKLD, jembatan penghubung desa pesisir, lantai pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan tempat pelelangan ikan, pelengkap pelabuhan penangkap ikan berupa jaringan listrik dan pipa air yang digunakan untuk cadangan air tawar bagi kapal-kapal penangkap ikan. Semua ini menjadi tanggung jawab setiap pihak yang terkait dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat lokal.

Partisipasi dari pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur cukup banyak dengan memberikan bantuan dana bagi prasarana yang rusak, walaupun dalam jumlah kecil. Minimnya bantuan dana untuk prasarana yang rusak tersebut disebabkan karena minimnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan. Dari 100% anggaran yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, 70%-nya digunakan untuk gaji pegawai, sementara untuk dana pembangunan sekitar 30% harus di bagi kepada setiap sektor yang ada di Kabupaten Lombok Timur, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, anggaran 30% yang dibagi kepada masing-masing sektor ini dalam implementasinya juga menemui kesulitan berupa penyalahgunaan anggaran. Sedangkan partisipasi dari pihak swasta ialah

dengan memberikan bantuan yang disebut CSR *(Corporate Social Responsibility)* yang sebagian besar berupa barang seperti pembangkit listrik tenaga surya yang berada di pesisir pantai Labuhan Haji). Hal penting dari setiap bantuan ialah pengguna bantuan yang tepat sasaran oleh masyarakat lokal. Dan menjadi kewajiban dan kesadaran bagi negara dalam mengelola bantuan yang berasal dari luar negeri, karena menurut Siagian (2012:8), bantuan memiliki dua makna, yaitu;

> "Pendekatan moralis dan paragmatis. Secara moralis, bantuan tersebut merupakan cara negara bekas penjajah untuk "menebus dosanya" terhadap negara bekas jajahannya karena kebijaksanaan yang eksploitatif di masa lalu yang menyengsarakan rakyat pribumi. Namun secara paragmatis, mengatakan bahwa kalau-pun negara-negara bekas penjajah bersedia memberikan bantuan ke negara bekas jajahannya bukan atas landasan moralis, melainkan untuk kepentingan nasional negara penjajah. Bentuk kepentingan nasional negara bekas penjajah terhadap negara bekas jajahan ialah dengan menjadikan negara bekas jajahan sebagai negara penghasil bahan baku/mentah untuk industri di negara bekas penjajah dan menjadikan negara bekas jajahannya sebagai pasar bagi produk yang dihasilkannya.

Peran masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat pesisir (nelayan) yang ditunjukkan bukan hanya sebagai pengguna prasarana saja, namun juga berusaha merawat/memelihara bahkan melindungi prasarana yang menunjang aktifitas mereka dari semua bentuk perusakan. Usaha untuk merawat/memelihara dan melindungi prasarana yang ada dapat menggunakan kemampuan lokal baik individu maupun kelompok yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka terhadap prasarana yang ada, sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Karena Tjokrowinoto (1996) mengidentifikasi ada beberapa "rasional dasar/ logika dasar" tentang perlunya pembangunan berbasis sumberdaya ekonomi lokal, yaitu:

> a) sumber pembangunan yang berasal dari pusat tidak akan dapat mencukupi untuk menjangkau sebagian besar masyarakat, terutama pada lapisan sosial bawah; b) program-program pembangunan yang

dilaksanakan oleh pusat yang bertumpu pada manjemen birokrasi, sukar untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; c) pengelolaan sumberdaya lokal lebih tanggap pada variasi setempat yang diwarnai oleh ekologi alami, ekologi sosial dan preferensi individual yang sangat bervariasi; d) memungkinkan masyarakat memobilisasi berbagai sumber yang kurang termanfaatkan, sampai kepada keterampilan, komunkasi dan sumber dana; dan terakhir e) pengelolaan sumberdaya lokal menempatkan tanggung jawab pembangunan pada masyarakat setempat.

2. Perencanan Skenario Sektor Kelautan dan Perikanan Lombok Timur

Perencanaan skenario yang sesuai dengan pendekatan Lindgren dan Bandhold yaitu metode TAIDA *(Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting).* Dengan metode ini, pengembangan sektor kelautan dan perikanan bisa dikelola dengan baik. Adapun perencanaan skenario sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur berbasis potensi lokal, dijelaskan sebagai berikut:

a. *Tracking* (Pelacakan)

Dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur maka tidak terlepas dari dua faktor penting yang memberikan pengaruh pada proses pengambilan kebijakan sektor yang bersangkutan. Dua faktor tersebut ialah faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Sesuai dengan pendapat Chermack (2003) yang mengatakan bahwa kerangka (bangun) dari skenario adalah *"The process of constructing alternate future of bisiness external environment"* atau sebuah proses untuk mengkonstruksikan pilihan-pilihan alternatif di masa depan dengan memperhatikan lingkungan ekternal sebuah bisnis. Selain itu, Lindgren dan Bandhold (2003:38) mengungkapkan bahwa langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun skenario ialah *Tracking* (Pelacakan). *"Tracking: we trace*

changes and signs of threats and opportunities" (tahap pelacakan merupakan tahap penelusuran atas perubahan dan tanda-tanda keberadaan ancaman dan peluang). Dari pendapat-pendapat tersebut, *"Tracking"* bukan hanya tentang penelusuran atas suatu perubahan yang terjadi dan tanda-tanda keberadaan faktor ekternal (ancaman/ tantangan dan peluang) namun juga mengenali faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki atau lebih dikenal dengan SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity, Threat).* Bryson (2007:147) mengatakan bahwa SWOT merupakan suatu teknik untuk memfokuskan kepada pertanyaan seperti (1) Peluang eksternal terpenting apakah yang kita miliki? (2) Ancaman eksternal terpenting apakah yang kita hadapi? (3) Apa kekuatan internal terpenting kita? dan (4) Apa kelemahan internal terpenting kita?

Pendapat dari beberapa ahli tersebut, memberikan pemahaman bahwa tanpa mengenali faktor internal, akan sulit memahami tanda-tanda keberadaan faktor ekternal. Untuk itulah, tahap awal dari perencanaan skenario *(Tracking)* menjadi tahap identifikasi dan berusaha mempelajari perubahan dari masa lalu berupa kekuatan dan kelemahan untuk menghadapi masa sekarang dan melakukan skenario terhadap masa depan dengan menangkap peluang dan mengatasi ancaman. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya (faktor internal dapat saling melengkapi/ saling mengisi dengan sesama faktor internalnya, maupun untuk mengatasi masalah pada faktor ekternal). Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 27. Matrik SWOT

Faktor Internal	***Strength/ Kekuatan (S)*** S1. Luas perairan laut yang hampir sama dengan luas daratan dan terbentang dari utara hingga selatan Kabupaten Lombok Timur S2. Menjadi gerbang penghubung bagi produk pertanian dan perikanan S3. Lombok Timur memiliki komoditi yang beragam (budidaya laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan penangkapan ikan laut) S4. Memiliki 6 kecamatan pantai dengan 41 desa nelayan. S5. Memiliki kawasan minapolitan khusus rumput laut yang letaknya di Kecamatan Jerowaru S6. Potensi kelautan yang berfungsi sebagai obyek wisata potensial (kawasan konservasi dan gili) S7. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui tradisi dan budaya (gemarikan) dan lembaga (forikan) S8. Memiliki 2 (dua) industri besar yang mengolah tuna dengan kualitas ekspor	***Weakness/ Kelemahan (W)*** W1. Kemampuan modal/ anggaran rendah dan sarana-prasarana pendukung yang masih belum memadai W2. Kurangnya tenaga ahli profesional, kualitas sumberdaya aparatur masih kurang, penyebaran informasi pasar dan penguasaan penerapan teknologi petani ikan/ nelayan yang masih rendah W3. Kurang maksimalnya sarana kelembagaan perikanan seperti lembaga perkreditan, perbankan, koperasi perikanan yang mandiri serta organisasi nelayan secara aktif, tepat dan benar dan prasarana seperti BBIP, TPI, SPDN, *Cool Storage*, fasilitas jalan, jembatan dan kelengkapan dermaga kapal penangkap ikan (jaringan listrik dan air tawar) W4. Minimnya promosi tentang potensi perikanan dan kelautan serta kesempatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri W5. Masih kurang dalam inovasi dan masih rendahnya kemampuan teknologi tepat guna W6. Jaringan pemasaran yang masih lemah W7. Kurangnya mitra yang baik antara pemerintah, swasta, lembaga masyarakat dan masyarakat perikanan pada umumnya
Faktor External		

Opportunity/ Peluang (O)	***Alternatif (SO)***	***Alternatif (WO)***
O1. Sumberdaya kelautan dan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tersedia saat ini masih menunjang O2. Kebutuhan produk kelautan dan perikanan yang terus mengalami peningkatan dan dikembangkannya pasar lelang mutiara bertaraf internasional di tingkat provinsi O3. Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis *Blue Economy* yang berkaitan dengan masalah pengelolaan perikanan tanpa limbah *(Zero Waste)* O4. Adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Otonomi Pengelolaan Wilayah Perairan (Sumberdaya Perikanan), peraturan daerah tentang penataan ruang kawasan, aturan pengambilan terumbu karang dan hukum adat/awik-awik	SO1. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan dukungan pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Otonomi Pengelolaan Wilayah Perairan (Sumberdaya Perikanan) dan beberapa peraturan lainnya yang saling terkait. Selain itu, diperlukan sistem padat modal guna menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Lombok Timur *(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,O1,O4)** SO2. Membuka dan mengembangkan usaha baru di sektor kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk kebutuhan lokal maupun mancanegara melalui *Blue Economy* (ekonomi biru) *(S1,S2,S3,S4,S5,S8,O2,O3)**	WO1. Inovasi dan motorisasi unit penangkapan, budidaya dan pengolahan melalui bantuan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan memaksimalkannya melalui konsep *Blue Economy* (ekonomi biru) *(W1,W2 ,W4,W5,W7,O3)** WO2. Pengembangan jaringan pemasaran dan pengembangan budidaya dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan secara intensif untuk mendukung produksi perikanan tangkap dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal, antar pulau dan regional. Selain itu, mengembangkan teknologi tepat guna agardapat menghasilkan produksi perikanan dengan kualitas ekspor *(W1,W2,W3,W4.W5,W6,W7,O1,O2,O3,O4)** WO3. Membangun srana-prasarana kelautan dan perikanan melalui dukungan pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat (*Blue Economy*) dan *stakeholders* yang terkait guna meningkatkan produksi kelautan-perikanan dan sebagai pemasukan bagi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur *(W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,O1,O2,O3,O4)**

Threat/ Ancaman (T)	***Alternatif (ST)***	***Alternatif (WT)***
T1. Sentralistik kekuasaan relatif masih ada pada pemerintah pusat seperti masalah perizinan (usaha perikanan dan kelautan) yang cenderung berbelit-belit T2. Iklim kompetisi antar daerah yang semakin tinggi T3. Eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan yang berlebihan T4. Berkembangnya daerah penambangan di dekat pantai (tambang batu apung) menyebabkan tercemarnya kualitas air T5. Terjadi wabah penyakit ikan saat paceklik dan harga pakan, obat-obatan serta suku cadang perahu cukup tinggi T6. Efek globalisasi AEC (*Asean Economic Community)* tahun 2015 T7. Masih adanya pola hidup konsumtif di kalangan nelayan lokal yang masih tinggi	ST1. Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat melalui kerjasama dan pengawasan dalam mengatasi hambatan budidaya, penangkapan dan pengolahan serta mewaspadai ancaman perdagangan bebas (AEC 2015) dalam membangun sumberdaya ekonomi lokal Kabupaten Lombok Timur *(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,T3,T4,T5,T6,T7)** ST2. Pemanfaatan semua potensi secara optimal untuk meningkatkan kemampuan kompetisi antar daerah yang sehat dalam menghadapi era globalisasi *(S1,S2,S3,S4,S5,S6, S7,S8,T1,T2,T6)** ST3. Menyadarkan nelayan atas pola hidup konsumtifnya dan melakukan penyederhanaan birokrasi terutama yang berkaitan dengan perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan *(S1,S2,S3,S5,S6, S7,S8,T1,T3,T4,T6,T7)**	WT1. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pengusaha perikanan dan masyarakat dalam rangka memonitoring pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan *(W1,W2,W3,W4,W5,W7,T3,T4,T5)** WT2. Restrukturisasi potensi perikanan dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dalam bidang perikanan secara optimal *(W1,W2,W4,W7,T2,T3)** WT3. Memanfaatkan, merawat/ memelihara, memperbaiki dan membentuk/membangun sarana-prasarana koperasi, BBIP, TPI, SPDN, *Cool Storage*, fasilitas jalan, jembatan dan kelengkapan dermaga kapal penangkap ikan (jaringan listrik dan air tawar) guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan sistem padat modal dan teknologi tepat guna serta mewaspadai bahaya wabah penyakit pada usaha budidaya *(W1,W2,W3 ,W5,W7,T2,T3,T4,T5)**

Keterangan: SO *(Strength Opportunity)*, ST *(Strength Threat)*, WO *(Weakness Opportunity)* dan WT *(Wakness Threat)*
* Menandakan hubungan atau keterkaitan antar faktor (internal dan ekternal) yang mendukung strategi

Sumber: Data diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Dua faktor tersebut yaitu faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternalnya ialah peluang dan ancaman. Dari faktor-faktor tersebut dapat dikembangkan berbagai pilihan alternatif, seperti SO *(Strength Opportunity)* atau memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, ST *(Strength Threat)* atau memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman, WO *(Weakness Opportunity)* mengupayakan agar kelemahan dapat diatasi untuk mencoba menangkap peluang dan WT *(Weakness Threat)* atau upaya untuk mengurangi kerugian akibat kelemahan dan ancaman.

Faktor internal, dalam hal ini kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur saat ini dapat digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan, menangkap peluang dan mengatasi berbagai ancaman yang muncul dari luar. Kekuatan ini akan lebih kuat lagi jika didukung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki saat ini dan memunculkan sebuah kekuatan baru untuk menghadapi ancaman global. Dari salah satu kekuatan yang dimiliki saat ini, Kabupaten Lombok Timur bisa menangkap peluang yang ada dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui dukungan pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi pengelolaan wilayah perairan (sumberdaya perikanan) dan beberapa peraturan lainnya yang saling terkait. Selain itu, diperlukan sistem

padat modal guna menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Lombok Timur. Langkah lainnya dengan membuka dan mengembangkan usaha baru di sektor perikanan dan kelautan yang ditujukan untuk kebutuhan lokal maupun mancanegara melalui *blue economy* (ekonomi biru).

Kekuatan juga dapat memberikan dampak positif guna menghadapi ancaman. Ancaman dari luar dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur melalui: 1) melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat melalui kerjasama dan pengawasan dalam mengatasi hambatan budidaya, penangkapan dan pengolahan serta mewaspadai ancaman perdagangan bebas (AEC/*Asean Economic Community* 2015) dalam membangun sumberdaya ekonomi lokal Kabupaten Lombok Timur, 2) memanfaatan semua potensi secara optimal untuk meningkatkan kemampuan kompetisi antar daerah yang sehat dalam menghadapi era globalisasi, 3) menyadarkan nelayan atas pola hidup konsumtifnya dan melakukan penyederhanaan birokrasi terutama yang berkaitan dengan perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk kelemahan yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat ditutupi dengan keberadaan kekuatan dan dengan memaksimalkan/memanfaatkan keberadaan peluang untuk mengatasi beberapa ancaman yang muncul.

Kelemahan yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi penghambat untuk menangkap berbagai peluang dari luar. Pilihan alternatif yang dapat dilakukan ialah 1) inovasi dan motorisasi unit penangkapan, budidaya dan

pengolahan melalui bantuan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan memaksimalkannya melalui konsep *blue economy* (ekonomi biru), 2) pengembangan jaringan pemasaran dan pengembangan budidaya dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan secara intensif untuk mendukung produksi perikanan tangkap dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal, antar pulau dan regional. Selain itu, mengembangkan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan produksi perikanan dengan kualitas ekspor, dan 3) membangun sarana-prasarana kelautan dan perikanan melalui dukungan pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat *(blue economy)* dan *stakeholders* yang terkait guna meningkatkan produktifitas sektor kelautan dan perikanan, juga sebagai pemasukan pendapatan bagi daerah Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Timur juga harus mewaspadai berbagai ancaman yang datang dari luar. Dengan kelemahan yang dimiliki saat ini, tentu akan sangat sulit bagi Kabupaten Lombok Timur untuk menghindari ancaman tersebut. Untuk itu, dibutuhkan beberapa pertimbangan (mengendalikan kerugian) dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan kedepannya. Pilihan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah 1) meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha bidang perikanan dan masyarakat dalam rangka memonitoring pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, 2) restrukturisasi potensi perikanan dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dalam bidang perikanan secara optimal, dan 3) memanfaatkan, merawat/ memelihara, memperbaiki dan membentuk/membangun sarana-prasarana koperasi, BBIP (Balai Benih Ikan Pantai), TPI (Tempat Pelelangan Ikan), SPDN (*Solar Packed*

Dealer untuk Nelayan), *Cool Storage*, fasilitas jalan, jembatan dan kelengkapan pelabuhan penangkap ikan yang dekat dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) seperti (jaringan listrik dan air tawar) guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan sistem padat modal dan teknologi tepat guna serta mewaspadai bahaya wabah penyakit pada usaha budidaya. Peranan alat dan teknologi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, menurut Ringland (1998), *scenario planning* adalah bagian dari perencanaan strategis yang berhubungan dengan alat dan teknologi untuk mengelola suatu ketidakpastian di masa depan.

Dari sekian banyak permasalahan, baik berupa kelemahan maupun ancaman dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur, kekuatan dan peluang tidak cukup untuk memberikan jawaban atas ancaman dan menangkap setiap peluang yang ada. Hal ini dikarenakan sumber masalah sebenarnya/ masalah utama pengembangan sektor kelautan dan perikanan belum mampu dijawab/dikelola oleh alternatif SO *(Strength Opportunity)*, ST *(Strength Threat)*, WO *(Weakness Opportunity)* dan WT *(Wakness Threat)*, atau dengan kata lain pilihan alternatif tersebut masih bersifat umum dan masih belum mengkaji secara dalam inti permasalahan. Untuk itu, maka dibutuhkan identifikasi terhadap masalah utama melalui tahap *Analizing/* tahap kedua setelah *Tracking*.

b. *Analizing* (Menganalisis)

Tahap kedua dalam perencanaan skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur ialah melakukan tahap analisis. Lindgren dan Bandhold (2003:38) mengungkapkan bahwa langkah kedua yang

dilakukan dalam menyusun skenario ialah *Analysing* (analisis) yang merupakan tahap dimana kita melakukan analisis terhadap konsekuensi dan menghasilkan suatu skenario *(we analyse consequences and generate scenarios)* atau bisa juga dikatakan tahapan analisis terhadap konsekuensi yang muncul akibat keberadaan peluang dan ancaman dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahannya guna membentuk skenario. Analisis terhadap konsekuensi tersebut dilakukan melalui identifikasi sumber masalah utama dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Identifikasi sumber masalah utama *(focal concern)* menurut Schwartz (1996) ialah:

> "langkah awal yang digunakan untuk mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang dapat mempengaruhi keputusan maupun cara berfikir/ cara pandang skenario atas isu atau masalah tersebut dengan memperhatikan beberapa kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya, penentuan jangka waktu pelaksanaan dan relevansinya dilapangan".

Sumber masalah utama *(focal concern)* yang dimaksud ialah kurangnya anggaran/modal pembangunan dan sumberdaya manusia/SDM yang masih belum memadai. Kurangnya anggaran pembangunan di Kabupaten Lombok Timur menyebabkan sulitnya melakukan pengembangan baik di bidang fisik maupun pada bidang non-fisik. Masalah kekurangan anggaran/modal pembangunan hampir merata dan dialami oleh setiap pelaku pembangunan, terlebih pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kekurangan anggaran di Kabupaten Lombok Timur disebabkan oleh kurangnya kemandirian daerah untuk membentuk sumber pendapatan asli daerah. Sumber anggaran yang baik berasal dari penggabungan beberapa sumber pendapatan daerah dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terjalinnya hubungan yang baik

dengan swasta serta modal sosial dari masyarakatnya. Sektor yang jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur ialah sektor kelautan dan perikanan.

Untuk bisa mendapatkan pemasukan anggaran, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi besar (sektor kelautan dan perikanan) dengan inovatif, kreatif dan produktif. Namun kenyataannya, Kabupaten Lombok Timur belum memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk melakukan pengelolaan tersebut, sehingga belum tercipta optimalisasi pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki. Salah satu akibat dari belum memadainya sumberdaya manusia yang mengelola sektor kelautan dan perikanan ialah masih berkembangnya praktek-praktek perusakan lingkungan dan tindakan lainnya yang mengancam kelangsungan sumberdaya kelautan dan perikanan. Praktek-praktek semacam ini sulit dihilangkan, karena masyarakat melakukannya secara kontinu dan berlangsung lama sehingga untuk melakukan perubahan sangat sulit, kecuali perubahan tersebut atas dasar keinginan masyarakat atau dengan dorongan dari beberapa pihak baik individu maupun kelompok yang sangat dekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu, akibat dari belum memadainya sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Timur ialah rendahnya penyerapan teknologi. Dengan rendahnya penyerapan teknologi, maka akan berakibat pada rendahnya tingkat produktifitas sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam membangun sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Timur sebelum

melakukan penerapan teknologi. Untuk memperkuat identifikasi masalah utama *(focal concern)* tersebut, maka diperlukan beberapa aspek penting sebagai indikator analisis, seperti aspek politik *(politic)*, ekonomi *(economy)*, sosial *(social)*, teknologi *(technology)* dan lingkungan *(environment).*

Aspek politik berupa undang-undang, peraturan, maupun hukum adat yang ada dan berkembang di masyarakat, jumlahnya sudah cukup dan hanya membutuhkan konsistensi maupun ketaatan untuk menjalankannya. Karena sering ditemukan bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya pada hukum dan cenderung melanggar. Tidak adanya sanksi yang tegas dan mengikat serta rendahnya penanganan terhadap pelanggaran yang ada, menyebabkan bertambahnya jumlah pelangaran yang terjadi. Pelanggaran ini biasanya berupa kegiatan-kegiatan perusakan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan seperti pengeboman ikan, penggunaan alat tangkap yang tidak dibenarkan oleh peraturan, alih fungsi lahan hutan bakau/mangrove menjadi lahan usaha perdagangan/permukiman, dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dilihat dari aspek ekonomi, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur memberikan peran yang besar dalam membangun dan menciptakan usaha baru berbasis kelautan dan perikanan. Akan tetapi hal ini tidak cukup untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi *landing sector* atau sektor utama yang berperan mendukung sektor lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dibutuhkan manajemen yang lebih baik dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan, baik dari segi penangkapan, budidaya,

pengolahan dan pemasaran. Karena seperti yang diketahui, bahwa Kabupaten Lombok Timur masih terkendala pada pemasaran produk perikanannya, khususnya untuk memenuhi pasar ekspor dan daya saing produk yang masih dibawah daerah pengahasil ikan lainnya. Dukungan dari pihak terkait sangat diperlukan dalam mengelola sektor ini, terlebih peran dan partisipasi dari masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat lokal saat ini masih belum cukup untuk memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan. Padahal menurut Munir (2002:208-209) terdapat enam prinsip dasar yang membuat suatu daerah bahkan masyarakatnya menjadi maju (sejahtera) dengan sumberdaya lokal yang dimilikinya. Prinsip tersebut seperti:

> a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat pada tingkat lokal oleh warga masyarakat yang diakui perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan; b) Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada di dalam masyarakat setempat; c) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi, dan karenanya mengakui makna pilihan nilai individual dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis; d) Didalam mencapai tujuan yang ditentukan, menggunakan teknik *social learning* dimana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatori dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing; e) Budaya kelembagannya ditandai oleh adanya organisasi yang otonom dan mandiri yang saling berinteraksi memberikan umpan balik untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi; dan f) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu menjadi kendala besar dalam pembangunan. kurangnya partisipasi ini salah satunya

disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang berpendidikan dasar. Tingkat pendidikan yang didominasi oleh pendidikan dasar disebabkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga pelayanan pendidikan diarahkan pada kawasan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, sementara kawasan yang berada di pesisir cenderung jauh dari layanan pendidikan maupun dari layanan penting lainnya seperti kesehatan dan air bersih. Untuk itu, maka dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam peningkatan partisipasi aktif masayarakat dan melakukan pembangunan pelayanan pendidikan maupun kesehatan serta kebutuhan vital lainnya.

Teknologi yang ada saat ini di Kabupaten Lombok Timur masih belum cukup untuk mengelola potensi lokal yaitu sektor kelautan dan perikanan. Padahal fungsi/peran teknologi cukup berpengaruh pada perencanaan skenario, sesuai dengan apa yang diungkapkan Ringland (1998), bahwa *scenario planning* adalah bagian dari perencanaan strategis yang berhubungan dengan alat dan teknologi untuk mengelola suatu ketidakpastian di masa depan. Masih belum cukup/ belum memadainya teknologi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, salah satunya dikarenakan tingkat dan kualitas pendidikan yang mendominasi masyarakat sebagian besar berpendidikan dasar, sehingga cara berfikir maupun daya serap teknologinya masih rendah. Selain itu, kurangnya anggaran pembangunan menyebabkan kurangnya inovasi teknologi dan kurangnya intensitas pemberdayaan/pelatihan untuk memperkenalkan teknologi baru kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut dapat teratasi jika

terjalin kemitraan dengan berbagai pihak dapat dimaksimalkan sehingga sumbangan anggaran untuk pembangunan akan cukup untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Selain berpengaruh pada penerapan teknologi, pendidikan juga berpengaruh besar pada lingkungan hidup.

Dampak dari tingkat pendidikan yang masih rendah terhadap lingkungan ialah berkuragnya daya dukung lingkungan kususnya lingkungan perairan yang merupakan habitat utama dari sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga memberikan kontribusi besar bagi setiap kasus perusakan lingkungan. Hal yang menjadi tanggung jawab bersama ialah tetap menjaga keberlangsungan lingkungan dan melindunginya dari kerusakan dikarenakan lingkungan merupakan sumber mata pencaharian manusia masa kini dan untuk masa berikutnya.

Penguatan terhadap penegakan hukum yang diimbangi dengan peningkatan kualitas kesadaran masyarakat melalui pendidikan adalah langkah konkrit untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, bentuk perusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Lombok Timur dibeberapa tempat disebabkan oleh berkembangnya pusat pariwisata yang belum menerapkan konsep pembangunan yang bukan hanya ditujukan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial saja, namun juga masalah peningkatan daya dukung lingkungan atau lebih dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Untuk itu, dibutuhkan sebuah perencanaan yang dapat memberikan solusi yang bersifat *win-win solution* dengan mengembangkan satu aspek, namun aspek lain juga ikut berkembang.

Berdasarkan 2 (dua) sumber masalah utama *(focal concern)* pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur seperti anggaran dan sumberdaya manusia (SDM) maupun kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan yang ada, maka dapat disusun logika skenario dengan periode capaian tahun 2014-2034 atau bisa dicapai selama minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun sebelum itu, dibutuhkan beberapa syarat atau kriteria penting yang akan menjadi landasan dalam pembuatan skenario. Kriteria tersebut menurut Mats Lindgren dan Hans Bandhold (2003:31), ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan dalam pembuatan skenario yang baik, yaitu: *a) Decision-making power; b) Plausibility; c) Alternatives; d) Consistency; e) Differentiation; f) Memorability; g) Challenge.*

Logika skenario yang dimaksud, terbagi menjadi empat yaitu 1) anggaran mendukung dan sumberdaya manusia memadai, 2) anggaran tidak mendukung namun sumberdaya manusia memadai, 3) anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai, dan 4) anggaran tidak mendukung dan sumberdaya manusia tidak memadai. Untuk skenario empat, Bryan dan White (1987:23-28) mempertegas bahwa perencanaan itu sangat penting dilaksanakan jika 1) sumber-sumber yang dimiliki terbatas dan disertai dengan kurangnya pengetahuan dalam penyerapan dan penerjemahan terhadap informasi, dan 2) keinginan untuk mengendalikan masa depan yang diinginkan bersifat mendesak. Dapat dipahami bahwa perencanaan berfungsi untuk menjadikan sumber-sumber dengan kondisi terbatas, mampu dikelola dengan lebih efisien, efektif dan memberikan hasil yang optimal/ produktif dan secara tersirat menganjurkan untuk

melakukan *scenario planning* terhadap masa depan sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Empat logika skenario tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matriks di bawah ini:

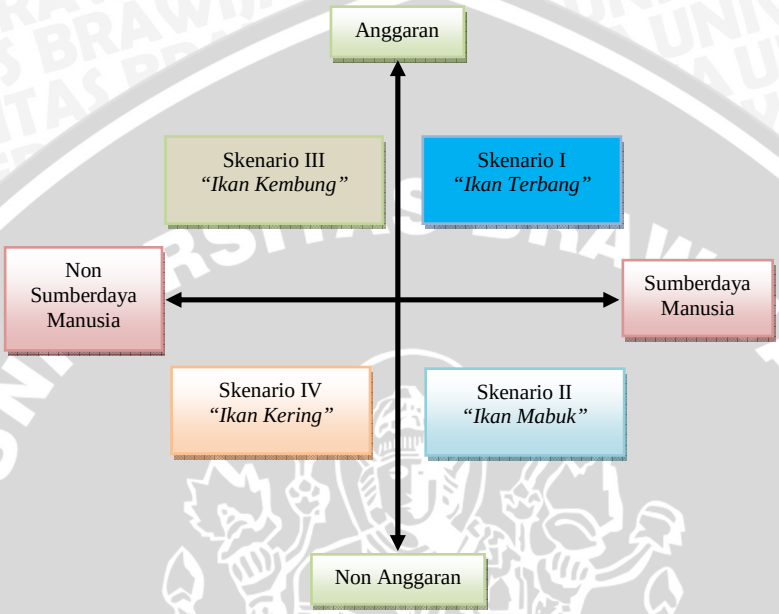

Gambar 20. Matriks Logika Skenario
Sumber: Adaptasi dari Lindgren, M dan H, Bandhold. 2003. *Scenario planning: The Link between future and strategy*. New York: Palgrave Macmillan. (hal 75)

Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa ada dua titik koordinat, yaitu anggaran dan sumberdaya manusia. Gambar tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat empat skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur yaitu skenario I (ikan terbang) dengan anggaran mendukung dan sumberdaya manusia memadai, skenario II (ikan mabuk) dengan anggaran tidak mendukung namun sumberdaya manusia memadai, skenario III (ikan kembung) dengan anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai dan skenario IV (ikan kering) dengan anggaran tidak mendukung dan sumberdaya manusia tidak memadai. Cara yang ditempuh untuk memudahkan pembentukan logika skenario I sampai skenario IV ialah dengan melakukan analisis dari lima

sisi *"PEST's Plus"* (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan Lingkungan). Logika skenario ini dianalisis dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2034. Adapun logika skenario periode 2014-2034 ialah sebagai berikut:

1) Skenario I "Ikan Terbang"

Skenario I merupakan skenario terbaik dimana sumber anggaran mendukung dan sumberdaya manusianya juga memadai. Dampak dari skenario ini terlihat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 28. Skenario I "Ikan Terbang" (anggaran mendukung dan sumberdaya manusia memadai)

Aspek	Kemungkinan Dampak
Political	• Berjalannya dan ditegakkannya hukum dan aturan adat secara sungguh-sungguh • Menciptakan kesadaran pemerintah lokal dalam melaksanakan kebijakan/program-proyek dengan konsisten dan terkontrol oleh masyarakat • Mendorong meningkatnya profesionalisme birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan publik • Terciptanya hubungan yang baik antara tiga lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. • Masyarakat menjadi mengerti dan sadar hukum serta mengetahui kebijakan pemerintah dari tingkat terendah (RT/RW)
Economic	• Terciptanya lapangan kerja baru • Investasi dibidang kelautan dan perikanan yang tinggi • Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk menyesuaikan antara kemampuan anggaran dengan kebijakan/program-proyek yang akan dijalankan • Pengembangan dan pembangunan industri yang ramah lingkungan • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi • Terciptanya market/pasar yang baik bagi sektor kelautan dan perikanan • Terciptanya kesejahteraan (bidang kesehatan dan pendidikan)

Social	• Masyarakat semakin terbangun rasa kebersamaannya • Indeks pembangunan manusia (khususnya di daerah pesisir) tinggi. Baik dibidang pendidikan dan kesehatan sehingga sumberdaya manusia (SDM) berkualitas tinggi, cerdas, kritis dan etos kerja yang tinggi pula. • Partisifasi masyarakat tinggi dengan adanya beberapa lembaga yang menaungi usaha kelautan dan perikanan mereka. • Berkurangnya kecemburuan sosial dan disparitas • Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah semakin harmonis • Kehidupan masyarakat semakin aman dan nyaman
Technology	• Teknologi yang digunakan merupakn teknologi tepat guna dan berorientasi lingkungan (ramah Lingkungan) • Teknologi mampu mendorong meningkatnya hasil kelautan dan perikanan. • Teknologi memberikan akses informasi mengenai harga jual produk kelautan dan perikanan. • Teknologi memberikan kemudahan dalam distribusi barang (produk kelautan dan perikanan).
Environment	• Perlindungan dan pengawasan terhadap dampak pengembangan sektor kelautan dan perikanan terhadap lingkungan dengan peraturan (Perda) • Kualitas air, terumbu karang, tanaman penyangga/bakau, gili dan lain sebagainya, semakin baik dan terlindungi • Keberlanjutan ekologi (berkurangnya pencemaran “limbah” dan zat beracun)

Sumber: Data diolah, 2014

Skenario ini dihasilkan dari kombinasi antara anggaran yang mendukung dan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai. Beberapa hal yang diinginkan dari skenario ini ialah pemerintah responsif terhadap keinginan masyarakat. Masyarakat tulus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sementara pihak swasta, mempraktekkan tanggung jawab sosial yang sesungguhnya bukan hanya melalui *CSR (Corporate Sosial Rensponsility)*, namun juga dengan berperan secara aktif dalam upaya pembangunan. Hasilnya ialah terciptanya tata kelola pemerintahan/ birokrasi yang

baik, layanan publik yang profesional, ketaatan akan hukum tinggi serta pembangunan terarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

Kekuatan sumberdaya ekonomi lokal yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Lombok Timur. Karakteristik warga masyarakat yang santun, saling mempercayai, saling menghargai, tenggang rasa, cerdas dan rasa bertanggung jawab yang semakin tinggi, baik antar sesama warga maupun dengan pemerintah. Dengan karakteristik tersebut, masyarakat sangat mudah menyerap perkembangan teknologi yang akan mengelola/ memanajemen lingkungan. Lingkungan, baik pesisir maupun perairan terkelola dengan benar, bersih, dan sehat. Perairan laut di Kabupaten Lombok Timur menjadi sumber inspirasi yang terbebas dari konflik kepentingan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga pesisir yang telah terbangun dari sisi sumberdaya manusianya dan perekonomiannya. Sehingga akan mewujudkan Kabupaten Lombok Timur sebagai “Ikan Terbang” yang dimana iklim investasi berjalan baik, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan lancar dan meningkatnya daya saing Kabupaten Lombok Timur pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

2) Skenario II “Ikan Mabuk”

Skenario II merupakan skenario yang baik dimana sumber anggaran tidak mendukung namun sumberdaya manusia memadai. Dampak dari skenario ini terlihat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 29. Skenario II "Ikan Mabuk" (anggaran tidak mendukung namun sumberdaya manusia memadai)

Aspek	Kemungkinan Dampak
Political	• Hukum dan aturan adat lebih diperketat dalam penerapannya dan ada kontrol dari masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum yang ada • Profesionalisme birokrasi mulai meredup, namun masih memberikan pelayanan yang baik dengan kesadaran untuk mengangkat masyarakat dari krisis • Perbaikan hubungan antara masyarakat, pemerintah, legislative (DPRD), lembaga-lembaga dan sektor swasta
Economic	• Berkurangnya investasi dibidang perikanan dan kelautan • Pendapatan Asli Daerah dipaksakan agar kemampuan anggaran dapat menunjang kegiatan pembangunan, dalam hal ini pembangunan sektor kelautan dan perikanan • Pasar/market dari hasil kelautan dan perikanan mulai berkurang karena kualitas produk menurun • Masyarakat cenderung bertahan (subsisten) karena serba terbatas • Lapangan kerja dan sumberdaya kelautan dan perikanan mulai berkurang yang menyebabkan masyarakat beralih ke pekerjaan lain/bisnis yang lebih menjanjikan bahkan melakukan migrasi
Social	• Masyarakat banyak yang menuntut pengembangan sarana-prasarana pendukung usaha perikanan dan kelautan lainnya, namun masyarakat mencoba saling tolong-menolong untuk bersama-sama keluar dari keterpurukan • Hubungan kekerabatan sangat erat • Partisipasi masyarakat berkurang dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan dikarenakan lembaga yang menaungi mereka kekurangan anggaran dalam operasionalnya
Technology	• Teknologi cenderung sederhana dan semi-modern (antara modern dan tradisional) karena sumber anggaran untuk mengembangkannya tidak ada. Selain itu sumberdaya kelautan dan perikanan semakin menipis karena tidak terkelola dengan baik • Keterbatasan teknologi yang diimbangi dengan terbatasnya sumberdaya kelautan dan perikanan menyebabkan masyarakat kekurangan informasi penting khususnya pemasaran produk perikanan
Environment	• Lingkungan pesisir dan perairan masih terjaga dengan baik karena ada kontrol dari masyarakat

Sumber: Data diolah, 2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Skenario ini merupakan kombinasi antara anggaran yang tidak mendukung namun sumberdaya manusia (SDM) memadai. Kabupaten Lombok Timur di tahun 2034 dalam skenario ini cukup banyak yang menganggur, kesempatan kerja sangat terbatas disebabkan karena sumberdaya kelautan dan perikanan mulai menipis dan jumlah penduduk miskin meningkat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin berkurang. Tenaga kerja lokal khususnya kaum muda yang dibutuhkan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan juga banyak yang perpindah ke kabupaten/kota lain karena lebih menjanjikan dalam hal upah kerja, ada juga yang terpaksa bertahan, namun dengan bidang kerja yang berbeda/ alih profesi kerja, selain sektor kelautan dan perikanan. Di Kabupaten Lombok Timur teknologi yang digunakan untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan cenderung tradisional dan semimodern. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk mengembangkan teknologi tersebut. Dengan teknologi yang dianggap masih sederhana ditambah lagi dengan mulai terbatasnya sumberdaya kelautan dan perikanan, maka masyarakat kekurangan bahkan sulit mengakses informasi penting tentang usaha penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Kabupaten Lombok Timur tahun 2034 menurut skenario ini, tidak semuanya bersifat negatif atau buruk, ada beberapa hal positif yang bisa dipertahankan. Hal positif tersebut dilihat dari lingkungan yang tetap terjaga dengan baik karena hukum ditegakkan dengan ketat dan ada kontrol dari masyarakat. Masyarakat banyak yang menuntut pengembangan sarana-prasarana pendukung usaha perikanan dan kelautan lainnya, namun masyarakat mencoba

saling tolong-menolong untuk bersama-sama keluar dari keterpurukan. Perbaikan hubungan terus dilakukan antara elemen pemerintah, legislatif dan masyarakat. Profesionalisme birokrasi mulai meredup, namun masih memberikan pelayanan yang baik dengan kesadaran untuk mengangkat masyarakat dari krisis.

3) Skenario III "Ikan Kembung"

Skenario III merupakan skenario yang cukup baik dimana anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai. Dampak dari skenario ini terlihat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 30. Skenario III "Ikan Kembung" (anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai)

Aspek	Kemungkinan Dampak
Political	• Berkurangnya kesadaran akan hukum • Terjadi konspirasi • Pembangunan yang tidak *sustainable* • Stabilitas masyarakat maupun ekonomi terganggu
Economic	• Pasar/market untuk hasil kelautan dan perikanan berkurang karena kualitas produk menurun dengan gagalnya penerapan teknologi • Pemerataan pembangunan tingkat sektoral berkurang • Lapangan kerja pada sektor kelautan dan perikanan bisa menipis • Memperlebar kesenjangan sosial
Social	• Masyarakat terpancing emosi dan menyelesaikan masalah dengan kekerasan • Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah tidak harmonis • Kehidupan masyarakat tidak nyaman dan terjadi konflik
Technology	• Teknologi berkembang pesat, namun tidak tepat guna karena sumberdaya manusia (SDM) yang menjadi pendukung utama teknologi tidak memadai. • Teknologi terbuang percuma karena tidak dapat diimplementasikan dengan baik • Mendapat penolakan dari masyarakat
Environment	• Banyak terjadi kerusakan dan pencemaran

Sumber: Data diolah, 2014

Skenario ini dihasilkan dari kombinasi antara anggaran yang mendukung namun sumberdaya manusia (SDM) tidak memadai. Ekonomi Kabupaten Lombok Timur dikuasai oleh para pemilik modal yang kondisinya semakin nyaman dan mapan. Sedangkan masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha kelautan dan perikanan semakin tidak berdaya dengan peluang pasar untuk produk kelautan dan perikanan yang mulai berkurang, kurangnya pemerataan pembangunan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Ketidakberdayaan masyarakat tersebut ditambah lagi dengan rendahnya keahlian dari masyarakat menyebabkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah tidak harmonis, masyarakat mudah terpancing emosi, dan akhirnya terjadi konspirasi menuntut kesejahteraan yang merata, namun seringkali berujung pada konflik yang mengganggu keamanan dan kenyaman masyarakat dan menganggu stabilitas perekonomian. Kurangnya keahlian yang dimiliki masyarakat juga menyebabkan teknologi tidak terserap sempurna, ada yang terbuang percuma dan ada pula yang mendapat penolakan dari masyarakat. Semnetara itu, masyarakat yang sedang terpancing emosi biasanya kesadaran hukumnya berkurang atau cenderung menurun sehingga pembangunan menjadi tidak *sustainable/*berkelanjutan yang dibuktikan dari semakin banyak dan meluasnya kerusakan dan pencemaran.

4) Skenario IV "Ikan Kering"

Skenario IV merupakan skenario yang buruk dimana anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai. Dampak skenario ini terlihat pada kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 31. Skenario IV "Ikan Kering" (anggaran tidak mendukung dan sumberdaya manusia tidak memadai)

Aspek	Kemungkinan Dampak
Political	• Hukum dan aturan adat lemah dan tidak berdaya (banyak yang melanggar) • Pemerintah lokal tidak lagi memiliki kesadaran dalam melaksanakan kebijakan/program-proyek dengan konsisten dan terkontrol • Profesionalisme birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan publik digunakan untuk memperkaya diri • Masyarakat sudah tidak sadar dan taat hukum karena aspirasi mereka dilupakan
Economic	• Lapangan kerja menipis dan sangat terbatas • Tidak adanya investasi dibidang kelautan dan perikanan • Pertumbuhan ekonomi rendah • Peluang market/pasar untuk sektor kelautan dan perikanan sangat kecil • Pengangguran dan kelaparan meningkat
Social	• Rasa kebersamaan masyarakat sudah tidak ada lagi • Indeks pembangunan manusia sangat rendah terlebih di daerah pesisir • Partisipasi masyarakat rendah, lembaga yang selama ini menaungi usaha kelautan dan perikanan tidak lagi beroperasi. • Kecemburuan sosial dan disparitas semakin tinggi • Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah buruk dan cenderung konflik
Technology	• Teknologi yang membantu dalam peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan hanya mimpi saja • Teknologi kembali ke bentuk semula yaitu sederhana/sangat sederhana (tradisional)
Environment	• Peraturan tentang lingkungan digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi • Kualitas air, terumbu karang, tanaman penyangga (bakau/*mangrove*), pulau-pulau kecil/gili dan lain sebagainya, memiliki kondisi yang semakin buruk karena ekploitasi berlebihan • Maraknya pencemaran lingkungan baik sampah/limbah maupun zat beracun

Sumber: Data diolah, 2014

Skenario ini merupakan kombinasi antara anggaran yang tidak mendukung dan sumberdaya manusia (SDM) tidak memadai. Dalam skenario ini Kabupaten

Lombok Timur seperti lautan tanpa warna. Kualitas air, terumbu karang, tanaman penyangga (bakau/*mangrove*), pulau-pulau kecil/gili dan lain sebagainya, memiliki kondisi yang semakin buruk karena ekploitasi berlebihan dan semakin banyaknya tindakan pencemaran terhadap lingkungan baik sampah/limbah maupun zat beracun. Sedangkan peraturan mengenai lingkungan hidup, hukum dan aturan adat (awik-awik) serta kebijakan/program-proyek hanya digunakan sebagai alat mendapatkan uang atau untuk memperkaya diri dan menindas rakyat lemah. Hal ini juga berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Lombok Timur.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Lombok Timur sangat berantakan yang ditandai dengan banyaknya pengangguran dan kelaparan yang diakibatkan oleh menipisnya/terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi yang baik untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga kualitas produk kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur sangat rendah/ sudah tidak ada yang berminat dan tidak adanya investasi pada bidang ini yang menjadikan rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Sementara itu, kehidupan warga khususnya yang berada di daerah pesisir saling mencurigai, kurang rasa kebersamaannya dan apatis terhadap berbagai hal termasuk kebijakan pemerintah bahkan hubungan masyarakat dengan pemerintah semakin buruk dan cenderung konflik.

c. *Imaging* (Gambaran masa depan/ Visi)

Tahap ke-tiga dalam perencanaan skenario adalah Imaging. Menurut Lindgren dan Bandhold (2003:38) *Imaging* ialah *"we identify possibilities and generate visions of what is desired"* tahap identifikasi berbagai kemungkinan dan

membangun visi atas sesuatu yang kita inginkan. Sebelum membangun visi atas sesuatu yang diinginkan maka terlebih dahulu memahami visi yang telah ada sebagai acuan dalam mengembangkan visi selanjutnya. Visi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2008-2013 sudah berakhir masa berlakunya di tahun 2014 ini atau dengan kata lain, visi ini hanya berlaku sampai tahun 2013 dan ditandai dengan terpilihnya bupati yang baru. Namun tidak menutup kemungkinan jika visi ini bisa dilanjutkan dengan beberapa evaluasi dan perbaikan, sehingga antara visi sebelum dan setelah terpilihnya bupati yang baru menjadi singkron. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antar bupati sebelum dan sesudahnya, dengan melupakan sejenak persaingan politik mereka yang sempat memanas atau mengilangkan ego masing-masing untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang lebih baik.

Melakukan singkronisasi antara visi bupati sebelum dan setelahnya memang sulit, namun jika pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Lombok Timur memiliki jiwa kesatria, bukan seperti pribahasa masa lalu “kalah jadi abu, menang jadi arang” (keduanya memang tidak berguna sama sekali). Jiwa kesatria ialah mengakui kekalahan, tidak mencari-cari kesalahan, yang menang tetap menghormati yang kalah dan berusaha merangkul yang kalah untuk memberikan pembelajaran berharga bagi yang menang dalam setiap upaya pembangunan yang berhasil maupun yang belum berhasil serta menghargai kekayaan lokal yaitu keberagaman dalam sebuah persatuan. Sehingga masyarakat semakin terbangun dan mendapatkan contoh baik dari para pemimpin mereka yang berjiwa kesatria.

Terlepas dari itu semua, tidak jarang dari beberapa visi yang dibawa oleh bupati sebelumnya terkadang diubah total oleh bupati yang baru.

Perombakan total atas visi lama (visi bupati sebelumnya) oleh bupati terpilih, terkesan seperti saling menjatuhkan dengan alasan harga diri maupun alasan pribadi lainnya. Visi ini tentu tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan masyarakat hanya menjadi korban atas visi yang ditunggangi oleh kepentingan individu. Untuk itu, dibutuhkan kerendahan hati para pemimpin (bupati) Kabupaten Lombok Timur dalam menerima semua masukan/kritik membangun yang jelas sumbernya (atas dasar kebaikan untuk masyarakat luas) dan menjalankan visi secara konsisten. Dari kerendahan hati dalam menerima maupun menjalankan visi yang benar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka dikembangkan visi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2034 dengan waktu capaian sekitar 5 sampai 20 tahun melalui pemanfaatan keberadaan potensi lokal. Adapun perbedaan antara Visi, Misi dan waktu pencapaian visi-misi tersebut, sebelum dan setelah adanya skenario dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 32. Visi, Misi, Waktu Capaian Sebelum dan Setelah Adanya Skenario

Indikator	Sebelum Adanya Skenario	Sesudah Adanya Skenario
Visi	Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan Dalam Lindungan Allah SWT	Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan <u>Melalui Potensi Lokal</u> Dibawah Lindungan Allah SWT
Misi	1) Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan di semua sektor prioritas yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, 2) Mewujudkan pembangunan	Selain dilengkapi oleh misi sebelum adanya skenario, dikembangkan (ditambah) juga 6 misi baru sesuai dengan visi yang baru seperti 1) Melakukan pembenahan

	nyata ekonomi kerakyatan berbasis agroindustri dan bahari yang berwawasan lingkungan, 3) Mendorong reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh untuk mencairkan kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro-publik, 4) Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak, 5) Mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kehidupan antar kelompok yang rukun, taqwa dan penuh kesejukan dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, 6) Menumbuh kembangkan iklim investasi dalam dan luar negeri untuk membuka lapangan kerja yang secara langsung mampu mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 7) Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.	terhadap potensi sektor kelautan dan perikanan dari aspek pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana serta pemasaran hasil perikanan, 2) Pengelolaan koperasi dan pengembangan kawasan UMKM sektor kelautan-perikanan, 3) *Recruitment*/ pengerahan tenaga ahli yang profesional terutama dari daerah sendiri/tenaga lokal yang disertai dengan pelatihan, 4) Pengawasan sumberdaya kelautan-perikanan dan melakukan pelestarian kembali terumbu karang maupun penyangga pantai/bakau, 5) Mengembangkan mitra dan inovasi sektor kelautan dan perikanan untuk menghadapi persaingan pasar bebas, 6) Mengembangkan alternatif lahan produksi untuk budidaya ikan.
Waktu Capaian	2008-2013 (5 Tahun)	2014-2034 (5-20 Tahun)

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Visi Kabupaten Lombok Timur kedepan diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu potensi lokal yang dimaksud ialah sektor kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan karena pada visi

Kabupaten Lombok Timur sebelumnya (sebelum adanya skenario) yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan Dalam Lindungan Allah SWT"**, belum memiliki alat atau sarana untuk mencapai masyarakat Lombok Timur yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan, sehingga visi tersebut terkesan mengambang dan seperti tidak terarah. Karena itu peneliti dalam hal ini, berupaya untuk menjawab tantangan tersebut dengan menambahkan alat atau sarana pencapaian tujuan yaitu "potensi lokal" dalam visi yang telah ada atau dengan kata lain, peneliti membentuk visi baru yang bisa dijadikan referensi maupun pertimbangan bagi bupati terpilih maupun bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Visi Kabupaten Lombok Timur setelah adanya skenario yang waktu capaiannya dari tahun 2014 sampai tahun 2034 ialah "Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan **Melalui Potensi Lokal** Dibawah Lindungan Allah SWT". Visi pembangunan ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Lombok Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 1945. Potensi lokal bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan 5 tahun sampai 20 tahun kedepan dan untuk memperkuat kemandirian daerah dalam upaya pembangunan. Potensi lokal yang dimaksud salah satunya ialah sektor kelautan dan perikanan, dengan pengelolaan yang *sustainable*/berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Waktu capaian visi ini

disesuaikan dengan waktu capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJP (Rencana Jangka Panjang) berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 4, 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 4 dan 5. Selain itu, menurut Munir (2002:41) menjelaskan lebih spesifik tentang perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dan mengatakan bahwa perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, dua diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang ini merupakan cetak biru/ *blue print* pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang dan bertujuan sebagai pondasi bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah pembangunan yang membutuhkan jangka waktu lama dapat dipermudah pencapaiannya melalui bantuan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Walaupun perencanaan jangka menengah masih umum, akan tetapi sasaran-sasaran yang bersifat sektoral sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. Sebagai contohnya ialah pembentukan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA).

Visi pembangunan ini memiliki makna, yaitu 1) Masyarakat Lombok Timur yang adil dalam kesejahteraan, yakni untuk menciptakan kondisi yang menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat ditegakkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab tinggi dalam mengelola potensi lokal (sektor kelautan dan perikanan) yang diwujudkan dengan penegakan hukum tanpa kecuali (seadil-adilnya) dalam kehidupan masyarakat, 2) Masyarakat Lombok Timur yang Sejahtera dalam Keadilan, yakni masyarakat Lombok Timur yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya baik sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial-perekonomiannya secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur tanpa kecuali dengan pemanfaatan dan pengoptimalisasian sumberdaya atau potensi lokal (sektor kelautan dan perikanan), 3) Dalam Lindungan Allah SWT, yakni terciptanya keadilan dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan tetap dalam naungan dan lindungan Allah SWT serta hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan potensi lokal (sektor kelautan dan perikanan) yang Allah SWT berikan secara wajar sesuai daya dukung lingkungan. Sedangkan untuk misinya, sebelum adanya skenario, masih belum terlihat dengan jelas potensi lokal sebagai alat atau sarana pencapaian visinya, sehingga pada misi setelah adanya skenario, ditambahkan enam misi yang berkaitan dengan potensi lokal tanpa melupakan misi sebelum adanya skenario (7 misi) dan pada tahap perencanaan skenario berikutnya, yaitu *deciding* menjelaskan lebih detail tentang misi ini.

d. *Deciding* (Misi/ Keputusan/Kebijakan)

Tahap ke-empat dalam perencanaan skenario adalah *Deciding*. Menurut Lindgren dan Bandhold (2003:38) *Deciding* adalah "*we weigh up the information, identify choices and strategies"* (tahap memutuskan/ pertimbangan atas informasi, identifikasi terhadap pilihan-pilihan dan strategi). Dengan kata lain, *deciding* merupakan tahap pembentukan misi, dimana segala sesuatu diputuskan secara bersama-sama. Masa depan dapat dilacak, dianalisis dan dilakukan suatu tindakan untuk mencapai visi, serta mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari ancaman di masa depan. Tahap *deciding* juga berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa saja yang akan menjadi sasarannya dan dengan

menggunakan strategi apa saja untuk mewujudkannya (tahap *deciding* berhubungan dengan identifikasi atas beberapa pilihan dan strategi).

Untuk dapat mewujudkan visi pembangunannya, Kabupaten Lombok Timur melalui Pemerintah Daerahnya menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang dibutuhkan oleh daerah untuk bisa berkembang. Namun hingga berakhirnya misi (dalam RPJMD tahun 2008-2013) tersebut, pembangunan belum menunjukkan kemajuan pesat, khususnya sektor kelautan dan perikanan masih berjalan ditempat dan cenderung banyak fasilitas pengembangannya yang tidak terawat bahkan rusak. Untuk melakukan perbaikan dan pengoptimalisasian terhadap sektor kelautan dan perikanan, maka dibutuhkan misi baru yang memberikan ruang bagi sektor tersebut untuk berkembang dengan baik, mengingat sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur saat ini selain sektor pertanian.

Berdasarkan visi Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2014 sampai tahun 2034 yang disusun peneliti yaitu "Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan **Melalui Potensi Lokal** Dibawah Lindungan Allah SWT", juga memberikan gambaran yang jelas mengenai misi atau kerangka kebijakan/keputusan-keputusan yang diambil. Dari visi "melalui potensi lokal" dan disertai dengan kenyataan bahwa:

> a) sumber pembangunan yang berasal dari pusat, tidak akan dapat mencukupi untuk menjangkau sebagian besar masyarakat, terutama pada lapisan sosial bawah; b) program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat yang bertumpu pada manjemen birokrasi, sukar untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; c) pengelolaan sumberdaya lokal lebih tanggap pada variasi setempat yang diwarnai oleh ekologi alami, ekologi sosial dan preferensi individual yang sangat bervariasi; d) memungkinkan masyarakat memobilisasi berbagai sumber

yang kurang termanfaatkan, sampai kepada keterampilan, komunkasi dan sumber dana; dan terakhir e) pengelolaan sumberdaya lokal menempatkan tanggung jawab pembangunan pada masyarakat setempat. (Tjokrowinoto, 1996).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibentuk 6 (enam) misi atau kerangka kebijakan/keputusan-keputusan. Misi/kebijakan atau keputusan yang dimaksud yaitu 1) Melakukan pembenahan terhadap potensi sektor kelautan dan perikanan dari aspek pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana serta pemasaran hasil perikanan, 2) Pengelolaan koperasi dan pengembangan kawasan UMKM sektor kelautan-perikanan, 3) *Recruitment* atau pengerahan tenaga ahli yang profesional terutama dari daerah sendiri/tenaga lokal yang disertai dengan pelatihan, 4) Pengawasan sumberdaya kelautan-perikanan dan melakukan pelestarian kembali terumbu karang maupun penyangga pantai/bakau, 5) Mengembangkan mitra dan inovasi sektor kelautan dan perikanan untuk menghadapi persaingan pasar bebas, 6) Mengembangkan alternatif lahan produksi untuk budidaya ikan.

Misi atau kerangka kebijakan/keputusan-keputusan yang berjumlah 6 (enam) tersebut, kemudian dijabarkan kedalam bentuk strategi-strategi agar memudahkan dalam pengaplikasiannya dan pencapainnya. Strategi-strategi ini diharapkan mampu memecah permasalahan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Adapun strategi-strategi yang dimaksud sebagai berikut:

Misi I. Melakukan pembenahan terhadap potensi sektor kelautan dan perikanan dari aspek pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana serta pemasaran hasil perikanan

Strategi untuk pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana seperti: a) membentuk usaha kecil yang menyediakan sarana-prasarana perikanan, b)

mengadakan alat transportasi darat maupun laut, c) perbaikan, perawatan maupun pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), d) pembuatan gudang es *(ice storage)* yang dekat dengan aktivitas kelautan dan perikanan, e) membentuk industri pengolahan ikan yang ramah lingkungan, dan f) mengembangkan dan meragamkan jenis ikan yang ada di BBI maupun di BBIP. Sedangkan strategi untuk pemasaran hasil perikanan ditempuh melalui peningkatan intensitas penawaran terhadap produk perikanan.

Misi II. Pengelolaan koperasi dan pengembangan kawasan UMKM sektor kelautan-perikanan

Pengelolaan koperasi yang bersih dari praktek-praktek kecurangan (KKN/Korupsi Kolusi dan Nepotisme) para pengurus yang dapat merugikan anggota. Pengembangan kawasan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khusus untuk sektor kelautan dan perikanan yang strategis dan dekat dengan aktivitas perikanan.

Misi III. *Recruitment* atau pengerahan tenaga ahli yang profesional terutama dari daerah sendiri/ tenaga lokal yang disertai dengan pelatihan

Melakukan pengerahan atau pengangkatan tenaga yang memiliki keahlian/kapasitas/kompetensi yang bisa diandalkan atau benar-benar ahli dalam sektor kelautan dan perikanan, baik dalam bidang penangkapan, pengolahan dan pemasaran produk perikanan, terlebih dalam bidang budidaya. Tenaga ini diupayakan berasal dari tenaga lokal/ Kabupaten Lombok Timur sendiri dan untuk mengatasi masalah kompetensinya, maka tenaga kerja diberikan pelatihan terlebih dahulu sampai kompetensi mereka benar-benar memadai.

Misi IV. Pengawasan sumberdaya kelautan-perikanan dan melakukan pelestarian kembali terumbu karang maupun penyangga pantai (*mangrove*/bakau)

Aktif melakukan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan lokal (awik-awik) ditegakkan secara tegas dan sebenar-benarnya. Pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang menyusup ditengah-tengah kapal penangkap ikan lokal. Melakukan penjagaan/pengawasan dan melindungi habitat/tempat tinggal ikan seperti terumbu karang agar tetap lestari. Selain itu, melakukan penanaman kembaliabrasi pantai bisa saja terjadi sehingga membutuhkan penyangga berupa pohon bakau.

Misi V. Mengembangkan mitra dan inovasi sektor perikanan dan kelautan untuk menghadapi persaingan pasar bebas

Mitra dilakukan antar pemerintah daerah yang memiliki kontribusi besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur salah satunya dengan membentuk kemitraan yang bergerak dibidang sarana-prasarana tangkap, budidaya pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dengan inti dari kerjasama tersebut ialah saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dalam bentuk penyediaan industri pengolahan ikan ramah lingkungan yang ditujukan untuk melakukan pengolahan atas kelebihan hasil tangkapan nelayan maupun pembudidaya ikan. Sedangkan, untuk inovasi sektor perikanan dan kelautan dilakukan dengan keahlian/kemampuan/kapasitas lokal dengan mengubah pola fikir masyarakat maupun pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam memandang sebuah permasalahan.

Misi VI. Mengembangkan alternatif lahan produksi untuk budidaya ikan

Pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan gili/pulau-pulau kecil dan sungai-sungai di Kabupaten Lombok Timur sebagai areal yang potensial dan murah bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Hal yang dibutuhkan hanya kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta atau dengan sesama warga lainnya untuk bisa berpartisipasi dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

e. *Acting* (Tindakan/bertindak)

Tahap terakhir dalam perencanaan skenario menurut Lindgren dan Bandhold (2003:38) adalah *acting* yang merupakan tahap *"we set up short-term goals, take the first steps and follow up our actions"* (tahap pengaturan tujuan untuk jangka pendek dengan mengambil langkah pertama dan seterusnya sebagai sebuah tindakan). Ini berarti bahwa pada tahap *acting*, berbagai strategi yang telah diputuskan pada tahap sebelumnya *(deciding)* diintegrasikan ke dalam suatu tindakan yang akan dibuat perencanaan skenarionya atau dengan kata lain, *"acting"* adalah tahap implementasi strategi yang telah mengintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran oganisasi untuk terus berusaha beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

Program-program maupun usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta konservasi dan pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil, beberapa ada yang berhasil, namun sebagiannya lagi masih mengalami hambatan/kendala. Hambatan atau kendala tersebut bersumber dari

dua masalah, yaitu masalah anggaran dan sumberdaya manusianya. Anggaran dan sumberdaya manusia (SDM) merupakan dua hal yang sangat penting dalam pembangunan khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan anggaran yang cukup, maka semua pembangunan kelautan dan perikanan baik fisik maupun non-fisiknya dapat tercapai dengan baik.

Sumberdaya manusia dibutuhkan untuk mengelola anggaran yang tersedia dan untuk mengembangkan potensi lokal (sektor kelautan dan perikanan) sebagai modal untuk menciptakan kesejahteraan. Potensi lokal sebagai modal untuk menciptakan kesejahteraan, diungkapkan pula oleh Blakely, (1990) yang mengatakan, bahwa:

> "konsep pengembangan sumberdaya ekonomi lokal yang memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis potensi lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam *marketplace* dan lebih menempatkan kelompok masyarakat dibanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenaga kerja".

Untuk mengelola anggaran dan sumberdaya manusia agar mengarah pada tujuan pembangunan, maka dibutuhkan skenario terhadap kedua *focal concern* tersebut dengan mengintegrasikannya kedalam beberapa strategi (strategi yang dijabarkan dari visi dan misi). Ada empat pilihan atau alternatif skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu:

1) Skenario I "ikan terbang" dengan anggaran mendukung dan sumberdaya manusia memadai

Pemberian nama skenario I sebagai skenario ikan terbang karena pada dasarnya ikan ketika terbang/ meloncat keluar dari permukaan air ikan tersebut harus memiliki segala kemampuan penting dengan perhitungan yang matang. Sama halnya dengan sektor kelautan dan perikanan, harus memiliki kemampuan

yang cukup untuk keluar dari keterpurukannya dan kemampuan tersebut berupa kecukupan anggaran dan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai. Dalam skenario ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun masyarakatnya, bahkan *stakeholders* lainnya tidak perlu mengkhawatirkan dampak negatif dari skenario ini, karena sudah didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia (SDM) sebagai penggerak pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Hal yang perlu diperhatikan ialah mengelola kedua faktor tersebut agar tetap saling mendukung dalam proses pembangunan sektor kelautan dan perikanan baik pada bidang penangkapan, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran. Dalam skenario I ini, hampir semua strategi bisa diterapkan karena dukungan anggaran dan sumberdaya manusianya yang memadai. Integrasi strategi dalam skenario ini akan dijelaskan pada pilihan-pilihan strategi.

2) Skenario II "ikan mabuk" dengan anggaran tidak mendukung namun sumberdaya manusia memadai

Skenario II diberikan nama sebagai skenario ikan mabuk, karena ikan yang memiliki ketahanan tubuh (sumberdaya manusia) saja tidak cukup untuk mempertahankan hidupnya tanpa adanya makanan (anggaran). Gejala yang muncul ketika ikan kekurangan makanan ialah pusing/mabuk yang akhirnya mati. Pada sektor kelautan dan perikanan juga terjadi hal yang sama ketika pembangunan tanpa didukung anggaran maka pembangunan tersebut akan kehilangan arah dan akhirnya sektor kelautan-perikanan tersebut tidak berkembang sama sekali. Namun untuk bisa bertahan, jalan yang ditempuh ialah memaksimalkan peran sumberdaya manusianya untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Langkah yang bisa dilakukan agar anggaran pembangunan dapat

menunjang pengembangan sektor kelautan dan perikanan ialah dengan mengoptimalkan peran sumberdaya manusia (SDM) yang ada guna melakukan kerjasama/mitra baik antar pemerintah maupun dengan swasta. Bentuk kerjasama tersebut ialah dengan pemberian modal/ investasi di sektor tersebut. Sumberdaya manusia (SDM) dapat membuka jalur perdagangan khususnya dibidang kelautan dan perikanan.

3) Skenario III "ikan kembung" dengan anggaran mendukung namun sumberdaya manusia tidak memadai

Skenario ini diberikan nama skenario ikan kembung karena lingkungannya dipenuhi oleh makanan/sumber makanan yang melimpah namun populasi ikan minim di lingkungan tersebut, sehingga makanan yang berlimpah tersebut menjadi sia-sia karena tidak ada yang memakannya. Sementara populasi ikan yang ada, tidak mampu lagi memakan sumber makanan tersebut karena perutnya telah terisi penuh/kembung dan akhirnya hanya bisa diam (gerak terbatas). Hal yang sama ketika sektor kelautan dan perikanan hanya didukung oleh anggaran pembangunan, namun tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai. Anggaran yang ada hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki kapasitas dan keahlian dalam upaya pembangunan. Dan kebanyakan dari mereka menggunakan anggaran tersebut semaunya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima di masa depan atau dengan kata lain, anggaran pembangunan digunakan untuk melaksanakan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang bukan menjadi program prioritas dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah jika dukungan anggaran tersebut menjadi pemicu besar bagi sumberdaya manusia

(SDM) lainnya untuk memanfaatkan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya guna kepentingan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

4) Skenario IV "ikan kering" dengan anggaran tidak mendukung dan sumberdaya manusia tidak memadai

Skenario ini dinamakan ikan kering karena kehidupan ikan yang serba sulit dengan sumber makanan yang tidak tersedia sementara kondisi dan jumlah populasi ikan semakin menyusut/ banyak terserang penyakit sehingga daya gerak ikan terbatas untuk mencari sumber makanan. Analogi ini sama dengan sektor kelautan dan perikanan ketika anggaran tidak mendukung dan dihadapkan pula pada kenyataan bahwa sumberdaya manusianya yang tidak memadai untuk mengelola beberapa potensi yang ada sebagai kekuatan untuk membalikkan keadaan. Kondisi seperti ini memang kritis, namun setidaknya ada beberapa langkah alternatif untuk bisa menyelamatkan sektor kelautan dan perikanan dari kondisi sulit ini. Langkah-langkah alternatif tersebut ialah dengan memperkuat sumberdaya manusianya terlebih dahulu, sehingga ketersediaan anggaran dapat di usahakan melalui adanya sumberdaya manusia yang terampil, kreatif, inovatif dan produktif atau dengan kata lain bahwa memaksimalkan peran sumberdaya manusianya, akan membantu penguatan ketersediaan anggaran juga.

Ketersediaan anggaran dapat diperkuat dengan cara melakukan kerajasama dengan sektor lain misal sektor pertanian, peternakan, pariwisata atau melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai penyumbang modal *(anggaran)* maupun dengan kerjasama yang dibangun antar kabupaten, bahkan dari bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk mengatasi masalah sumberdaya manusia (SDM) yang tidak memadai ialah dengan bantuan dari

berbagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pihak-pihak yang dimaksud ialah tokoh agama, ketua RW/RT, kepala desa sampai bupati, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan orang-orang yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Lombok Timur maupun masyarakat terdidik di lingkungan desa sampai kabupaten untuk membagi pengetahuan/keahlian/pengalaman yang dimilikinya kepada masyarakat yang masih rendah kualitas sumberdaya manusianya.

Untuk menyempurnakan pilihan skenario, dari skenario I sampai dengan skenario IV, maka dibutuhkan strategi-strategi yang bisa diintegrasikan atau digabungkan kedalam skenario-skenario tersebut. Strategi ini merupakan penjabaran dari visi dan misi peneliti yang direncanakan waktu pencapaiannya dari tahun 2014 sampai 2034 atau dengan kata lain masa pencapaiannya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (duapuluh tahun). Visi Kabupaten Lombok Timur "Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan **Melalui Potensi Lokal** Dibawah Lindungan Allah SWT". Dari visi "melalui potensi lokal", dapat dibentuk 6 (enam) misi atau kerangka kebijakan/keputusan-keputusan. Dari misi-misi tersebut dapat dibentuk beberapa strategi alternatif yang berfungsi sebagai rencana aksi dalam rangkaian perencanaan skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal di Kabupaten Lombok Timur. Strategi-strategi alternatif yang dimaksud, seperti:

Misi I. Melakukan pembenahan terhadap potensi sektor kelautan dan perikanan dari aspek pengelolaan dan ketersediaan sarana-prasarana serta pemasaran hasil perikanan

Pengelolaan dilakukan agar setiap kegiatan perikanan dan kelautan lebih terfokus pada tujuan peningkatan kualitas, kuantitas, produktifitas serta dampak positif sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut salah satunya ialah memperbaiki tata kelola dan manajemen pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dengan baik serta menguntungkan semua pihak melalui penyediaan fasilitas-failitas pendukungnya. Ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat penting untuk meningkatkan hasil kelautan dan perikanan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut seperti:

1) Membentuk usaha kecil tempat nelayan/petani ikan membeli peralatan dan perlengkapan untuk mengembangkan usaha perikanan mereka. Kemudian usaha kecil ini sebaiknya menyediakan alat tangkap (jaring, mesin kapal, obat-obatan, pakan dan peralatan lainnya) yang layak dan murah/terjangkau, baik penyediaannya melalui penyisihan modal khusus oleh pemerintah untuk nelayan/petani ikan maupun dengan membuat sebuah koperasi khusus tempat para nelayan/petani ikan meminjam modal. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Untuk skenario I aplikasinya sudah jelas karena didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. Penerapan strategi ini di skenario II, memerlukan kerjasama yang baik antar nelayan/pembudidaya dalam memaksimalkan potensi mereka berupa

sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif untuk mendapatkan anggaran pembentukan usaha kecil tersebut, melalui pembentukan kelompok usaha yang modal awalnya berasal dari tabungan nelayan/pembudidaya tersebut atau mungkin dengan melakukan pengajuan dana pembentukan usaha kecil kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Sedangkan penerapan strategi ini dalam skenario III ditempuh dengan kekuatan anggaran/dana pembangunan yang tersedia dengan cukup untuk membangun sumberdaya manusia yang akan membentuk dan mengelola usaha kecil tersebut.

2) Mengadakan alat transportasi (transportasi darat maupun laut) dan mengembangkan jalur transportasi pesisir/ tepi pantai (lingkar utara-selatan Kabupaten Lombok Timur) sebagai jalur strategis bagi pengangkutan hasil kelautan dan perikanan maupun untuk menunjang kepentingan pengembangan perikanan di wilayah pesisir seperti pengangkutan bahan penunjang infrastruktur untuk pelabuhan tangkap atau yang lainnya. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Untuk skenario yang didukung oleh anggaran yang cukup, strategi ini tidak menjadi kendala besar. Untuk skenario yang tidak didukung oleh anggaran yang cukup, seperti skenario II "ikan mabuk" maka hal tersebut membutuhkan usaha keras untuk mengoptimalkan pengerahan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki agar

pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, walaupun hasilnya tidak sebaik ketika didukung oleh anggaran pembangunan yang cukup.

3) Perbaikan, perawatan maupun pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dan SPDN *(Solar Packed Dealer* untuk Nelayan) yang memiliki standar yang baik. Standar tersebut berdasarkan dampaknya terhadap pedagang, konsumen dan lingkungan. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Untuk melakukan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) membutuhkan kekuatan anggaran yang cukup untuk bisa dilaksanakan (skenario I "ikan terbang" dan skenario III "ikan kembung"). Sedangkan kekuatan sumberdaya manusia (SDM) atau tenaga lokal digunakan untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap tempat pelelangan ikan (TPI) dan SPDN *(Solar Packed Dealer* untuk Nelayan) yang telah ada dengan kapasitas/keahlian/kemampuan lokal yang dimiliki. Kekuatan sumberdaya manusia/ tenaga lokal terdapat pada skenario I "ikan terbang" dan skenario II "ikan mabuk".

4) Pembuatan gudang es *(Ice Storage)* yang dekat dengan tempat pelelangan ikan, pelabuhan, dan pendaratan ikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mengangkutnya. Selain itu juga, es tidak cepat mencair untuk mengawetkan hasil tangkapan para nelayan karena jarak yang dekat tersebut. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III

"ikan kembung". Namun untuk mengaplikasikannya pada skenario II "ikan mabuk" membutuhkan waktu lama sampai strategi tersebut benar-benar terwujud. Hal ini dikarenakan modal utama pembuatan gudang es *(Ice Storage)* belum mendukung pada skenario II.

5) Karena hasil tangkapan ikan cukup banyak, maka dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ramah lingkungan untuk mengolah kelebihan hasil tangkapan nelayan baik yang dikelola pemerintah, pemerintah yang kerjasama dengan swasta maupun yang dikelola oleh masyarakat berupa industri kecil. Strategi ini cukup jelas untuk dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung".

6) Mengembangkan dan meragamkan jenis ikan yang dijadikan benih di Balai Benih Ikan (BBI) maupun di BBIP (Balai Benih Ikan Pantai), sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan untuk memperoleh bibit/benih ikan. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Strategi ini jika diaplikasikan pada skenario II, maka sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia diarahkan untuk melakukan usaha-usaha alternatif dalam mengembangkan dan meragamkan jenis ikan yang dijadikan benih, salah satunya dengan mendapatkan benih dari alamnya untuk dikembangkan dan jika telah memenuhi target produksi maka sebagian dari benih tersebut dapat dilepaskan lagi ke habitat aslinya agar tidak cepat punah.

Sedangkan untuk pemasaran hasil kelautan dan perikanan ditempuh dengan meningkatkan intensitas penawaran terhadap produk perikanan. Untuk meningkatkan intensitas penawaran tersebut, maka hal yang dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktifitas perikanan. Cara lain ialah dengan memaksimalkan berbagai program peningkatan konsumsi ikan. Strategi ini dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Skenario dengan kekuatan anggaran (skenario I dan III) ditujukan untuk meningkat kualitas, kuantitas dan produktifitas produk kelautan dan perikanan untuk bisa bersaing di pasar global. Sedangkan untuk skenario II "ikan mabuk" yang didukung dengan kekuatan sumberdaya manusia (SDM) dapat memperkuat mitra dengan pelaku-pelaku usaha produk kelautan dan perikanan atau dengan memperkuat pemberdayaan kepada masyarakat tentang pemasaran produk dan melakukan upaya memasyarakatkan makan ikan (peningkatan konsumsi ikan).

Misi II. Pengelolaan koperasi dan pengembangan kawasan UMKM sektor kelautan-perikanan

Pengelolaan koperasi bersih dari praktek-praktek para pengurus yang dapat merugikan anggota. Pengelolaan ini butuh transparansi atas dana yang masuk ke koperasi dan dana yang keluar dari koperasi dengan disaksikan seluruh anggota koperasi sehingga tidak ada lagi unsur penipuan dalam koperasi. Pengembangan kawasan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khusus untuk sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan melakukan *survey* terhadap lokasi yang strategis dan dekat dengan aktivitas perikanan. Lokasi yang strategis dan dekat dengan aktivitas perikanan tersebut sebagian besar tidak terkontrol serta

terkesan jauh dari upaya pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini bertujuan agar pembangunan daerah dapat merata dan dapat dikelola dengan baik serta dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Strategi ini dapat diterapkan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Strategi ini akan berjalan baik pada skenario I "ikan terbang" karena didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusianya yang memadai. Untuk melakukan perombakan terhadap praktek-praktek kecurangan para pengurus yang merugikan anggota koperasi, dapat dilakukan dengan memaksimalkan peranan sumberdaya manusia (SDM) terampil untuk mengelolanya yang terdapat pada skenario II "ikan mabuk". Untuk skenario II jika ingin mendapatkan sumber anggaran maka dapat melakukan lobi maupun dengan melakukan mitra/kerjasama dengan pihak terkait guna mengembangkan kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khusus untuk sektor kelautan dan perikanan di lokasi yang strategis. Sedangkan untuk skenario III "ikan kembung" yang diperkuat oleh anggaran dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk merubah perilaku pengurus koperasi dengan membentuk sistem pengawasan terpadu terhadap pengelolaan dana anggota oleh para pengurus koperasi. Selain itu, dengan kekuatan anggaran ini dapat dilakukan pengembangan terhadap kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khusus untuk sektor kelautan dan perikanan di lokasi yang strategis.

Misi III. *Recruitment*/pengerahan tenaga ahli yang profesional terutama dari daerah sendiri/ tenaga lokal yang disertai dengan pelatihan

Pengerahan atau pengangkatan tenaga ahli bertujuan untuk mendapatkan tenaga yang memiliki keahlian/kapasitas yang bisa diandalkan atau benar-benar

ahli dalam sektor kelautan dan perikanan, baik dalam bidang penangkapan, pengolahan, terlebih dalam bidang budidaya (perbanyakan benih ikan, pembesaran, pemilihan indukan dan menghasilkan benih ikan yang unggul melalui mutasi genetik). Tidak hanya itu saja, tenaga yang direkrut juga memiliki kompetensi dalam pengelolaan sumberdaya dan pemasaran hasil. Untuk masalah kompetensi, tenaga kerja yang direkrut bisa diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu sampai kompetensi mereka benar-benar mampu untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara tepat dan benar. Tenaga utama yang direkrut berasal dari Kabupaten Lombok Timur sendiri (tenaga kerja lokal) agar tingkat pengangguran semakin berkurang dan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat khususnya bagi para sarjana yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang menganggur.

Strategi ini dapat diterapkan pada skenario I “ikan terbang” dengan baik karena didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusianya yang memadai. Penerapan strategi ini pada skenario II “ikan mabuk” juga tidak terlalu sulit karena didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang memadai untuk melakukan pengelolaan terhadap sektor kelautan dan perikanan, walaupun anggaran tidak mendukung tapi dengan kualitas sumberdaya manusia yang diarahkan dengan baik untuk mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan, maka anggaran untuk pembangunan bisa di upayakan ketersediaannya. Untuk skenario III “ikan kembung” masalah anggaran bukan menjadi permasalahan utama, namun yang menjadi masalah utama ialah sumberdaya manusia (SDM) yang tidak memadai. Untuk mengatasi sumberdaya manusia yang belum memadai

tersebut, maka dilakukan dengan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas/keahlian sumberdaya manusia yang ada dengan menggunakan kekuatan anggaran yang ada. Strategi ini juga bisa diterapkan dalam skenario IV "ikan kering" (anggaran dan sumberdaya manusia yang tidak mendukung) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pelatihan yang diberikan secara swadaya oleh masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk anggaran pembangunan dapat di usahakan melalui sumberdaya alam yang dimiliki daerah tersebut.

Misi IV. Pengawasan sumberdaya kelautan-perikanan dan melakukan pelestarian kembali terumbu karang maupun penyangga pantai (mangrove/bakau)

Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan/ daya dukung lingkungan atas sumberdaya kelautan dan perikanan setelah dieksploitas yang bertujuan agar sumberdaya tersebut tidak habis terkuras dalam satu periode ekploitasi, akan tetapi dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan, maka hal yang dilakukan ialah aktif melakukan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan lokal (awik-awik) ditegakkan secara tegas dan sebenar-benarnya. Pengawasan terhadap pencurian (ikan, terumbu karang, dsb) oleh kapal-kapal asing juga harus di perketat, seringkali kapal asing memiliki jaringan dari dalam (aparatur/ nelayan setempat) dan terlihat seperti nelayan lokal sehingga sulit dikenali. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang jelas bagi pelanggar (pihak yang

terlibat baik lokal maupun asing) dan melakukan patroli secara berkala guna melindungi perairan Kabupaten Lombok Timur dari tindakan yang tidak diinginkan lainnya.

Pelestarian dilakukan dengan cara menjaga dan melindungi habitat/ tempat tinggal ikan seperti terumbu karang agar tetap lestari. Selain itu, abrasi pantai bisa saja terjadi sehingga membutuhkan penyangga berupa pohon bakau. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu: 1) Melarang penggunaan zat kimia dan alat penangkap masal dalam penangkapan ikan dan memberikan pemahaman kepada nelayan akan pentingnya menjaga terumbu karang dan pohon bakau ditepi pantai. (hasil yang diperoleh berupa ikan akan jauh lebih besar ketika terumbu karang dan bakau sebagai penahan dari abrasi air laut tumbuh merata dan banyak), 2) Membudidayakan terumbu karang dan pohon bakau, jika telah siap maka dilakukan penanaman pada tempat-tempat yang kondisi terumbu karang dan bakau-nya kritis, dan 3) Jika kondisi wilayah telah kritis dan hampir tidak ditemukan terumbu karang, maka sistem rumpon (pelepasan “sampah” ke dasar laut seperti ban bekas, ranting atau batang pohon, pipa-pipa bekas, dll) sangat cocok untuk diterapkan. Strategi ini cukup jelas untuk dapat di aplikasikan pada skenario I “ikan terbang”, skenario II “ikan mabuk” dan skenario III “ikan kembung”. Strategi-strategi ini terimplementasi dengan baik pada skenario I dengan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. Pada skenario II, strategi-strategi ini diupayakan pencapaiannya melalui pengerahan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur guna melakukan pengawasan, penegakan hukum dan strategi lainnya. Sedangkan untuk

skenario III, strategi-strategi ini didukung pelaksanaannya dengan kekuatan anggaran, disamping itu pula dilakukan pembenahan terhadap sumberdaya manusia yang dimiliki.

Misi V. Mengembangkan mitra dan inovasi sektor perikanan dan kelautan untuk menghadapi persaingan pasar bebas

1) Mitra

Mitra dengan daerah lainnya dapat membuka jalur pemasaran baru dan membentuk kemitraan yang bergerak dibidang sarana-prasarana tangkap, budidaya dan pengolahan hasil. Pengembangan pelabuhan perikanan berskala internasonal juga dapat membuka jalur ekspor hasil perikanan. Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki pelabuhan semacam ini, namun Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki pelabuhan perikanan internasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan hal ini tentu menjadi peluang besar jika kedua kabupaten tersebut melakukan mitra. Bentuk mitra lainnya ialah melalui kerjasama dalam penyediaan alat tangkap, peralatan budidaya, maupun peralatan untuk pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Daerah yang memproduksi alat tangkap/ memiliki industri pembuat alat tangkap dan peralatan-peralatan pendukung usaha kelautan dan perikanan dapat memberikan harga murah atas alat yang diproduksinya jika Kabupaten Lombok Timur menjadi mitra tetapnya.

Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat membantu pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya ialah kerjasama dalam penyediaan industri pengolahan ikan yang ramah lingkungan untuk mengolah kelebihan hasil tangkapan nelayan maupun pembudidaya ikan.

Hal yang perlu diingat dan diperhitungkan bila pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta ialah jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, dampak lingkungan yang timbul akibat operasi industri pihak swasta dan perlu adanya batasan dalam mengeksploitasi sumberdaya ikan maupun batasan waktu yang rasional dalam pengoperasian industri sehingga pada batas waktu yang telah ditentukan, industri milik swasta tersebut bisa menjadi milik pemerintah daerah dan hak pengelolaannya dipegang oleh pemerintah daerah.

Strategi ini bisa di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Strategi-strategi ini terimplementasi dengan baik pada skenario I dengan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. Pada skenario II, strategi-strategi ini diupayakan pencapaiannya melalui pengerahan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur guna melakukan kerjasama/mitra yang baik dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi yang dimliki oleh sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk skenario III, strategi-strategi ini didukung pelaksanaannya dengan kekuatan anggaran untuk melakukan promosi dengan berbagai pihak yang ingin melakukan kerjasama/mitra dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk memperkecil dampak dari kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif dan produktif.

2) Inovasi

Inovasi ini diharapkan mampu mengubah pola fikir masyarakat yang cenderung tradisional menjadi semimodern atau modern dengan kapasitas lokal

yang dimiliki saat ini. Strategi berbentuk inovasi ini bisa di aplikasikan pada skenario I “ikan terbang”, skenario II “ikan mabuk” dan skenario III “ikan kembung”. Strategi-strategi ini terimplemenatsi dengan baik pada skenario I dengan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. Pada skenario II, strategi-strategi ini diupayakan pencapaiannya melalui pengerahan sumberdaya manusia (SDM) sehingga minimnya anggaran dapat diatasi. Sedangkan pada skenario III, strategi-strategi ini didukung pelaksanaannya dengan kekuatan anggaran, disamping itu pula dilakukan pembenahan terhadap sumberdaya manusia yang dimiliki. Dan hampir setiap bentuk strategi berbentuk inovasi ini dapat di integrasikan ke dalam skenario I, II dan III. Adapun inovasi yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan kualitas kemasan produk perikanan baik dari izin, label, merk, dan daya tahan produk sehingga dapat diperjual belikan di pasar modern.
b. Memetakan dengan jelas potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur baik secara elektronik maupun pemetaan manual.
c. Menciptakan alat transportasi (transportasi darat dan laut) untuk pengangkutan ikan yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung agar ikan tetap segar sampai ke tempat tujuan. Mungkin saja dengan perpaduan antara mobil/motor dengan alat pendingin (jika ikan dalam kondisi mati). Karena pengemasan dengan kantong plastik ditambah oksigen sudah umum digunakan dan plastik yang telah dipakai seringkali dibuang sehingga tidak efisien serta tidak ramah

lingkungan, maka perpaduan antara mobil/motor dengan kolam didalamnya (sesuai dengan porsi) ditambah dengan oksigen (jika ikan dalam kondisi hidup) mungkin lebih efisien dari sebelumnya.

d. Menciptakan kenyamanan bagi pedagang, konsumen dan lingkungan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menata tempat pelelangan secara berpetak-petak dan (bila hasil yang diperoleh banyak/melimpah) penataan barang (ikan) seperti anak tangga sehingga memudahkan pembeli dalam memilih barang (ikan) yang akan dibeli.
- Membuat sistem drainase dan bak penampung limbah (limbah cair maupun padat) yang baik dan terhindar dari gangguan hewan.
- Membuat tempat penjagalan ikan untuk masing-masing pedagang.
- Menciptakan kesadaran dari pedagang untuk tetap menjaga agar setiap sampah ikan sisa potongan (jeroan, sirip, tulang, dan limbah berupa air cucian ikan) dibuang tepat pada tempat dan posisinya.
- Atap bangunan dikondisikan agar saat ruang pelelangan tidak digunakan, cahaya matahari dapat menembus ke segala penjuru dalam ruangan tersebut sehingga bakteri tidak berkembang biak.
- Lantai dasar dan beberapa sisi samping termasuk tiang bangunan sebaiknya dilapisi dengan menggunakan kramik selain memudahkan untuk dibersihkan, juga dapat menghindari dari kerusakan air garam.

- Membentuk panitia kebersihan baik dari pemerintah mupun swadaya dari para pedagang sendiri.
- Melakukan perawatan berkala terhadap tempat pelelangan ikan.

e. Terumbu karang yang dibudidayakan (pembudidayaan Terumbu Karang) juga dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat karena terumbu karang Indonesia pada umummnya memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dari terumbu karang di negara lainnya, sehingga dapat dijual secara legal atas dasar izin pemerintah.

f. Pohon bakau selain sebagai pelindung dari abrasi dan sebagai tempat hidup hewan laut, juga dapat dijadikan obat bahkan makanan unik berupa keripik buah/ daun bakau dan sirup buah bakau. Selain itu, beberapa jenis bakau bisa diolah sebagai tepung bakau yang menjadi bahan baku roti, kue/bolu, biskuit, dll. Bunga bakau jenis tertentu di ekstraksi/ disaring sehingga menjadi semacam cairan yang jika diteteskan kemata penderita katarak dapat sembuh dengan beberapa kali tetesan. Jika ini diproduksi dalam jumlah banyak dan dilengkapi izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), tentu akan mendatangkan hasil yang cukup menjanjikan kedepannya.

g. Limbah padat (jeroan, sisa potongan sirip, insang, kepala, dan tulang) yang dihasilkan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat dijadikan sebagai campuran bahan pakan (berupa pakan buatan/pelet) bagi ikan lainnya maupun bagi peternak ayam/peternak unggas lain. Selain itu, pemancing juga biasa menggunakan limbah padat berupa hati untuk

dijadikan umpan. Jika memungkinkan sisa limbah berupa hati tadi dapat dijadikan minyak ikan sehingga tidak terbuang percuma.

h. Jenis ikan yang dibudidayakan pada Balai Benih Ikan (BBI) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) bukan hanya ikan untuk konsumsi saja namun juga ikan hias (ikan hias air tawar, payau dan asin/ laut) sehingga perkembangan sektor perikanan tidak hanya dinilai dari hasil yang diperoleh dari ikan konsumsi saja namun juga dari ikan hias. Untuk keberlanjutan dalam pemasarannya maka diperlukan pasar khusus ikan hias.

i. Membentuk kelompok petani ikan di pedesaan maupun di pesisir sehingga tercipta integrasi antara kedua kelompok tersebut dalam meningkatkan potensi perikanan dan melatih keterampilan lain yang sesuai dengan kondisi mereka selain sebagai nelayan tangkap, agar pada saat cuaca tidak menentu nelayan tetap bisa menghidupi diri dan keluarganya mungkin dengan pembuatan tambak ikan hias maupun ikan konsumsi di sekitar muara, membuat tambak garam, membuat perahu dan berdagang/ *entrepreneurship*.

j. Mendukung dan mengembangkan tempat produksi garam yang ada saat ini menjadi lebih besar dan modern untuk kebutuhan dalam negeri. Jika memungkinkan pengembangannya juga untuk eksport.

k. Potensi kelautan dan perikanan bisa digunakan sebagai alat untuk menarik wisatawan dengan cara membuat museum ikan/ wisata buatan maupun dengan menawarkan berbagai macam kuliner lokal dengan

menu utama ikan dan dilengkapi tempat menikmati hidangan tersebut (lesehan baik di dekat pantai maupun pada lokasi budidaya ikan).

Misi VI. Mengembangkan alternatif lahan produksi untuk budidaya ikan

Pengembangan ini ditujukan untuk perikanan air laut dan air tawar, karena harga areal/ lahan yang akan digunakan untuk produksi/ budidaya ikan sangat mahal dan jika ditemukan harga yang sesuai, itu hanya lahan yang jauh dari sumber air. Oleh karena itu, dibutuhkan kepekaan dalam mengembangkan usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar dalam hal ketersediaan lahannya. Untuk budidaya air laut dapat memanfaatkan gili/pulau kecil yang memiliki penghuni dapat dijadikan sebagai tempat produksi ikan salah satunya dengan menggunakan metode keramba sedangkan untuk gili/pulau kecil yang tidak berpenghuni dapat dijadikan sebagai tempat konservasi sumberdaya ikan (ikan konsumsi maupun ikan hias) dengan sistem pengawasan dan manajemen yang menempatkan masyarakat lokal sebagai salah satu penggerak utamanya. sedangkan untuk lahan produksi air tawar dapat memanfaatkan sungai-sungai di Kabupaten Lombok Timur dengan kualitas air yang baik untuk kehidupan ikan, maka sungai bisa menjadi salah satu tempat pengembangan yang potensial namun murah dan hanya butuh kerjasama dengan pemerintah atau dengan warga lainnya.

Pengelolaan perikanan air tawar di sungai dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang sebagai teknisi, penjaga “keramba ikan” dan sisanya sebagai penyedia benih ikan serta kebutuhan lainnya dan ketika panen hasil yang diperoleh juga dibagi secara bersama-sama. Selain itu pula, dengan melakukan pemanfaatan terhadap sungai-

sungai sebagai tempat budidaya ikan, maka dapat mengurangi tingkat pencemaran dari aktivitas rumah tangga seperti sampah, limbah cair maupun limbah padat, karena pada dasarnya masyarakat akan merasa malu jika harus membuang sampah dan limbah sejenisnya di area yang digunakan untuk kegiatan usaha budidaya.

Untuk mengintegrasikan strategi dalam "misi VI", dibutuhkan kekuatan anggaran dan sumberdaya manusia yang baik atau dengan salah satu faktor yang mendukung baik itu sumberdaya manusia (SDM) saja maupun anggaran saja. Hal ini menandakan bahwa strategi ini cukup jelas untuk dapat di aplikasikan pada skenario I "ikan terbang", skenario II "ikan mabuk" dan skenario III "ikan kembung". Strategi-strategi ini terimplemenatsi dengan baik pada skenario I dengan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. Pada skenario II, strategi-strategi ini diupayakan pencapaiannya melalui pengerahan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi terpendam seperti gili/pulau-pulau kecil maupun sungai-sungai yang tidak produktif agar menjadi produktif dan menghasilkan modal/anggaran untuk keberlanjutan pembangunan. Sedangkan untuk skenario III, strategi-strategi ini didukung pelaksanaannya dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan (gili dan sungai). Disamping itu, dilakukan pula pembenahan dan peningkatan kualitas/kapasitas/keahlian sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki melalui intensitas pemberdayaan yang cukup sehingga anggaran yang ada dapat di manfaatkan dengan baik dan benar serta proporsional. Agar setiap skenario tersebut dapat di aplikasikan dengan baik, maka dibutuhkan peran

optimal dari semua pihak yang berhubungan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah disusun oleh peneliti, maka peran yang diharapkan dari masing-masing *stakeholder* ialah memberikan kontribusinya secara maksimal.

Peran yang diharapkan dari *stakeholder* ialah mewujudkan visi-misi pembangunan melalui potensi lokal dan sumberdaya lokal yang dimiliki. Peran untuk mengelola potensi lokal ini menjadi legal karena telah diatur dalam Pasal 18 ayat (10) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa ”Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”. Peran ini bisa berasal dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan *stakeholders* terkait yang berhubungan dengan pengembangan potensi lokal (sektor kelautan dan perikanan) di Kabupaten Lombok Timur.

Peran yang dimaksud melibatkan beberapa *stakeholder* yang ada di Kabupaten Lombok Timur, seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Derah), Dinas Kelautan dan Perikanan (DISKELKAN), Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut), TNI-AL (Angkatan Laut), KKPL (Komite Pengelola Perikanan Laut), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Lembaga Pendamping, Pengusaha baik individu maupun kelompok (PT dan UD), BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan masyarakat (nelayan, pembudidaya, pedagang ikan, dll). Selain itu, *stakeholder* ekternal juga dibutuhkan, seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan beberapa

Perguruan Tinggi. Adapun peran masing-masing *stakeholder* ini dalam mewujudkan pelaksanaan skenario I sampai IV ialah sebagai berikut:

1) Legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur. DPRD memberikan peranan vital dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk mengesahkan kebijakan (anggaran pembangunan) yang ada didalamnya. Peran DPRD disini ialah merancang, membahas dan membentuk Undang-undang yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu pengelola kegiatan kelautan dan perikanan harus sering mengadakan pertemuan dengan DPRD agar mendapat dukungan secara legislasi.
2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Bappeda Kabupaten Lombok Timur serta Dinas Koperasi dan UMKM sebagai salah satu bagian dari fungsi eksekutif yang berwenang mengambil dan membuat perencanaan, kebijakan, tata ruang, implementasi serta monitoring evaluasi program/kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
3) BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut), TNI-AL (Angkatan Laut) dan KKPL (Komite Pengelola Perikanan Laut) sebagai penanganan berbagai masalah keamanan baik berupa *illegal fishing*, pencemaran laut, penyelundupan, perampasan kapal. Selain itu, sebagai pengaman batas teritorial laut, bahkan penghasil peta-peta wilayah laut khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

4) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal penentuan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Lombok Timur. Dalam upaya pelaksanaan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini, LSM/ Lembaga Pendamping berperan dalam upaya pendampingan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, kuli panggul bahkan terhadap usaha pengolahan ikan dalam mengelola usaha miliknya sesuai dengan program yang digulirkan pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat akan dipermudah dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah melalui peran yang dibawa oleh LSM yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan LSM yang tergerak/dimotori oleh kepentingan tertentu/ karena imbalan terselubung dari pihak tertentu.
5) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) memiliki peran dan kepentingan atas kegiatan pengurangan kemiskinan, sebab berbagai aksi dari kegiatan ini akan secara langsung terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari sisi permodalan.
6) Pengusaha baik individu maupun kelompok (PT dan UD) memiliki peran penting yaitu menghimpun sumberdaya kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh nelayan/pembudidaya guna kepentingan konsumsi lokal, antar daerah maupun untuk kepentingan ekspor. Peran penting yang ditunjukkan oleh pengusaha ini ialah menyerap banyak

tenaga kerja lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penurunan angka pengangguran daerah khususnya Kabupaten Lombok Timur.

7) Masyarakat berperan besar dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur, terutama dari sisi pengambilan keputusan. Posisi masyarakat dalam hal ini ialah sebagai aktor utama dalam melaksanakan keputusan yang ada dan masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan memiliki kepentingan kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sektor ini. Dan masyarakat nantinya yang akan membantu melaksanakan atau dengan kata lain, masyarakat sebagai pengguna sekaligus sebagai penerima manfaat dari keputusan/ kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sehingga masyarakat diharapkan taat terhadap kebijakan pemerintah, responsif terhadap kebijakan tersebut, dan menjadi pengawas serta berkontribusi besar dalam kegiatan pembangunan.

8) *Stakeholder* ekternal seperti LIPI dan Perguruan Tinggi juga berperan penting dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur. Perannya ialah memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan dari sudut pandang keilmuan, teknologi dan sumberdaya manusianya, sehingga kelangsungan dan keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur dilihat dari 1) kondisi produksi perikanan, 2) nilai produksi, 3) produksi benih/bibit, 4) pengolahan hasil, tingkat konsumsi ikan, 5) kondisi hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan gili, 6) tingkat penghasilan nelayan, pembudidaya ikan dan pedagang ikan dan 7) sarana-prasarana. Kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagian dalam kondisi cukup baik dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, namun hal itu belum cukup untuk bisa bersaing di pasar bebas atau AEC /*Asean Economic Community* pada tahun 2015 nanti. Dari ketujuh indikator kondisi sektor kelautan dan perikanan yang ada, saran-prasarana menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan kelautan dan perikanan kedepannya tanpa mengabaikan indikator yang lainnya. Hal ini dikarenakan kondisi sarana-prasarana kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur masih belum cukup untuk mengelola potensi yang ada. Untuk itulah maka dilakukan beberapa perbaikan, perawatan dan pembangunan kembali maupun ketepatan manajemen terhadap potensi lokal yang dimiliki dengan memperhatikan sumberdaya dan kapasitas lokal pula.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Perencanaan skenario pengembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Timur didukung oleh kekuatan dan peluang untuk mengurangi dampak kelemahan dan ancaman yang muncul. Baik permasalahan yang ada pada kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada, semuanya disebabkan oleh dua *focal concern* (masalah utama) yang merupakan sumber masalah dan menjadi penyebab kekuatan kurang memberikan pengaruh positif untuk menghadapi ancaman, sedangkan kelemahan yang dimiliki sangat sulit untuk menangkap peluang. Dua masalah utama dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ialah kurangnya anggaran/modal pembangunan dan sumberdaya manusia (SDM) yang masih belum memadai. Dua *focal concern* (masalah utama) tersebut bersinergi dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan membentuk logika skenario dengan periode capaian dari tahun 2014 sampai 2034.

Logika skenario yang dikembangkan yaitu, 1) skenario I (ikan terbang) yang merupakan skenario terbaik karena didukung oleh anggaran dan sumberdaya manusia memadai, 2) skenario II (ikan mabuk) dicapai dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan kekuatan sumberdaya manusianya (SDM) yang dimiliki untuk mendapatkan anggaran pembangunan, 3) skenario III (ikan kembung) dicapai dengan kekuatan anggaran untuk melakukan pembenahan terhadap sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki dan 4) skenario IV (ikan kering) merupakan kondisi

kritis karena tidak ada dukungan oleh anggaran dan sumberdaya manusia (SDM). Peluang untuk terjadinya skenario IV ini sangat kecil sekali dan tidak mungkin suatu daerah tidak memiliki salah satu dari dua *focal concern* ini. Untuk menyempurnakan logika skenario tersebut, maka dibutuhkan sebuah visi yang dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5 sampai 20 tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2034, visinya yaitu "Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan Melalui Potensi Lokal Dibawah Lindungan Allah SWT" yang merupakan visi gabungan antara visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan visi peneliti. Dalam mewujudkan visi yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, maka dibentuklah 6 (enam) misi atau kerangka kebijakan/pembuatan keputusan-keputusan dan beberapa strategi pencapaiannya. Pilihan atau alternatif strategi tersebut di integrasikan kedalam sebuah kegiatan-kegiatan/rencana aksi sebagai sebuah perencanaan yang utuh. Dan untuk mewujudkan pelaksanaannya, maka di butuhkan peran dari berbagai *stakeholder* yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Kemitraan yang melibatkan peran pihak swasta sebagai salah satu *stakeholder* pengembangan sektor kelautan dan perikanan sangat dibatasi, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya lokal. Swasta diberikan tempat bukan sebagai pengelola sumberdaya lokal, namun menjadi penunjang terbukanya akses pasar bagi produk kelautan dan perikanan, pendukung dalam penyediaan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang bukan

merupakan kegiatan vital dari pemanfaatan hasil sumberdaya lokal. Dengan demikian sumberdaya lokal yang dimiliki tidak menjadi monopoli pihak swasta, namun menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat lokal yang memiliki sumberdaya tersebut untuk menjaga dan mengelolanya bagi kepentingan bersama (tujuan jangka panjang), bukan untuk kepentingan kelompok/golongan/perusahaan tertentu. Hal inilah yang menjadi pembeda antara konsep pengembangan sumberdaya ekonomi lokal/ *Local Economic Resources Developent* (LERD) dengan konsep 3P *(Public, Privat, Partnership).* Dalam konsep 3P *(Public, Privat, Partnership),* swasta ditempatkan sebagai pengelola utama dari sumberdaya lokal, sehingga sumberdaya lokal terkuras habis tanpa adanya manfaat besar yang diterima pemiliki sumberdaya (masyarakat lokal).

B. Saran

1. Pada beberapa tahapan di perencanaan skenario, pengaplikasiannya sangat sulit dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dengan status pengambilan keputusan/kebijakan yang lemah atau tidak memiliki kekuatan besar dalam mendorong terlaksananya skenario yang ada. Tahapan yang dimaksud ialah *deciding* dan *acting,* sedangkan tahapan perencanaan skenario yang masih bisa dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dengan status pengambilan keputusan/kebijakan yang lemah tersebut ialah *tracking, analizing* dan *imaging*. Untuk itulah dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik antara masyarakat yang berstatus

lemah dalam hal pengambilan keputusan/ kebijakan dengan pemerintah sebagai pengambil dan yang menetapkan keputusan/ kebijakan dengan status kuat. Selain itu, peran (kerjasama) dari *stakeholder* lainnya sangat dibutuhkan guna terlaksananya skenario, baik itu swasta/ *privat*, lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM, Kelompok Nelayan/ Petani Ikan/ Pedagang/ Kuli Panggul, Koperasi, dll), maupun dari pemerintah/ organisasi Luar Negeri.

2. Melakukan manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya aparatur, tenaga lokal maupun masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan untuk saat ini bukan hanya berfokus pada pendidikan dasar seperti SD, SMP dan SMA saja, namun lebih kepada pengembangan pendidikan tinggi seperti Universitas atau Perguruan Tinggi dan setingkatnya dengan memberikan insentif bagi mahasiswa yang belajar ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selama ini berupa “asrama mahasiswa” yang berada pada pusat layanan pendidikan, khusus di luar pulau. Namun fasilitas berupa “asrama mahasiswa” tersebut tidak memiliki manajemen pengawasan yang baik dan benar, karena mayoritas mahasiswa yang menempati asrama tersebut ialah mahasiswa bermasalah, baik dilihat dari cara berfikirnya maupun perilakunya (*maaf ini seperti:* preman dan pemabuk), bahkan mahasiswa yang ada di dalam asrama tersebut semakin nyaman dan merasa bahwa fasilitas Pemerintah

Daerah tersebut sebagai fasilitas pribadi. Untuk itulah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan internal asrama mahasiswa tersebut. Terlepas dari itu semua, kenyataan yang ada saat ini ialah pendidikan di seluruh kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Timur jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di negara-negara berkembang maupun negara maju lainnya, seperti ikan teri dengan ikan hiu. Dimana ikan teri merupakan kualitas dan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia sementara ikan hiu merupakan kualitas dan tingkat pendidikan penduduk di luar negeri.

3. Pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dalam hal promosi produk kelautan dan perikanan baik itu promosi pada tingkat lokal (kabupaten), tingkat provinsi, tingkat nasional dan promosi tingkat dunia/ internasional. Untuk promosi produk perikanan ke mancanegara, Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan keberadaan touris asing yang sedang berlibur di Lombok Timur yang diarahkan untuk mengetahui dan memahami potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur khususnya bidang kelautan dan perikanan dengan bantuan sektor pariwisata. Sehingga produk perikanan Lombok Timur dapat dikenal dunia internasional dan dapat meningkatkan investasi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk promosi di tingkat lokal, provinsi dan nasional, dapat dilakukan dengan

memanfaatkan media masa baik elektronik maupun cetak yang cukup mudah, murah dan dapat merubah *image* masyarakat terhadap potensi Kabupaten Lombok Timur yang selama ini terpendam.

4. Untuk melakukan pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang pemasaran, juga dibutuhkan mitra yang baik dalam menunjang perencanaan skenario yang ada. Mitra selama ini hanya berputar pada kerjasama pemerintah dengan swasta atau antar pemerintah daerah di Indonesia saja. Padahal jika difikirkan lebih matang dan bijak, produk kelautan dan perikanan seluruh daerah di Indonesia semuanya dikuasai oleh pihak asing dalam hal struktur perdagangan. Sehingga kabar miring atau isu-isu mengenai kelangkaan dan turunnya harga produk kelautan dan perikanan yang terjadi di Indonesia merupakan strategi pasar dari pihak asing dengan memanfaatkan tenaga lokal untuk menyembunyikan pengaruhnya di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itulah, dibutuhkan kerjasama yang baik antar lembaga/ badan yang memiliki keterkaitan dengan pasar produk kelautan dan perikanan. Salah satu dari lembaga atau badan tersebut ialah Badan Pengawasan Perdagangan Luar Negeri yang bergerak di dunia perdagangan khususnya perdagangan luar negeri. Badan ini memantau isu-isu dan perkembangan pasar luar negeri serta manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak asing dan jika dimanfaatkan secara optimal, maka harga pasar produk kelautan dan perikanan tidak akan lemah di mata dunia internasional. Hal ini tentu membutuhkan transparansi dari badan yang

bersangkutan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Selain itu, untuk menyerap informasi yang diberikan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Luar Negeri maka dibutuhkan layanan informasi disetiap penjuru tanah air dengan membangun pusat data dan informasi yang terbebas dari tunggangan pihak asing.

5. Perlu adanya *Grade* pada rumput laut di Kabupaten Lombok Timur yang akan di ekspor kelauar daerah, distribusi ke daerah lainnya maupun untuk bahan baku perusahaan, sehingga harga jual rumput laut sesuai dengan kualitasnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.

Blakely. 1990. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. New Delhi: Sage Publications.

Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California: Sage Publications, Inc.

Bryan, Coralie and White, Louise G. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Diterjemahkan oleh: Simatupang, Rusyanto L. Jakarta: LP3ES.

Bryson, J.M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Diterjemahkan oleh: Miftahuddin, M. Cetakan VIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPS NTB. 2013. Keadaan ketenagakerjaan agustus 2013. *Berita Resmi Statistik,* 74/11 (52): 1 6.

Chermack, Thomas James. 2003. Thesis: *A Theory of Scenario Planning*. US: Umi Microform.

Conyers, Diana. 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Cetakan ke-1 tahun 1991*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur. 2009. *"Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur"*, diakses pada tanggal 3 November 2013 dari http://lomboktimurkab.go.id/.../.../...

FAO .1995. *Planning for Sustainable Use of Land Resources: Towards a New Approach*. Rome: FAO Land and Water Bulletin.

Gafar, A.M. 2012. *Analisis Peranan Individu, Pemerintah dan Kelompok Sosial Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Lombok Timur*. Selong: Lembaga Pusat Studi Sumber Daya (PSSD).

Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Harahab, N. 2010. *Penilian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harsono, B. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.

Hayati, T., H. Nursadi, dan A. Danesjvara. 2005. *Administrasi Pembangunan: Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Heady, Frel. 1995. *Public Administration: A Comparative Perspective*. New York: Marcel Dekker.

HIS. 2006. *Concept of Local Economic Development*. Rotterdam: Course Material of LED.

Kartasasmita, G. 1996. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kusumastanto, T. 2002. *Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Guru Besar Kebijakan Ekonomi. Bogor: PKSPL-IPB.

Latief, H., M.S. Fitrianto dan D.S. Abi Suroso. 2010. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Sektor Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Bappenas.

Lindgren, M dan H, Bandhold. 2003. *Scenario planning: The Link between future and strategy.* New York: Palgrave Macmillan.

Miles, M.B, & A.M. Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru.* Diterjemahkan oleh: Rohidi, T.R. ed.1. Jakarta: UI-Press.

Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda Provinsi NTB.

Nadeak, Agus. 2009. Kawasan basis sektor perikanan dan kelautan. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, 4(3): 102 110.

Nigro, Lloyd G. & Felix A. Nigro. 1988. *Modern Public Administration*. 3rd-7th editions. New York: Harper and Row/ Collins.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. 2014. *"RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2008-2013"*. Lombok Timur: Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2009. "Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur", diakses pada tanggal 3 Januari 2014 dari http://www.mataram.bpk.go.id/.../pdf

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012. "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032", diakses pada tanggal 3 Januari 2014 dari http://www.tataruangntb.net/.../pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. "Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut", diakses pada tanggal 9 April 2014 dari http://prokum.esdm.go.id/.../pdf

Pfiffner, John M & R. Vance Presthus. 1953. *Public Administration (third edition)*. New York: Ronald Press Company.

Ringland, Gill. 1998. *Scenario Planning: Managing for the Future*. England: John Wiley & Sons. Ltd.

Rustiadi, E., S. Saefulhakim, D. R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cetakan ke-tiga. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Said, A. 2012. *Konsep LERD*. RCCP *(Research Centre for Conflict and Policy)* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang: Makalah disampaikan dalam Program Diklat Non Gelar Pusbindiklatren Bappenas 2012. 34 halaman

Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.

Schwartz, Peter. 1996. *The Art of Long View: Planning for the future in an uncertain world*. US: Currency Doubleday.

Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*. ed.2. Jakarta: Bumi Aksara.

Sonhadji, A. 1996. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasada Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

_____. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. "Undang-undang Pokok Agraria", diakses pada tanggal 9 April 2014 dari http://www.pn-stabat.go.id/.../pdf

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP-PK)", diakses pada tanggal 28 Mei 2014 dari http://bk.menlh.go.id/files/UU_no_27_th_2007.pdf

Undang-undang No. 32 Tahun 2004. "Pemerintahan Daerah", diakses pada tanggal 14 Januari 2014 dari http://www.sjdih.depkeu.go.id/.../HTM

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan", diakses pada tanggal 13 Maret 2014 dari http://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/2009UU45.pdf

Wilson, Woodrow. 1992. *"The Study of Administration"*, dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (ed). *Classic of Public Administration*. Belmont C.A.: Wadsowrt Publishing Company.

Wiharnandi, A. 2014. "Ekosistem terumbu karang pulau Lombok: Menanti status legalitas kawasan", diakses pada tanggal 13 Maret 2014 dari http://www.mongabay.co.id /.../.../…

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian/ Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3605 /UN 10.3/ PG /2014
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Faqih
Alamat	: Jln. Sumbersari Gang. 03 No. 207 Malang, Jawa Timur
NIM	: 105030600111019
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Perencanaan Pembangunan
Judul Skripsi	: Perencanaan Skenario *(Scenario Planning)* Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal "Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)"
Waktu	: 2 (dua) bulan
Peserta	: 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Maret 2014
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Bappeda Kabupaten Lombok Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim 83612 Telp. (0376) – 21212, Fax.(0376) – 21371

Selong, 17 Maret 2014

Nomor : 070/169/PD/III/2014
Lamp. : -
Perihal : **Permakluman Penelitian/ Survey**

K e p a d a
Yth. 1. KADIS. KELKAN. Kab. Lotim
2. KADIS. Koprasi dan UKM. Kab. Lotim
3. KADES. Labuhan Haji, Jerowaru, Sambelia, Keruak dan Sakra Timur
Masing-masing
di-
T e m p a t

بسم الله الرحمن الرحيم
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor : 3605/UN 10.3/PG/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal Mohon Ijin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan oleh:

Nama	:	**MUHAMMAD FAQIH**
NPM	:	105030600111019
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Rempung
Instansi / Badan	:	Universitas Brawijaya
Tujuan / Keperluan	:	Untuk memperoleh data
Judul / Tema	:	"Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan dan Prikanan Berbasis Potensi Lokal Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)."
Tanggal Pelaksanaan	:	17 Maret 2014 s/d 17 Mei 2014

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

وبا الله التوفيق والهدايه
والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABID.PENELITIAN, STATISTIK DAN PELAPORAN,

BAPPEDA

Dra.Hj. SRI UTAMI AFIANTI,M.Ap
NIP. 19620305 198903 2 008

Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Camat Labuhan Haji, Keruak, Jerowaru, Sambelia dan Sakra Timur Masing-masing di Tempat;
4. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang.

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

LEMBAR PENERUS DISPOSISI

INDEX / KODE : 248

Tanggal Penyelesaian

PERIHAL : permohonan penelitian / survey

TANGGAL / NO. : 17 maret 2014 / 070 / 169 / PD / III / 2014

ASAL : Bappeda Lotim

TGL. PENERIMAAN : 25 Maret 2014

INSTRUKSI / INFORMASI :

Tolong berikan informasi tentang data² kelautan & perikanan Kab. Lotim

Diteruskan kepada :

1. KDEP
2. Sekretaris
3. Kabid Perikanan Budidaya
4. Kabid PTPK
5. Kabid KP3K
6. Kabid PBTIK2
7. UPTD BBI Lemak
8. UPTD BBIP Lab Baji
9. UPTD TPI Tj Luar
10. UPTD TPI Lab Lombok
11. BPKIP Sambelia

Lampiran 4. Peta Kabupaten Lombok Timur

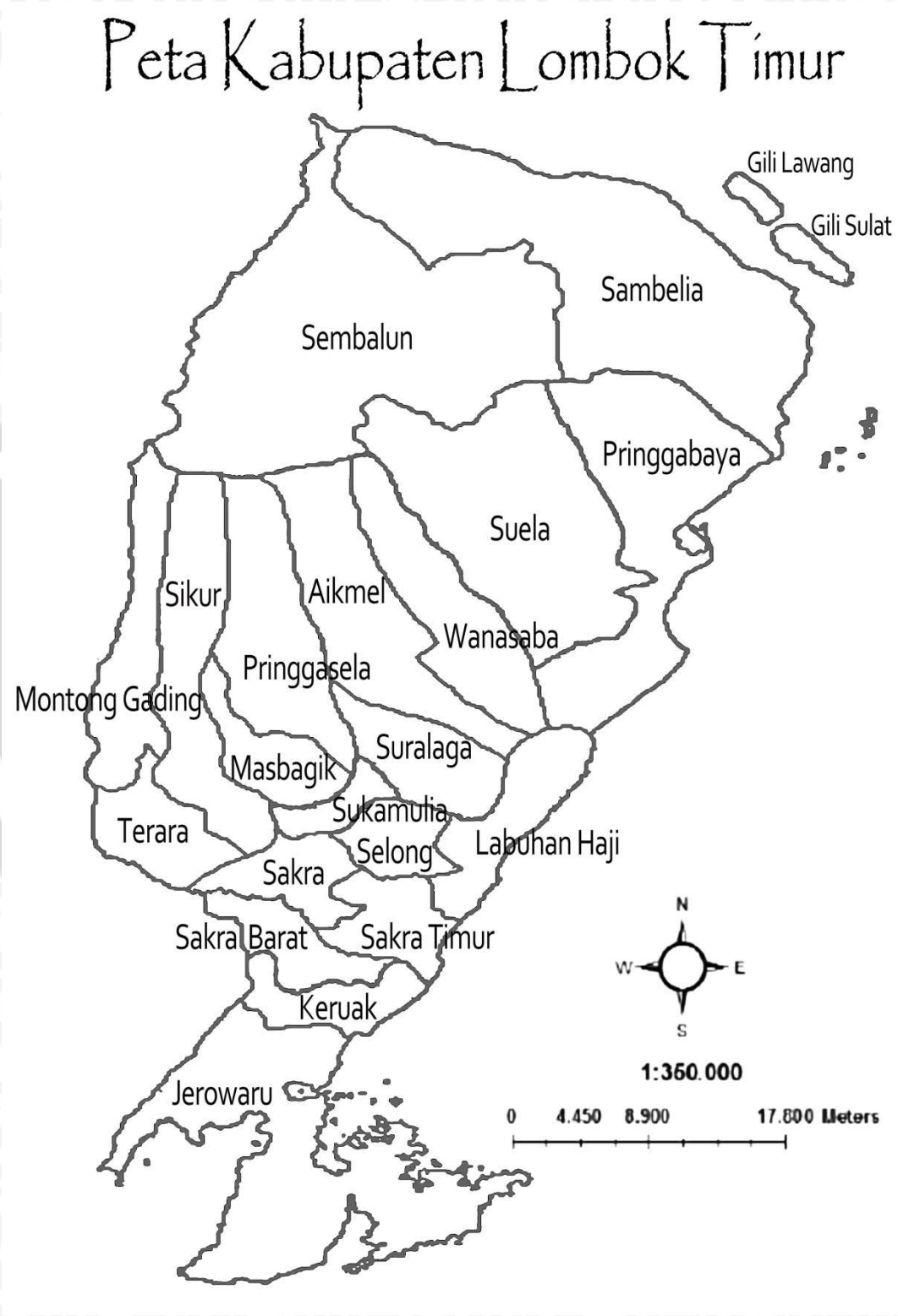

Lampiran 5. Konsep LERD *(Local Economic Resources Development)*

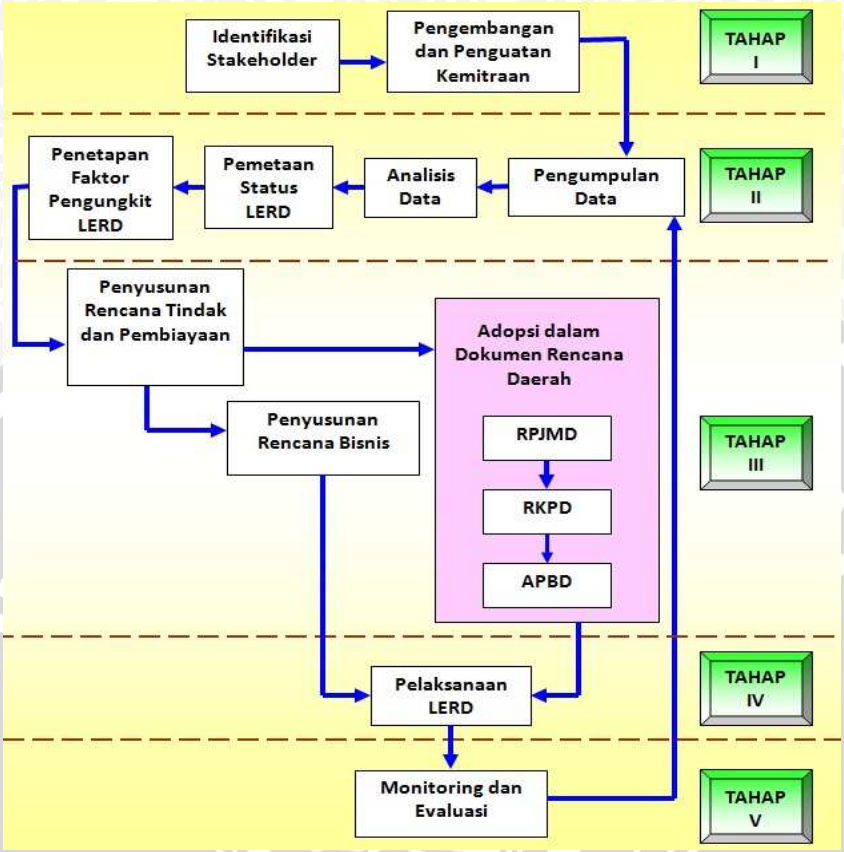

Gambar 1. Alur Pelaksaan LERD *(Local Economic Resources Development)*

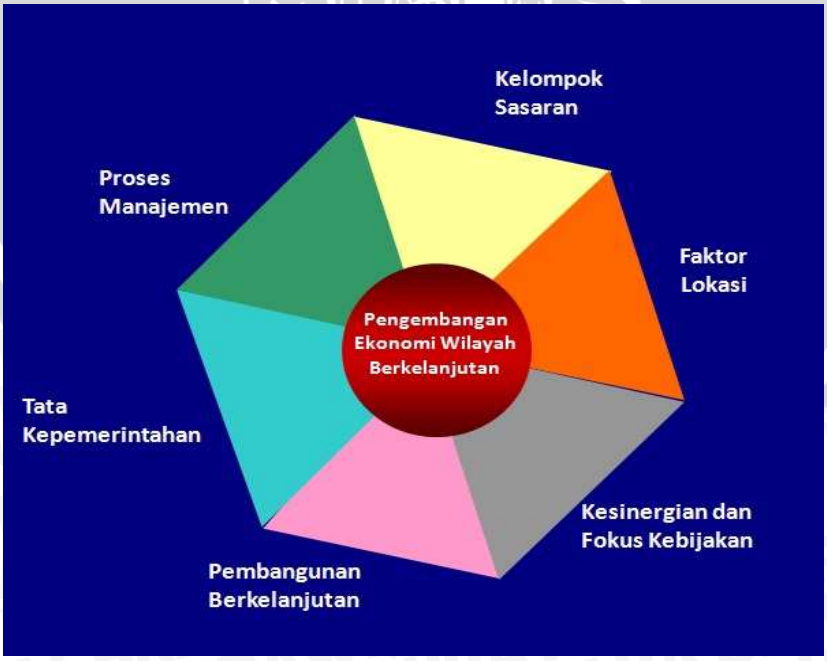

Gambar 2. Hexagonal LERD *(Local Economic Resources Development)*

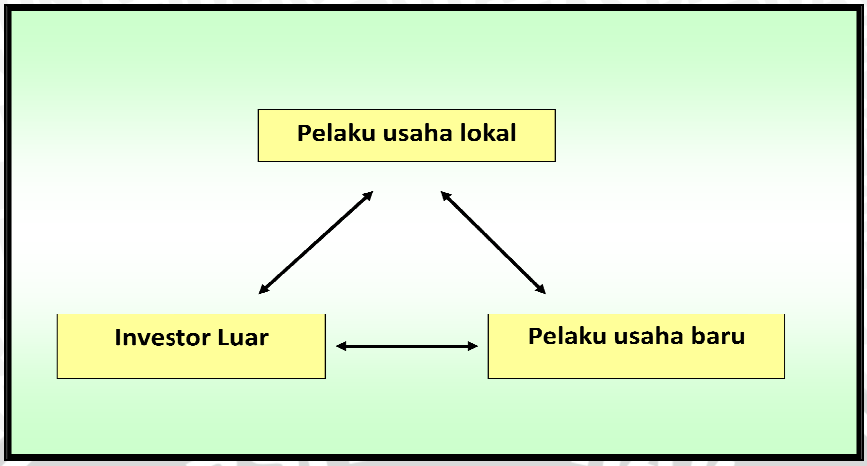

Gambar 3. Kelompok Sasaran LERD *(Local Economic Resources Development)*

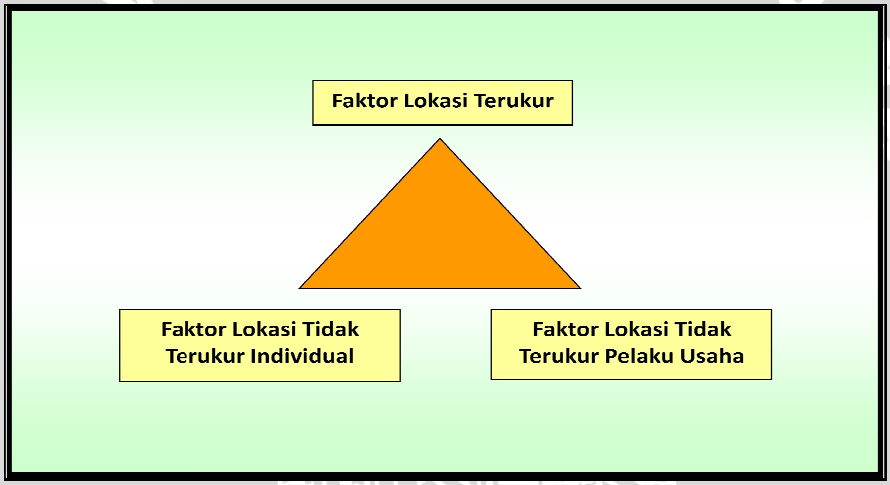

Gambar 4. Faktor Lokasi dalam Pembangunan Berbasis LERD *(Local Economic Resources Development)*

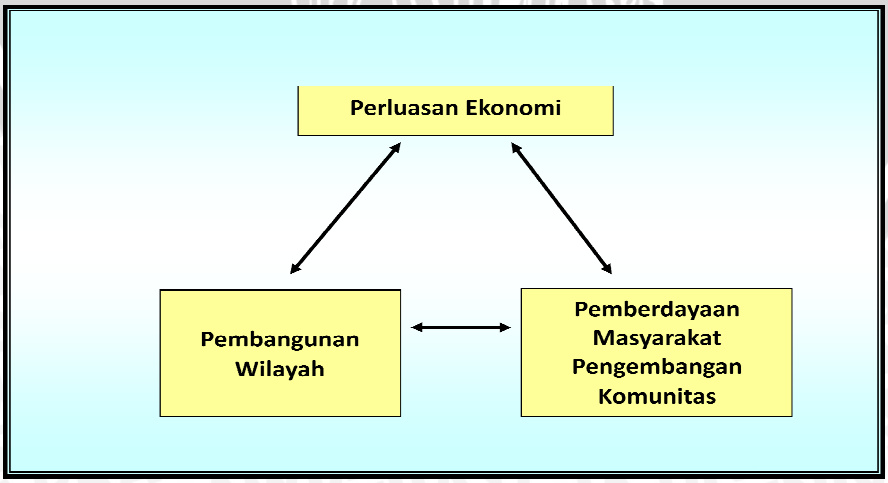

Gambar 5. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan dalam Pembangunan Berbasis LERD *(Local Economic Resources Development)*

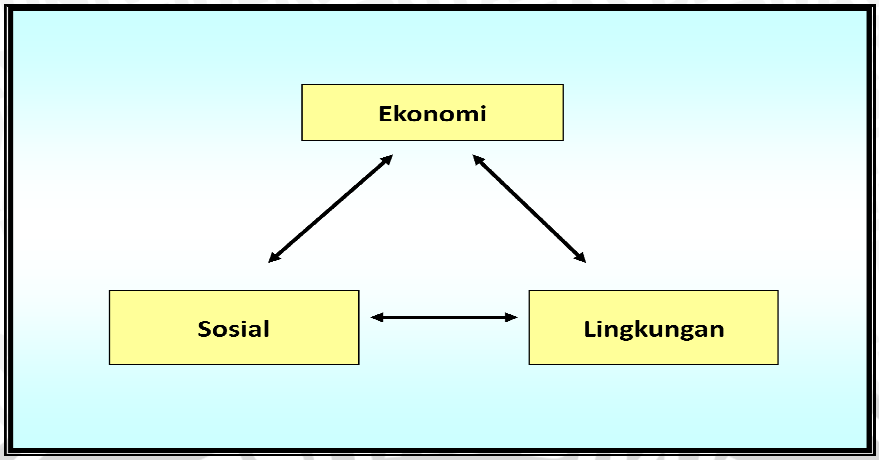

Gambar 6. Pembangunan Berkelanjutan dalam LERD *(Local Economic Resources Development)*

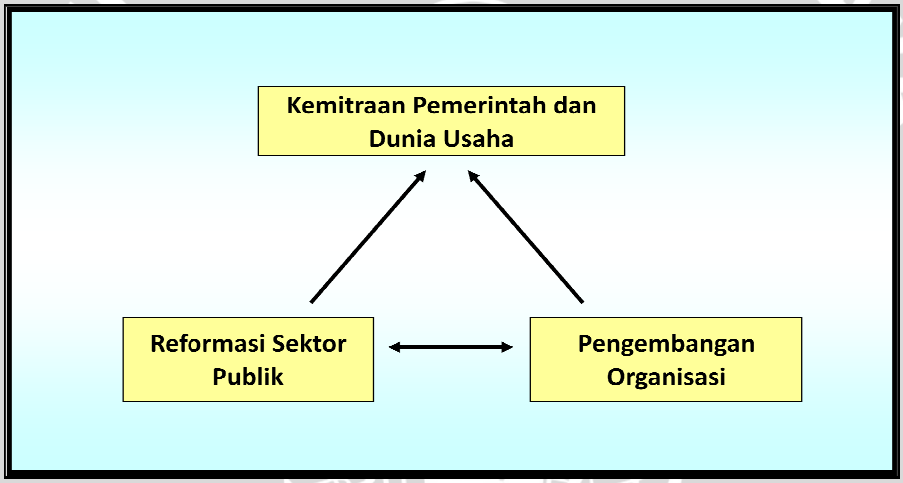

Gambar 7. Tata Kepemerintahan dalam LERD *(Local Economic Resources Development)*

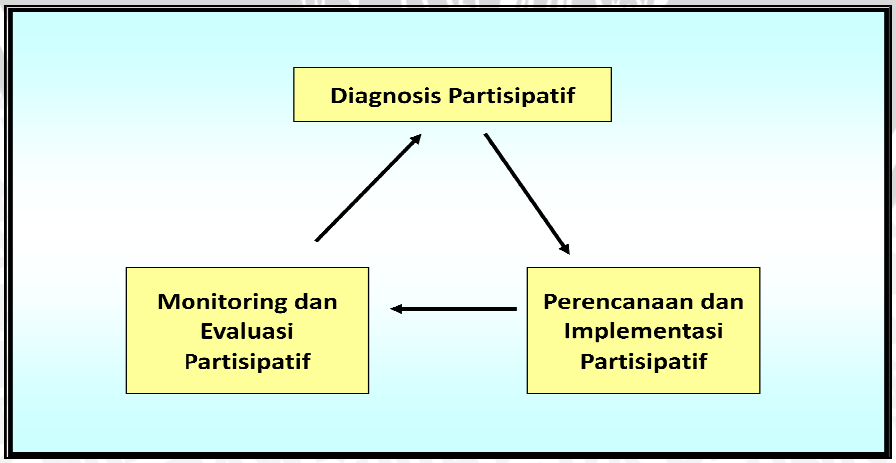

Gambar 8. Proses Manajemen dalam LERD *(Local Economic Resources Development)*

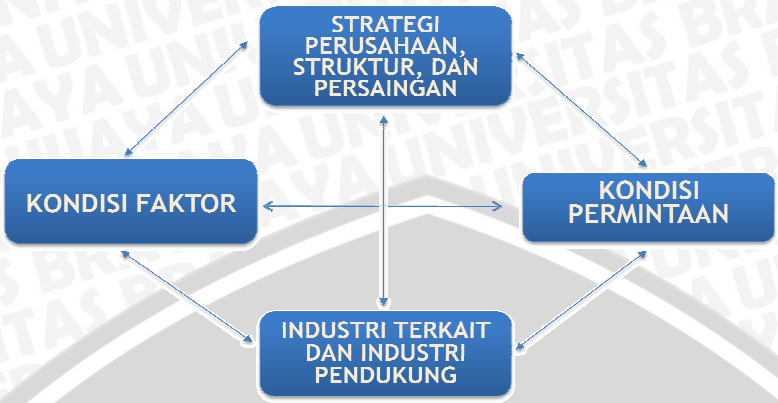

Gambar 9. Penentu Daya Saing Nasional dalam Pembangunan Berbasis LERD *(Local Economic Resources Development)*

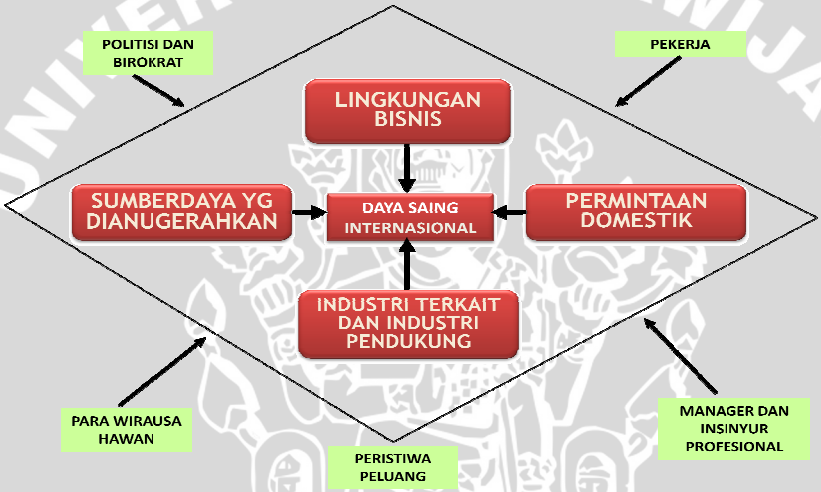

Gambar 10. Penentu Daya Saing Internasional dalam Pembangunan Berbasis LERD *(Local Economic Resources Development)*

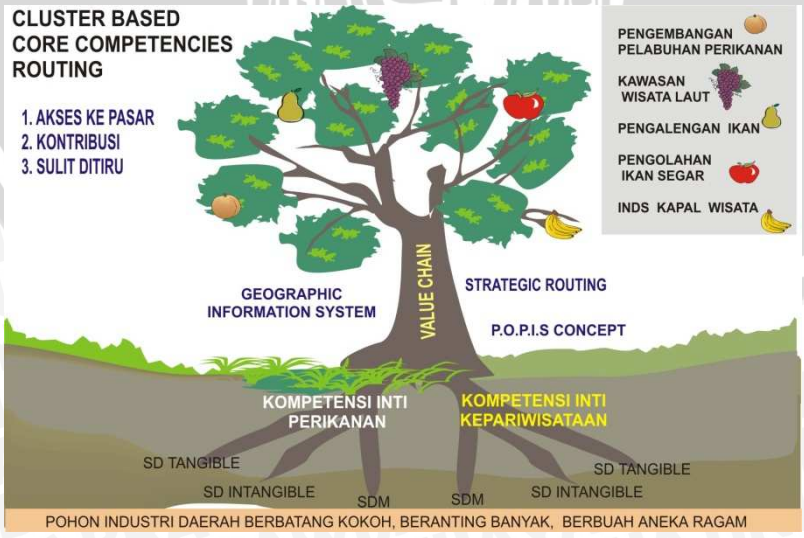

Gambar 11. Mapping Tujuan Perencanaan Skenario melalui Konsep LERD *(Local Economic Resources Development)*

Lampiran 6. Data Jumlah Penduduk Desa Pesisir dan Penyebarannya 2012-2013

No	Kecamatan	Desa	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Km^2/Jiwa)	Jumlah Nelayan
1.	Jerowaru	Batu Nampar Selatan	2.401	2.606	1.507	5.007	9,24	541,88	246
		Wakan							128
		Pandan Wangi							145
		Ekas Buana							200
		Jerowaru	6.167	6.941	3.862	13.138	35,22	373,02	306
		Pemongkong	4.193	4.379	2.425	8.572	83,22	103,00	1.235
		Sekaroh	1.751	1.817	1.053	3.622			383
		Kwang Rundun	517	574	339	1.091			
		Serewe							676
		Mangku Buana	1.017	1.096	627	2.113			
		Pare Mas							
2.	Keruak	Tanjung Luar	4.671	4.637	2.272	9.308	2,36	3944,06	3.951
		Pijot	2.272	2.629	1.395	4.881	6,82	751,68	759
		Ketapang Raya	1.608	1.722	940	3.330			1.327
3.	Sakra Timur	Menceh	2.267	2.793	1.472	5.010	10,26	488,30	346
		Surabaya	1.595	2.079	1.056	3.674	8,58	428,20	265
4.	Labuhan Haji	Labuhan Haji	3.930	4.190	2.272	8.120	4,04	2009,90	997
		Peneda Gandor	2.275	5.270	1.438	4.845	7,73	626,77	264
		Suryawangi	1.970	2.252	1.216	4.222	4,82	875,93	182
		Korleko	2.814	3.537	2.052	6.351	16,62	382,12	65

		Ijobalit	2.728	3.083	1.779	5.811	12,07	481,44	98
		Kertasari	1.052	1.181	692	2.233			42
		Korleko Selatan	1.136	1.317	781	2.453			32
5.	**Pringgabaya**	Kerumut	1.492	1.972	990	3.471	6,00	578,5	155
		Pohgading	4.349	4.928	2.700	9.277	9,00	1030,77	60
		Batuyang	3.803	4.526	8.329	2.272	5,00	454,4	
		Pringgabaya	6.336	7.212	3.930	13.548	33,00	410,54	330
		Labuhan Lombok	6.005	6.046	3.086	12.051	64,00	188,29	1.863
		Pringgabaya Utara	1.790	2.075	1.097	3.865			330
		Pohgading Timur	2.486	2.870	1.701	5.356			223
		Anggaraksa	1.112	1.326	733	2.438			140
		Gunung Malang	2.131	2.233	1.239	4.364			109
		Seruni Mumbul	2.396	2.375	1.276	4.771			476
6.	**Sambelia**	Obel-obel	1.593	1.952	914	3.822	56,41	68,88	350
		Belanting	2.966	4.159	1.702	7.125	71,89	33,42	387
		Labuhan Pandan	3.340	5.062	1.996	8.402	38,97	197,30	347
		Sugian	2.501	2.602	1.436	5.103	45,48	112,20	633
		Dara Kunci	2.122	2.146	1.238	4.268			393
		Padak Guar							
		Dadap							114
		Madayin							

Lampiran 7. Data Potensi Budidaya Laut pada 6 Kecamatan/ Kelurahan Pantai Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas Areal Budidaya Laut (Ha)						Total Areal
		Mutiara	Ikan Kerapu	Udang Lobster	Rumput Laut	Teripang	Kekerangan	
1	Jerowaru	786,00	330,40	325,00	1808,00	95,60	75,00	3420,00
2	Keruak	235,80	55,60	40,00	70,00	15,60	35,00	452,00
3	Labuhan Haji	157,00	-	-	-	-	-	157,00
4	Pringgabaya	606,35	15,00	52,28	52,00		28,50	754,13
5	Sambelia	1648,50	108,40	108,48	70,00	82,80	41,00	2059,18
Jumlah		**3433,65**	**509,40**	**525,76**	**2000,00**	**194,00**	**179,50**	**6842,31**

Lampiran 8. Data Potensi dan Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2008-2014

Tahun 2008 (disahkan pada tahun 2009)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**1.995,69**	**4.846,50**	**40.174,62**	**88.670.305**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,22	27.500.000
	b. Kerapu	509,40	6,50	502,90	25,60	4.648.500
	c. Udang Lobster	525,68	11,07	514,61	81,00	16.290.000
	d. Rumput Laut	2.000,00	172,62	1.827,38	40.067,80	40.231.805
	e. Teripang	194,00	-	194,00	-	-
	f. Kekerangan	179,50	-	179,50	-	-
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**252,00**	**3.248,00**	**1.114,60**	**38.879.000**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.171,90**	**3.746,30**	**617,50**	**10.374.250**
	a. Kolam	1.771,35	805,57	965,78	605,00	10.160.250

	b. Minapadi	3.138,00	366,25	2.771,75	4,50	77.000
	c. Karamba	8,85	0,08	8,77	8,00	137.000
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	**-**	**-**	**15.074,80**	**156.830.150**
JUMLAH					**56.981,52**	**294.753.705**

Tahun 2009 (disahkan pada tahun 2010)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**2.056,95**	**4.785,28**	**60.559,52**	**101.981.385**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,22	27.500.000
	b. Kerapu	509,40	6,50	502,90	5,40	1.546.000
	c. Udang Lobster	525,68	12,37	513,31	82,90	15.687.000
	d. Rumput Laut	2.000,00	232,58	1.767,42	60.471,00	57.248.385
	e. Teripang	194,00	-	194,00	-	-
	f. Kekerangan	179,50	-	179,50	-	-
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**269,50**	**3.230,50**	**1.435,10**	**62.730.800**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.171,90**	**3.746,30**	**856,00**	**17.619.650**
	a. Kolam	1.771,35	805,57	965,78	851,00	17.512.300
	b. Minapadi	3.138,00	366,25	2.771,75	3,60	78.000
	c. Karamba	8,85	0,08	8,77	1,40	29.350
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	**-**	**-**	**12.941,70**	**150.709.100**
JUMLAH					**75.792,32**	**333.040.935**

Tahun 2010 (disahkan pada tahun 2011)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**2.200,30**	**4.641,93**	**93.194,80**	**135.667.950**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,20	27.500.000
	b. Kerapu	509,40	9,00	500,40	9,00	2.565.250
	c. Udang Lobster	525,68	28,55	497,13	116,60	34.980.000
	d. Rumput Laut	2.000,00	357,25	1.642,75	93.069,00	70.622.700
	e. Teripang	194,00	-	194,00	-	-
	f. Kekerangan	179,50	-	179,50	-	-
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**269,50**	**3.230,50**	**1.783,50**	**64.206.000**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.267,95**	**3.650,25**	**1.271,10**	**23.866.800**
	a. Kolam	1.771,35	901,60	869,75	1.264,70	23.669.200
	b. Minapadi	3.138,00	366,25	2.771,75	4,30	152.300
	c. Karamba	8,85	0,10	8,75	2,10	45.300
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	-	-	**15.683,00**	**235.245.000**
JUMLAH					**111.932,40**	**458.985.750**

Tahun 2011 (disahkan pada tahun 2012)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**2.369,23**	**4.473,00**	**119.133,80**	**201.745.850**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,20	27.500.000
	b. Kerapu	509,40	9,00	500,40	12,60	3.710.000
	c. Udang Lobster	525,68	28,55	497,13	146,00	38.837.500
	d. Rumput Laut	2.000,00	526,18	1.473,82	118.975,00	131.698.350
	e. Teripang	194,00	-	194,00	-	-

	f. Kekerangan	179,50	-	179,50	-	-
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**269,50**	**3.230,50**	**2.581,20**	**90.020.300**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.268,05**	**3.650,15**	**1.752,30**	**37.992.400**
	a. Kolam	1.771,35	901,60	869,75	1.702,80	37.422.100
	b. Minapadi	3.138,00	366,25	2.771,75	5,70	117.900
	c. Karamba	8,85	0,20	8,65	43,80	452.400
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	-	-	**13.095,30**	**235.245.000**
JUMLAH					**136.562,60**	**565.003.550**

Tahun 2012 (disahkan pada tahun 2013)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**2.369,23**	**4.473,00**	**112.590,30**	**239.960.312**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,40	55.000.000
	b. Kerapu	509,40	9,00	500,40	17,20	6.450.000
	c. Udang Lobster	525,68	28,55	497,13	153,50	53.725.000
	d. Rumput Laut	2.000,00	526,18	1.473,82	112.419,20	124.785.312
	e. Teripang	194,00	0,00	194,00	0,00	0
	f. Kekerangan	179,50	0,00	179,50	0,00	0
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**322,00**	**3.178,00**	**2.788,90**	**97.611.500**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.268,15**	**3.650,05**	**3.370,10**	**72.428.800**
	a. Kolam	1.771,35	901,60	869,75	3.022,70	66.499.400
	b. Minapadi	3.138,00	366,30	2.771,70	210,80	4.426.800
	c. Karamba	8,85	0,25	8,60	136,60	1.502.600
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	-	-	**12.520,30**	**225.365.400**
JUMLAH					**131.269,60**	**635.366.012**

Tahun 2013 (disahkan pada tahun 2014)

No	Komoditi	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	**Budiaya Laut**	**6.842,23**	**2.369,23**	**4.473,00**	**104.133,60**	**0**
	a. Mutiara	3.433,65	1.805,50	1.628,15	0,50	0
	b. Kerapu	509,40	9,00	500,40	22,20	0
	c. Udang Lobster	525,68	28,55	497,13	173,50	0
	d. Rumput Laut	2.000,00	526,18	1.473,82	103.937,40	0
	e. Teripang	194,00	0,00	194,00	0,00	0
	f. Kekerangan	179,50	0,00	179,50	0,00	0
2	**Budidaya Tambak**	**3.500,00**	**322,00**	**3.178,00**	**3.620,00**	**0**
3	**Budidaya Air Tawar**	**4.918,20**	**1.268,15**	**3.650,05**	**4.187,14**	**0**
	a. Kolam	1.771,35	901,60	869,75	3.927,24	0
	b. Minapadi	3.138,00	366,30	2.771,70	130,30	0
	c. Karamba	8,85	0,25	8,60	129,60	0
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**18.242 ton/thn (MSY)**	**-**	**-**	**12.738,50**	**0**
JUMLAH					**124.679,24**	**0**

Lampiran 9. Perhitungan Nilai "Kenaikan (%/ Tahun)

Formula/Rumus

$$\text{Kenaikan (\%/Tahun)} = \frac{Selisih\ Nilai\ Produksi\ (tahun\ akhir\ "2012" - tahun\ awal\ "2011")}{Nilai\ Produksi\ Tahun\ Awal\ (2011)} \text{ x } 100$$

Contoh:

No.	Komoditi C1	Nilai Produksi		Selisih Nilai Produksi C4	Hasil Bagi antara "Selisih Nilai Produksi" dengan "Nilai produksi Tahun 2011 (Tahun Awal)" C5	Kenaikan (%/Tahun) "C5 x 100" C6
		2011 C2	2012 C3			
1	**Budiaya Laut**	**201.745.850**	**239.960.312**	**38.214.462**	**0,189**	**18,94**
	a. Mutiara	27.500.000	55.000.000	27.500.000	1,000	100,00
	b. Kerapu	3.710.000	6.450.000	2.740.000	0,739	73,85
	c. Udang Lobster	38.837.500	53.725.000	14.887.500	0,383	38,33
	d. Rumput Laut	131.698.350	124.785.312	-6.913.038	-0,052	-5,25
2	**Budidaya Tambak**	**90.020.300**	**97.611.500**	**7.591.200**	**0,084**	**8,43**
3	**Budidaya Air Tawar**	**37.992.400**	**72.428.800**	**34.436.400**	**0,906**	**90,64**
	a. Kolam	37.422.100	66.499.400	29.077.300	0,777	77,70
	b. Minapadi	117.900	4.426.800	4.308.900	36,547	3654,71
	c. Karamba	452.400	1.502.600	1.050.200	2,321	232,14
4	**Penangkapan Ikan Laut**	**235.245.000**	**225.365.400**	**-9.879.600**	**-0,042**	**-4,20**

Keterangan: C1-6 adalah Column/kolom 1-6

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Kantor KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) Gili Sulat dan Gili Lawang, Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 2. Perkampungan Nelayan di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 3. Wilayah Pesisir Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 4. Pencemaran Laut di Perkampungan Nelayan Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 5. Fasilitas WC umum (yang tidak layak) di Perkampungan Nelayan Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 6. *Landing Place* di Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 7. *Landing Place* di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 9. Ruko-ruko Tradisional di Pinggir Pantai Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 10. Kapal Penangkap Ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 11. Kegiatan Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung/KJA) di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Gambar 12. Pedagang/ penjual Ikan di Pasar Tradisional Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Muhammad Faqih
NIM	:	105030600111019
Tempat/ Tgl lahir	:	Selong, 28 Mei 1992
Pendidikan	:	1) SDN. No. 2 Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (NTB), 1998 Tamat Tahun 2004; 2) SMPN 1 Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur (NTB), 2004 Tamat Tahun 2007; 3) SMAN 1 Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (NTB), 2007 Tamat Tahun 2010.
Agama	:	Islam
No.Hp	:	087863480881
Email	:	faqih_rempoeng@yahoo.co.id
Pengalaman	:	1) Partisipan Diklat GIS *(Geografic Information System)* tahun 2011; 2) Panitia *ASPA Internasional Seminar and IAPA Annual Conference June 12-14th 2012* di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya; 3) Peserta Sayembara Logo BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) Tahun 2014; 4) Teknisi Elektronika Sederhana tahun 2005-Sekarang.

Malang, 26 Agustus 2014

Muhammad Faqih

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA